PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

# RPD

# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
## TAHUN 2024 - 2026

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 11 TAHUN 2023

# LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI**
**KABUPATEN BONDOWOSO**
**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)**
**KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**
**2023**

**BUPATI BONDOWOSO**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesatu huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Waliota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Mengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14.Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

26. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Peragkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
10. Kebijakan Umum Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:
   a. menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disesuaikan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
   b. menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:
   a. tersedianya pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
   b. tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian kinerja Pemerintah Daerah;
   c. mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II : GAMBARAN UMUM
   BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
   BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
   BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
   BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala BAPPEDA bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
a. Hasil Penendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *eksisting*;
b. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB…

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SOEKWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 11

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 dengan tepat waktu.

Dokumen RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan kaidah perumusan kebijakan perencanaan tanpa penjabaran visi dan misi Kepala Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program prioritas pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis yang selanjutnya dituangkan dalam gambaran kondisi umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan serta isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 2026, mengakomodir berbagai isu berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, beserta program strategis nasional baik yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maupun program strategis lainnya, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Bondowoso, Maret 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... vi
DAFTAR GAMBAR ..... xiv

BAB I PENDAHULUAN ..... I-1
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-9
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I-11
1.5 Sistematika Penulisan ..... I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ..... II-3
2.1.1.3 Topografi ..... II-3
2.1.1.4 Geologi ..... II-4
2.1.1.5 Hidrologi ..... II-5
2.1.1.6 Klimatologi ..... II-6
2.1.1.7 Penggunaan Lahan ..... II-6
2.1.1.8 Demografi ..... II-8
2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-13
2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana ..... II-29
2.1.1.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem . II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-35
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-35
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-44
2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga ..... II-55
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II-57
2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II-57
2.3.1.1 Urusan Pendidikan ..... II-57
2.3.1.2 Urusan Kesehatan ..... II-64
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-69
2.3.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..... II-75
2.3.1.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ..... II-77
2.3.1.6 Urusan Sosial ..... II-79

2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II-80
2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja ..... II-80
2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II-84
2.3.2.3 Urusan Pangan ..... II-85
2.3.2.4 Urusan Pertanahan ..... II-87
2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup ..... II-88
2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II-89
2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II-90
2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-92
2.3.2.9 Urusan Perhubungan ..... II-93
2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika ..... II-94
2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II-94
2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal ..... II-95
2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II-100
2.3.2.14 Urusan Statistik ..... II-101
2.3.2.15 Urusan Persandian ..... II-102
2.3.2.16 Urusan Kebudayaan ..... II-102
2.3.2.17 Urusan Perpustakaan ..... II-103
2.3.2.18 Urusan Kearsipan ..... II-104
2.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan ..... II-105
2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II-105
2.3.3.2 Urusan Pariwisata ..... II-105
2.3.3.3 Urusan Pertanian ..... II-110
2.3.3.4 Urusan Perdagangan ..... II-116
2.3.3.5 Urusan Perindustrian ..... II-118
2.3.3.6 Urusan Transmigrasi ..... II-120
2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... II-120
2.3.4.1 Sekretariat Daerah ..... II-120
2.3.4.2 Sekretariat DPRD ..... II-121
2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II-121
2.3.5.1 Perencanaan ..... II-121
2.3.5.2 Keuangan ..... II-122
2.3.5.3 Kepegawaian ..... II-124
2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan ..... II-126
2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan ..... II-127
2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... II-127
2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum ..... II-128
2.3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-129
2.3.9 *Sustainable Development Goals* (SDG's) ..... II-149
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-152

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III-2

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III-3
3.1.2 Neraca Daerah ..... III-10
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III-14
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III-16
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III-19
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III-22
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III-25
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III-31

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan ..... IV-1
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... IV-1
4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... IV-2
4.1.3 Aspek Daya Saing ..... IV-3
4.1.4 Aspek Pelayanan Umum Termasuk SPM ..... IV-4
4.2 Isu Strategis ..... IV-15

BAB V TUJUAN DAN SASARAN ..... V-1
Tujuan dan Sasaran ..... V-1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi ..... VI-1
6.2 Arah Kebijakan ..... VI-5
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... VI-6

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama ..... VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Kunci ..... VIII-3
8.3 Indikator Kinerja Daerah ..... VIII-3

BAB IX PENUTUP ..... IX-1
9.1 Pedoman Transisi ..... IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ..... IX-1

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso ..... | II-2 |
| Tabel 2.2 | Klasifikasi Ketinggian Tempat Menurut Kecamatan ..... | II-3 |
| Tabel 2.3 | Luas Wilayah Menurut Karakteristik Tanah ..... | II-5 |
| Tabel 2.4 | Luas Wilayah Menurut Peruntukannya (Ha) Tahun 2018-2021 ..... | II-6 |
| Tabel 2.5 | Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso ..... | II-7 |
| Tabel 2.6 | Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2031 ..... | II-8 |
| Tabel 2.7 | Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Rasio Kabupaten BondowosoTahun 2018-2021 (dalam jiwa) ..... | II-9 |
| Tabel 2.8 | Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... | II-9 |
| Tabel 2.9 | Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam jiwa) ..... | II-10 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 ..... | II-11 |
| Tabel 2.11 | Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2020 ..... | II-12 |
| Tabel 2.12 | Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-12 |
| Tabel 2.12A | Tenaga Hononer Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 ..... | II-13 |
| Tabel 2.13 | Kawasan Strategis Kabupaten Bondowoso ..... | II-21 |
| Tabel 2.14 | Kejadian Bencana di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-32 |
| Tabel 2.15 | Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB ADHK Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso ..... | II-36 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) ..... | II-37 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ADHB dan ADHK (Dalam Juta) ..... | II-38 |
| Tabel 2.18 | Perbandingan Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ADHB dan ADHK (Dalam Juta)..... | II-39 |
| Tabel 2.19 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha (persen) ..... | II-41 |
| Tabel 2.20 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-42 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.21 | Rata-rata Laju Indek Implisit Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-43 |
| Tabel 2.22 | PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-43 |
| Tabel 2.23 | Gini Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-44 |
| Tabel 2.24 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022 | II-45 |
| Tabel 2.25 | Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 | II-45 |
| Tabel 2.26 | Perbandingan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 (%) | II-46 |
| Tabel 2.27 | Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 | II-46 |
| Tabel 2.28 | Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022 Kabupaten Bodowoso | II-47 |
| Tabel 2.29 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-48 |
| Tabel 2.30 | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-49 |
| Tabel 2.31 | Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-49 |
| Tabel 2.32 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tahun 2018 – 2022 | II-50 |
| Tabel 2.33 | Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 | II-50 |
| Tabel 2.34 | Penetapan UMK dan KHL Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 (Rupiah) | II-51 |
| Tabel 2.35 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-51 |
| Tabel 2.36 | Capaian Penunjang Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2021-2022 | II-51 |
| Tabel 2.37 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bondowoso | II-52 |
| Tabel 2.38 | IDM Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-52 |
| Tabel 2.39 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-53 |
| Tabel 2.40 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2022 | II-53 |
| Tabel 2.41 | Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso | II-54 |
| Tabel 2.42 | Kondisi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Anak Baduta Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso | II-55 |
| Tabel 2.43 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 | II-55 |
| Tabel 2.44 | Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018-2022 | II-57 |
| Tabel 2.45 | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2018-2022 (%) | II-57 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.47 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-59 |
| Tabel 2.48 | Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-60 |
| Tabel 2.49 | Angka Kelulusan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-60 |
| Tabel 2.50 | Angka Transisi Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-60 |
| Tabel 2.51 | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-61 |
| Tabel 2.52 | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 | II-61 |
| Tabel 2.53 | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-62 |
| Tabel 2.54 | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2022 | II-63 |
| Tabel 2.55 | Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2018-2022 | II-64 |
| Tabel 2.56 | Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-64 |
| Tabel 2.57 | Rasio Posyandu (%) Tahun 2018-2022 | II-64 |
| Tabel 2.58 | Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%) Tahun 2018-2022 | II-64 |
| Tabel 2.59 | Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2022 | II-65 |
| Tabel 2.60 | Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-65 |
| Tabel 2.61 | Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-66 |
| Tabel 2.62 | Tenaga Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-66 |
| Tabel 2.63 | Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2018-2022 | II-67 |
| Tabel 2.64 | Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-69 |
| Tabel 2.65 | Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-69 |
| Tabel 2.66 | Panjang Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-70 |
| Tabel 2.67 | Kondisi Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-70 |
| Tabel 2.68 | Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-71 |
| Tabel 2.68A | Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022 | II-71 |
| Tabel 2.69 | Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2018-2022 | II-71 |
| Tabel 2.70 | Pelayanan Air Bersih Perkotaan oleh PDAM Tahun 2018-2022 | II-72 |
| Tabel 2.71 | Perkembangan Cakupan Air Limbah Tahun 2018-2022 | II-72 |
| Tabel 2.72 | Capaian Kinerja Penataan Ruang Tahun 2018-2022 | II-73 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.73A | RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 | II- 73 |
| Tabel 2.73 | Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-75 |
| Tabel 2.74 | Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 2018-2022 | II-75 |
| Tabel 2.75 | Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2017-2021 | II-76 |
| Tabel 2.76 | Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 | II-76 |
| Tabel 2.77 | Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso | II-77 |
| Tabel 2.78 | Pembinaan LSM, Orpol, Pemuda dan LSM Tahun 2016-2020 Kabupaten Bondowoso | II-77 |
| Tabel 2.79A | Jumlah Kejadian Bencana tahun 2018-2022 | II-78 |
| Tabel 2.79B | Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan) Tahun 2018 – 2022 | II-78 |
| Tabel 2.79 | Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017 – 2021 | II-79 |
| Tabel 2.80 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018-2021 | II-79 |
| Tabel 2.81 | Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-81 |
| Tabel 2.82 | Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 | II-82 |
| Tabel 2.83 | Pemberdayaan Perempuan dalam Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 | II-84 |
| Tabel 2.84 | Perlindungan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan Tahun 2017-2021 | II-85 |
| Tabel 2.85 | Skor PPH dan Angka Kecukupan Gizi Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-85 |
| Tabel 2.86 | Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton) Tahun 2018-2022 | II-86 |
| Tabel 2.87 | Tingkat Produksi Bahan Pangan Tahun 2017-2021 di Kabupaten Bondowoso | II-86 |
| Tabel 2.88 | Perkembangan indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2022 | II-87 |
| Tabel 2.89 | Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022 | II-88 |
| Tabel 2.90 | Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-89 |
| Tabel 2.91 | Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar) Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-89 |
| Tabel 2.92 | Persentase Penduduk ber-KTP dan ber-Akta Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-90 |
| Tabel 2.93 | Kelompok Binaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso | II-91 |
| Tabel 2.94 | Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018-2022 | II-91 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.96 | Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso ..... | II-92 |
| Tabel 2.97 | Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2017-2021 ..... | II-92 |
| Tabel 2.99 | Perkembangan arus penumpang Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso ..... | II-93 |
| Tabel 2.100 | Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso ..... | II-93 |
| Tabel 2.101 | Kondisi Pemasangan Rambu dan Sarana Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022 ..... | II-94 |
| Tabel 2.102 | Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022 ..... | II-94 |
| Tabel 2.103 | Perkembangan Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2018-2022 ..... | II-95 |
| Tabel 2.104 | Nilai Investasi Non Fasilitasi di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-95 |
| Tabel 2.105 | Capaian Kinerja Pelayanan Perijinan Tahun 2016-2020 ..... | II-97 |
| Tabel 2.106 | Capaian Kinerja Kepemudaan Tahun 2018-2022 ..... | II-101 |
| Tabel 2.107 | Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2018-2022 ..... | II-101 |
| Tabel 2.108 | Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-101 |
| Tabel 2.109 | Jumlah Pengamanan Informasi Milik Daerah Tahun 2018-2022 ..... | II-102 |
| Tabel 2.110 | Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018-2022 ..... | II-102 |
| Tabel 2.111 | Perkembangan Perpustakaan Tahun 2018-2022 ..... | II-103 |
| Tabel 2.112 | Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2018-2022 ..... | II-104 |
| Tabel 2.113 | Luas Areal, Produksi Perikanan Budidaya, Perairan Umum dan Benih Ikan Tahun 2018-2022..... | II-105 |
| Tabel 2.114 | Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) Setiap Destinasi Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso ..... | II-106 |
| Tabel 2.115 | Jumlah Total Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso ..... | II-108 |
| Tabel 2.115A | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-109 |
| Tabel 2.116 | Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso dan Kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2018-2022 ..... | II-110 |
| Tabel 2.117 | Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Bondowoso (%) Tahun 2018-2022 ..... | II-111 |
| Tabel 2.118 | Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2018-2022 ..... | II-112 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.119 | Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2017-2021 | II-113 |
| Tabel 2.120 | Populasi, Produksi Ternak dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Tahun 2018-2022 | II-114 |
| Tabel 2.121 | Perkembangan Luas HMT dan Kelahiran Hasil IB Tahun 2018-2022 | II-115 |
| Tabel 2.122 | Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Bondowoso (%) Tahun 2016-2020 | II-116 |
| Tabel 2.123 | Kondisi Pasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-117 |
| Tabel 2.124 | Perkembangan Ekspor (Milyar) Tahun 2017-2021 | II-117 |
| Tabel 2.125 | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Serta Wirausaha Tahun 2017-2021 | II-117 |
| Tabel 2.126 | Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Bondowoso (%) Tahun 2019-2022 | II-118 |
| Tabel 2.127 | Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-119 |
| Tabel 2.128 | Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2018-2022 | II-120 |
| Tabel 2.129 | Capaian Kinerja Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-121 |
| Tabel 2.130 | Dokumen Perencanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-122 |
| Tabel 2.131 | Program pembangunan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-122 |
| Tabel 2.132 | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2018-2022 | II-123 |
| Tabel 2.133 | Realisasi Anggaran dan Opini BPK Terhadap LKD Tahun 2017-2021 | II-123 |
| Tabel 2.134 | Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2022 | II-124 |
| Tabel 2.135 | Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 | II-125 |
| Tabel 2.136 | Perkembangan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-125 |
| Tabel 2.137 | Perkembangan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-126 |
| Tabel 2.138 | Perkembangan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-127 |
| Tabel 2.139 | Kinerja Pengawasan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 | II-128 |
| Tabel 2.140 | Perkembangan Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Tahun 2018-2022 | II-128 |
| Tabel 2.141 | Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 | II-128 |
| Tabel 2.142 | Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2018-2022 | II-129 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.143 | Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2021 ..... | II-132 |
| Tabel 2.144 | Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2018-2021 ..... | II-133 |
| Tabel 2.145 | Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2018-2021 ..... | II-138 |
| Tabel 2.146 | Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2018-2021 ..... | II-139 |
| Tabel 2.147 | Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 ..... | II-140 |
| Tabel 2.148 | Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2016-2020 ..... | II-142 |
| Tabel 2.149 | Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021 ..... | II-143 |
| Tabel 2.150 | Capaian SDG's Tahun 2019-2022 ..... | II-150 |
| Tabel 2.151 | Perkembangan Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2018-2022 (kejadian) ..... | II-152 |
| Tabel 2.152 | Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 (dalam jiwa). | II-154 |
| Tabel 2.153 | Kualitas Jalan Mantap Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 .... | II-154 |
| Tabel 2.154 | Kondisi Jaringan Irigasi Baik Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 ..... | II-154 |
| Tabel 2.155 | Perkembangan Capaian Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Tahun 2018-2022 ..... | II-155 |
| Tabel 3.1 | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso ..... | III-6 |
| Tabel 3.2 | Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2018-2022 ..... | III-11 |
| Tabel 3.3 | Analisis Rasio Keuangan Tahun 2018-2022..... | III-14 |
| Tabel 3.4 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018-2022 ..... | III-18 |
| Tabel 3.5 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2022 ..... | III-19 |
| Tabel 3.6 | Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022 ..... | III-20 |
| Tabel 3.7 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022 ..... | III-20 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018-2022..... | III-21 |
| Tabel 3.9 | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 ..... | III-28 |
| Tabel 3.10 | Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2024-2026 ..... | III-32 |
| Tabel 3.11 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 – 2026 ..... | III-33 |
| Tabel 5.1 | Persandingan Dokumen dan Isu Strategis Dalam Perumusan Konsep RPD Tahun 2024-2026 ..... | V-2 |
| Tabel 5.2 | Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 ..... | V-4 |
| Tabel 6.1 | Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 ..... | VI-2 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 6.2 | Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bondowoso ..... | VI-8 |
| Tabel 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 ..... | VII-2 |
| Tabel 7.2 | Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ..... | VII-3 |
| Tabel 8.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bondowoso ..... | VIII-1 |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bondowoso ..... | VIII-3 |
| Tabel 8.3 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bondowoso ..... | VIII-4 |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.1 | Peta Batas Administrasi Kabupaten Bondowoso ..... | II-1 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bondowoso ..... | II-14 |
| Gambar 2.3 | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso ..... | II-14 |
| Gambar 2.4 | Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Bondowoso ..... | II-15 |
| Gambar 2.5 | Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso ..... | II-16 |
| Gambar 2.6 | Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bondowoso ..... | II-17 |
| Gambar 2.7 | Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Bondowoso ..... | II-19 |
| Gambar 2.8 | Peta Potensi Pertambangan dan Sumber Daya Bumi Kabupaten Bondowoso ..... | II-20 |
| Gambar 2.9 | Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso ..... | II-24 |
| Gambar 2.10 | Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 ..... | II-27 |
| Gambar 2.11 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso ..... | II-32 |
| Gambar 5.1 | Gambaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026..... | V-3 |
| Gambar 5.2 | Skema Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 ..... | V-4 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berakhirnya periodisasi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso periode 2018-2023, maka berakhir pula periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Kabupaten Bondowoso merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat serta merupakan perwujudan dari kehendak masyarakat Kabupaten Bondowoso, yang menjadi pedoman strategis bagi pembangunan masa transisi tahun 2024 hingga tahun 2026, sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso sesuai periodisasi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dilakukan untuk menjamin terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perencanaan jangka menengah daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJP Nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program serta pendanaan pembangunan daerah, serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

Dalam perumusan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target Indikator Makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 tahun 2010 pada tahapan RPJMD IV (2020 -2024) yaitu Fokus Penguatan Pasar dan Peningkatan Kualitas Produk dan tahapan RPJMD V (2025) yaitu Fokus Lepas Landas sebagai Kawasan Agribisnis Maju, menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023.
4. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan Nasional.
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 dan Renstra PD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (Outcome) Renstra Perangjkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021.
3. Evaluasi kontribusi keluaran (Output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).
4. Isu-isu strategis terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah.
5. Kebijakan Nasional.
6. Regulasi yang berlaku.
7. Saran dan/atau masukan dari stakeholders pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 hingga 2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 hingga 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 diharapkan mampu mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional dengan memperhatikan perubahan regulasi, serta dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tahapan dan tata cara proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD dan konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026 dan penetapan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Berita acara forum konsultasi publik menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra PD tahun 2024-2026 menjadi Rancangan akhir. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bpondowoso tahun 2024-2026 dan Rancangan akhir Renstra PD dilakukan reviu oleh APIP. Selanjutnya Rancangan Rencana Pembangunan Daerah diajukan untuk dilakukan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Timur dan disempurnakan sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Pada tahapan selanjutnya, dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dilakukan penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 kepada DPRD Kabupaten Bondowoso.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 Kabupaten Bondowoso disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Vurus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6514), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6618);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
35. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2000) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
56. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
57. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dengan periode perencanaan sebelumnya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso 2024-2026 disusun berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031. Selanjutnya RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan sebagai berikut:

### A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Bondowoso.

## B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur.

## C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPD Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2024-2026 secara substantif berpedoman pada tahapan keempat (2020-2025) yaitu penguatan pasar dan peningkatan kualitas produk serta lepas landas sebagai Kawasan Agribisnis Maju. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

## D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 2011-2031

Penyusunan RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 pada Tahap III (Tahun 2022 - 2026), pada pengembangan kawasan strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

## E. Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

## F. RKPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2024 hingga tahun 2026 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 hingga tahun 2026 diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program dimana dalam RPD masih bersifat indikatif, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2024 hingga 2026, RKP Tahun 2024 hingga 2026, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 hingga 2026.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, menjamin keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) selama masa transisi periodisasi pemerintahan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sesuai kaidah penyusunan kebijakan perencanaan melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, serta dinamika perubahan regulasi tahun 2024-2026.
2. Memberikan acuan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026.
3. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan secara komprehensif serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, pada pelaksanaan pembangunan antar daerah, antar wilayah, maupun antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan di Kabupaten Bondowoso selama periode 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 adalah :

1. Perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu tahun 2024-2026;
2. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2024-2026;
3. Perumusan Program Prioritas tahun 2024-2026;
4. Perumusan seluruh program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, serta menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama jangka waktu tahun 2024-2026.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** **PENDAHULUAN**, berisi latar belakang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta penjelasan maksud dan tujuan.

**BAB II** **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, memuat gambaran umum kondisi daerah ditinjau dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**BAB III** **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**, yang memuat gambaran kinerja keuangan tahun 2018-2021 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

**BAB IV** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**, berisi permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II mencakup 4 aspek (geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum termasuk SPM) yang menjadi dasar penentuan isu strategis.

**BAB V** **TUJUAN DAN SASARAN,** berisi penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga Tahun 2026 dan *cascading* kinerja.

**BAB VI** **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS,** berisi strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan penentuan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sesuai mekanisme *cascading* di BAB V.

**BAB VII** **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH,** memuat kerangka pendanaan seluruh program PD tahun 2024-2026 dan daftar Program PD tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

**BAB VIII** **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,** berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

**BAB IX** **PENUTUP**

# BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Batas administrasi wilayah Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana gambar berikut.

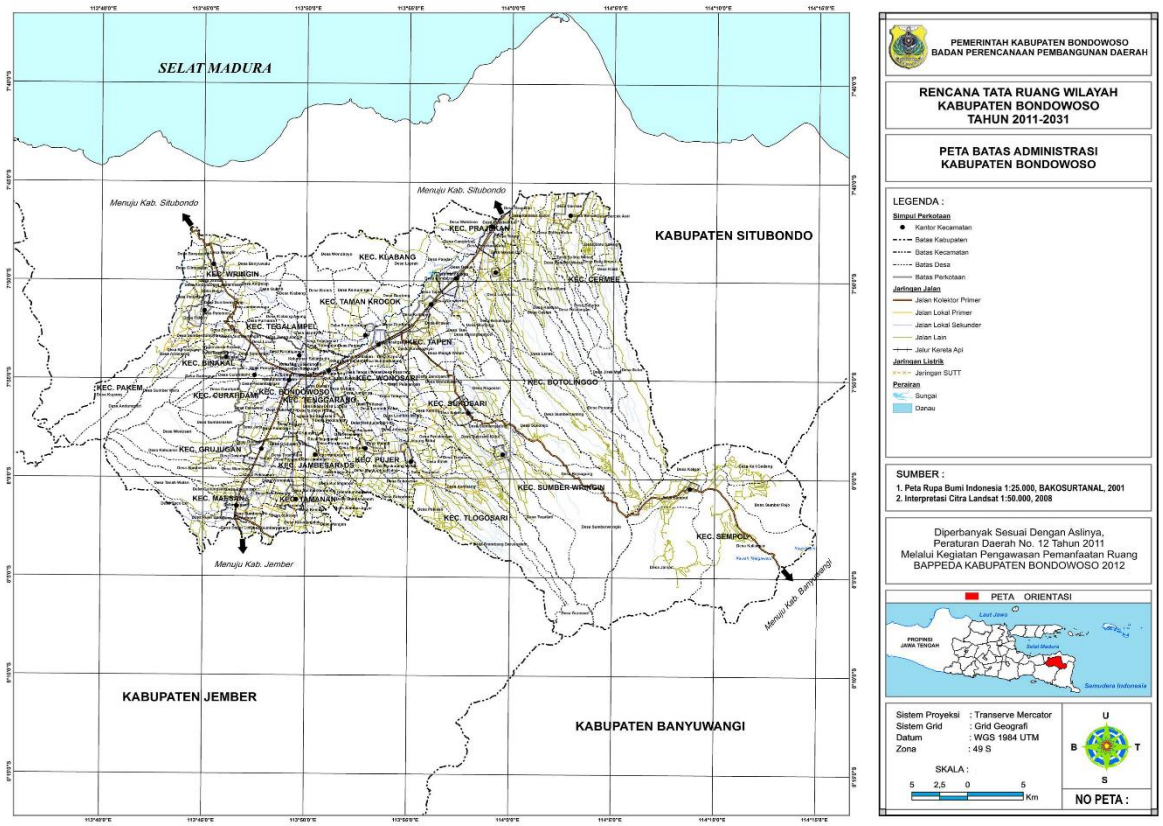


Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Bondowoso

Wilayah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Pantura yang menghubungkan Banyuwangi – Situbondo – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya, juga tidak dilalui jalur selatan yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya. Kabupaten Bondowoso hanya dilalui jalur provinsi antara Situbondo – Bondowoso – Jember atau sebaliknya. Kabupaten Bondowoso juga merupakan satu-satunya kabupaten di daerah tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.565,068 Km² atau sekitar 3,26% dari luas total Provinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.412 dusun. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maesan | Maesan | - | 12 | 62 | 13 | 58,751 |
| 2. | Grujugan | Taman | - | 11 | 49 | 7 | 69,334 |
| 3. | Tamanan | Tamanan | - | 9 | 52 | 15 | 30,100 |
| 4. | Jambesari DS | Jambesari | - | 9 | 41 | 10 | 28,118 |
| 5. | Pujer | Kejayan | - | 11 | 80 | 12 | 38,611 |
| 6. | Tlogosari | Pakisan | - | 10 | 98 | 17 | 110,042 |
| 7. | Sukosari | Sukosari Lor | - | 4 | 31 | 22 | 33,610 |
| 8. | Sbr. Wringin | Sbr. Wringin | - | 6 | 71 | 27 | 162,841 |
| 9. | Tapen | Tapen | - | 9 | 52 | 16 | 53,340 |
| 10. | Wonosari | Wonosari | - | 12 | 72 | 10 | 40,470 |
| 11. | Tenggarang | Tenggarang | 1 | 11 | 69 | 2 | 24,450 |
| 12. | Bondowoso | Dabasah | 7 | 4 | 19 | 2 | 22,527 |
| 13. | Curahdami | Curahdami | 1 | 11 | 111 | 3 | 67,872 |
| 14. | Binakal | Binakal | - | 8 | 51 | 7 | 38,617 |
| 15. | Pakem | Patemon | - | 8 | 47 | 18 | 61,420 |
| 16. | Wringin | Wringin | - | 13 | 92 | 16 | 54,449 |
| 17. | Tegalampel | Sekarputih | 1 | 7 | 54 | 2 | 34,862 |
| 18. | Taman Krocok | Taman | - | 7 | 47 | 12 | 55,209 |
| 19. | Klabang | Klabang | - | 11 | 49 | 19 | 70,184 |
| 20. | Botolinggo | Lumutan | - | 8 | 100 | 25 | 121,110 |
| 21. | Ijen | Sempol | - | 6 | 38 | 74 | 215,660 |
| 22. | Prajekan | Prajekan lor | - | 7 | 34 | 24 | 51,896 |
| 23. | Cermee | Cermee | - | 15 | 93 | 32 | 121,595 |
| | **Jumlah** | | **10** | **209** | **1.412** | | **1.565,068** |

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2023

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibukota Provinsi (Surabaya). Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, dimana 44,4% wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan $0^{o}$-$2^{o}$ seluas 190,83 $km^2$ (12,23%), landai $2^{o}$-$15^{o}$ seluas 568,17 $km^2$ (36,42%), agak curam $15^{o}$-$40^{o}$ seluas 304,70 $km^2$(19,53%) dan sangat curam diatas $40^{o}$ seluas 496,40 $km^2$ (31,82%).

### 2.1.1.3 Topografi

Ditinjau dari ketinggiannya, hamparan wilayah Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian rata-rata sekitar 253 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan puncak tertinggi 3.287 meter dpl dan terendah 54 meter dpl. Hamparan tersebut dikelilingi oleh gugusan Pegunungan Kendeng Utara dengan puncak Gunung Raung, Gunung Ijen dan Gunung Widodaren disebelah Timur, Pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Kilap dan Gunung Krincing di sebelah Barat, sedangkan di sebelah Utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Secara rinci ketinggian wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Ketinggian Tempat
Menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Tinggi Di Atas Permukaan Laut (M dpl)* |
|---|---|---|
| 1. | Maesan | 386,00 |
| 2. | Grujugan | 357,00 |
| 3. | Tamanan | 345,00 |
| 4. | Jambesari DS | 345,00 |
| 5. | Pujer | 371,00 |
| 6. | Tlogosari | 475,00 |
| 7. | Sukosari | 529,00 |
| 8. | Sbr. Wringin | 700,00 |
| 9. | Tapen | 184,00 |
| 10. | Wonosari | 253,00 |

| No. | Kecamatan | Tinggi Di Atas Permukaan Laut (M dpl)* |
|---|---|---|
| 11. | Tenggarang | 240,00 |
| 12. | Bondowoso | 253,00 |
| 13. | Curahdami | 247,00 |
| 14. | Binakal | 238,00 |
| 15. | Pakem | 500,00 |
| 16. | Wringin | 502,00 |
| 17. | Tegalampel | 240,00 |
| 18. | Taman Krocok | 225,00 |
| 19. | Klabang | 162,00 |
| 20. | Botolinggo | 128,00 |
| 21. | Ijen | 1.130,00 |
| 22. | Prajekan | 54,00 |
| 23. | Cermee | 116,00 |

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2022

Daerah terluas berada pada ketinggian 100-500 m dpl atau 49,11% dari keseluruhan luas, ketinggian >1.000 m dpl seluas 27,87%, ketinggian 500-1.000 m dpl seluas 19,75% dan daerah tersempit berada pada ketinggian 0 – 100 m dpl atau 3,27%.

### 2.1.1.4 Geologi

Menurut tinjauan geologis, stratigrafi wilayah Kabupaten Bondowoso disusun oleh batuan endapan vulkanik hasil gunung api kwarter 21,6% dan hasil gunung api kwarter muda 62,8%, yang banyak mengandung leusit, tufa dan batupasir (5,6%), endapan alluvium 8,5% dan fasies sedimen miosen 1,5% dengan komposisi ukuran dominan lempung, lanau, lanau berpasir dan pasir halus (± 96,9%) dan ukuran pasir kasar, kerikil, kerakal dan bongkah (±3,1%).

Kabupaten Bondowoso merupakan rangkaian zona fisiografis gunung api kuarter yang dikelompokkan dalam satu grup tersendiri sebagai Komplek Pegunungan Ringgit – Buser (Van Bemmelen, 1949), dengan dominasi endapan hasil aktifitas gunung api kwarter muda dan sedimentasi dataran *intermountain* (*Recent Volcanic Formation*).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki jenis tanah Regosol yaitu seluas 78.286 Ha yang tersebar di 23 Kecamatan. Jenis tanah ini luasan terbesar terdapat di Kecamatan Tlogosari mencapai seluas 11.092 Ha. Tanah regosol merupakan tanah berbutir kasar berasal dari material vulkanik gunung berapi yang mengendap berupa abu dan pasir vulkanik yang merupakan areal pertanaman padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran.

Sedangkan jenis tanah Andosol 32.859 Ha tersebar di 10 Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Ijen seluas 16.811 Ha, vegetasi yang tumbuh berupa tanaman bambu, dan rumput liar.

Untuk jenis tanah Mediteran terdapat seluas 11.230 Ha tersebar di Kecamatan Tapen, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Botolinggo, Prajekan dan Cermee. Tanah mediteran berwarna antara merah sampai kecoklatan yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Jenis tanah mediteran merupakan bagian lahan subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya. Tanaman yang tumbuh berupa palawija, tembakau, jati, dan jambu mente.

Jenis tanah Gromosol terdapat seluas 510 Ha hanya di wilayah Kecamatan Cermee. Gromosol adalah jenis tanah berwarna kelabu hitam berbentuk material halus berlempung. Jenis tanah ini bersifat subur dan merupakan areal pertanaman padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, dan jati.

Jenis tanah Litosol terdapat di Kecamatan Curahdami (1.800 Ha), Pakem (1.950 Ha) dan Klabang (1.150 Ha), Jenis tanah ini berbatu-batu dan berupa areal pertanaman rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.

Sedangkan untuk jenis tanah Latosol tersebar di 12 Kecamatan, total seluas 28.224 Ha yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Grujugan, Klabang, Cermee dan Sumber Wringin. Jenis tanah ini berwarna merah hingga kuning, sehingga sering disebut tanah merah, banyak mengandung zat besi dan aluminium dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan pH berkisar antara 4,5-5,5. Areal pertanaman yang tersebar berupa padi, palawija, sayuran, buah-buahan, dan kopi. Luas wilayah menurut karakteristik tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Karakteristik Tanah

| No | Jenis Tanah | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | Km² | % |
| 1 | Litosol | 49,00 | 3,14 |
| 2 | Regosol | 782,87 | 50,18 |
| 3 | Andosol | 328,59 | 21,06 |
| 4 | Gromosol | 5,10 | 0,33 |
| 5 | Mediteran | 112,30 | 7,20 |
| 6 | Latosol | 282,24 | 18,09 |
| | **Jmlah** | **1.560,10** | **100,00** |

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2015

### 2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Bondowoso yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean seluas 1.347 km2 mencakup hampir seluruh Wilayah Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Wilayah Kabupaten Situbondo, sebagian besar wilayah tersebut berbukit dan bergunung-gunung.

Pola aliran sungai dendritik terbentuk akibat geomorfologi perbukitan yang sangat dominan mempengaruhi kondisi wilayah Kabupaten Bondowoso. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada yaitu DAS Sampean, DAS Deluwang dan DAS Banyuputih (Kalipahit) dengan aliran sungai meliputi Sungai Sampean yang membelah wilayah Kabupaten Bondowoso, Sungai Deluwang di sisi barat, dan Sungai Telaga di sisi timur.

Dalam wilayah DAS Sampean tersebut terdapat dua bendung, yaitu Bendung Sampean Baru (SB) di bagian hulu (Kabupaten Bondowoso) dan Bendung Sampean Lama (SL) di bagian hilir (Kabupaten Situbondo). Selain itu terdapat 342 bendung kecil dan 14 embung lapangan, baik di hulu maupun di hilir Bendung SB.

### 2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah kabupaten Bondowoso memiliki suhu yang relatif sejuk berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan suhu rata–rata 28°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 62% hingga 86%. Selama periode tahun 2018-2021, perubahan iklim global yang terjadi mengakibatkan perbedaan tingkat curah hujan yang signifikan, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni-Agustus dengan curah hujan 700 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi pada bulan september dengan curah hujan 184 mm/bulan. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni-Agustus dengan jumlah hari hujan 27 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan November-Desember dengan rata-rata hari hujan 2 hari/bulan.

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso untuk sawah beririgasi seluas 32.351 Ha atau 20,74% luas wilayah, luas lahan kering sebesar 43.159 Ha (27,66%), sehingga luas areal potensial yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam pengembangan pertanian seluas 75.510 Ha atau 48,40% dari luas wilayah Kabupaten Bondowoso, sementara seluas 55.811 Ha atau 35,77% merupakan kawasan hutan (hutan sejenis, semak belukar dan rimba). Kondisi eksisting pemanfaatan penggunaan lahan di Kabupaten Bondowoso tersaji dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Peruntukannya (Ha) Tahun 2018 – 2021

| No. | Jenis Penggunaan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Permukiman | 7.330,91 | 7.330,91 | 7.330,91 | 7.330,91 |
| 2. | Industri | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 |
| 3. | Persawahan Irigasi | 32.351,79 | 32.351,79 | 32.351,79 | 32.351,79 |
| 4. | Tanah Kering | 43.158,61 | 43.158,61 | 43.158,61 | 43.158,61 |
| 5. | Kebun Campur | 296,42 | 296,42 | 296,42 | 296,42 |
| 6. | Perkebunan | 8.856,69 | 8.856,69 | 8.856,69 | 8.856,69 |
| 7. | Hutan | 55.811,02 | 55.811,02 | 55.811,02 | 55.811,02 |
| 8. | Rawa/danau/ waduk | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 |

| No. | Jenis Penggunaan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Padang rumput/ tanah kosong | 3.185,72 | 3.185,72 | 3.185,72 | 3.185,72 |
| 10. | Sungai/saluran irigasi | 767,57 | 767,57 | 767,57 | 767,57 |
| 11. | Jalan darat | 773,81 | 773,81 | 773,81 | 773,81 |
| 12. | Tanah tandus/rusak | 3.399,46 | 3.399,46 | 3.399,46 | 3.399,46 |
| 13. | Lain-lain | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | 156.010,00 | 156.010,00 | 156.010,00 | 156.010,00 |

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2022

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso berdasarkan jenis kawasan disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kawasan Lindung di Kabupaten Bondowoso

| No. | Jenis Kawasan | Luas (Ha) | Letak |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Kawasan Hutan Konservasi** | | |
| 1. | Taman Wisata Alam Kawah Ijen | 48 | Kec. Ijen |
| 2. | Cagar Alam Jeding | 2 | Kec. Ijen |
| 3. | Cagar Alam Kawah Ijen Merapi – Ungup-ungup | 2.468 | Kec. Ijen (secara Administrasi berada di Kab. Bondowoso dan Kab. Banyuwangi) |
| 4. | Cagar alam Pancur Ijen I dan II | 3,95 | Kec. Botolinggo |
| 5. | Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang | 1.275 | Kab. Bondowoso |
| **B.** | **Kawasan Hutan Lindung** | | |
| 1. | Hutan Lindung KPH Bondowoso: | 30.674,6 | Kec. Maesan, Grujugan, Tlogosari, Sumberwringin, Curahdami, Wringin, Klabang, Ijen, Botolinggo, Prajekan, Cermee |

Sumber : Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2020

Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 mengamanatkan pengelolaan kawasan lindung untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya dan memberikan jaminan terhadap kelestarian lingkungan hidup didalamnya. Perlindungan terhadap kawasan lindung di Kabupaten Bondowoso menjadi prioritas, mengingat lokasi lahan kritis yang masih relatif cukup luas, termasuk pada beberapa lereng pegunungan yang merupakan perlindungan bagi kawasan di bawahnya dari ancaman longsor dan banjir.

Rencana Tata Ruang tersebut juga mengamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya agar tidak punah sehingga memberi manfaat bagi keberlanjutan kehidupan. Kawasan Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa (memelihara spesies) serta ekosistemnya, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso pada dasarnya secara konsisten sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang menekankan pada pengembangan sektor pertanian. Arahan penggunaan lahan hingga tahun 2031 telah direncanakan dengan mempertimbangkan kecenderungan kebutuhan pembangunan yang seimbang secara ekologis, dengan konsep:

1. Meningkatkan (mengembalikan) luasan kawasan lindung dan konservasi lahan melalui penanganan lahan-lahan kritis.
2. Mempertegas keberadaan kawasan-kawasan penyangga pada kawasan budidaya.
3. Meningkatkan luas persawahan irigasi melalui konversi lahan kering, tadah hujan dan setengah teknis.
4. Optimalisasi dan penataan kawasan permukiman (terbangun) yang telah ada.

Adapun rencana penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bondowoso hingga tahun 2031 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Arahan Rencana Pemanfaatan Lahan
Kabupaten Bondowoso Sampai Dengan 2031

| No | Guna Lahan | Rencana 2031 | |
|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | Persen (%) |
| 1 | Hutan Lindung | 30.674,60 | 19,66 |
| 2 | Suaka Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa | 3.772,80 | 2,42 |
| 3 | Konservasi Mata air | 340,69 | 0,22 |
| 4 | Waduk, Sungai & Sempadan | 1.356,50 | 0,87 |
| 5 | Hutan Produksi (Perhutani) | 29.160,95 | 18,69 |
| 6 | Hutan Rakyat | 15.421,20 | 9,88 |
| 7 | Perkebunan | 14.101,49 | 9,04 |
| 8 | Pertanian Lahan Kering | 17.355,50 | 11,12 |
| 9 | Pertanian Lahan Basah (sawah) | 34.118,00 | 21,87 |
| 10 | Peternakan | 158,00 | 0,10 |
| 11 | Perikanan | 48,00 | 0,03 |
| 12 | Pertambangan | 58,50 | 0,04 |
| 13 | Industri dan Pergudangan | 712,76 | 0,46 |
| 14 | Pariwisata | 43,00 | 0,03 |
| 15 | Permukiman dan Prasarana | 8.088,01 | 5,18 |
| 17 | Lain-lain | - | - |
| 18 | Perdagangan dan Jasa | 600,00 | 0,38 |
| | **JUMLAH** | **156.010,00** | **100,00** |

Sumber : Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso 2011- 2031

### 2.1.1.8 Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso berdasarkan pendataan (data registrasi kecamatan) terus bertambah tiap tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 772.297 jiwa meningkat sebanyak 41.714 jiwa (5,40%) hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 814.011

jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dari 495,00 jiwa/km2 di tahun 2018 menjadi 521,76 jiwa/km2 di tahun 2021. Pada tahun 2019 perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin (sex rasio) 98,95% yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Rasio
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2021 (dalam jiwa)

| No | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Rasio Sex | Kepadatan (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 376.074 | 396.223 | 772.297 | 94,91 | 495,00 |
| 2 | 2019 | 396.698 | 400.894 | 797.592 | 98,95 | 511,24 |
| 3 | 2020 | 395.001 | 387.883 | 782.884 | 98,19 | 501,82 |
| 4 | 2021 | 398.343 | 415.668 | 814.011 | 95,83 | 521,76 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2022

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso mencapai 778.525 jiwa terdiri dari 383.325 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 395.200 jiwa berjenis kelamin perempuan sehingga rasio sex mencapai 97,0 dengan tingkat kepadatan 499 jiwa/km².

Tabel 2.8 Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Komposisi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Rasio Sex | Kepadatan (Jiwa/Km²) |
| 1 | Maesan | 23.919 | 24.283 | 48.202 | 98,5 | 859 |
| 2 | Grujugan | 18.535 | 18.779 | 37.314 | 98,7 | 501 |
| 3 | Tamanan | 19.107 | 19.511 | 38.618 | 97,9 | 1.372 |
| 4 | Jambesari DS | 17.966 | 18.284 | 36.250 | 98,3 | 1.204 |
| 5 | Pujer | 19.749 | 20.659 | 40.408 | 95,6 | 1.013 |
| 6 | Tlogosari | 22.673 | 23.104 | 45.777 | 98,1 | 413 |
| 7 | Sukosari | 7.569 | 7.980 | 15.549 | 94,8 | 671 |
| 8 | Sumberwringin | 16.873 | 17.416 | 34.289 | 96,9 | 249 |
| 9 | Tapen | 16.416 | 17.650 | 34.066 | 93,0 | 597 |
| 10 | Wonosari | 19.524 | 20.282 | 39.806 | 96,3 | 942 |
| 11 | Tenggarang | 21.111 | 21.719 | 42.830 | 97,2 | 1.660 |
| 12 | Bondowoso | 37.665 | 39.151 | 76.816 | 96,2 | 3.317 |
| 13 | Curahdami | 16.653 | 16.596 | 33.249 | 100,3 | 661 |
| 14 | Binakal | 8.459 | 8.728 | 17.187 | 96,9 | 440 |
| 15 | Pakem | 11.424 | 11.815 | 23.239 | 96,7 | 374 |
| 16 | Wringin | 19.728 | 20.331 | 40.059 | 97,0 | 691 |

| No. | Kecamatan | Komposisi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Rasio Sex | Kepadatan (Jiwa/Km²) |
| 17 | Tegalampel | 13.217 | 13.059 | 26.276 | 101,2 | 710 |
| 18 | Taman Krocok | 8.102 | 8.622 | 16.724 | 94,0 | 316 |
| 19 | Klabang | 8.908 | 9.433 | 18.341 | 94,4 | 201 |
| 20 | Botolinggo | 14.810 | 15.179 | 29.989 | 97,6 | 235 |
| 21 | Ijen | 6.050 | 5.886 | 11.936 | 102,8 | 58 |
| 22 | Prajekan | 12.482 | 13.093 | 25.575 | 95,3 | 451 |
| 23 | Cermee | 22.385 | 23.640 | 46.025 | 94,7 | 356 |
| **JUMLAH** | | **383.325** | **395.200** | **778.525** | **97,0** | **499** |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Jumlah populasi penduduk terbanyak berada di kecamatan Bondowoso mencapai 76.816 jiwa (9,87%), dengan kepadatan penduduk mencapai 3.317 jiwa/km2 dan jumlah populasi penduduk terendah berada di kecamatan Ijen sebanyak 11.936 jiwa (1,53%) dengan kepadatan penduduk sebesar 58 jiwa/km2.

Penduduk Kabupaten Bondowoso didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 69,17%, diikuti penduduk usia muda dibawah 15 tahun sebesar 19,97% dan sisanya adalah penduduk usia tua diatas 65 tahun sebesar 10,86%. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 538.471 jiwa, sementara non produktif mencapai 240.054 jiwa.

Tabel 2.9 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam jiwa)

| No. | Struktur Umur | KOMPOSISI PENDUDUK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Perempuan (jiwa) | Laki-Laki (jiwa) | Jumlah (jiwa) | % Jumlah Penduduk |
| 1 | 0-4 | 26.090 | 26.958 | 53.048 | 6,81 |
| 2 | 5-9 | 24.826 | 25.322 | 50.148 | 6,44 |
| 3 | 10-14 | 25.456 | 26.838 | 52.294 | 6,72 |
| 4 | 15-19 | 28.171 | 28.992 | 57.163 | 7,34 |
| 5 | 20-24 | 28.408 | 29.257 | 57.665 | 7,41 |
| 6 | 25-29 | 29.181 | 28.299 | 57.480 | 7,38 |
| 7 | 30-34 | 28.718 | 28.248 | 56.966 | 7,32 |
| 8 | 35-39 | 27.935 | 27.358 | 55.293 | 7,10 |
| 9 | 40-44 | 29.592 | 28.263 | 57.855 | 7,43 |
| 10 | 45-49 | 27.660 | 27.455 | 55.115 | 7,08 |
| 11 | 50-54 | 27.187 | 26.532 | 53.719 | 6,90 |
| 12 | 55-59 | 22.820 | 23.277 | 46.097 | 5,92 |
| 13 | 60-64 | 21.051 | 20.067 | 41.118 | 5,28 |
| 14 | 65-69 | 16.605 | 15.200 | 31.805 | 4,09 |
| 15 | 70-74 | 14.490 | 11.664 | 26.154 | 3,36 |
| 16 | 75+ | 17.010 | 9.595 | 26.605 | 3,42 |
| **Jumlah** | | **395.200** | **383.325** | **778.525** | **100** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Komposisi penduduk yang besar pada usia produktif menyebabkan angka ketergantungan penduduk mencapai angka 44,16% yang artinya bahwa dalam 100 jiwa penduduk usia produktif Kabupaten Bondowoso harus menanggung beban biaya hidup 44 jiwa penduduk non produktif (usia tua dan dan anak-anak).

Persentase usia produktif yang dominan merupakan potensi bagi perkembangan ekonomi ke depan yaitu tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai untuk berbagai sektor usaha namun apabila jumlah tenaga kerja yang besar tidak mampu terserap oleh sektor usaha maka berbagai permasalahan akan timbul yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi.

Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianut berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021

| No. | Jenis Agama | Jumlah Penganut |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 808.547 |
| 2 | Kristen | 3.713 |
| 3 | Katolik | 1.453 |
| 4 | Hindu | 232 |
| 5 | Budha | 342 |
| 6 | Konghucu | 5 |
| 7 | Kepercayaan | 4 |
| **JUMLAH** | | **814.296** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Jenis pekerjaan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yakni pertanian, industri dan jasa. Jumlah penduduk bekerja mulai tahun 2018 mengalami fluktuasi hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah penduduk bekerja sebesar 419.497 jiwa, meningkat menjadi 453.025 jiwa pada tahun 2019 dan menurun menjadi 452.545 pada tahun 2020.

Sektor pertanian masih sebagai penyumbang jumlah tenaga kerja terbesar, berikutnya sektor jasa dan industri. Selama pandemi covid-19, jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan industri diperkirakan semakin meningkat, sedangkan jumlah penduduk bekerja di sektor jasa mengalami penurunan cukup tajam sebesar 48,93% dari tahun 2019. Data Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 – 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2020

| No | JENIS PEKERJAAN | TAHUN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian,Kehutanan dan Perikanan | 196.912 | - | - | - |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 571 | - | - | - |

| No | JENIS PEKERJAAN | TAHUN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3 | Industri Pengolahan | 62 081 | - | - | - |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | NA | - | - | - |
| 5 | Bangunan / Konstruksi | 29 067 | - | - | - |
| 6 | Perdagangan Besar, Ecer, Rumah Makan dan Hotel | 68 116 | - | - | - |
| 7 | Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi | 7 026 | - | - | - |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Usaha Perusahaan | 7 385 | - | - | - |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan | 63 878 | - | - | - |
| 10 | Kegiatan yang belum jelas batasannya | - | - | - | - |
| 11 | Pertanian | - | 193.673 | 125.555 | 218.713 |
| 12 | Industri | - | 73.168 | 49.096 | 91.676 |
| 13 | Jasa | - | 152.656 | 278.374 | 142.156 |
| | **Jumlah** | **435.036** | **419.497** | **453.025** | **452.545** |

Sumber : Sakernas, 2017-2021

Sedangkan sisi ketenagakerjaan pada aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sejumlah 8.761 orang yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 574 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 6.819 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 1.368 Orang. Kualifikasi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Berdasarkan Pendidikan | | | | | |
| 1 | SD / MI | 79 | 69 | 57 | 65 | 57 |
| 2 | SMP/ MTs | 243 | 219 | 196 | 187 | 175 |
| 3 | SMA / SMK / MA | 2.288 | 2.167 | 1.867 | 1.801 | 1.649 |
| 4 | Diploma 1 (D-1) | 994 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| 5 | Diploma 2 (D-2) | | 377 | 283 | 273 | 229 |
| 6 | Diploma 3 (D-3) | | 621 | 609 | 627 | 779 |
| 7 | Diploma 4 (D-4) | 4.533 | 115 | 124 | 154 | 159 |
| 8 | Sarjana Srata 1 (S-1) | | 4.340 | 4.335 | 4.506 | 5.391 |
| 9 | Sarjana Strata 2 (S-2) | 353 | 340 | 366 | 316 | 313 |
| 10 | Doktoral (S-3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | **JUMLAH** | **8.492** | **8.259** | **7.851** | **7.939** | **8.761** |
| II | Berdasarkan Golongan | | | | | |
| 1 | Golongan I | 232 | 173 | 142 | 130 | 102 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Golongan II | 2.282 | 2.183 | 1.833 | 1.728 | 1.822 |
| 3 | Golongan III | 3.627 | 3.776 | 3.868 | 3.964 | 3.887 |
| 4 | Golongan IV | 2.351 | 2.127 | 2.008 | 1.805 | 1.582 |
| **JUMLAH** | | **8.492** | **8.259** | **7.851** | **7.627** | **7.393** |
| III | PPPK | | | | | |
| **JUMLAH** | | - | - | - | **312** | **373** |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/37/430.6.2/2021 tentang Perpanjangan, Penetapan Honorarium, dan Penempatan Tenaga Honorer pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Jumlah tenaga honorer kategori 1 (K1) sebanyak 58 orang, sedangkan tenaga honorer kategori 2 (K2) berjumlah 460 orang. Mengingat terdapat tenaga honorer yang meninggal dan pensiun hingga akhir tahun 2022 jumlah pegawai honorer sebanyak 373 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12A Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

| No | Kualifikasi Pendidikan | Non ASN | |
|---|---|---|---|
| | | Honorer K1 | Honorer K2 |
| 1 | SD / MI | 8 | 9 |
| 2 | SMP / MTs | 3 | 21 |
| 3 | SMA / SMK / MA | 19 | 200 |
| 4 | Diploma 1 (D-1) | 1 | 1 |
| 5 | Diploma 2 (D-2) | - | 39 |
| 6 | Diploma 3 (D-3) | 12 | 3 |
| 7 | Diploma 4 (D-4) | - | - |
| 8 | Sarjana Srata 1 (S-1) | 13 | 43 |
| 9 | Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) | - | 1 |
| 10 | Doktoral (S-3) | - | - |
| **JUMLAH** | | **56** | **317** |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

### 2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumberdaya alam yang besar merupakan modal potensial untuk pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso memiliki potensi wilayah yang berbeda, permasalahannya adalah bagaimana potensi wilayah tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bondowoso disajikan pada Gambar 2.1 berikut:

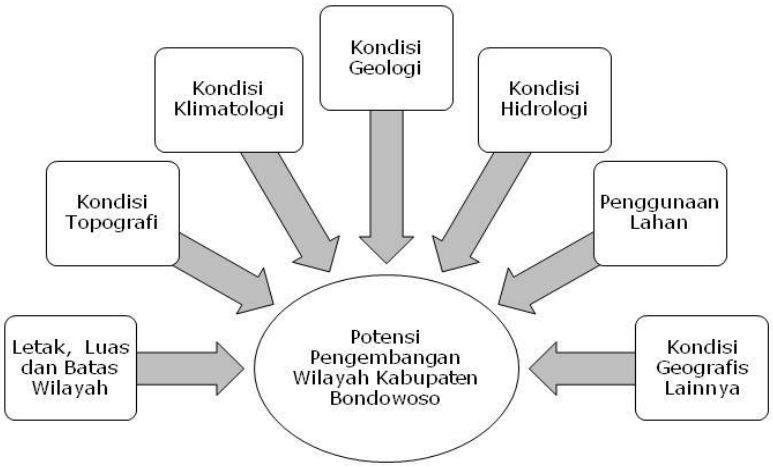


Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Potensi
Pengembangan Wilayah Kabupaten Bondowoso

Dengan pengelolaan potensi wilayah secara optimal maka (a) tingkat investasi meningkat, (b) tingkat produktivitas meningkat, (c) sumberdaya alam dapat dieksploitasi secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, (d) kualitas sumberdaya manusia meningkat, (e) peran institusi meningkat, dan (f) ketersediaan sarana dan prasarana dasar meningkat.

Dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bondowoso sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, arahan peruntukan lahan menurut pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031 tergambar dalam peta berikut.

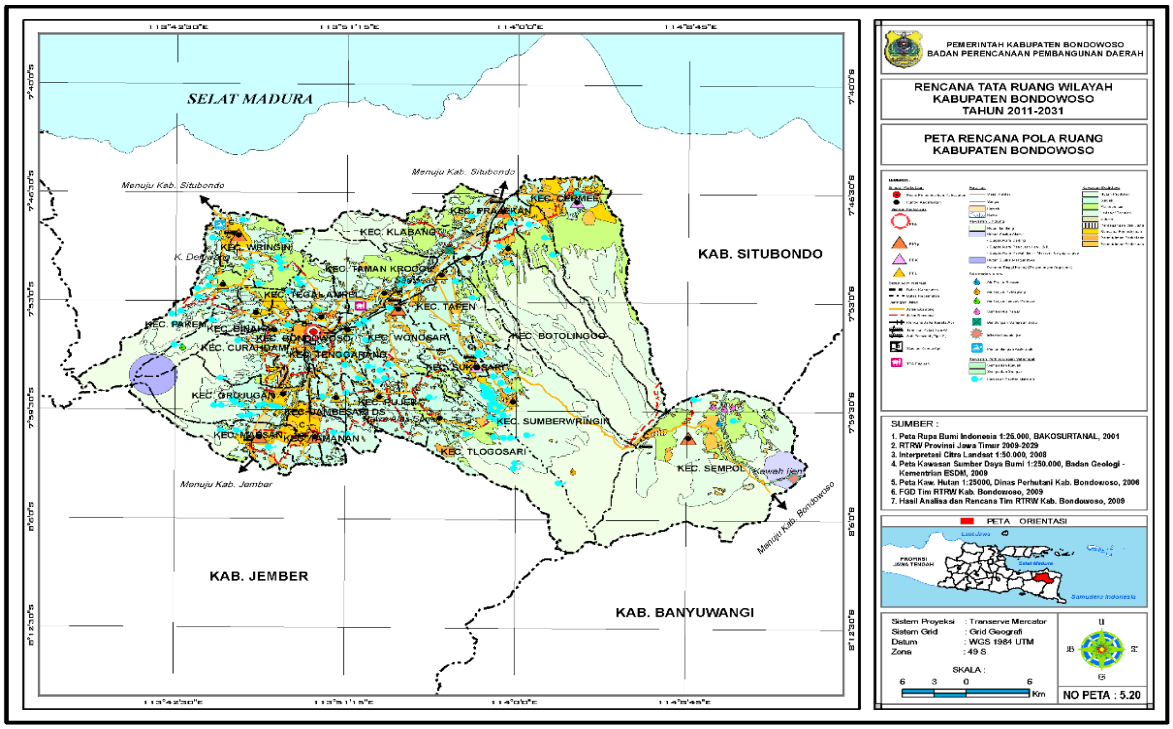


Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bondowoso

Peruntukan ruang di Bondowoso terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya antara lain terdiri dari :

1. Kawasan pertanian meliputi :
   a. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Ijen, Sukosari, Sumberwringin, dan Kecamatan Tlogosari.
   b. Kawasan pertanian lahan basah meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.
   c. Kawasan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.
   d. Kawasan peternakan kecil di 23 kecamatan dan kawasan peternakan besar meliputi Kecamatan Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin.

   Kawasan pertanian dalam RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031 tergambar dalam peta berikut.

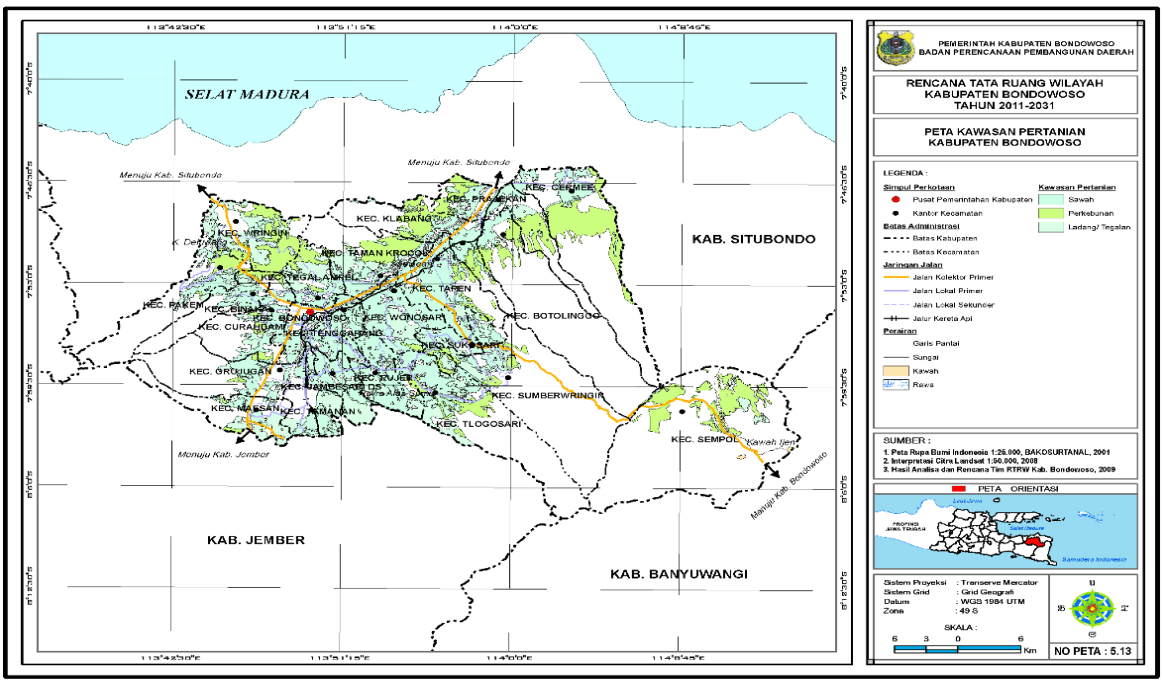


Gambar 2.4 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Bondowoso

2. Kawasan perkebunan khususnya komoditas kopi, kakao, tebu, tembakau, cengkeh, kelapa meliputi Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Cermee, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumber Wringin, Tamanan, Tenggarang, Tegalampel, Tapen, Tlogosari, Taman Krocok, Ijen, Wringin, Maesan, dan Kecamatan Wonosari.
3. Kawasan perikanan meliputi Kecamatan Binakal, Cermee, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang , Maesan, Pujer, Prajekan, Sukosari, Sumberwringin, Tamanan, Tapen, Tenggarang, Tlogosari, dan Kecamatan Wonosari.

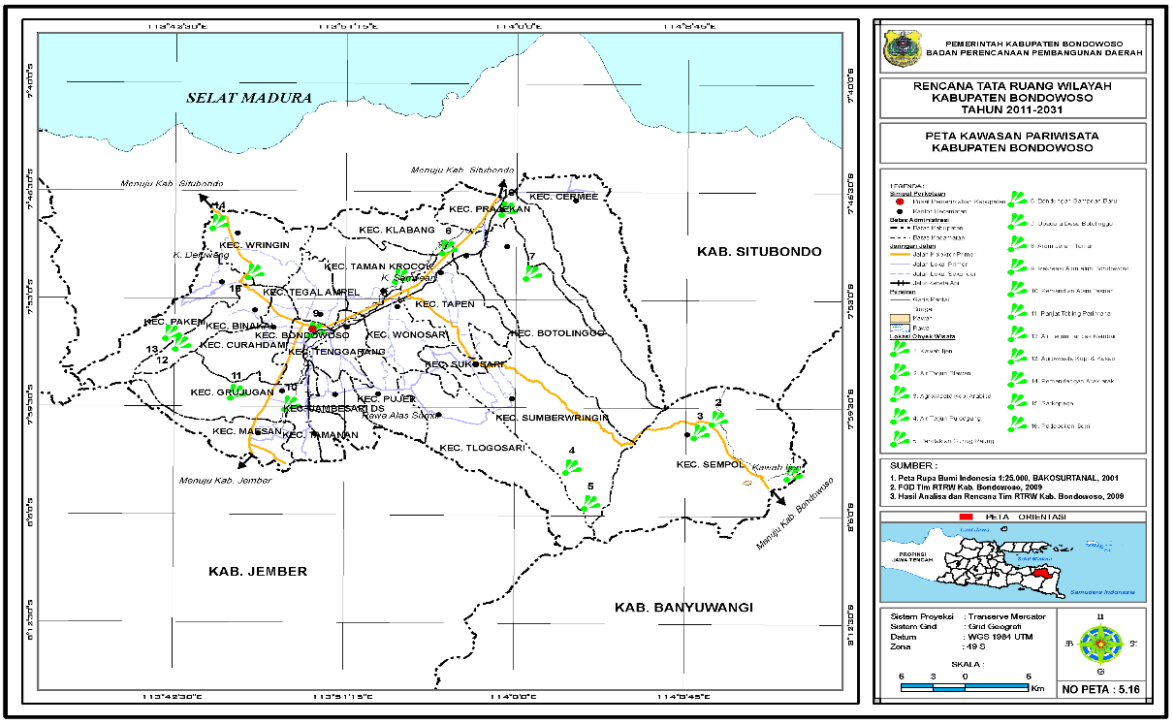


Gambar 2.5 Peta Kawasan Pariwisata Kabupaten Bondowoso

4. Kawasan pariwisata meliputi :
    a. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya meliputi : (1) Situs megalitikum (Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Prajekan, Pujer, Tamanan, Tegalampel, Tlogosari, Wonosari, dan Kecamatan Wringin, (2) Situs Gua Buto di Kecamatan Cermee, (3) Wisata ziarah makam Ki Ronggo di Kecamatan Tegalampel, (4) Wisata budaya Padepokan Gema Buana di Kecamatan Prajekan, (5) Wisata kerajinan kuningan Cindogo di Kecamatan Tapen, (6) Desa wisata Blimbing di Kecamatan Klabang, (7) Desa wisata Tamanan, Kalianyar, dan Sumberkemuning di Kecamatan Tamanan, dan (8) Desa wisata Gunungsari di Kecamatan Maesan.
    b. Kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata Alun-alun Bondowoso di Kecamatan Bondowoso.
    c. Kawasan pariwisata alam meliputi : (1) kawasan wisata terpadu Kawah Ijen - Raung dengan obyek : wisata Kawah Ijen, Kawah Telaga Weru dan Kawah Wurung, wisata air terjun Blawan dan gua stalagtit, wisata pemandian air panas

Blawan dan pemandian Damarwulan, wisata agro di Kecamatan Ijen, Sumberwringin, Sukosari dan Tlogosari, dan wisata Air Terjun Puloagung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin.

d. kawasan wisata terpadu Lereng Argopuro dengan obyek wisata pendakian Pegunungan Hyang atau Gunung Argopuro di Kecamatan Pakem, wisata agro Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kecamatan Pakem, wisata air terjun Tancak Kembar di Kecamatan Pakem, wisata Pemandangan Arak-Arak di Kecamatan Wringin, dan , wisata megalitikum Situs Batu Labeng di Kecamatan Wringin.

e. kawasan wisata rekreasi dengan obyek wisata Pemandian Tasnan di Kecamatan Grujugan dan wisata Bendung Sampean Baru di Kecamatan Tapen.

f. kawasan wisata minat khusus dengan obyek wisata arung jeram Bosamba di Kecamatan Taman Krocok dan Tapen, kawasan wisata pendakian Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin, wisata panjat tebing alam Patirana di Kecamatan Grujugan, dan wisata petualangan di Desa Solor Kecamatan Cermee.

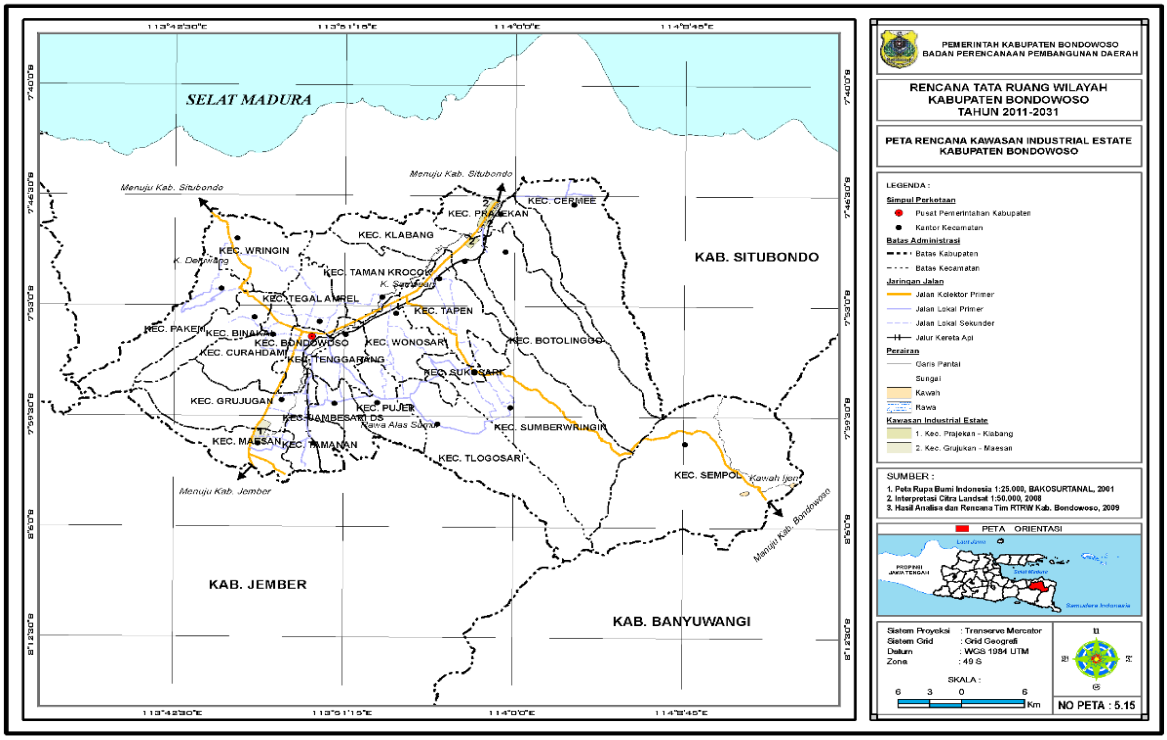


Gambar 2.6 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bondowoso

5. Industri meliputi :

a. Kawasan peruntukan industri terpadu industri pengolahan hasil pertanian, industri lain yang memiliki resiko pencemaran rendah dan pergudangan di Kecamatan Grujugan, Kecamatan Maesan dan Kecamatan Tamanan.

b. Kawasan peruntukan industri kimia, logam, industri lainnya dan pergudangan di Kecamatan Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Grujugan, Klabang, Tapen, Maesan, dan Kecamatan Prajekan.

c. Kawasan peruntukan industri untuk pengolahan hasil pertanian dan pergudangan di Kecamatan Wringin.

d. Sentra industri sedang dan industri rumah tangga meliputi :

1) Sentra industri kimia di Kecamatan Cermee, Prajekan, Botolinggo, Klabang, Tapen, Grujugan, Tamanan, Tenggarang, dan Ijen.

2) Sentra industri pande besi meliputi Kecamatan Binakal, Jambesari Darus Sholah, dan Kecamatan Tlogosari.

3) Sentra industri makanan di Kecamatan Binakal, Bondowoso, Klabang, Maesan, Prajekan, Pujer, Ijen, Sukosari, Sumberwringin, Tamanan, Taman Krocok, Tenggarang, Tlogosari , Wonosari, dan Kecamatan Wringin.

4) Sentra industri logam dasar dan kuningan di Kecamatan Tapen.

5) Sentra industri meubel di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pakem, Tegalampel, dan Kecamatan Tamanan.

6) Sentra industri handy craft dan anyaman bambu di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Cermee, Pakem, Pujer, Tlogosari, Tapen, Tamanan, dan Kecamatan Wringin.

7) Sentra industri rokok dan pengolahan tembakau di Kecamatan Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Maesan, Pujer, Pakem, Tamanan, dan Kecamatan Wringin.

8) Sentra industri konveksi di Kecamatan Bondowoso, Binakal, Curahdami, dan Kecamatan Pujer.

9) Sentra industri batu hias di Kecamatan Bondowoso, Grujugan, Pakem, dan Kecamatan Wringin.

10) Sentra industri batik di Kecamatan Maesan dan Kecamatan Tamanan.

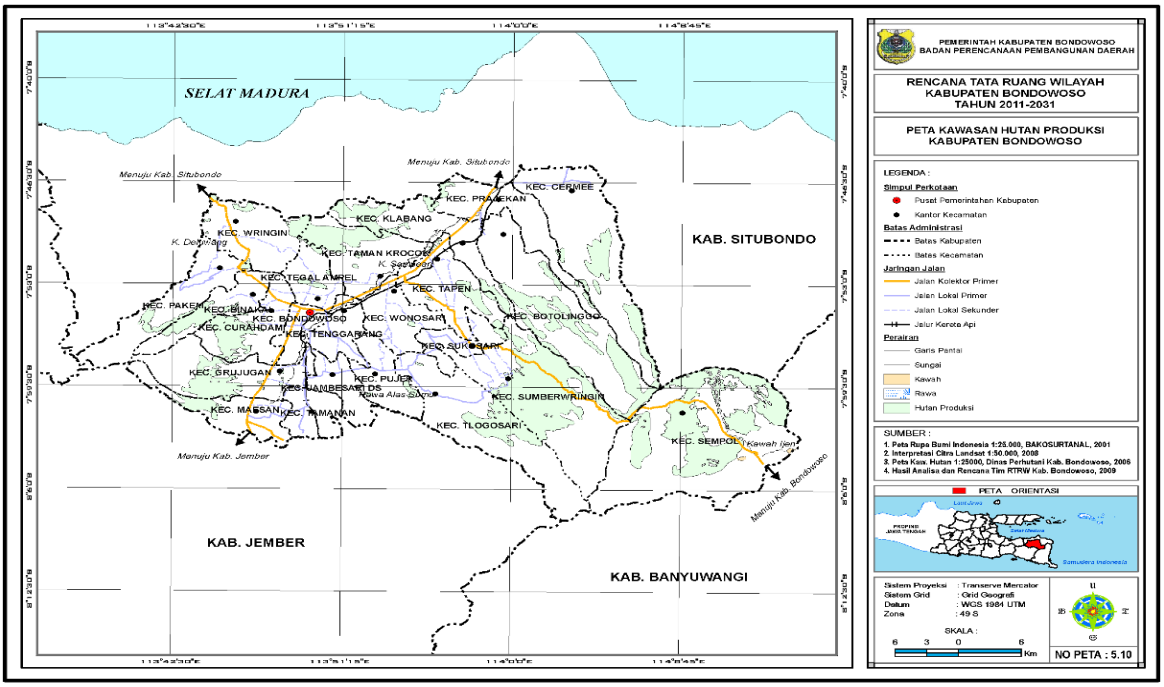


Gambar 2.7 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Bondowoso

6. Hutan Produksi meliputi Kecamatan Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari, Ijen, Sukosari, Sumber Wringin, dan Kecamatan Wringin.
7. Hutan rakyat meliputi Kecamatan Bondowoso, Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujugan, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, Tlogosari, Tamanan, Tenggarang, Jambeari Darussholah, Sukosari, Ijen, Sumber Wringin, Wonosari dan Kecamatan Wringin.

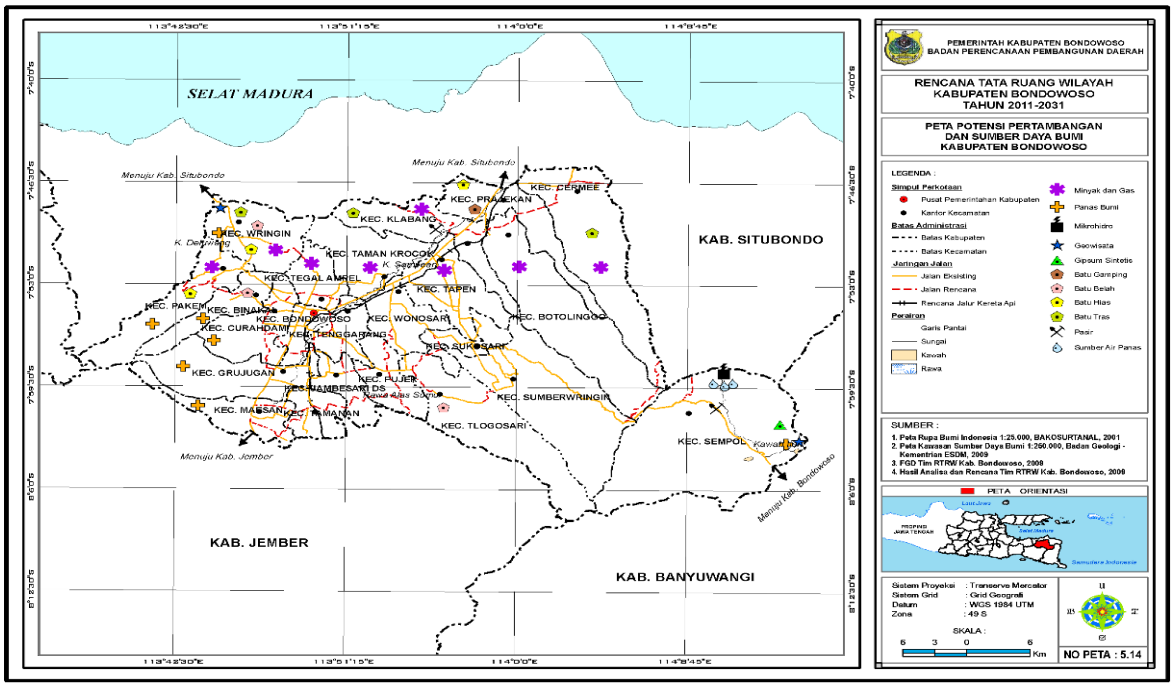


Gambar 2.8 Peta Potensi Pertambangan dan Sumber Daya Bumi Kabupaten Bondowoso

8. Pertambangan

   a. Kawasan peruntukan pertambangan Mineral, meliputi tambang Pasir di Kecamatan Klabang dan Kecamatan Ijen, tambang Batu Kali di Kecamatan Binakal, tambang Batu Belah di Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Binakal dan Kecamatan Wringin, tambang Batu Hias atau Poles di Kecamatan Grujugan, Kecamatan Prajekan, Kecamatan Maesan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Wringin, tambang Batu Tras di Kecamatan Wringin, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Cermee, tambang Batu Gamping di Kecamatan Prajekan, tambang Kalsit di Kecamatan Klabang, dan tambang Belerang dan Gipsum di Kecamatan Ijen.

   b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi : Kecamatan Klabang, Kecamatan Pakem, Taman Krocok, Tapen, Tegalampel, dan Kecamatan Wringin.

   c. Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi meliputi : Pegunungan Hyang di Kecamatan Binakal, Curahdami, Grujugan, Maesan, Pakem, Blawan – Ijen di Kecamatan Ijen, dan Ijen – Raung Kecamatan Sumberwringin.

9. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi :

   a. Kawasan Perdagangan Dan Jasa Skala Kabupaten Ditetapkan Di Kawasan Perkotaan Bondowoso Meliputi Kecamatan Bondowoso, Curahdami, Tegalampel, Dan Kecamatan Tenggarang.

   b. Kawasan Perdagangan Dan Jasa Skala Sub Wilayah Kabupaten Meliputi Kecamatan Cermee, Maesan, Prajekan, Sukosari, Tamanan, Wonosari, Dan Kecamatan Wringin.

c. Kawasan Perdagangan Dan Jasa Skala Kecamatan Meliputi Kecamatan Binakal, Botolinggo, Sumberwringin, Grujugan, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Pakem, Pujer, Ijen, Taman Krocok Tapen, Dan Kecamatan Tlogosari.

d. Kawasan Perdagangan Skala Kawasan Dan Lingkungan, Tersebar Diseluruh Kawasan Permukiman.

10. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi 23 kecamatan.

Dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan wilayah, khususnya mengakomodir kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan, dikembangkan kawasan strategis, meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi, dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis ekonomi terdiri dari Kawasan Agropolitan, Kawasan Segitiga Emas Ijen, Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso, Kawasan Strategis Tamanan, Kawasan Industri, dan Kawasan Daerah Tertinggal dengan lokasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13 Kawasan Strategis Kabupaten Bondowoso

| NO | KAWASAN STRATEGIS | LOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Kawasan Agropolitan | Kecamatan Ijen, Sukosari, Sumberwringin, dan Tlogosari |
| 2 | Kawasan Segitiga Emas Ijen | Sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo |
| 3 | Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso | Seluruh wilayah Kecamatan Bondowoso |
| | | Sebagian wilayah Kecamatan Curahdami, meliputi Kelurahan Curahdami, Desa Petung, Desa Curahpoh, Desa Penambangan, Desa Poncogati, Desa Selolembu dan Desa Locare |
| | | Sebagian wilayah Kecamatan Tegalampel, meliputi Kelurahan Sekarputih dan Desa Karanganyar |
| | | Sebagian wilayah Kecamatan Tenggarang, meliputi Kelurahan Tenggarang, Desa Bataan, Desa Kajar, Desa Sumbersalam, Desa Koncer Darul Aman, Desa Koncer Kidul, Desa Grujugan Lor dan Desa Kejawan. |
| 4 | Kawasan Strategis Tamanan | Wilayah Kecamatan Tamanan, Jambesari Darus Sholah, dan Pujer. |
| 5 | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri Grujugan-Maesan-Tamanan dan Kawasan Peruntukan Industri Prajekan-Botolinggo-Klabang, serta Kawasan Peruntukan Industri Wringin |
| 6 | Kawasan Strategis Sosial Budaya | Kawasan Alun-alun dan pusat kota |
| | | Kawasan utama situs megalitikum (Kawasan Desa Glingseran dan Desa Banyuputih di Kecamatan Wringin, Kawasan Desa Pekauman di Kecamatan Grujugan, dan Kawasan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan) |
| 7 | Kawasan strategis peruntukan pertambangan mineral | Kawasan Pandak dan Leprak Kecamatan Klabang dengan potensi pasir dan kalsit |
| | | Kawasan Walidono Kecamatan Prajekan dengan potensi batu gamping untuk semen |
| | | Kawasan Cermee dengan potensi batu tras |

| NO | KAWASAN STRATEGIS | LOKASI |
|---|---|---|
| | | Kawasan Ijen dengan potensi gipsum sintetis |
| | | Kawasan Binakal dengan potensi batu belah |
| | | Kawasan Wringin dengan potensi batu tras. |
| 8 | Kawasan strategis peruntukan pemanfaatan panas bumi. | Kawasan geotermal Blawan – Ijen dan Raung (Kecamatan Ijen dan Sumberwringin) dan Kawasan geotermal Pegunungan Hyang (Kecamatan Pakem, Binakal, Curahdami, Grujugan, dan Maesan) |
| 9 | Kawasan strategis lingkungan hidup | Kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, dan kawasan suaka alam dan marga satwa |
| 10 | Kawasan strategis pertahanan dan keamanan | Daerah Latihan Militer Dodilapur Bondowoso, Dodilapur Tamanan dan Dodilapur Gunung Merapi |
| | | Daerah Latihan Militer Kostrad Divisi 2 di Desa Kluncing Kecamatan Sumberwringin dan Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami |
| | | Kawasan batalyon 514 |

Arahan struktur ruang dalam pengembangan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat meliputi :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Perkotaan Bondowoso yang meliputi Kecamatan Bondowoso, sebagian Kecamatan Curahdami yang meliputi Desa Penambangan, Sumbersuko, Curahpoh, Locare dan Kelurahan Curahdami, sebagian Kecamatan Tegalampel yang meliputi Desa Tegalampel, Karanganyar dan Kelurahan Sekarputih, dan sebagian Kecamatan Tenggarang yang meliputi Desa Bataan, Koncer Darulaman, Koncer Kidul, Lojajar, Kajar, Sumbersalam, dan Kelurahan Tenggarang, serta sebagian Kecamatan Jambesari Darus Sholah yaitu Desa Grujugan Lor.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
   a. Perkotaan Maesan di Kecamatan Maesan yang meliputi Desa Maesan, Sumbersari, Pakuniran dan Penanggungan
   b. Perkotaan Prajekan di Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa Prajekan Kidul dan Prajekan Lor
   c. Perkotaan Tamanan di Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa Tamanan dan Kalianyar
   d. Perkotaan Wonosari di Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong
   e. Perkotaan Wringin di Kecamatan Wringin yang meliputi Desa Wringin dan Jatisari.
   f. Perkotaan Cermee di Kecamatan Cermee yang meliputi Desa Suling Wetan dan Cermee
   g. Perkotaan Pujer di Kecamatan Pujer yang meliputi Desa Maskuning Kulon, Maskuning Wetan dan Mangli
   h. Perkotaan Sukosari di Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa Sukosari Lor

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi :
   a. Perkotaan Binakal di Kecamatan Binakal yang meliputi Desa Baratan
   b. Perkotaan Botolinggo di Kecamatan Botolinggo yang meliputi Desa Botolinggo dan Lumutan
   c. Perkotaan Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah yang meliputi Desa Jambesari dan Pejagan
   d. Perkotaan Klabang di Kecamatan Klabang yang meliputi Desa Klabang, Besuk, Klampokan dan Sumbersuko
   e. Perkotaan Pakem di Kecamatan Pakem yang meliputi Desa Pakem dan Patemon,
   f. Perkotaan Ijen di Kecamatan Ijen yang meliputi Desa Sempol dan Kalisat
   g. Perkotaan Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin yang meliputi Desa Sumberwringin dan Sumbergading
   h. Perkotaan Grujugan di Kecamatan Grujugan yang meliputi Desa Dadapan dan Taman
   i. Perkotaan Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok yang meliputi Desa Taman
   j. Perkotaan Tapen di Kecamatan Tapen yang meliputi Desa Cindogo, Tapen, dan Kalitapen
   k. Perkotaan Tlogosari di Kecamatan Tlogosari yang meliputi Desa Pakisan dan Tlogosari.

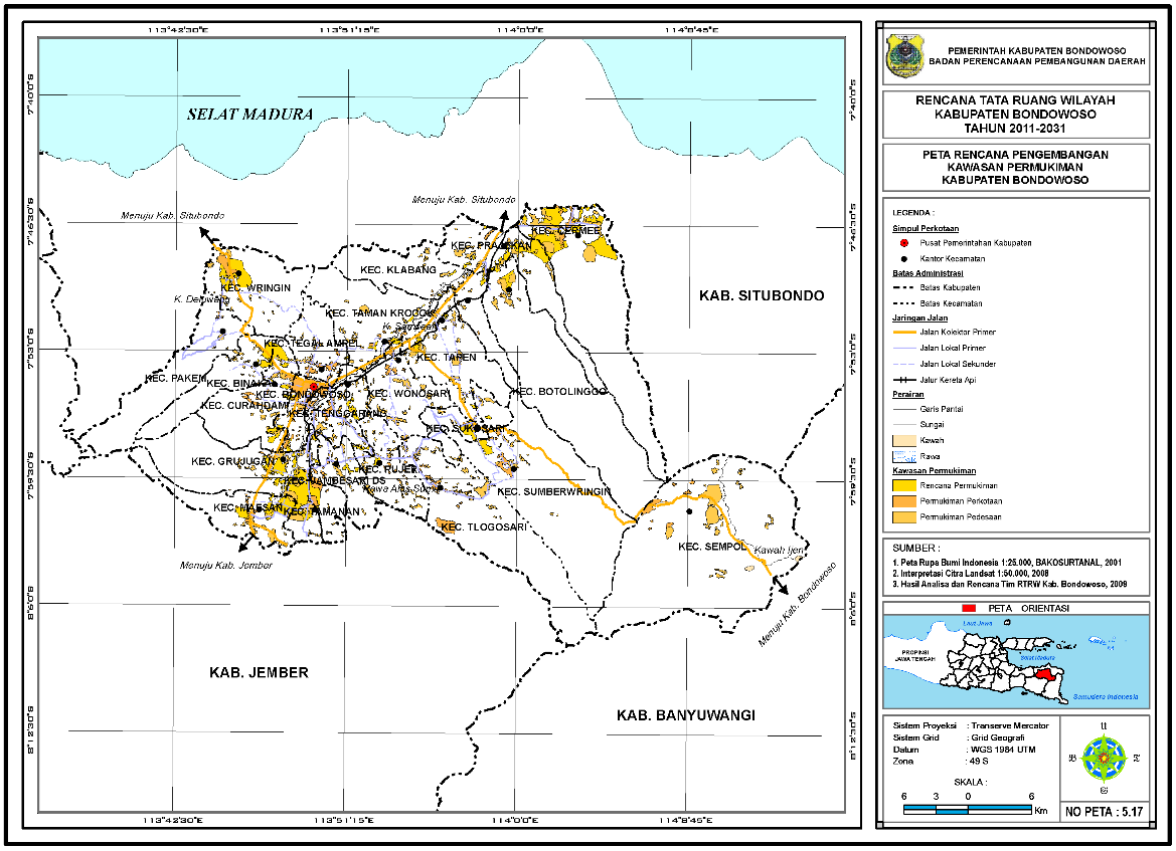


Gambar 2.9 Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso

4. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) meliputi:

   a. Desa Botolinggo di Kecamatan Botolinggo,
   b. Desa Bercak di Kecamatan Cermee,
   c. Desa Suling Kulon di Kecamatan Cermee,
   d. Desa Jetis di Kecamatan Curahdami,
   e. Desa Grujugan Kidul di Kecamatan Grujugan,
   f. Desa Sumberpandan di Kecamatan Grujugan,
   g. Desa Sumberjeruk di Kecamatan Jambesari Darus Sholah,
   h. Desa Blimbing di Kecamatan Klabang,
   i. Desa Pakuniran di Kecamatan Maesan,
   j. Desa Sumberdumpyong di Kecamatan Pakem,
   k. Desa Sukowono di Kecamatan Pujer,
   l. Desa Sukorejo di Kecamatan Sumberwringin,
   m. Desa Kalianyar di Kecamatan Ijen,
   n. Desa Mengen di Kecamatan Tamanan,
   o. Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen,
   p. Desa Lojajar di Kecamatan Tenggarang,
   q. Desa Kembang di Kecamatan Tlogosari,
   r. Desa Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari,
   s. Desa Ampelan di Kecamatan Wringin,
   t. Desa Bukor di Kecamatan Wringin,

Sistem jaringan prasarana dan sarana meliputi transportasi Jalan raya, prasarana telekomunikasi, prasarana irigasi/pengairan, prasarana energi/listrik, prasarana air bersih, prasarana drainase, prasarana pengelolaan persampahan, dan prasarana sanitasi.

1. Sistem Prasarana Jalan

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Bondowoso, terbagi menjadi:

a. Jalan jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Garduatak- -Kawah Ijen)

b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan : Jalan penghubung Bondowoso–Jember; Jalan penghubung Bondowoso–Situbondo, Jalan penghubung Bondowoso–Besuki dan Jalan penghubung Maesan-Sukowono.

c. Jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan pusat perkotaan Bondowoso dengan kawasan fungsional tertentu, seperti kawasan perdagangan, industri, perkantoran, wisata, dan lainnya.

d. Jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan Perkotaan Bondowoso dengan pusat-pusat kegiatan (perkotaan kecamatan)

e. Jalan lokal primer, yang merupakan jalan tembus antar kabupaten.

Rencana peningkatan jalan dan jembatan, serta prasarana transportasi merupakan arahan pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya, meliputi :

a. Peningkatan jalan kolektor primer, meliputi jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan jalan untuk jenis jalan ini adalah berupa penambahan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan, serta pelebaran jalan.

b. Peningkatan jalan lokal primer, meliputi jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan Bondowoso sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan lainnya (PPK dan PPL) serta dengan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran. Jenis peningkatannya antara lain peningkatan kualitas perkerasan, penambaan rambu-rambu dan perlengkapan jalan, serta pelebaran jalan;

c. Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, agrobisnis dan sentra industri, dengan prioritas peningkatan kualitas perkerasan jalan.

d. Peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir, dengan prioritas peningkatan perkerasan jalan dan pembangunan jembatan pada ruas :

- jalan Botolinggo-Pancur;

- jalan Klabang-Wonoboyo,
- jalan Cermee-Batu Ampar-Solor-Silapak,
- jalan Pakem-Ardisaeng,
- jalan Prajekan-Penang,
- jalan Sukorejo-Puloagung,
- jalan Tlogosari-Brambang dan
- jalan Wringin–Sumbercanting-Semampir-Banyuwulu.

e. Pengembangan jalan lingkar Perkotaan Bondowoso yang melalui wilayah Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Tenggarang, dengan prioritas pada ruas Pancoran – Kejawan, mencakup perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan.

f. Pengembangan Terminal Bondowoso menjadi terminal Tipe B yang berlokasi di jalur jalan lingkar perkotaan Bondowoso.

g. Pengembangan terminal penumpang type C di beberapa Pusat Pelayanan yang potensial, yaitu di Maesan, Prajekan, Ijen, Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringi.

h. Pengembangan pelayanan angkutan umum penumpang.

i. Pengembangan pelayanan transportasi kereta api di Kabupaten Bondowoso diarahkan untuk mengaktifkan kembali sarana kereta api pada jalur Kalisat – Bondowoso – Situbondo.

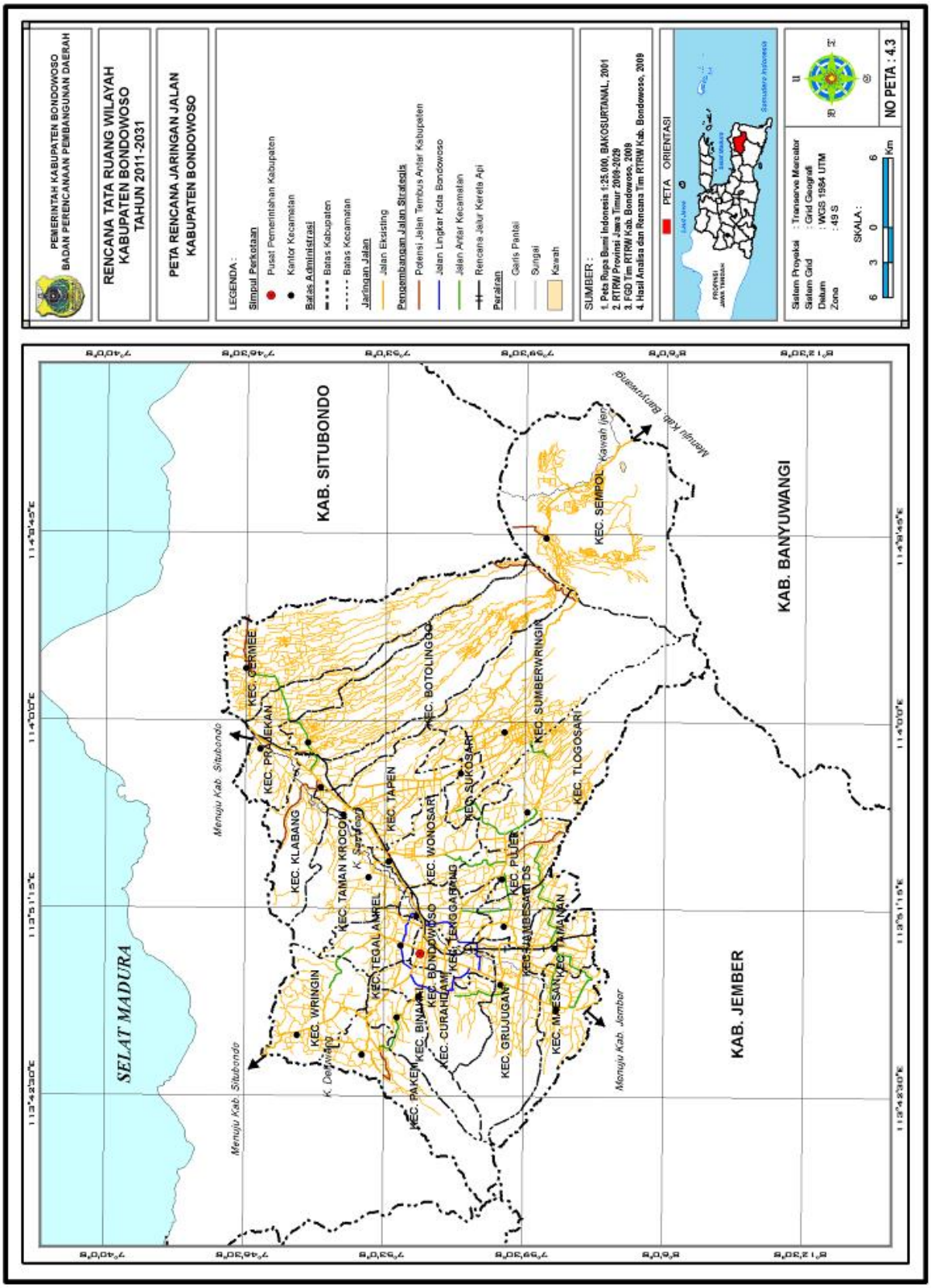


Gambar 2.10 Peta Rencana Jaringan Jalan
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031

2. Sistem Prasarana Lainnya

Arahan bagi pengembangan jaringan prasarana lainnya meliputi :

a. Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai. Serta pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mikrohidro, tenaga surya, panas bumi, dan energi alternatif lainnya.

b. pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi prasarana telekomunikasi dan prasarana penyampaian informasi yang terdiri atas jaringan kabel dan non kabel (pancaran gelombang), dalam bentuk jaringan kabel telepon, menara telekomunikasi, unit layananan (wartel, warnet, telepon umum), studio radio dan studio televisi, untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah

c. Pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan pemanfaatan sempadan secara ketat;

d. Pembangunan bendungan dan penampung air baku lainnya, peningkatan kondisi prasarana irigasi pada kawasan potensial peningkatan produksi pangan, serta optimalisasi prasarana irigasi yang telah terbangun.

e. Pengembangan sistem pengelolaan air bersih perdesaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat memerlukan pembinaan teknis dan kelembagaan dari instansi terkait.

f. Meningkatkan kinerja sistem perpipaan PDAM di kawasan perkotaan yang telah ada, dengan optimalisasi kapasitas sumber pengambilan air, menurunkan tingkat kebocoran dan pemeliharaan/ perbaikan jaringan secara rutin dan berkala;

g. memantapkan saluran drainase primer dengan pembangunan saluran drainase yang memperhatikan kontur wilayah, pembuatan saluran drainase tersier yang layak pada kawasan permukiman dan sepanjang sisi jalan;

3. Sistem Prasarana Perhubungan

Perencanaan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan secara komprehensif dan terpadu antarsektor dapat dilakukan melalui pengembangan sistem prasarana wilayah. Rencana sistem prasarana wilayah kabupaten Bondowoso dikembangkan menjadi sistem prasarana utama berupa sistem prasarana perhubungan yang terfokus pada sistem transportasi darat mengingat letak geografis wilayah Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan berupa daratan. Sistem Transportasi darat sebagai sistem moda transportasi utama di Kabupaten Bondowoso berperan mendukung pembangunan dan melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Disisi lain perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso dan kabupaten sekitar, memberikan manfaat yang besar bagi aktifitas masyarakat Bondowoso, salah satunya adalah meningkatnya mobilitas manusia dan barang.

Sistem prasarana utama yang dikembangkan di wilayah kabupaten Bondowoso terdiri dari rencana transportasi jalan raya dan rencana transportasi kereta api. Rencana transportasi jalan raya terdiri dari terdiri atas: jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jalan dan jembatan, rencana lokasi terminal dan rencana pengembangan sarana prasarana angkutan umum masal wilayah.

Rencana transportasi kereta api dikembangkan berupa pengembangan layanan kereta api, meliputi :

a. Pengamanan dan konservasi jalur kereta api, stasiun dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka revitalisasi sistem angkutan kereta api yang melalui wilayah Kecamatan Tamanan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang dan Kecamatan Prajekan;
b. Mengaktifkan kembali pelayanan angkutan kereta api yang melintasi Kalisat – Bondowoso – Situbondo – Panarukan;
c. Meningkatkan peranan pemerintah dalam pelayanan kereta api; dan
d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem angkutan kereta api, sebagai sarana transportasi umum dan pengembangan pariwisata.

Pemanfaatan ruang wilayah secara tepat serta terbangunnya infrastruktur wilayah diharapkan dapat mendorong pengembangan semua potensi sumberdaya di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

### 2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bondowoso merupakan daerah pegunungan yang berbukit dengan kelerengan yang bervariasi dapat memungkinkan terjadinya kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bondowoso terdiri dari daerah-daerah yang memiliki tingkat erosi tinggi, tanah gundul di kawasan hutan lindung, kawasan bantaran sungai, kawasan alur sungai (jalur) pembuangan air kawah, kawasan bersudut lereng lebih dari 40% dengan struktur tanah relatif labil dan kawasan lain yang secara historis, geologis dan ekologis sering atau rawan mengalami bencana banjir, longsor dan vulkanis (gunung berapi).

Tingkat erosi tahunan berdasarkan studi Universitas Brawijaya (1989-1990) berkisar antara 26.500 – 34.715 ton/ha/tahun atau 1,07 mm/tahun. Sedangkan DAS akan mampu menahan erosi (mengendalikan kelestarian) apabila komposisi masing-masing guna lahan sebagai berikut: hutan 44,18%, perkebunan 28,71%, tegal 20,77%, sawah 3,12% dan permukiman 3,22%.

Berdasarkan peta Rawan Bencana dari terdapat beberapa potensi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di Wilayah Kabupaten Bondowoso, antara lain :

1. Bencana Gunung Api

   Potensi bencana gunung api dapat terjadi di 6 kecamatan antara lain Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Botolinggo, dan Kecamatan Tapen.

2. Bencana Gempa

   Potensi bencana gempa dapat terjadi pada 23 kecamatan, yaitu Kecamatan Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

3. Bencana Banjir

   Potensi bencana banjir dapat terjadi 19 kecamatan antara lain Kecamatan Tegalampel, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

4. Bencana Longsor

   Potensi bencana longsor dapat terjadi di 15 kecamatan antara lain pada Kecamatan Wringin, Kecamatan Pakem, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Maesan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Pujer, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Taman Krocok, dan Kecamatan Klabang.

5. Bencana Angin Puyuh

   Potensi bencana angin puyuh dapat terjadi pada 23 kecamatan, yaitu Kecamatan Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Maesan, Bondowoso, Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, dan Cermee.

6. Bencana Badai

   Potensi bencana badai dapat terjadi di 13 kecamatan antara lain pada Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Klabang, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

7. Bencana Kekeringan

   Potensi bencana kekeringan dapat terjadi di 7 kecamatan antara lain pada Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Binakal, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

8. Bencana Kebakaran

   Potensi bencana kebakaran dapat terjadi pada 21 kecamatan, yaitu Kecamatan Wringin, Tegalampel, Pakem, Binakal, Grujugan, Curahdami, Bondowoso,

Tenggarang, Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sumber Wringin, Ijen, Sukosari, Botolinggo, Wonosari, Tapen, Taman Krocok, Prajekan, dan Cermee.

9. Bencana Kebakaran hutan

   Potensi bencana kebakaran hutan dapat terjadi di 14 kecamatan antara lain pada Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Maesan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Klabang.

10. Bencana Epidemi

    Potensi bencana epidemi dapat terjadi di 16 kecamatan antara lain pada Kecamatan Wringin, Kecamatan Tegalampel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Maesan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Prajekan, dan Kecamatan Cermee.

11. Bencana Polusi Lingkungan

    Potensi bencana polusi lingkungan dapat terjadi di 3 kecamatan antara lain pada Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, dan Kecamatan Prajekan.

12. Bencana Kecelakaan Industri

    Potensi bencana kecelakaan industri dapat terjadi di 4 kecamatan antara lain pada Kecamatan Grujugan, Kecamatan Maesan, Kecamatan Ijen dan Kecamatan Prajekan.

13. Bencana Kecelakaan Transportasi

    Potensi bencana kecelakaan transportasi dapat terjadi di 14 kecamatan antara lain pada Kecamatan Pakem, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Maesan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Sumber Wringin, Kecamatan Ijen, Kecamatan Sukosari, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, dan Kecamatan Prajekan.

14. Bencana Konflik Sosial

    Potensi bencana konflik sosial dapat terjadi di 3 kecamatan antara lain pada Kecamatan Pakem, Kecamatan Grujugan, dan Kecamatan Botolinggo.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso tergambarkan dalam peta berikut:

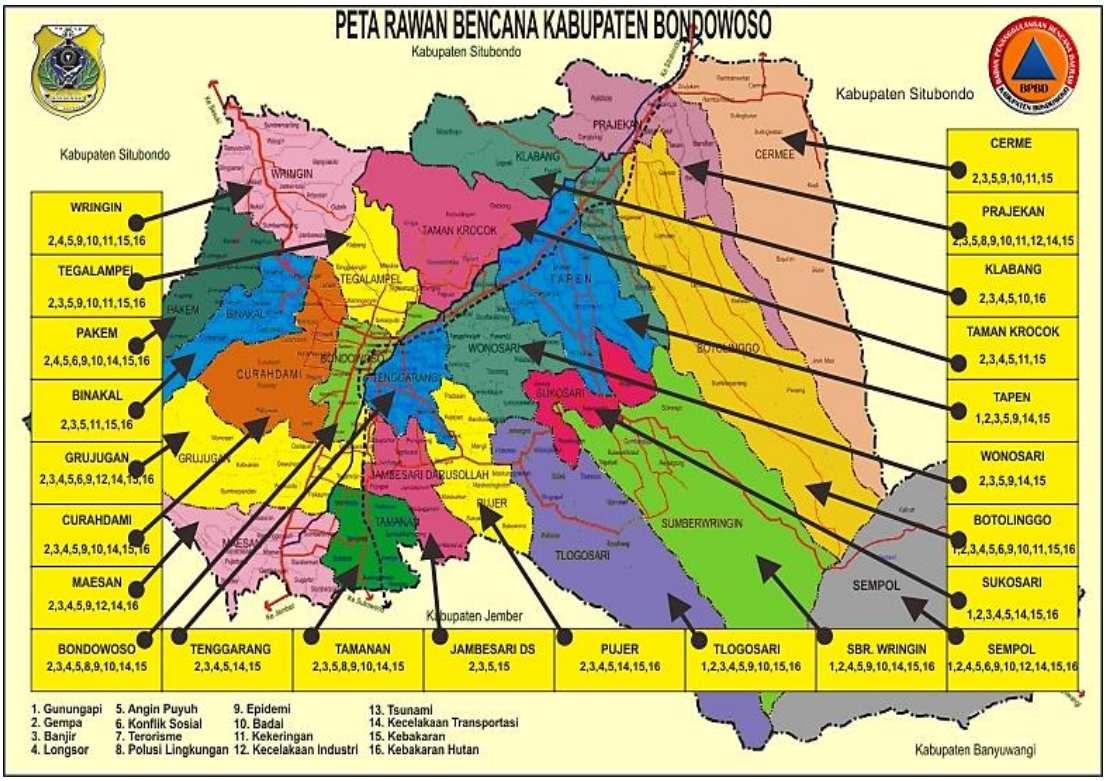


Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Bondowoso masuk daerah dengan resiko bencana tinggi (skor : 116,61) berada pada urutan 401 dari 514 Kabupaten/kota se-Indonesia.

Tabel 2.14 Kejadian Bencana di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021

| NO | JENIS BENCANA | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencana Gunung Api | kejadian | - | - | - | - | - |
| 2 | Bencana Gempa | kejadian | - | - | - | - | - |
| 3 | Bencana Banjir | kejadian | 21 | 22 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | Bencana Longsor | kejadian | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 |
| 5 | Bencana Angin Kencang | kejadian | - | 20 | 34 | 34 | 54 |
| | Bencana Angin Puyuh | kejadian | 10 | 18 | 18 | 18 | |
| 6 | Bencana Angin Putting Beliung | kejadian | 10 | 38 | 34 | 34 | 12 |
| 7 | Bencana Kekeringan | kejadian | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 8 | Bencana Kebakaran | kejadian | - | - | - | - | - |
| 9 | Bencana Kebakaran Hutan | kejadian | - | 5 | - | - | 2 |
| 10 | Bencana Epidemi | kejadian | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 11 | Bencana Polusi Lingkungan | kejadian | - | - | - | - | - |
| 12 | Bencana Kecelakaan Industri | kejadian | - | - | - | - | - |
| 13 | Bencana Kecelakaan Transportasi | kejadian | - | - | - | - | - |
| 14 | Bencana Konflik Sosial | kejadian | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | | **59** | **120** | **93** | **93** | **118** |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, 2022

Dari keseluruhan kejadian bencana yang ada di Bondowoso, selama kurun waktu 2018-2022 didominasi oleh bencana banjir, longsor, angin puyuh, epidemi, dan kebakaran. Disamping itu, kawasan sempadan sungai yang berada di sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi yang mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian bentuk dan fungsi sungai, memerlukan penanganan khusus untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, bentuk fisik pinggiran sungai dan dasar/kedalaman sungai.

Selain kawasan bencana tersebut diatas, di Kabupaten Bondowoso terdapat lahan kritis dan lahan sangat kritis yang memiliki potensi menjadi penyebab awal terjadinya bencana alam. Pada tahun 2020 luas lahan kritis dan lahan sangat kritis mencapai seluas 9.155,11 Ha, yang terdiri dari 5.863,45 Ha lahan kritis dan 3.291,66 ha lahan sangat kritis. Lahan kritis tersebut, tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali enam kecamatan, yaitu kecamatan Tamanan, Jambesari DS, Wonosari, Tenggarang dan Bondowoso (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2021). Keberadaan lahan kritis disebabkan karena pengelolaan dan keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat mengakibatkan masyarakat merambah lahan dan menempati lahan garapan pada daerah-daerah yang masuk kawasan konservasi, disamping itu masih ada masyarakat yang membudidayakan tanaman tidak sesuai dengan fungsi lahan sehingga memicu terjadinya lahan kritis.

Secara Nasional penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Penyebaran Covid-19 juga terjadi di Bondowoso, sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun 2021 kasus terkonfirmasi sebanyak 2.892, terdiri dari dirawat 265 orang, sembuh 2.420 orang, meninggal sebanyak 207 orang dan kasus suspek sebanyak 90 orang.

### 2.1.1.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh ekosistem. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis Jasa Ekosistem akan menghasilkan indikasi potensi sumberdaya alam di daerah yang akan bermanfaat sebagai : 1) Acuan pengelolaan sumber daya alam; 2) Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RTRW maupun RPJMD; 3) Indikator pada instrumen pengendalian lingkungan hidup; 4) Prediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan; 5) Arahan lokasi kegiatan yang tepat

sesuai DDDTLH dan meminimalisir resiko lingkungan; 6) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Selama lima tahun terakhir (2018-2021) struktur perekonomian Kabupaten Bondowoso didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bondowoso. Pada tabel 2.15 dapat dilihat bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010, angka PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2021 meningkat dari 12,951 triliun rupiah menjadi 13.637 triliun rupiah pada tahun 2019, dan selanjutnya menurun menjadi 13,451 triliun rupiah pada tahun 2020 dan meningkat kembali dari tahun 2021 sebesar 13,921 triliun dan tahun 2022 menjadi 14,410 triliun. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Bondowoso mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 1,36 persen. Penurunan PDRB di tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19, yang mulai masuk ke Indonesia sekitar pertengahan bulan Maret 2020.

Apabila diperhatikan selama tahun 2018-2022, kontribusi lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB setiap tahun mengalami penurunan yaitu dari 28,09% tahun 2018 menjadi 27,00% tahun 2019 dan akibat pandemi covid-19 kemudian meningkat menjadi 27,72% tahun 2020, tahun 2021 menurun menjadi 27,42% dan tahun 2022 meningkat menjadi 26,07%. Namun demikian, tidak berarti bahwa volume produksi lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan berkurang selama periode tersebut, namun lebih disebabkan karena laju pertumbuhan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan lapangan usaha lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2018 nilai kontribusinya sebesar 3,635 Trilyun dan tahun 2019 mencapai sebesar 3,682 Trilyun sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 3,729 Trilyun, yang berarti pandemi covid-19 sedikit berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020. Tahun 2021 sebesar 3,818 triliun dan tahun 2022 menurun menjadi 3,756 triliun. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB ADHK Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB ADHK Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Lapangan Usaha | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 3.635,80 | 28,09 | 3.679,90 | 27 | 3.729,50 | 27,72 | 3.818,35 | 27,42 | 3.756,87 | 26,07 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 263,4 | 2,03 | 269,8 | 1,98 | 253 | 1,88 | 257,49 | 18,49 | 272,71 | 18,94 |
| 3 | Industri Pengolahan | 2.968,70 | 22,92 | 3.224,60 | 23,64 | 3.235,10 | 24,05 | 3.358,39 | 24,12 | 3.567,46 | 24,75 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,4 | 0,05 | 6,8 | 0,05 | 6,8 | 0,05 | 6,94 | 0,04 | 7,41 | 0,05 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang | 10,4 | 0,08 | 10,9 | 0,08 | 11,3 | 0,08 | 12,06 | 0,08 | 11,97 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 1.109,80 | 8,57 | 1.175,30 | 8,62 | 1.103,60 | 8,2 | 1.107,78 | 7,95 | 1.182,05 | 8,20 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda | 2.101,80 | 16,22 | 2.234,90 | 16,38 | 2.050,90 | 15,25 | 2.182,66 | 15,67 | 2.330,19 | 16,17 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 98,1 | 0,76 | 106,3 | 0,78 | 101,1 | 0,75 | 113,59 | 0,08 | 129,6 | 0.08 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 93,1 | 0,72 | 100,5 | 0,74 | 82,2 | 0,61 | 84,00 | 0,06 | 94,07 | 0,06 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 836,4 | 6,46 | 899,8 | 6,6 | 974,9 | 7,25 | 1.041,68 | 7,48 | 1.073,90 | 7,45 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 381,8 | 2,95 | 397 | 2,91 | 395,1 | 2,94 | 399,27 | 2,86 | 403,8 | 2,80 |
| 12 | Real Estate | 160,2 | 1,24 | 168,7 | 1,24 | 173,4 | 1,29 | 175,91 | 1,26 | 185,14 | 1,28 |
| 13-14 | Jasa Perusahaan | 47,5 | 0,37 | 50,5 | 0,37 | 46,8 | 0,35 | 47,61 | 0,34 | 49,86 | 0,34 |
| 15 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 432 | 3,33 | 448,6 | 3,29 | 437,5 | 3,25 | 440,13 | 3,16 | 433,39 | 3,00 |
| 16 | Jasa Pendidikan | 469,6 | 3,63 | 505,8 | 3,71 | 518,5 | 3,85 | 529,62 | 3,80 | 539,84 | 3,74 |
| 17 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 101,2 | 0,78 | 107,7 | 0,79 | 116,6 | 0,87 | 121,78 | 0,87 | 123,44 | 0,85 |
| 18-21 | Jasa Lainnya | 235,4 | 1,82 | 250,7 | 1,84 | 215,4 | 1,6 | 224,39 | 1,61 | 248,51 | 1,17 |
| | PDRB | 12.951,10 | 100 | 13.637,40 | 100 | 13.451,80 | 100 | 13.921,65 | 100 | 14.410,20 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2022

Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

| No. | Lapangan Usaha | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % | (Juta Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 5.620,10 | 30,41 | 5.792,40 | 29,2 | 5.946,50 | 29,83 | 6.204,93 | 29,47 | 6.489,78 | 28,34 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 370,1 | 2 | 388,3 | 1,95 | 373,7 | 1,87 | 388,06 | 1,84 | 425,65 | 1,86 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4.173,80 | 22,56 | 4.630,60 | 23,31 | 4.762,10 | 23,89 | 5.140,41 | 24,42 | 5.788,78 | 25,28 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,8 | 0,04 | 8,5 | 0,04 | 8,6 | 0,04 | 9,01 | 0.04 | 9,74 | 0.04 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang | 12,9 | 0,07 | 13,8 | 0,07 | 14,5 | 0,07 | 15,68 | 0,07 | 16,12 | 0,07 |
| 6 | Konstruksi | 1.784,10 | 9,64 | 1.918,20 | 9,65 | 1.822,10 | 9,14 | 1.852,41 | 8,80 | 2.091,20 | 9,13 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda | 2.811,10 | 15,2 | 3.065,60 | 15,43 | 2.879,90 | 14,45 | 3136,5 | 14,90 | 3.520,24 | 15,37 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 132,5 | 0,72 | 146,9 | 0,74 | 142 | 0,71 | 158,08 | 0,75 | 189,64 | 0,83 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 137 | 0,74 | 151,8 | 0,76 | 125,7 | 0,63 | 132,78 | 0,63 | 155,04 | 0,68 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 938,2 | 5,07 | 1.023,20 | 5,15 | 1.110,70 | 5,57 | 1.188,01 | 5.64 | 1.236,89 | 5,40 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 545,8 | 2,95 | 573,7 | 2,89 | 575,5 | 2,89 | 596,56 | 2,83 | 641,28 | 2,80 |
| 12 | Real Estate | 210,6 | 1,14 | 226,8 | 1,14 | 238,2 | 1,19 | 243,67 | 1,16 | 259,97 | 1,14 |
| 13-14 | Jasa Perusahaan | 70,5 | 0,38 | 76,9 | 0,39 | 73,4 | 0,37 | 76,35 | 0,36 | 81,73 | 0,36 |
| 15 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 614,9 | 3,32 | 677,3 | 3,43 | 697,4 | 3,5 | 697,89 | 3,32 | 702,78 | 3,07 |
| 16 | Jasa Pendidikan | 633,8 | 3,43 | 693,9 | 3,49 | 724,7 | 3,64 | 741,71 | 3,52 | 764,93 | 3,34 |
| 17 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 130,6 | 0,71 | 142,4 | 0,72 | 156,9 | 0,79 | 167,71 | 0,80 | 175,56 | 0,77 |
| 18-21 | Jasa Lainnya | 301 | 1,63 | 323,8 | 1,63 | 283,7 | 1,42 | 302,49 | 1,44 | 352,51 | 1,54 |
| | PDRB | 18.494,80 | 100 | 19.854,10 | 100 | 19.935,60 | 100 | 21.052,23 | 100 | 22.901,86 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2022

Tabel 2.17 Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 -2022 ADHB dan ADHK (Dalam Juta)

| No. | Lapangan Usaha | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hb (%) | Hk (%) | Hb (%) | Hk (%) | Hb (%) | Hk (%) | Hb (%) | Hk (%) | Hb (%) | Hk (%) |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 30,41 | 28,09 | 29,2 | 27 | 29,83 | 27,72 | 29,47 | 27,42 | 28,34 | 26,07 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2 | 2,03 | 1,95 | 1,98 | 1,87 | 1,88 | 1,84 | 18,49 | 1,86 | 18,94 |
| 3 | Industri Pengolahan | 22,56 | 22,92 | 23,31 | 23,64 | 23,89 | 24,05 | 24,42 | 24,12 | 25,28 | 24,75 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 9,64 | 8,57 | 9,65 | 8,62 | 9,14 | 8,2 | 8,80 | 7,95 | 9,13 | 8,20 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda | 15,2 | 16,22 | 15,43 | 16,38 | 14,45 | 15,25 | 14,90 | 15,67 | 15,37 | 16,17 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,08 | 0,83 | 0.08 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,74 | 0,72 | 0.76 | 0,74 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,06 | 0,68 | 0,06 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 5,07 | 6,46 | 5,15 | 6,6 | 5,57 | 7,25 | 5,64 | 7,48 | 5,40 | 7,45 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,95 | 2,95 | 2,89 | 2,91 | 2,89 | 2,94 | 2,83 | 2,86 | 2,80 | 2,80 |
| 12 | Real Estate | 1,14 | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 1,19 | 1,29 | 1,16 | 1,26 | 1,14 | 1,28 |
| 13-14 | Jasa Perusahaan | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,34 |
| 15 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 3,32 | 3,33 | 3,43 | 3,29 | 3,5 | 3,25 | 3,32 | 3,16 | 3,07 | 3,00 |
| 16 | Jasa Pendidikan | 3,43 | 3,63 | 3,49 | 3,71 | 3,64 | 3,85 | 3,52 | 3,80 | 3,34 | 3,74 |
| 17 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,71 | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,87 | 0,8 | 0,87 | 0,77 | 0,85 |
| 18-21 | Jasa Lainnya | 1,63 | 1,82 | 1,63 | 1,84 | 1,42 | 1,6 | 1,44 | 1,61 | 1,54 | 1,17 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2022

Tabel 2.18 Perbandingan Perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso
Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 -2022
ADHB dan ADHK (Dalam Juta)

| No. | Uraian | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 18.494,80 | 12.951,50 | 19.854,10 | 13.637,40 | 19.935,60 | 13.451,80 | 21.052,23 | 13.921,65 | 22.901,86 | 14.410,26 |
| 2 | Jawa Timur | 2.189.823,64 | 1.563.441,82 | 2.345.790,59 | 1.649.768,12 | 2.299.460,00 | 1.610.419.65 | 2.454.000,50 | 1.669.000,12 | 2.730.907,48 | 1.757.821,43 |
| 3 | Nasional | 14.983.364,00 | 10.425.851,90 | 16.079.257,00 | 10.949.037,80 | 15.434.151,80 | 10.722.422,70 | 11.652.641,15 | 11.118.000,87 | | |

Sumber : BPS, 2022

Proses industrialisasi yang didukung sektor pertanian yang kuat, masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Secara struktural tampak pada upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk pertanian yang sebagian besar terkait dengan sektor industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan serta pasca panen yang memerlukan pemanfaatan teknologi dan kesiapan SDM. Sumbangan Lapangan usaha kategori industri pengolahan mencapai 24,75% terhadap total PDRB ADHK pada tahun 2022.

Sementara itu, lapangan usaha yang memiliki peningkatan sumbangan besar terhadap pembentukan PDRB ADHK tahun 2022 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, memberikan sumbangan sebesar 16,76% terhadap total PDRB ADHK.

Sehingga memperhatikan kecenderungan yang terjadi, dimungkinkan selama 5 (lima) tahun ke depan perekonomian Kabupaten Bondowoso akan bergeser dan didominasi lapangan usaha kategori non pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu ke arah lapangan usaha kategori industri pengolahan serta lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tabel 2.16 dapat dilihat nilai PDRB Kabupaten Bondowoso atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 22,901 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,849 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 21,052 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar terhadap total nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 28,34 persen (turun dari 30,41 persen tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan, sebesar 25,28 persen (naik dari 22,56 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,37 persen (naik dari 15,20 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,13 persen (turun dari 9,64 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 5,40 persen sedangkan tahun 2018 sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya pertambahan nilai PDRB yang lebih tinggi dari PDRB tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan nilai tambah PDRB dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Bondowoso 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha (persen)

| No | Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 0,42 | 1,21 | 1,35 | 2,38 | -1,61 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 3,77 | 2,44 | -6,23 | 1,79 | 5,91 |
| 3 | Industri pengolahan | 9,37 | 8,62 | 0,33 | 3,31 | 6,23 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,96 | 5,83 | 0,00 | 2,34 | 6,72 |
| 5 | Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, dan daur Ulang | 5,27 | 4,72 | 3,67 | 6,31 | -0,80 |
| 6 | Konstruksi | 5,49 | 5,91 | -6,10 | 0,38 | 6,70 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda | 6,37 | 6,33 | -8,23 | 6,43 | 6,76 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 8,66 | 8,31 | -4,89 | 12,37 | 14,09 |
| 9 | penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,24 | 7,97 | -18,21 | 2,15 | 11,99 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,24 | 7,58 | 8,35 | 6,85 | 3,09 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,33 | 3,97 | -0,48 | 1,05 | 1,13 |
| 12 | Real Estat | 5,67 | 5,32 | 2,79 | 1,44 | 5,25 |
| 13,14 | Jasa Perusahaan | 6,56 | 6,27 | -7,33 | 1,65 | 4,72 |
| 15 | administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial | 4,38 | 3,83 | -2,47 | 0,61 | -1,53 |
| 16 | Jasa Pendidikan | 6,35 | 7,69 | 2,51 | 2,14 | 1,93 |
| 17 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,76 | 6,38 | 8,26 | 4,43 | 1,36 |
| 18 – 21 | Jasa Lainnya | 5,12 | 6,44 | -14,01 | 4,18 | 10,75 |
| | **Pertumbuhan** | **5,08** | **5,30** | **-1,36** | **3,49** | **3,51** |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Selama kurun waktu tahun 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi dari 5,08% pada tahun 2018 meningkat mencapai angka 5,30% pada tahun 2019, namun seiring dengan merebaknya virus covid-19 pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga 1,36% (minus). Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 8,35 persen. Pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan meniadakan kegiatan bertatap muka, tidak terkecuali untuk kalangan bisnis, perkantoran atau kegiatan belajar mengajar. Kendala ini disikapi dengan bentuk pertemuan-pertemuan secara *online*, untuk kegiatan belajar mengajar diselenggarakan secara daring, begitu pula pelaksanaan rapat rapat di perkantoran maupun dalam rangka bisnis dilakukan melalui *video conferrence* atau sejenisnya. Sehingga penggunaan paket data mengalami peningkatan yang signifikan, yang menyebabkan pertumbuhan positif di sektor ini. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, delapan diantaranya mengalami pertumbuhan positif. Salah satunya adalah kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 8,32 persen. Penanganan pasien covid-19 yang semakin hari semakin bertambah menjadi penyebab utamanya. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif antara dua hingga tiga persen yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 3,96, persen, Real Estate tumbuh sebesar 2,77 persen dan Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 2,53 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas hanya tumbuh dibawah 1,35 persen.

Tercatat sembilan lapangan usaha/kategori mengalami pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi di tahun 2020 dengan besaran yang bervariasi. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi paling dalam yaitu sebesar -18,21 persen. Penyebabnya adalah tingkat hunian kamar hotel/penginapan yang sangat rendah dan sempat tutupnya restoran dan rumah makan, walaupun ada yang buka hanya bisa melayani *'take away'*. Berikutnya adalah kategori Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar -14,02 persen, disusul kategori Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan -8,23 persen. Kategori Jasa Perusahaan tumbuh negatif sebesar -7,26 persen. Fokus pemerintah terhadap masalah pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan *social distancing*, penerapan PSBB dan PPKM Mikro diperkirakan menyebabkan sektor ekonomi tumbuh terbatas, dan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) bagi masyarakat yang terdampak covid-19 belum terlihat hasilnya. Terdapat lima lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi antara 0,47 persen hingga 6,24 persen.

Tabel. 2.20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 5,08 | 5,30 | (1,36) | 3,49 | 3,51 |
| 2 | Jawa Timur | 5,50 | 5,52 | (2,39) | 3,57 | 5,34 |
| 3 | Indonesia | 5,17 | 5,02 | (2,07) | 3,69 | 5,31 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso relatif lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Timur. Secara Nasional pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 2,07% (minus), perekonomian Jawa Timur terkontraksi sebesar 2,39% (minus). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Bondowoso selama tahun 2020 masih dibawah 1,5% (-1,36%). Beberapa sektor ekonomi yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Penguatan prioritas pembangunan pada pemulihan ekonomi telah tepat sasaran yaitu penguatan ekonomi sektor pertanian dan UMKM. Penguatan sektor pertanian dan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Namun kondisi ini belum mampu untuk menjangkau dampak pandemi covid-19 pada sektor jasa. Pemerintah daerah secara berkelanjutan perlu memberikan stimulan pada sektor yang melemah dan memicu meningkatnya pengangguran seperti sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,49 dan tahun 2022 menjadi 3,51 sehingga diharapkan mendapatkan momentum peningkatan untuk tahun-tahun mendatang.

## 2. Laju Inflasi Tingkat Produsen (Indek Implisit)

Laju pertumbuhan Inflasi Tingkat Produsen (indek implisit) adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan

mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga adanya hambatan dalam distribusi barang. Penurunan Inflasi Tingkat Produsen merupakan salah satu indikasi bahwa perekonomian dapat terkendali dalam kondisi yang stabil. Perkembangan laju Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren yang positif yaitu mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Rata-rata laju Inflasi Tingkat Produsen Tahun 2018 - 2022 adalah sebesar 2,732%. Perkembangan inflasi tingkat produsen/laju indek implisit di Kabupaten Bondowoso selama Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Rata-rata Laju Indek Implisit Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondowoso | 2,77 | 1,95 | 1,80 | 2,04 | 5,10 | 2,732 |
| 2 | Jawa Timur | 3,12 | 1,57 | 0,42 | 3,04 | | |
| 3 | Nasional | 3,82 | 1,60 | 0,46 | 1,87 | | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas, laju indek implisit bondowoso tahun 2020 turun menjadi 1,80%, kondisi ini disebabkan tidak ada kenaikan permintaan konsumen saat pandemi covid-19 karena tingkat konsumsi masyarakat bondowoso menurun. sehingga fluktuasi harga komoditas di pasar tidak terjadi secara siginifikan. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,10 seiring dengan pemulihan ekonomi.

Secara Nasional, jumlah kasus covid-19 harian yang meningkat memberikan tekanan yang signifikan terhadap inflasi. Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai sebesar 0,46% turun dari target yang diperkirakan (2% - 4%). Tingkat konsumsi dan daya beli Sebagian besar masyarakat secara umum mengalami penurunan selama pandemi covid-19. Tahun 2021 inflasi nasional mencapai 1,87.

### 3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan untuk mengetahui pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso meningkat selama kurun waktu 2018-2022 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita penduduk pada tahun 2018 yaitu Rp.23.948.000,- meningkat menjadi Rp.29.310.000,- pada tahun 2022. PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.22 PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| Tahun | PDRB Perkapita (Rp.) ADHB | PDRB Perkapita (Rp.) ADHK | Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 23.948.000 | 16.770.000 | 4,62 |
| 2019 | 25.595.000 | 17.581.000 | 4,83 |

| Tahun | PDRB Perkapita (Rp.) ADHB | PDRB Perkapita (Rp.) ADHK | Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25.598.000 | 17.272.000 | -1,75 |
| 2021 | 27.041.170 | 20.305.031 | 17,56 |
| 2022 | 29.310.000 | 18.440.000 | -9,18 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

PDRB perkapita ADHB penduduk Kabupaten Bondowoso terus meningkat selama kurun waktu tahun 2018-2022, yang menunjukkan terdapat tren peningkatan pendapatan masyarakat yang dipengaruhi faktor harga. Sedangkan PDRB perkapita ADHK penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, menunjukkan terdapat penurunan kuantum produksi secara sektoral. Hal ini tidak hanya akibat faktor ekonomi Kabupaten Bondowoso saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi regional maupun nasional. Kondisi perekonomian nasional dan regional yang mengalami kontraksi mempengaruhi tingkat produksi dan distribusi komoditi yang dihitung secara sektoral di dalam PDRB. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap tingkat produksi/produktifitas pelaku usaha yang mengalami penurunan akibat pandemi covid-19, sehingga tingkat PDRB per kapita menurun dibanding tahun sebelumnya.

### 4. Disparitas Pendapatan

Indek Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk tingkat pendapatan atau kekayaan penduduk yang menunjukkan tingkat ketimpangan/pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pada tahun 2020 Indek Gini mencapai angka 0,32 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang.

Tabel. 2.23 Gini Rasio Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Indeks Gini (Kondisi Maret) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 0,350 | 0,300 | 0,329 | 0,334 | 0,365 |
| 2 | Jawa Timur | 0,379 | 0,370 | 0,366 | 0,374 | 0,371 |
| 3 | Nasional | 0,389 | 0,380 | 0,381 | 0,381 | 0.381 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018-2022 (bps.go.id)

Secara nasional, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio) sepanjang tahun 2019-2022 mengalami kenaikan sebesar 0,036 menjadi 0,365 dari angka 0,300 pada tahun 2019. Selama tahun 2020-2022, terjadinya pandemi covid-19 di seluruh dunia menyebabkan tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan khususnya pada lapisan bawah sehingga tingkat pengeluaran semakin menurun.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 65,27 | 66,09 | 66,43 | 66,59 | 67,31 |
| 2 | Jawa Timur | 70,77 | 71,50 | 71,71 | 72,14 | 72,75 |
| 3 | Nasional | 71,39 | 71,92 | 71,94 | 72,29 | 72,91 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 65,27 pada tahun 2018, meningkat mencapai 67,31 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup.

Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya tingkat pengeluaran per kapita masyarakat, sebagai salah satu indikator pengukuran IPM. Hal ini tentu berpengaruh terhadap skor IPM tahun 2020. Tingkat pendapatan dan konsumsi sebagian besar masyarakat yang menurun menyebabkan tingkat pengeluaran per kapita pertahun menurun dari Rp.11,3 juta pada tahun 2019 turun menjadi Rp.11,01 juta pada tahun 2020. IPM Indonesia sebesar 71,94 poin di tahun 2020 meningkat 0,03% (tumbuh 0,02 poin) dari tahun 2019. IPM pada tahun 2020 tetap mengalami peningkatan dengan adanya penguatan indikator lainnya, yakni umur harapan hidup saat lahir, serta harapan dan rata-rata lama sekolah. IPM Kabupaten Bondowoso meningkat di tahun 2021 mencapai 66,59 dan tahun 2022 menjadi 67,31.

## 2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 sebesar 83,46% atau sebanyak 18,41% penduduk usia diatas 15 tahun yang buta huruf. Pada tahun 2020 angka melek huruf penduduk Kabupaten Bondowoso mencapai 82,05%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 17,95% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum dapat membaca dan menulis. Hasil analisis angka melek huruf, disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % Angka Melek Huruf | 83,46*% | 82,18% | 80,26% | 82,05% | 82,05% |
| 2 | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | 596.312 | 610.119 | 625.493*** | 632.108 | 656.783 |

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas | 654.706 | 660.700 | 678.206*** | 671.784 | 712.313 |

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2021 , *StatkesraJawa Timur, 2017-2021
***Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso

Jika dibandingkan dengan angka melek huruf rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka angka melek huruf di Kabupaten Bondowoso tergolong lebih rendah mengingat struktur usia penduduk di Kabupaten Bondowoso, angka buta huruf banyak terdapat pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Perbandingan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26 Perbandingan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 (%)

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 82,18 | 80,26 | 82,05 | 82,05 | 82,05 |
| 2 | Jawa Timur | 92,56 | 92,32 | 92,50 | 99,50 | 99,95 |
| 3 | Nasional | 98,07 | 98,22 | 98,29 | 98,29 | 99,95 |

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2021 , StatkesraJawa Timur, 2017-2022
bps.go.id, 2022

### 3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 sebesar 5,55 tahun meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 6,22 tahun. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang menamatkan sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur sebesar 7,78 tahun, sedangkan Nasional mencapai 8,48 tahun. Kabupaten Bondowoso termasuk kabupaten yang mempunyai tingkat pendidikan rendah yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

Pada tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso mencapai 13,31 tahun, Provinsi Jawa Timur mencapai 13,37 tahun. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27 Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | **Kabupaten Bondowoso** | | | | | |
| 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,95 | 13,27 | 13,28 | 13,29 | 13,31 |
| 2 | Angka Rata Lama Sekolah (RLS > +25 th) | 5,55 | 5,62 | 5,71 | 5,94 | 6,22 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | **Jawa Timur** | | | | | |
| 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | 13,09 | 13,10 | 13,16 | 13,19 | 13,37 |
| 2 | Angka Rata Lama Sekolah (RLS > +25 th) | 7,34 | 7,39 | 7,59 | 7,78 | 8,03 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

## 4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 66,27 tahun meningkat menjadi 67,29 tahun pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 1,01 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kabupaten Bondowoso yang lahir pada tahun 2022 bertambah 1,01 tahun dibanding dengan penduduk yang lahir pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, AHH Kabupaten Bondowoso masih berada di bawah AHH Provinsi yang pada tahun 2022 telah mencapai sebesar 71,74 tahun. Angka Harapan Hidup tahun 2018-2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28 Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| NO | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 66,27 | 66,55 | 66,74 | 66,89 | 67,29 |
| 2 | Jawa Timur | 70,97 | 71,18 | 71,30 | 71,38 | 71,74 |
| 3 | Nasional | 71,20 | 71,34 | 71,47 | 71,60 | - |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Bondowoso untuk berpola hidup sehat semakin membaik, ditunjang dengan pelayanan kesehatan yang relatif lebih baik sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Bondowoso semakin membaik.

## 5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 13,33% yang merupakan capaian kinerja sangat baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2.29 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tingkat kemiskinan (%) | 14,39 | 13,33 | 14,17 | 14,73 | 13,47 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 110.980 | 103.330 | 110.240 | 115.180 | 105.690 |
| 3 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 2,12 | 1,67 | 2,16 | 2,19 | 1,62 |
| 4 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,51 | 0,33 | 0,50 | 0,49 | 0,33 |
| 5 | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 363.443 | 380.350 | 408.352 | 423.150 | 449.760 |

Sumber:* Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Pada tahun 2018, angka kemiskinan di Bondowoso mengalami peningkatan yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai imbas dari kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 disebabkan kondisi terjadinya pandemi Covid-19. Tahun 2022 kemiskinan menurun menjadi 13,47%.

Pada tahun 2018-2019, beberapa program pembangunan yang berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan serta dukungan inovasi daerah dalam mengatasi kemiskinan lebih tepat sasaran sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2019 menjadi 13,33%.

Pada tahun 2020, program-program pengentasan kemiskinan lebih ditingkatkan dengan menambah cakupan penanganan kemiskinan sebagai bagian pemulihan ekonomi dari dampak covid-19, namun program-program ini belum mampu menahan peningkatan laju kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 diantaranya meningkatnya pengangguran terbuka, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, dan semakin lesunya perekonomian Kabupaten Bondowoso yang ditandai dengan beberapa sektor usaha khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa perjalanan/pariwisata tutup.

Selama kurun waktu 2020, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso bertambah sebanyak 6,91 ribu jiwa. Bila dibandingkan tahun ke tahun, kondisi pada bulan Maret 2019 penduduk miskin berjumlah 103,33 ribu jiwa, meningkat menjadi 110,24 ribu jiwa pada bulan Maret 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 0,84%. Tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi sebesar 14,17%, naik pada tahun 2021 menjadi 14,73 dan tahun 2022 menurun menjadi 13,47% seiring dengan mulai membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Indek kedalaman kemiskinan (P1) selama kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun yang menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil atau bertambah baik. Pada tahun 2020 seiring dengan kondisi pandemic covid mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 2,16 yang menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dan menurun tahun 2022 menjadi 1,62.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami penurunan yang menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2020, P2 di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan menjadi 0,50 menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di antara penduduk miskin (yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso), semakin bervariasi. Pada tahun 2022 P2 menurun menjadi 0,33.

Tabel 2.30 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Persentase Penduduk Miskin (Kondisi Per Maret) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 14,39 | 13,33 | 14,17 | 14,73 | 13,47 |
| 2 | Jawa Timur | 10,98 | 10,37 | 11,09 | 10,59 | 10,38 |
| 3 | Nasional | 9,82 | 9,41 | 9,78 | 9.71 | 9,54 |

Sumber:* Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Bulan Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang menjadikan aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan memengaruhi pendapatan penduduk khususnya pada penduduk berpendapatan rendah.

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022, berdasarkan data Satkernas, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 440 jiwa dari jumlah angkatan kerja tahun 2021 menjadi 467.928 jiwa dengan rincian sebanyak 454.395 jiwa telah mendapat lapangan pekerjaan dan sebanyak 20.533 jiwa belum mendapatkan kesempatan bekerja atau pengangguran. Adapun perkembangan ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.31 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia Kerja (Jiwa) | 610.972 | 615.757 | 628.608 | 632.700 | 636.593 |
| 2 | Angkatan Kerja (Jiwa) | 436.530 | 466.822 | 472.018 | 467.488 | 467.928 |
| 3 | Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) | 174.442 | 148.935 | 156.590 | 165.212 | 161.665 |
| 4 | Bekerja (Jiwa) | 419.497 | 453.025 | 452.545 | 446.653 | 454.395 |
| 5 | Pengangguran Terbuka (Jiwa) | 17.033 | 13.797 | 19.473 | 20.835 | 20.533 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,90 | 2,96 | 4,13 | 4,46 | 4,32 |
| 7 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 68,66 | 73,57 | 71,99 | 73,89 | 74,61 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023
*DPMPTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2017 (Data BPS tidak tersedia)

Terjadinya pandemi covid-19, diperkirakan menyebabkan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 menurun sebanyak 302 jiwa atau menurun dibandingkan jumlah pengangguran terbuka tahun 2021. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 3,90 | 2,96 | 4,13 | 4,46 | 4,32 |
| 2 | Jawa Timur | 3,91 | 3,82 | 5,84 | 5,74 | 5,49 |
| 3 | Nasional | 5,30 | 5,23 | 7,07 | 6,49 | 5,86 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023 (bps.go.id)

Perekonomian nasional dan regional yang terpuruk akibat pandemi covid-19 diharapkan segera membaik, sehingga menunjang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang usaha terbuka yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja sangat diperlukan mengingat jumlah pengangguran terbuka masih tinggi. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sebesar 95,87% turun dari tahun 2017 sebesar 97,91%. Penurunan TKK menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan yang disebabkan tingkat persaingan kerja yang semakin ketat. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33 Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Kesempatan Kerja (%) | 97,91 | 96,1 | 97,04 | 95,87 | 95,87 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pola pergeseran jenis lapangan pekerjaan penduduk juga terjadi di Kabupaten Bondowoso seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor sekunder dan tersier, akan tetapi sektor primer khususnya lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor yang dominan. Jumlah pekerja sektor formal semakin menyusut, paling banyak di sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian, sektor yang memiliki upah terendah dalam struktur pengupahan, sehingga tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota, dibandingkan di desa.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dilakukan setiap tahun berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMK ditetapkan melalui diskusi Tripartit antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, asosiasi pengusaha, dan asosiasi pekerja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK. Faktor-faktor tersebut merupakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Bondowoso. KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu tahun. Hal-hal yang termasuk komponen KHL terdiri atas kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Penentuan

komponen UMK dan KHL ini ditinjau dan ditetapkan setiap tahun dengan memperhitungkan laju inflasi Nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional. Setiap perusahaan memiliki regulasi tersendiri dalam menetapkan perhitungan gaji karyawannya. Akan tetapi, perhitungan tersebut tetap berpedoman pada penetapan UMK oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Perbandingan UMK dan KHL Kabupaten Bondowoso disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34 Penetapan UMK dan KHL Kabupaten Bondowoso
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UMK** | 1.667.505,41 | 1.801.406,09 | 1.954.705,75 | 1.954.705,75 | 1.954.705,75 |
| **KHL** | 1.531.631,00 | 1.626.397,00 | 1.764.803,00 | 1.764.803,00 | 1.764.803,00 |

Sumber : DPMPTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2021

Selama tahun 2017-2021, UMK Kabupaten Bondowoso meningkat sebesar 17,22% sedangkan KHL meningkat sebesar 15,22%, sedangkan UMK yang berlaku untuk tahun 2021 tetap seperti tahun 2020 mengingat kondisi pandemi Covid-19.

## 6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan. Indikator capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.35 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indek Reformasi Birokrasi | 63,35 | 64,74 | 65,00 | 66,35 | 65,01 |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi ditunjang oleh capaian penunjang Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2022, sebagai berikut:

Tabel 2.36 Capaian Penunjang Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2021-2022

| No | Uraian | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 73,03 | 74,20 |
| 2 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,2260 | 3,2260 |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bondowoso memiliki kewajiban

melakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap peningkatan kinerja. Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur di Kabupaten Bondowoso menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 83,96% meningkat menjadi 81,12% pada tahun 2022.

Tabel 2.37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bondowoso

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 83,96 | 81,53 | 79,00 | 81,78 | 81,12 |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari kurun waktu tahun 2016-2020 mendapatkan penilaian dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## 7. Indek Desa Membangun (IDM)

Indek Desa Membangun merupakan ukuran kemandirian atau kemajuan suatu desa yang di dalamnya merupakan akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. IDM mengklasifikasi desa menjadi 5 (Lima) status yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Penilaian IDM dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. IDM Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38 IDM Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Status Desa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Tertinggal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tertinggal | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Berkembang | - | 160 | 144 | 129 | 101 |
| 4 | Maju | - | 47 | 64 | 74 | 91 |
| 5 | Mandiri | - | 0 | 1 | 6 | 17 |
| | Nilai Rata-Rata IDM | - | 0,6748 | 0,6963 | 0,7081 | 0,7251 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2023

Pada Tahun 2019 terdapat 2 Desa dengan status Tertinggal dari 209 desa dan tidak ada desa dengan status Mandiri, sampai dengan tahun 2022 sudah tidak ada desa dengan status tertinggal dan terdapat 17 desa mandiri. Sedangkan Desa Maju bertambah menjadi 91 dari Desa Berkembang yang naik status. Untuk nilai rata-rata

IDM selama tahun 2019-2022 meningkat sebanyak 0,05 point dari 0,6748 menjadi 0,7251.

## 8. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atas kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pada tahun 2018, Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bondowoso sebesar 66,00 dan pada tahun 2022 sebesar 68,95.

Tabel 2.39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kabupaten Bondowoso | 66,00 | 64,63 | 71,06 | 66,39 | 68,95 |
| 2. | Jawa Timur | 66,36 | 67,10 | 67,70 | 68,49 | 69,92 |
| 3. | Nasional | 71,67 | 66,52 | 70,27 | 71,45 | 72,42 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, DLH Provinsi Jatim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bondowoso secara umum selama lima tahun terakhir nilainya fluktuatif, dimana pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks yang tinggi disebabkan karena ada perubahan formula dalam perhitungan IKLH sesuai ketentuan. Sedangkan IKLH pada tahun 2022 naik menjadi 68,95 atau dibawah IKLH Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

## 9. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pembangunan gender semakin seimbang atau lebih merata. Pada tahun 2018, angka IPG tercatat sebesar 88,89%, 90,42% pada tahun 2019, dan meningkat kembali pada tahun 2020 yang mencapai 90,68% dan tahun 2022 mencapai 91,10. Indeks pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 – 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Bondowoso | 89,89 | 90,42 | 90,68 | 90,75 | 91,10 |
| 2 | Jawa Timur | 90,77 | 90,91 | 91,07 | 91,67 | 92,08 |
| 3 | Nasional | 90,99 | 91,07 | 91,06 | 91,27 | 91,63 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023 (bps.go.id)

## 10. Gizi Buruk Dan Stunting

Pembangunan pangan dan gizi masyarakat memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain

aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan. Ada 5 pilar RAD-PG yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan kelembagaan pangan dan gizi. Pencapaian target dalam RAD-PG menjadi prioritas pembangunan pangan dan gizi masyarakat, sehingga diperlukan integrasi prioritas lokasi yang juga menjadi prioritas lokasi pengentasan kemiskinan dan prioritas lokasi stunting, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2019 – 2023 di Kabupaten Bondowoso.

Yang menjadi perhatian penting pada Ibu Hamil dan Balita adalah status gizi. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2017-2021 tergolong rendah sesuai klasifikasi status gizi yang ditetapkan WHO yaitu dibawah 10%. Pada tahun 2017 mencapai sebanyak 1,04% dari total jumlah balita yang ada, pada tahun 2019 menurun menjadi 1,33%. Peningkatan balita gizi buruk terjadi selama pandemi Covid-19 tahun 2020 mencapai sebanyak 1,69% dan menurun tahun 2022 menjadi 1,26%. Persentase balita gizi buruk sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.41 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balita Dengan Gizi Buruk (%) | 1,04 | 1,13 | 1,33 | 1,69 | 1,26 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh pola asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Tingkat stunting di Kabupaten termasuk tinggi dan perlu mendapat prioritas penanganan.

Jumlah anak baduta stunting hingga tahun 2018 sebanyak 8.213 jiwa (19,13%) menurun menjadi sebanyak 5.155 jiwa (12,23%) tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi 3.924 jiwa (9,33%). Jumlah dan Persentase Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Anak Baduta Tahun 2018 – 2021 Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42 Kondisi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) Anak Baduta Tahun 2017-2021 Kabupaten Bondowoso

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Baduta mengalami Stunting | - | 8.213 | 6.590 | 5.155 | 3.924 |
| 2 | Persentase Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Anak Baduta (%) | - | 19,13 | 14,59 | 12,23 | 9,33 |

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Mengingat angka stunting yang masih tinggi dan Kabupaten Bondowoso termasuk daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan Stunting di Provinsi Jawa Timur maka permasalahan perbaikan gizi masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Disamping kenyataan bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan melalui percepatan pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh terhadap masyarakat, maka percepatan pencapaian *Herd Immunity* juga perlu dilakukan melalui perbaikan gizi masyarakat.

### 2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Meningkatnya peran pemuda, olahraga, seni dan budaya menjadi sasaran pembangunan Kepemudaan, Olahraga dan kebudayaan dengan kebijakan meningkatkan prestasi olah raga dan melestarikan serta mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya. Adapun perkembangan seni budaya dan olahraga selama periode tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.43 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | % klub olahraga yang dibina (%) | 66,67 | - | 42,61 | 42,61 | 100 |
| 2 | % atlet yang mengikuti kompetisi olahraga | NA | NA | 20 | 50 | 67 |
| 3 | % cabor yang mengikuti kompetisi olahraga | NA | NA | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Rasio ∑ group kesenian per 10.000 penduduk (%) | 0,0778 | 1,0112 | 39.74 | 39.74 | 0.70 |
| 5 | Kekayaan budaya yg dilestarikan | 1.175 | 1.209 | 1.209 | 1.219 | 1.423 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2022
Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

Kabupaten Bondowoso memiliki sejarah yang sangat panjang dimulai dari zaman megalitikum yang ditandai dengan adanya peninggalan benda-benda purbakala seperti Dolmen, Punden Berundak, Menhir, Sarkopagus, Kubur Batu, Batu Kenong, Pelinggih, *Stunchambers* (batu ruang), Goa Buto, Ekopak, Abris Saus Roche, Arca Batu yang terdapat di Kecamatan Wringin, Grujugan, Pujer, Maesan, Tegalampel, Bondowoso, Wonosari, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Prajekan, Pujer, Tlogosari, Cermee, dan Ijen. Hingga tahun 2021 total terdapat 30 situs yang terdiri dari 1.423 benda. Pelestarian terhadap benda cagar budaya tersebut menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar perjalanan panjang sejarah ini dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat sebagai warisan dan maha karya budaya yang pernah ada di kabupaten Bondowoso. Selain itu kebudayaan daerah merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui wisata budaya. Masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagian besar terdiri dari empat suku/etnis yaitu Jawa, Madura, Arab dan Tionghoa sehingga memiliki karakteristik yang beragam.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

#### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pencapaian indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.44 Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | PAUD 3-6 tahun (%) | 90,94 | 91,16 | 91,91 | 91,20 | - |
| 2 | Jumlah siswa PAUD (jiwa) | 37.839 | 37.328 | 37.784 | 37.870 | - |
| 3 | Jumlah Penduduk kelompok Usia 3-6 (jiwa) | 41.610 | 40.947 | 41.109 | 41.520 | - |
| 4 | PAUD 5-6 tahun (%) | | | | | 96,65 |
| 5 | Jumlah siswa PAUD (jiwa) | | | | | 19.936 |
| 6 | Jumlah Penduduk kelompok Usia 5-6 (jiwa) | | | | | 20.626 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2023

#### 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut. Pencapaian indikator pendidikan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Tahun 2018-2022 (%)

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Angka Partisipasi Kasar:** | | | | | |
| | **PAUD 3-6 tahun** | 90,94 | 91,16 | 91,91 | 91,20 | - |
| | -Jumlah siswa PAUD (jiwa) | 37.839 | 37.328 | 37.784 | 37.870 | - |
| | -Jumlah Penduduk kelompok Usia 3-6 (jiwa) | 41.610 | 40.947 | 41.109 | 41.520 | - |

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PAUD 5-6 tahun** | | | | | 96,65 |
| | -Jumlah siswa PAUD (jiwa) | | | | | 19.936 |
| | -Jumlah Penduduk kelompok Usia 5-6 (jiwa) | | | | | 20.626 |
| | **SD/MI/Paket A** | 106,66 | 103,61 | 103,21 | 102,51 | 100,24 |
| | - Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 th (jiwa) | 66.529 | 66.163 | 65.978 | 65.579 | 65.028 |
| | **SMP/MTs/Paket B** | 105,61 | 103,84 | 100,41 | 100,42 | 100,38 |
| | - Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 th (jiwa) | 35.755 | 33.880 | 33.318 | 33.471 | 33.094 |
| | **SMA/SMK/MA/Paket C** | 56,70 | 65,57 | 66,81 | - | - |
| | - Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-18 th (jiwa) | 53.424 | 54.794 | 57.889 | - | - |
| **2.** | **Angka Partisipasi Murni:** | | | | | |
| | **SD/MI/Paket A** | 99,87 | 99,89 | 99,10 | 99,92 | 99,91 |
| | -APM Laki-Laki SD/MI/Paket A | - | 105,87 | 104,5 | 115,41 | 104,32 |
| | -APM Perempuan SD/MI/ Paket A | - | 93,62 | 93,31 | 86,65 | 95,86 |
| | -Jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Paket A Usia 7-12 Thn | 66.443 | 66.091 | 65.385 | 65.527 | 64.968 |
| | **SMP/MTs/Paket B** | 93,95 | 94,09 | 94,12 | 94,20 | 94,50 |
| | -APM Laki-Laki SMP/MTs/ Paket B | | 97,25 | 94,36 | 107,93 | 105,37 |
| | -APM Perempuan SMP/MTs/ Paket B | | 90,75 | 93,93 | 92,65 | 94,90 |
| | - Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/Paket B Usia 13-15 Tahun | 33.592 | 31.876 | 31.231 | 31,529 | 31.274 |
| | **SMA/SMK/MA/Paket C** | 47,14 | 48,94 | 48,54 | - | - |
| | - Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA | 31.057 | 26.053 | 27.889 | - | - |

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2018-2023

APK SD/MI/Paket A dan APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kondisi ini merupakan gambaran perkembangan pendidikan dasar, karena sebagian besar siswa adalah kelompok umur yang sesuai berdasarkan jenjang pendidikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Bondowoso sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan dari 105,61% pada tahun 2018, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 103,84%, menjadi 100,41% pada tahun 2020, 100,42% tahun 2021 dan menjadi 100,38 tahun 2022. Sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 mencapai 93,95% meningkat menjadi 94,12% pada tahun 2020, dan tahun 2021 sebesar 94,20%, sedangkan tahun 2022 sebesar 94,50% yang mengindikasikan semakin banyak jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tingkat SMP.

Beberapa faktor yang mempengaruhi APK dan APM pada SMA/SMK/MA/Paket C diantaranya adalah pemahaman yang mulai tumbuh terhadap pentingnya pendidikan menengah khususnya SMA/SMK/MA/Paket C, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Sehingga kecenderungan memilih bekerja setelah tamat SMP menjadi berkurang.

Pencapaian APM Kabupaten Bondowoso secara rata- rata masih lebih baik dari pencapaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Pencapaian APM provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 untuk APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 97,99%, APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 83,53%, dan APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C sebesar 62,24%. Pencapaian rata – rata APK Kabupaten Bondowoso juga lebih tinggi dari pada APK Provinsi Jawa Timur pada setiap jenjang usia pendidikan kecuali jenjang SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C yang berimplikasi bahwa prosentase siswa belajar (diluar dan dalam jenjang usia sekolah) di Kabupaten Bondowoso lebih besar daripada provinsi Jawa Timur. Adapun APK Provinsi Jawa Timur untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 104,35%, SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 96,4% dan SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C sebesar 85,24%.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2022. Penduduk kelompok usia 7-12 tahun secara keseluruhan (100%) masih bersekolah.

Tabel 2.47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No | Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SD/MI** | | | | | |
| 1.1. | Jumlah murid usia 7-12 thn | 66.443 | 66.091 | 65.385 | 68.185 | 66.142 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 66.529 | 66.163 | 65.978 | 65.579 | 65.028 |
| 1.3. | APS SD/MI (%) | 99,58 | 99,72 | 102,19 | 103,97 | 101,71 |
| **2** | **SMP/MTs** | | | | | |
| 2.1. | Jumlah murid usia 13-15 thn | 33.592 | 31.876 | 31.936 | 32.349 | 31.762 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 35.755 | 33.880 | 33.181 | 33.741 | 33.094 |
| 2.3. | APS SMP/MTs (%) | 96,49 | 97,64 | 96,25 | 96,65 | 95,98 |

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2023

### 4. Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.48 Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022
Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | SD/MI | 0,07 | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
| 2. | SMP/MTs | 0,22 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

## 5. Angka Kelulusan

Perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.49 Angka Kelulusan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | SMP/MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

## 6. Angka Transisi

Peningkatan Angka Transisi merupakan wujud meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, angka transisi SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai 91,65% meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 90,31%.

Tabel 2.50 Angka Transisi Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | SD/MI ke SMP/MTs | 98,38 | 92,61 | 93,58 | 93,81 | 94,56 |
| 2. | SMP/MTs ke SMA/MA/SMK | 90,31 | 90,45 | 90,89 | 91,08 | 91,65 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

## 7. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Perkembangan ketersediaan sekolah (gedung) pada jenjang pendidikan SD/MI rasionya stabil mendekati rasio ideal, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs rasionya belum mencapai ideal.

Tabel 2.51 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018–2022

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **SD/MI** | | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah | 628 | 626 | 626 | 626 | 576 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 66.163 | 65.978 | 65.978 | 65.579 | 65.028 |
| 1.3. | Rasio | 1:106 | 1 : 105 | 1 : 105 | 1 : 105 | 1 : 113 |
| **2** | **SMP/MTs** | | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 237 | 237 | 237 | 237 | 239 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 33.880 | 33.181 | 33.181 | 33.613 | 33.094 |
| 2.3. | Rasio | 1:143 | 1 : 140 | 1 : 140 | 1 : 142 | 1 :138 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

Jumlah gendung sekolah dasar mengalami penurunan sebanyak 50 lembaga di karenakan adanya regrouping Lembaga berdasarkan :

1. surat keputusan Bupati Nomor : 188.45/426/430.4.2/2021 tentang Perubahan unit pelaksana teknis daerah satuan Pendidikan formal Pendidikan dasar di lingkungan pemerintah saerah kabupaten bondowoso tahun 2021 Tanggal 20 Mei 2021
2. surat keputusan Bupati Nomor : 188.45/979/430.4.2/2021 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/426/430.4.2/2021 tentang Perubahan unit pelaksana teknis daerah satuan Pendidikan formal Pendidikan dasar di lingkungan pemerintah saerah kabupaten bondowoso tahun 2021 Tanggal 31 Agustus 2021.

Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.52 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2022

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σ gedung sekolah | Σ penduduk usia 7-12 th | Rasio | Σ gedung sekolah | Σ penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| 1 | Maesan | 28 | 4259 | 1:152 | 12 | 2203 | 1:184 |
| 2 | Grujugan | 28 | 3294 | 1:118 | 12 | 1677 | 1:140 |
| 3 | Tamanan | 24 | 3420 | 1:143 | 12 | 1789 | 1:149 |
| 4 | Jambesari Ds | 28 | 3244 | 1:116 | 20 | 1663 | 1:83 |
| 5 | Pujer | 26 | 3285 | 1:126 | 13 | 1602 | 1:123 |
| 6 | Tlogosari | 40 | 3866 | 1:97 | 17 | 1794 | 1:106 |
| 7 | Sukosari | 17 | 1186 | 1:70 | 8 | 576 | 1:72 |
| 8 | Sumberwringin | 23 | 2864 | 1:125 | 10 | 1439 | 1:144 |
| 9 | Tapen | 22 | 2589 | 1:118 | 7 | 1360 | 1:194 |

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σ gedung sekolah | Σ penduduk usia 7-12 th | Rasio | Σ gedung sekolah | Σ penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| 10 | Wonosari | 28 | 3168 | 1:113 | 13 | 1538 | 1:118 |
| 11 | Tenggarang | 27 | 3765 | 1:139 | 14 | 1842 | 1:132 |
| 12 | Bondowoso | 42 | 6998 | 1:167 | 20 | 3697 | 1:185 |
| 13 | Curahdami | 21 | 2966 | 1:141 | 14 | 1447 | 1:103 |
| 14 | Binakal | 13 | 1328 | 1:102 | 2 | 695 | 1:348 |
| 15 | Pakem | 17 | 1791 | 1:105 | 5 | 964 | 1:193 |
| 16 | Wringin | 31 | 3120 | 1:101 | 14 | 1636 | 1:117 |
| 17 | Tegalampel | 17 | 2161 | 1:127 | 5 | 1107 | 1:221 |
| 18 | Taman Krocok | 14 | 1258 | 1:90 | 3 | 600 | 1:200 |
| 19 | Klabang | 18 | 1362 | 1:76 | 3 | 721 | 1:240 |
| 20 | Botolinggo | 34 | 2456 | 1:72 | 12 | 1283 | 1:107 |
| 21 | Ijen | 10 | 1017 | 1: 102 | 2 | 498 | 1:249 |
| 22 | Prajekan | 23 | 2015 | 1:88 | 6 | 1003 | 1:167 |
| 23 | Cermee | 45 | 3616 | 1:80 | 15 | 1960 | 1:131 |
| **Jumlah** | | **576** | **65.028** | **1:113** | **239** | **33.094** | **1:138** |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2022

## 8. Rasio Guru/Murid

Perkembangan rasio guru dan murid pada tingkat pendidikan dasar tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.53 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **SD/MI** | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 6.587 | 6.720 | 6.645 | 6.557 | 6.170 |
| 1.2. | Jumlah Guru berijasah D4/S1 | 5.761 | 5.952 | 5.982 | 5.046 | 5.861 |
| 1.3. | Jumlah Murid | 67.616 | 68.554 | 65.978 | 65.579 | 66.338 |
| 1.4. | Rasio | 1 : 11 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1 : 11 |
| **2** | **SMP/MTs** | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 3.407 | 3.316 | 4.370 | 3.149 | 3.112 |
| 2.2. | JumlahGuru berijasah D4/S1 | 3.159 | 3.084 | 4.075 | 2.602 | 2.861 |
| 2.3. | Jumlah Murid | 33.700 | 32.419 | 35.181 | 33.613 | 33.503 |
| 2.4. | Rasio | 1 : 10 | 1:10 | 1:8 | 1:11 | 1 : 11 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso, 2022

Perkembangan rasio guru dan murid menurut kecamatan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.54 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2022

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Σ Guru | Σ Murid | Rasio | Σ Guru | Σ Murid | Rasio |
| 1 | Maesan | 289 | 4941 | 1:17 | 141 | 1750 | 1:12 |
| 2 | Grujugan | 280 | 3891 | 1:14 | 142 | 1622 | 1:11 |
| 3 | Tamanan | 279 | 3224 | 1:12 | 159 | 1712 | 1:11 |
| 4 | Jambesari Ds | 289 | 3229 | 1:11 | 161 | 1650 | 1:10 |
| 5 | Pujer | 297 | 1695 | 1:6 | 146 | 1421 | 1:10 |
| 6 | Tlogosari | 363 | 3729 | 1:10 | 153 | 1671 | 1:11 |
| 7 | Sukosari | 230 | 1161 | 1:5 | 137 | 548 | 1:4 |
| 8 | Sumberwringin | 222 | 1216 | 1:5 | 85 | 1429 | 1:17 |
| 9 | Tapen | 279 | 2414 | 1:9 | 109 | 1321 | 1:12 |
| 10 | Wonosari | 264 | 3507 | 1:13 | 143 | 1522 | 1:11 |
| 11 | Tenggarang | 278 | 3210 | 1:12 | 90 | 1870 | 1:21 |
| 12 | Bondowoso | 596 | 9266 | 1:16 | 474 | 5984 | 1:13 |
| 13 | Curahdami | 258 | 2622 | 1:10 | 152 | 1254 | 1:8 |
| 14 | Binakal | 198 | 1269 | 1:6 | 75 | 575 | 1:8 |
| 15 | Pakem | 166 | 1530 | 1:9 | 85 | 822 | 1:10 |
| 16 | Wringin | 277 | 2891 | 1:10 | 108 | 1586 | 1:15 |
| 17 | Tegalampel | 257 | 2038 | 1:8 | 161 | 981 | 1:6 |
| 18 | Taman Krocok | 145 | 1177 | 1:8 | 41 | 512 | 1:12 |
| 19 | Klabang | 215 | 1306 | 1:6 | 30 | 671 | 1:22 |
| 20 | Botolinggo | 213 | 2543 | 1:12 | 44 | 1117 | 1:25 |
| 21 | Ijen | 196 | 1066 | 1:5 | 155 | 456 | 1:3 |
| 22 | Prajekan | 282 | 2467 | 1:9 | 101 | 993 | 1:10 |
| 23 | Cermee | 297 | 3694 | 1:12 | 220 | 2036 | 1:9 |
| **Jumlah** | | **6.170** | **66.338** | **1:11** | **3.112** | **33.503** | **1 : 11** |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2022

### 9. Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP

Dalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, standar yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi lulusan adalah standar pendidik yang dimiliki oleh seorang guru. Standar pendidik adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan. Kualifikasi guru jenjang pendidikan SD dan SMP selama tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP Berpendidikan S.1 dan D.IV Tahun 2018-2022

| No | Jenjang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 87% | 89% | 89% | 91% | 93% |
| 2 | SMP | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso, 2022

Kualifikasi Guru jenjang SD dan SMP yang berpendidikan S.1/D.IV mengalami kenaikan sebesar 6% (SD) dan 2% (SMP). Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kualitas pendidik sehingga mutu pendidikan juga akan meningkat.

## 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

### 1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai sebanyak 43 kasus atau 404,55 per 100.000 KH, sedangkan pada Tahun 2022 sebanyak 17 kasus atau 164 per 100.000 KH.

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2021 mencapai 13,55 kasus per 1.000 KH menurun pada tahun 2022 menjadi 12.6 per 1.000 KH.

Perkembangan AKI dan AKB Kabupaten Bondowoso tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.56 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | AKI (Jiwa) | 14 | 19 | 19 | 43 | 17 |
| 2 | AKI per 100.000 KH | 139,75 | 177,40 | 177,40 | 404,55 | 164 |
| 3 | AKB per 1.000 KH | 16,01 | 15,47 | 15,69 | 13,55 | 12,6 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

### 2. Rasio Posyandu Per satuan Balita

Perkembangan Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.57 Rasio Posyandu (%) Tahun 2018 – 2022

| Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio posyandu per satuan balita | 2,58 | 2,65 | 2,68 | 2,20 | 2,20 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

### 3. Rasio Puskesmas, Ponkesdes, Pustu Per Satuan Penduduk

Sedangkan perkembangan rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.42

Tabel 2.58 Rasio Sarana Prasarana Kesehatan (%) Tahun 2018- 2022

| Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio puskesmas, ponkesdes, Pustu per satuan penduduk | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Persentase jumlah puskesmas dan pusling yang berfungsi dengan baik tercapai sesuai target namun masih terdapat beberapa puskesmas dan pusling yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan serta terletak di daerah yang sulit dijangkau. Realisasi rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sudah mencapai target namun masih diperlukan penambahan prasarana kesehatan di masyarakat agar dapat melayani kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

### 4. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk dan rasio tenaga medis persatuan penduduk mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.59 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2018 – 2022

| No. | Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rasio dokter per satuan penduduk | 27,58 | 6,00 | 17,00 | 26,00 | 27,90 |
| 2 | Rasio perawat per satuan penduduk | 125,34 | 131,00 | 140,00 | 143,00 | 153,90 |
| 3 | Rasio bidan per satuan penduduk | 93,88 | 79,00 | 82,00 | 87,30 | 92,80 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso,2022

Perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2018 – 2022 terdapat perkembangan pada sarana apotik dan posyandu yang secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.60 Sarana Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2022

| No. | Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Rumah Sakit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Puskesmas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Puskesmas Pembantu | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 4. | Puskesmas Keliling | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| No. | Jenis Sarana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5. | Poskesdes | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 6. | Poliklinik | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 |
| 7. | Laboratorium Medis | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Rumah Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Apotek | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 |
| 10. | Toko Obat berijin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Posyandu | 1.067 | 1.070 | 1.085 | 1.086 | 1.091 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Sedangkan perkembangan tenaga kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.61 Tenaga Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2022

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Dokter Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dokter Umum | 59 | 49 | 48 | 57 | 59 |
| 3. | Dokter Gigi | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 4. | Perawat | 572 | 606 | 573 | 601 | 640 |
| 5. | Bidan | 521 | 532 | 512 | 535 | 565 |
| 6. | Bidan Desa | 217 | 216 | 214 | 171 | 253 |
| 7. | Dukun Bermitra | 435 | 415 | 405 | 376 | 360 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Tenaga kesehatan pada Tabel diatas adalah tenaga kesehatan di Puskesmas-puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, sedangkan tenaga kesehatan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.62 Tenaga Kesehatan RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso
Tahun 2018– 2022

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Dokter Umum | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 2. | Dokter Spesialis: | | | | | |
| | - Anak | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | - Bedah | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | - Penyakit Dalam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - Kandungan | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | - Saraf | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | - Kelamin dan Kulit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - THT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Radiologi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | - Mata | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | - Jantung dan Pembuluh Darah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Bedah Onkologi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Bedah Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | - Orthopedi dan Traumatologi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Jiwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Anastesiologi | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | - Rehabilitasi Medik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Patologi Klinik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Patologi Anatomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Paru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Dokter Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dokter Gigi Spesialis | | | | | |
| | - Bedah Mulut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Konservasi/Endodonsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | -Gigi Anak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | -Periodonti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Paramedis | 155 | 428 | 454 | 332 | 357 |
| 4. | Penunjang Medis | 246 | 226 | 201 | 128 | 137 |

Sumber : Rumah Sakit dr. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2018-2022

## 5. Kinerja Kesehatan lainnya

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2018 – 2022

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) | % | 2018 | 90,00 | 83,64 | 92,90 |
| | | 2019 | 90,86 | 98,17 | 108,05 |
| | | 2020 | 91,32 | 94,06 | 103,00 |
| | | 2021 | 91,32 | 94,06 | 103,00 |
| | | 2022 | 91,32 | 97,72 | 107,01 |
| Cakupan penderita pneumonia | % | 2018 | 4,18 | 0,92 | 177,90 |
| | | 2019 | 100,00 | 84,04 | 84,04 |
| | | 2020 | 100,00 | 55,27 | 55,27 |
| | | 2021 | 100,00 | 55,70 | 55,70 |
| | | 2022 | N/A | N/A | N/A |
| Cakupan penderita TBC BTA positif | % | 2018 | 100,00 | 90,28 | 90,28 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 100,00 | 87,61 | 87,61 |
| | | 2020 | 100,00 | 50,79 | 50,79 |
| | | 2021 | 100,00 | 54,37 | 54,37 |
| | | 2022 | 100,00 | 110,52 | 110,52 |
| Cakupan penderita DBD | % | 2018 | 50,00 | 32,24 | 135,52 |
| | | 2019 | 50,00 | 49,37 | 101,26 |
| | | 2020 | 50,00 | 35,70 | 128,60 |
| | | 2021 | 50,00 | 19,55 | 100,00 |
| | | 2022 | N/A | 28,8 | 28,8 |
| Cakupan penderita Diare | % | 2018 | 100,00 | 65,01 | 65,01 |
| | | 2019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2020 | 100,00 | 42,87 | 42,87 |
| | | 2021 | 100,00 | 78,64 | 78,64 |
| | | 2022 | N/A | 62,90 | 62,90 |
| Penanganan HIV – AIDS | % | 2018 | 100,00 | 68,70 | 68,70 |
| | | 2019 | 100,00 | 82,24 | 82,24 |
| | | 2020 | 100,00 | 95,47 | 95,47 |
| | | 2021 | 100,00 | 113,65 | 113,65 |
| | | 2022 | 100,00 | 113,53 | 113,53 |
| Cakupan kunjungan bayi | % | 2018 | 97,00 | 103,88 | 107,09 |
| | | 2019 | 97,00 | 85,83 | 88,48 |
| | | 2020 | 97,00 | 91,93 | 94,77 |
| | | 2021 | 98,00 | 95,88 | 97,84 |
| | | 2022 | 94,00 | 96,21 | 102,35 |
| Cakupan kunjungan bumil K-4 | % | 2018 | 90,00 | 86,72 | 96,35 |
| | | 2019 | 91,00 | 85,65 | 94,12 |
| | | 2020 | 92,00 | 85,86 | 93,33 |
| | | 2021 | 93,00 | 87,69 | 94,29 |
| | | 2022 | 89,00 | 84,86 | 95,35 |
| Cakupan pelayanan nifas | % | 2018 | 97,00 | 99,17 | 102,23 |
| | | 2019 | 95,50 | 101,49 | 106,27 |
| | | 2020 | 96,00 | 99,12 | 103,25 |
| | | 2021 | 96,50 | 105,06 | 108,87 |
| | | 2022 | 97,00 | 103,31 | 106,51 |
| Cakupan kunjungan neonatus | % | 2018 | 96,00 | 102,81 | 107,09 |
| | | 2019 | N/A | 85,80 | 85,80 |
| | | 2020 | N/A | 91,90 | 91,90 |
| | | 2021 | N/A | 95,90 | 95,90 |
| | | 2022 | N/A | 87,10 | 87,10 |
| Cakupan pelayanan anak balita | % | 2018 | 90,00 | 88,70 | 98,55 |
| | | 2019 | 96,00 | 77,86 | 81,10 |
| | | 2020 | 97,00 | 103,05 | 106,24 |
| | | 2021 | 98,00 | 94,86 | 96,79 |
| | | 2022 | 100,00 | 99,22 | 99,22 |
| Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | % | 2018 | 96,00 | 100,00 | 104,16 |
| | | 2019 | 100,00 | 61,21 | 61,21 |
| | | 2020 | 100,00 | 95,09 | 95,09 |
| | | 2021 | 100,00 | 95,56 | 95,56 |
| | | 2022 | 100,00 | 96,88 | 96,88 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) telah mencapai target kinerja secara berturut-turut sejak tahun 2019. Hal ini disebabkan masyarakat semakin memahami pentingnya imunisasi bagi anak.

Cakupan pelayanan pada penderita Pneumonia masih belum terpenuhi disebabkan masyarakat masih enggan memeriksakan diri ke petugas Kesehatan sehingga cakupan menjadi lebih rendah. Hal tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga mobilitas penderita Pneumonia semakin terbatas untuk berobat ke fasyankes terdekat. Hal serupa juga terjadi pada cakupan penderita TBC BTA positif dan penderita diare yang menyebabkan kesulitan dalam kegiatan *tracing* dan pengobatan penderita.

Kunjungan bayi dan kunjungan bumil K4 belum mencapai target karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan Kesehatan pada bayi dan ibu hamil sebagai Tindakan preventif untuk menghindari resiko sakit dan kematian. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan mobilitas masyarakat untuk memeriksakan diri/berobat ke fasyankes semakin terbatas, bahkan pelaksanaan kegiatan Posyandu yang secara rutin dilakukan, harus dihentikan sementara untuk mencegah penularan Covid-19.

### 2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

#### 1. Bina Marga

Pembangunan infrastruktur kebinamargaan meliputi jalan dan jembatan merupakan bagian pembangunan yang mempunyai arti penting dalam rangka mendukung pembangunan dibidang lainnya seperti pembangunan menuju dan di kawasan Pariwisata, kawasan pertumbuhan ekonomi dan kawasan lainnya. Pada tahun 2022 kondisi jalan mantap di kabupaten Bondowoso mencapai 69,742 % dari total panjang jalan. Kondisi infrastuktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.64 Kondisi Jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Aspal (km) | 1.114,067 | 1.125,863 | 1.156,150 | 998,669 | 1.183,996 |
| 2 | Jalan beton (km) | - | - | - | 64,358 | 24,410 |
| 3 | Jalan makadam (km) | 71,109 | 66,536 | 39,946 | 107,990 | 81,920 |
| 4 | Jalan tanah (km) | 210,10 | 202,877 | 199,180 | 224,229 | 104,950 |
| | Σ panjang jalan (km) | 1.395,276 | 1.395,276 | 1.395,276 | 1.395,276 | 1.395,276 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

Namun demikian peningkatan panjang jalan beraspal belum mampu diimbangi dengan pemeliharaan jalan secara cukup, sehingga laju kerusakan jalan aspal cukup tinggi. Sedangkan jumlah jembatan pada tahun 2022 sebanyak 310 buah. Kondisi jalan dan jembatan sepanjang tahun 2018 – 2022 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.65 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalan Aspal (km) | 1.114,06 | 1.125,863 | 1.156,150 | 998,669 | 1.183,996 |
| - | Kondisi baik (km) | 690,63 | 781,010 | 881,120 | 982,712 | 973,096 |
| - | Kondisi rusak (km) | 423,43 | 333,050 | 275,030 | 412,564 | 422,180 |
| 2. | Jembatan (buah) | 297 | 293 | 293 | 310 | 310 |
| - | Kondisi baik (buah) | 243 | 245 | 248 | 245 | 245 |
| - | Kondisi rusak(buah) | 54 | 48 | 45 | 65 | 65 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

Kabupaten Bondowoso tidak dilintasi jalan nasional, tetapi dilintasi jalan provinsi sepanjang 68,880 Km, sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 1.395,276 Km, dengan jalan aspal 1.183,996 Km sampai tahun 2022, terdiri dari kondisi baik 973,096 km dan rusak 422,180 km yang di dukung oleh 310 buah jembatan meliputi 245 buah baik dan 65 buah dalam kondisi rusak.

## 2. Sumber Daya Air

Kondisi prasarana sumber daya air secara signifikan meningkat selama tahun 2018-2022, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bangunan bendung dan dam, tertanganinya bangunan irigasi yang rusak, serta bertambah panjangnya saluran irigasi sekunder dan tersier yang permanen dalam kondisi baik. Kondisi prasarana irigasi tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Panjang Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendung (buah) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 2. | Saluran sekunder (m) | 163.089 | 163.089 | 163.089 | 163.089 | 163.089 |
| 3. | Saluran tersier (m) | 421.463 | 421.463 | 421.463 | 421.463 | 390.553 |
| 4. | Bangunan pelengkap (unit) | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 | 4.367 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

Perkembangan sarana prasarana irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bondowoso tahun 2018– 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.67 Kondisi Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Σ kondisi bendung yang baik (buah) | 401 | 401 | 401 | 403 | 404 |
| 2. | Σ kondisi saluran sekunder yang baik (m) | 136.958 | 152.386 | 148.013 | 136.315 | 141.590 |
| 3. | Σ kondisi saluran tersier yang baik (m) | 261.310 | 290.747 | 282.403 | 296.205 | 269.205 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Σ kondisi bangunan pelengkap yang baik (unit) | 3.017 | 3.057 | 3.093 | 3.093 | 3.125 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

Berdasarkan data kondisi jaringan jalan sampai Sampai dengan tahun 2022, total panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sepanjang 441.007 m atau 75,44%.

Luas lahan baku sawah di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 tercatat 29.981 Ha, dengan prasarana irigasi yang tersedia berupa bendung, dam, waduk lapangan, serta saluran primer, sekunder dan tersier yang tersebar pada 622 Daerah Irigasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2015 yang menjadi daerah layanan irigasi di Kabupaten Bondowoso.

Kualitas sarana dan prasarana irigasi yang semakin meningkat dengan sistem pengelolaan irigasi yang semakin baik telah mampu menghasilkan sawah baru yang terlayani sistem irigasi teknis. Pada tahun 2018 baku sawah yang diairi seluas 37.059 Ha, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 29.981 Ha, yang berarti berkurang 7.078 Ha selama 5 tahun. Penurunan ini disebabkan karena validasi data luas layanan irigasi, alih komoditas dan alih fungsi lahan.

Sebagian besar masyarakat Bondowoso bermata pencaharian di bidang pertanian, kondisi jaringan irigasi yang baik merupakan kebutuhan utama dalam rangka menunjang produksi dan produktifitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Perkembangan luas baku sawah selama kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.68 Luasan Baku Sawah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018–2022

| No. | Jenis Sawah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknis | 31.110 | 31.184 | 31.174 | 25.281 | 25.258 |
| 2 | Semi Teknis | 2.503 | 2.119 | 2.102 | 2.098 | 2.127 |
| 3 | Sederhana | 3.446 | 2.622 | 2.622 | 2.596 | 2.596 |
| | Jumlah | **37.059** | **35.925** | **35.898** | **29.975** | **29.981** |

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, 2022

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2.68A Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2018 – 2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Jaringan Irigasi | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

### 3. Air Minum

Penyediaan sarana prasarana air minum perdesaan dilaksanakan melalui sistem penyediaan air minum berupa jaringan perpipaan yang mencukupi kebutuhan air minum masyarakat desa dan bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Cakupan rumah tangga yang menggunakan air minum pada tahun 2022 meningkat mencapai 80,59% dari tahun 2018 yang sebesar 62,25%.

Tabel 2.69 Perkembangan Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase rumah Tangga yang menggunakan air bersih | 62,25 | 71,05 | 73,54 | 78,16 | 80,59 |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso, 2023

Sedangkan pada kawasan perkotaan, pelayanan air bersih dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Bondowoso melalui 12 sistem jaringan meliputi 1 unit BNA Bondowoso dan 11 unit UPK (Sukosari, Maesan, Tegalampel, Tapen, Prajekan, Tlogosari, Wringin, Curahdami, Pakem, Tamanan dan Tenggarang) yang menjangkau 16 kecamatan. Perkembangan pelayanan Air Minum oleh PDAM Tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.70 Pelayanan Air Minum Perkotaan oleh PDAM Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | Sat | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kapasitas sumber air | L/dt | 157,4 | 158,3 | 158,3 | 163,0 | 171,5 |
| 2 | Produksi air | $M^3$ | 3.311.093 | 3.388.089 | 3.789.547 | 3.728.549 | 3.657.153 |
| 3 | Jumlah Pelanggan | pelanggan | 18.772 | 19.258 | 19.516 | 19.550 | 19.463 |
| 4 | Penduduk terlayani | jiwa | 119.260 | 119.562 | 120.262 | 119.960 | 119.398 |
| 5 | Prosentase pelayanan | % | 15,46 | 15,16 | 15,98 | 16.43 | 15,00 |

Sumber: PDAM, 2023

PDAM telah berupaya untuk melaksanakan distribusi air minum perkotaan melalui beberapa strategi, diantaranya pemberian diskon bagi pelanggan baru, peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penyedia Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa Ijen Water, guna menarik minat masyarakat akan kebutuhan air bersihnya.

Dalam kurun waktu 2018 sampai 2022, produksi air minum PDAM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 produksi air PDAM mencapai 3.657.153 $M^3$ meningkat sebanyak 346.060 $M^3$ dibanding tahun 2018 yang mencapai produksi sebanyak 3.311.093 $M^3$. Sedangkan jumlah pelanggan pada tahun 2022 mengalami menurun menjadi 19.463 pelanggan dari tahun 2018 yang sebanyak 18.772.

### 4. Air Limbah

Penanganan air limbah di Kabupaten Bondowoso menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sebesar 58,03% meningkat menjadi 96,03% pada tahun 2022. Namun hal ini perlu dilakukan percepatan karena masih dari sisi akses belum dari sisi

prasarana. Perkembangan cakupan rumah tangga dengan akses air limbah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Cakupan Air Limbah Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase cakupan air limbah | 58,03 | 64,45 | 75,59 | 83,44 | 96,03 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso (2018-2021)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (2023)

Perilaku masyarakat dalam membuang sampah, mandi, cuci, buang air besar dan limbah (terutama limbah industri) secara sembarangan masih tampak di wilayah Kabupaten Bondowoso, sehingga turut memberikan andil terhadap menurunnya kualitas air di Sungai Sampean. Diperlukan pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem off site dan on site,serta pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala kabupaten.

## 5. Penataan Ruang

Dengan telah dimilikinya Perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso 2011-2031, dan beberapa Peraturan Bupati tentang ketentuan-ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, serta semakin optimalnya Forum Penataan Ruang dalam menangani dan mengantisipasi permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bondowoso, sehingga kondisi lingkungan dan wilayah dapat tertata, terkelola, dan terkendali dengan baik.

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Penataan Ruang Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB* | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,36 | 13,37 |
| 2. | Persentase wilayah yang sesuai dengan RTRW | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso (2018-2021)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (2023)

Salah satu indikator kinerja penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan.

Luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bondowoso sebesar 11.984 ha yang tersebar pada 20 lokasi. Terluas adalah perkotaan Bondowoso yang mencakup 4

kecamatan, dan terkecil adalah perkotaan Tamankrocok. Dengan luasan tersebut RTH publik perkotaan seharusnya adalah 2.396,78 ha. Upaya penyediaan RTH publik perkotaan masih sekitar 13,50% sehingga masih perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.73A RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022

| No | Kawasan Perkotaan | Luas Perkotaan (Ha) | Kewajiban RTH Publik 20% | Luas RTH Publik Eksisting (Ha) | Tingkat Ketersediaan RTH Publik (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binakal | 80,76 | 16,15 | 7,78 | 9,63 |
| 2 | Bondowoso | 6720,56 | 1.344,11 | 967,46 | 14,40 |
| 3 | Botolinggo | 46,74 | 9,35 | 7,69 | 16,45 |
| 4 | Cermee | 517,08 | 103,42 | 43,61 | 8,43 |
| 5 | Grujugan | 381,32 | 76,26 | 34,95 | 9,16 |
| 6 | Jambesari Ds | 138,37 | 27,67 | 15,69 | 11,34 |
| 7 | Klabang | 350,8 | 70,16 | 52,78 | 15,05 |
| 8 | Maesan | 496,6 | 99,32 | 65,56 | 13,20 |
| 9 | Pakem | 305,06 | 61,01 | 26,13 | 8,57 |
| 10 | Prajekan | 496,0 | 99,19 | 93,03 | 18,76 |
| 11 | Pujer | 164,09 | 32,82 | 15,03 | 9,16 |
| 12 | Sumberwringin | 113,64 | 22,73 | 13,46 | 11,85 |
| 13 | Ijen | 79,52 | 15,90 | 8,28 | 10,41 |
| 14 | Sukosari | 263,73 | 52,75 | 29,02 | 11,00 |
| 15 | Tamanan | 471,61 | 94,32 | 58,28 | 12,36 |
| 16 | Taman Krocok | 51,07 | 10,21 | 7,99 | 15,64 |
| 17 | Tapen | 546,84 | 109,37 | 81,15 | 14,84 |
| 18 | Tlogosari | 133,34 | 26,67 | 20,35 | 15,26 |
| 19 | Wonosari | 268,91 | 53,78 | 38,61 | 14,36 |
| 20 | Wringin | 357,93 | 71,59 | 30,65 | 8,56 |
| | **Jumlah** | **11.984** | **2.396,78** | **1.617,50** | **13,50** |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (2023)

Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien dasar bangunan (KDB) dan Koefisien lantai bangunan (KLB)-nya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Sebagaimana ketentuan dalam Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, mewajibkan segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada arahan RTRW Kabupaten Bondowoso.

Penerbitan PBG dilakukan melalui aplikasi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, mengikuti regulasi. Sedangkan syarat-syarat bangunan gedung, klasifikasi dan struktur bangunan gedung diatur sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### 2.3.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah rumah layak huni keluarga prasejahtera mengalami peningkatan selama tahun 2018 - 2022. Pada tahun 2022 rasio rumah layak huni di Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi 72,40 % di banding dengan tahun 2018 yang sebesar 71,22%. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam rangka peningkatan rasio rumah layak huni dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih baik dan layak huni sehingga dengan adanya kegiatan ini berdampak pada meningkatnya rasio rumah layak huni setiap tahunnya meskipun jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bondowoso masih cukup banyak. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Bondowoso disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel. 2.73 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bondowoso

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Rumah Layak Huni (%) | 71,22 | 71,73 | 71,91 | 72,24 | 72,40 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2023

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso terus dilakukan agar lingkungan menjadi lebih baik. Berdasarkan SK Bupati Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bondowoso, luasan kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso 831,6 Ha, dimana sampai dengan tahun 2022 telah tertangani seluas 355,18 Ha. sehingga masih terdapat luasan kumuh seluas 476,42 Ha.

Tabel 2.74 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 2018-2022

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lingkungan Permukiman Sehat (%) | 28,76 | 97,61 | 98,59 | 99,58 | - |
| 2. | Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | - | - | 1,17 | 0,75 | 0,33 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2023

Jaringan listrik di Kabupaten Bondowoso sudah menjangkau sebagian besar masyarakat, namun demikian masih ada yang belum terjangkau jaringan yaitu dusun terpencil. Selain menggunakan sumber energi listrik PLN, banyak desa yang

memanfaatkan energi surya dan air sebagai tenaga pembangkit listrik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bondowoso yang dilayani PT PLN (Persero) tahun 2017 - 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.75 Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2017 - 2021

| No. | Golongan Tarif | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Sosial | 6.648 | 7.199 | 7.540 | 7.716 | 7.098 |
| 2. | Rumah Tangga | 170.713 | 181.216 | 208.478 | 222.605 | 234.531 |
| 3. | Usaha | 4.637 | 5.282 | 4.222 | 4.343 | 4.843 |
| 4. | Industri | 105 | 112 | 122 | 275 | 409 |
| 5. | Gedung Kantor | 404 | 403 | 399 | 446 | 613 |
| 6. | Jalan | 484 | 560 | 631 | 727 | 779 |
| 7. | Multiguna | 138 | 9 | 20 | 8 | 7 |
| | **Jumlah** | **183.129** | **194.781** | **221.402** | **235.580** | **248.280** |

Sumber: PLN Area Situbondo dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2017 – 2022

Jumlah pelanggan rumah tangga terlayani listrik tahun 2017 sebanyak 170.713 unit sedangkan tahun 2021 menjadi sebanyak 234.531 unit rumah tangga, atau meningkat rata-rata sebanyak 14.949 unit rumah tangga pelanggan pertahun.

### 2.3.1.5 Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan keberhasilanpembangunan di Kabupaten Bondowoso bergantung situasi yang aman, tertib dan tentram.

Tabel 2.76 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 – 2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bondowoso (%) | 90,94 | 12,05 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Penegakan Perda (%) | 30 | 72 | 21,40 | 28,57 | 28,57 |
| 3 | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate ) (%) | 30 | 100 | 49,10 | 57,00 | 50 |
| 4 | Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten /Kota(%) | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bondowoso, 2022

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2017 adalah sebanyak 6.075 orang, maka rasio jumlah tenaga LINMAS per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 79,26 orang dan pada tahun 2021 setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 78,33 personil LINMAS. Data Jumlah dan Rasio Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.77 Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan
Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Pol PP | 227 | 217 | 208 | 168 | 168 |
| 2 | Jumlah LINMAS | 6.075 | 6.075 | 6.080 | 6.080 | 6.080 |
| 3 | Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk | 2,96 | 2,83 | 2,66 | 2,15 | 2,16 |
| 4 | Jumlah linmas per 10.000 penduduk | 79,26 | 79,26 | 77,66 | 77,66 | 78,33 |

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bondowoso, 2022

Pembangunan berwawasan kesatuan bangsa dan sosial politik dalam kerangka NKRI mengarah pada penciptaan situasi saling menghormati antar suku, agama, ras maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penataan instrumen sosial masyarakat Bondowoso yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM serta mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam potensi konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat. Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, pemuda dan LSM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.78 Pembinaan LSM, Orpol, Pemuda dan LSM
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Bondowoso

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ormas, Orpol , pemuda dan LSM yang dibina (Total 51 Lembaga) | 519 | 519 | 219 | 228 | 228 |

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso, 2021

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, pemuda dan LSM harus terus dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan, mencegah terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat dan untuk menumbuh kembangkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari total sebanyak 519 lembaga, jumlah lembaga Ormas, LSM dan OPK sebanyak 51 lembaga sedangkan sisanya sebanyak 468 lembaga meliputi organisasi kepemudaan. Sejak Tahun 2018 pembinaan karang taruna di desa dilakukan bidang Sosial.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada masyarakat yang terkena dampak bencana bertujuan untuk penanganan bencana yang bersifat cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi dengan baik pada tahap pra bencana, saat

terjadinya bencana maupun pasca bencana. Ditinjau dari aspek geografis, Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kerawanan bencana yang termasuk tinggi dengan potensi bencana yang dapat terjadi antara lain Bahaya gempa bumi, bahaya banjir, bahaya banjir bandang, bahaya kekeringan, bahaya angin puting beliung dan lain sebagainya. Berikut data kejadian bencana yang terjadi di kabupaten Bondowoso selama tahun 2018-2022:

Tabel 2.79A Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2018-2022

| No. | Uraian Bencana | Jumlah Kejadian Bencana | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angin Kencang/Puting beliung | 15 | 16 | 34 | 63 | 66 |
| 2 | Banjir | 21 | 21 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | Longsor | 7 | 10 | 4 | 16 | 29 |
| 4 | Kekeringan | 46 | 10 | 7 | 19 | 14 |
| 5 | Karhutla | - | 4 | - | - | 2 |
| 6 | Non Alam | - | - | 4 | 10 | 19 |
| 7 | Sosial | - | - | - | 1 | 1 |
| | **Jumlah** | **89** | **61** | **57** | **117** | **138** |

Sumber : Badan Penanggulanan Bencana Daerah, 2023

Capaian kinerja ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bondowoso selama tahun 2018-2022 ditunjukkkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.79B Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan) Tahun 2018 – 2022

| **No.** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | 0,32 | 0,34 | 0,72 | 0,76 | 0,55 |
| 2 | % Bencana yang Ditanggulangi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Badan Penanggulanan Bencana Daerah, 2022

## 2.3.1.6 Urusan Sosial

Penanganan masalah sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial.

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Bondowoso

| **No.** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (Orang) | 312 | 27.626 | 325 | 294 | - |

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | Σ lembaga kesejahteraan sosial yg dibantu & difasilitasi | 43 lbg | 46 lbg | 12 lbg | 110 lbg | 82 lbg |
| 3 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS | 368 org | 817 org | 153 org | 153 org | - |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Bondowoso, 2022

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017-2021 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.80 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018-2021

| No. | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Populasi Data Keluarga Miskin** | | | | |
| 1 | Keluarga Fakir Miskin | 16.266 | 152.891 | 155.470 | 223.766 |
| | **Populasi PMKS Prioritas** | | | | |
| 1 | Anak Jalanan | 149 | 10 | 16 | 26 |
| 2 | Tuna Susila | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pengemis | 60 | 55 | 75 | 51 |
| 4 | Gelandangan dan gelandangan Psikotik | 25 | 25 | 75 | 167 |
| | **Jumlah PMKS Prioritas** | **246** | **90** | **166** | **244** |
| | **Populasi PMKS Lainnya** | | | | |
| 1 | Anak Balita Terlantar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anak Terlantar | 23 | 0 | 0 | 291 |
| 3 | Anak Berhadapan dengan Hukum | 29 | 24 | 26 | 21 |
| 4 | Anak dengan Kedisabilitasan | 709 | 650 | 658 | 22 |
| 5 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 4 | 24 | 26 | 21 |
| 6 | Anak yang memerlukan perlindungan Khusus | 20 | 0 | 26 | 2 |
| 7 | Lanjut Usia terlantar | 255 | 20 | 15 | 150 |
| 8 | Penyandang Disabilitas | 1.827 | 0 | 579 | 740 |
| | a. Tubuh | 730 | - | 308 | 617 |
| | b. Netra | 317 | - | 82 | 64 |
| | c. Rungu wicara | 296 | - | 65 | 17 |
| | d. Mental | 415 | - | 65 | 42 |
| | e. Cacat Ganda | 69 | - | 59 | 0 |
| | f. Bekas penderita penyakit kronis | 146 | - | 0 | 0 |
| 9 | Pemulung | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kelompok Minoritas | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan | 197 | 35 | 25 | 25 |
| 12 | a. Orang dengan HIV | 26 | 35 | 35 | 11 |

| No. | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | b. Orang dengan AIDS (ODHA) | 5 | | 0 | |
| 13 | Korban penyalahgunaan Napza | 13 | 20 | 30 | 30 |
| 14 | Korban Trafficking | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah | 42 | 20 | 42 | 26 |
| | a. Wanita | 11 | 18 | 42 | 26 |
| | b. Laki laki | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | c. Lanjut usia | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 176 | 0 | 81 | 0 |
| 17 | Korban Bencana Alam | 16 | 21 | 26 | 59 |
| 18 | Korban Bencana Sosial | 525 | 18 | 8 | 59 |
| 19 | Perempuan rawan sosial Ekonomi | 2.411 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil | 475 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Populasi PMKS Lainnya** | **7.290** | **867** | **1.577** | **1.457** |
| | **Jumlah Populasi PMKS Prioritas dan Populasi PMKS Lainnya** | **7.536** | **957** | **157.213** | **1.701** |

Sumber: Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kabupaten Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2022

Panti wredha di Kabupaten Bondowoso tahun 2021 dihuni sebanyak 100 orang, diantaranya berusia 51-60 sebanyak 4 orang, berusia 61-80 tahun mencapai sebanyak 89 dan berusia 81-100 sebanyak 7 orang. Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas yang terdiri dari anak jalanan, tuna susila, pengemis dan gelandangan pada tahun 2021 mencapai sebanyak 244 orang, meningkat sebanyak 54,2% dibanding tahun sebelumnya. PMKS prioritas umumnya berada di kawasan perkotaan dengan kondisi seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma kehidupan yang layak. Penanganan terhadap PMKS prioritas terkendala kurangnya tenaga teknis sosial dan keberadaan dokter jiwa untuk menjangkau seluruh kasus. Penanganan terhadap populasi PMKS lainnya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dalam kerangka penanggulangan kemiskinan.

## 2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan tingkat pendidikan, kondisi angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: tenaga kerja berpendidikan Tamatan SD/MI yaitu sebesar 22,41%, berpendidikan SLTP/MTs sebesar 9,70% berpendidikan SLTA/MA

sebesar 20,96% dan berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi sebesar 7,68% dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,61%.

Perkembangan penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018 (419.497 jiwa) sampai dengan tahun 2022 (454.395 jiwa) untuk kualifikasi tamat SD/MI menurun sebanyak 3,51%, tamat SLTP/MTs menurun sebanyak 1,45%, tamat SLTA/sederajat meningkat sebanyak 3,33%, dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi meningkat sebanyak 1,30%.

Penduduk belum bekerja pada tahun 2018-2022, untuk tamat SD/MI meningkat sebanyak 794 orang, tamat SLTP/MTs menurun sebanyak 245 orang, tamat SLTA/sederajat berkurang sebanyak 2.437 orang dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi bertambah sebanyak 156 orang. Sehingga diperlukan lebih banyak pembinaan ketrampilan dan pelatihan terhadap masyarakat dengan kualifikasi tamat pendidikan dasar dan tamat SLTA/sederajat. Sedangkan untuk tamat Akademi/Perguruan Tinggi perlu perluasan terhadap akses informasi kesempatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.81 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Tingkat Pendidikan | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belum Bekerja | Bekerja | Belum Bekerja | Bekerja | Belum Bekerja | Bekerja | Belum Bekerja | Bekerja | Belum Bekerja | Bekerja |
| 1 | Tidak / Belum pernah sekolah | - | 36.969 | 309 | 31.199 | 511 | 27.559 | - | 19.655 | - | 17.340 |
| 2 | Tidak Tamat / belum tamat SD | 1.860 | 128.241 | 1.544 | 139.631 | 2.333 | 136.337 | 4.114 | 143.686 | 8.083 | 161.382 |
| 3 | Tamat SD / MI | 2.840 | 113.169 | 1.654 | 132.126 | 6.713 | 143.710 | 5.171 | 135.969 | 3.634 | 103.025 |
| 4 | Tamat SLTP / MTs | 2.556 | 46.085 | 3.155 | 56.938 | 2.448 | 57.772 | 3.957 | 58.845 | 2.311 | 43.820 |
| 5 | Tamat SLTA / Sederajat | 9.249 | 67.701 | 5.927 | 65.486 | 5.672 | 58.520 | 5.690 | 63.176 | 6.812 | 92.944 |
| 6 | Tamat Akademi / Perguruan Tinggi | 528 | 27.332 | 1.205 | 27.645 | 1.796 | 28.647 | 1.903 | 25.322 | 684 | 35.884 |
| **Jumlah** | | 17.033 | 419.497 | 13.797 | 453.025 | 19.473 | 452.545 | 20.835 | 446.653 | 21.533 | 454.395 |

Sumber: Keadaan angkatan Kerja di Jawa Timur 2016-2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

Disisi lain pertumbuhan ketersediaan lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja baru belum seimbang, disamping itu kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga masih diperlukan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

kerja dan mediasi tenaga kerja ke pasar kerja khususnya dari kecepatan penyampaian informasi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja dan perlindungan tenaga kerja dilakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, agar pencari kerja memiliki keterampilan guna memenuhi kualifikasi kebutuhan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup keluarga. Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase TK yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan | % | 2018 | N/A | N/A | N/A |
| | | 2019 | 93,90 | 94,79 | 100,95 |
| | | 2020 | N/A | N/A | N/A |
| | | 2021 | N/A | N/A | N/A |
| | | 2022 | N/A | N/A | N/A |
| Persentase TK yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 2018 | N/A | N/A | N/A |
| | | 2019 | 79,07 | 74,77 | 100,95 |
| | | 2020 | N/A | N/A | N/A |
| | | 2021 | 64,00 | 62,12 | 97,06 |
| | | 2022 | 64,00 | 70,59 | 110,29 |
| Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKL) | % | 2018 | 67,49 | 57,56 | 85,29 |
| | | 2019 | 54,24 | 63,42 | 116,92 |
| | | 2020 | 54,37 | 48,51 | 89,22 |
| | | 2021 | 54,48 | 58,61 | 92,95 |
| | | 2022 | 51,12 | 65,16 | 127,46 |
| Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKAD) | % | 2018 | 2,21 | 1,22 | 55,20 |
| | | 2019 | 2,76 | 1,21 | 43,84 |
| | | 2020 | 2,78 | 1,18 | 42,45 |
| | | 2021 | 2,79 | 1,25 | 44,80 |
| | | 2022 | 1,55 | 0,75 | 48,38 |
| Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (AKAN) | % | 2018 | 16,57 | 8,32 | 50.27 |
| | | 2019 | 9,99 | 8,53 | 85,39 |
| | | 2020 | 10,03 | 0,93 | 9,27 |
| | | 2021 | 10,04 | 0,78 | 7,77 |
| | | 2022 | 3,43 | 3,82 | 111,37 |
| Persentase Berkurangnya Jumlah Pelanggaran terhadap Perundang-undangan Ketenagakerjaan | % | 2018 | 1,04 | 0 | 200 |
| | | 2019 | 1,04 | 1,04 | 100 |
| | | 2020 | 0,92 | 0,92 | 100 |
| | | 2021 | 0,92 | 0,47 | 148,91 |
| | | 2022 | 0,80 | 0 | 200 |
| % meningkatnya peserta Jamsostek | | | | | |
| Persentase meningkatnya peserta jamsostek (pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan aktif) | % | 2018 | 20,03 | 25,56 | 127,61 |
| | | 2019 | 20,05 | 20,05 | 100 |
| | | 2020 | 20,07 | 20,26 | 100,95 |
| | | 2021 | 20,09 | 39,44 | 196,32 |
| | | 2022 | 20,10 | 39,46 | 196,32 |

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase meningkatnya peserta jamsostek (perusahaan peserta BPJS ketenagakerjaan aktif) | % | 2018 | 48,44 | 45,54 | 94,01 |
| | | 2019 | 48,50 | 48,50 | 100 |
| | | 2020 | 48,56 | 48,56 | 100 |
| | | 2021 | 48,62 | 73,92 | 152,04 |
| | | 2022 | 48,69 | 74,07 | 152,12 |
| Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | % | 2018 | 87,50 | 85,71 | 97,95 |
| | | 2019 | 87,50 | 87,50 | 100 |
| | | 2020 | 87,50 | 100 | 85,71 |
| | | 2021 | 75 | 66,67 | 111,11 |
| | | 2022 | 75 | 0 | 200 |

Sumber: DPMPTSP dan Naker Kabupaten Bondowoso, 2022

Persentase tenaga kerja telah dilatih yang terserap pada dunia kerja belum optimal disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi belum optimal karena Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sehingga secara terbatas dilaksanakan pelatihan melalui UPT Pelatihan kerja Jember dan Situbondo. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, terdiri dari: Angkatan Kerja Lokal (AKL) cenderung meningkat karena upaya perluasan kesempatan kerja melalui job fair dan informasi pasar kerja yang mudah diakses.

Selama kurun waktu 5 tahun penurunan pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak kepada pekerja sebagaimana mestinya.

Dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja diperlukan Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang sekarang dikenal dengan BPJS ketenagakerjaan. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa kepesertaan jamsostek wajib bagi perusahaan atau pekerja. Kepesertaan jamsostek cenderung meningkat, jumlah peserta perorangan dari 6.454 orang pada tahun 2019 meningkat menjadi 6.526 orang pada tahun 2020, sedangkan peserta perusahaan dari 420 perusahaan pada tahun 2019 meningkat menjadi 422 perusahaan pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran pekerja dan perusahaan tentang manfaat jaminan sosial tenaga kerja yaitu jaminan resiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.

Sengketa antara pengusaha dan pekerja atau perselisihan hubungan industrial difasilitasi penyelesaiannya melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk untuk diselesaikan dengan perjanjian bersama. Indikator kinerja persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Tahun 2020 adalah 8 kasus yang tercatat atau terselesaikan 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya fasilitasi perselisihan hubungan industrial kedua pihak.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dinyatakan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi, diantaranya adalah pelindungan teknis yaitu pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Jaminan Sosial, fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia serta pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

### 2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan kaum perempuan dan perlindungan bagi anak dilakukan mengingat posisi perempuan dan anak dalam keluarga masih belum seimbang dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perempuan dan anakrentanmenjadi korban human trafficking. Pemberdayaan perempuan diupayakan dengan mengoptimalkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh kesempatan dan hak peran maupun partisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan secara adil.

Pada tahun 2021, Partisipasi kaum perempuan di Kabupaten Bondowoso dalam dunia kerja sebanyak 198.975 orang bekerja meningkat sebanyak 5.351 orang dibanding tahun 2017 yang sebanyak 193.624 orang. Pada tahun 2021, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan menurun menjadi sebesar 60,70% dari 62,31% pada tahun 2017.

Tabel 2.83 Pemberdayaan Perempuan dalam Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 193.624 | 175.547 | 191.732 | 195.810 | 198.975 |
| 2 | Persentase Partisipasi angkatan Kerja Perempuan | 62,31 | 58,16 | 62,07 | 62,08 | 60,70 |

Sumber : Keadaan angkatan Kerja di Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2017-2022

Fasilitasi terhadap korban KDRT juga secara intensif dilaksanakan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap para calon ibu maupun ibu rumah Tangga.

Tabel 2.84 Perlindungan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kasus Kekerasan Rumah Tangga | 90 | 38 | 88 | 42 | 42 |
| 2 | Advokasi Kasus Kekerasan Rumah Tangga | 90 | 38 | 88 | 42 | 42 |
| 3 | Rasio kekerasan dalam rumah Tangga | 0,036 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,014 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, 2022

### 2.3.2.3 Urusan Pangan

Aspek pelayanan pada urusan pangan, meliputi subsistem ketersediaan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, kecukupan dan kesinambungannya, subsistem distribusi pangan melalui sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat yang menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola subsistem distribusi, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta subsistem konsumsi yang berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi mutu, keragaman, kandungan gizi, berimbang dan aman, serta efisiensi konsumsi pangan dalam rumah tangga.

Peningkatan Angka Kecukupan Gizi masyarakat selaras dengan peningkatan pola konsumsi masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga. Untuk mencapai tingkat konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Bondowoso masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Pencapaian skor PPH berdasarkan angka kecukupan energi 2.100 Kkal/Kapita/hari di Kabupaten Bondowoso disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.85 Skor PPH dan Angka Kecukupan Gizi Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pola Pangan Harapan (%) | 73,3 | 76,1 | 78,9 | 81,1 | 78,9 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Angka kecukupan gizi (Kkal/ Kpt/Hr) | 2.086 | 2.026 | 1.887,5 | 2.015,12 | 1.957,40 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Bondowoso sangat bervariasi. Tahun 2017 skor PPH mencapai 72,60% dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 81,1%, dengan dominasi konsumsi padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Angka kecukupan gizi masyarakat meningkat selama tahun 2017-2018 dan kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 1.887,5 Kkal/kapita/Hari dengan angka kecukupan energi sebesar 1.878,5 Kkal/Kapita/Hari dan angka kecukupan protein mencapai 57,42 Kkal/Kapita/Hari, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 2.015,12 Kkal/Kapita/Hari.

Pada tahun 2017 ketersediaan beras mencapai jumlah yang cukup untuk konsumsi dan jumlahnya pada tahun 2021 mencapai 175.399,52 Ton. Sedangkan untuk jagung yang merupakan bahan pakan ternak tersedia pada tahun 2021 hingga sebanyak 172.054 Ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebanyak 90.178 Ton. Hal ini terjadi mengingat pelaksanaan peningkatan luas areal tanam padi menurun, dengan jumlah lahan yang tetap maka areal tanam jagung meningkat sehingga ketersediaan meningkat. Untuk gula pasir ketersediaannya fluktuatif namun masih dalam jumlah yang cukup. Sedangkan untuk telur dan daging ketersediaannya berfluktuatif, disebabkan berbagai faktor diantaranya keberadaan peternakan ayam petelur yang jumlahnya terbatas, demikian juga dengan ketersediaan daging mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permintaan dan harga ternak sapi.

Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi penduduk terhadap masing – masing ketersediaan komoditi. Komoditi beras, jagung, ubi kayu dan gula setiap tahun mengalami surplus ketersediaan bahan pangan sedangkan komoditi yang lain berfluktuasi tergantung dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada masing-masing tahun. Surplus dan minus ketersediaan bahan pangan dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.86 Ketersediaan Bahan Pangan (dalam Ton) Tahun 2018 - 2022

| No. | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Beras | Ton | 267.105,00 | 276.139,00 | 360.114,00 | 175.399,52 | 272.161,72 |
| 2 | Jagung | Ton | 121.982,00 | 110.200,00 | 140.604,00 | 172.054,00 | 165.166 |
| 3 | Gula Pasir | Ton | 29.159,37 | 5.776.37 | 27.352,72 | 28.224,01 | 40.486 |
| 4 | Telur | Ton | 3.904,00 | 3.915,00 | 2.776,35 | 3.245,93 | 7.994,31 |
| 5 | Daging | Ton | 2.400,00 | 2.724,00 | 2.663,00 | 3.816,03 | 10.306,17 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2022

Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh tingkat produksi komoditas pangan dan tingkat konsumsi penduduk terhadap masing-masing ketersediaan komoditi. Pada tahun 2019 ketersediaan gula pasir mengalami penurunan yang disebabkan produksi tebu petani lebih banyak dikirim ke Pabrik pengolahan Gula di luar Kabupaten Bondowoso. Hal

ini berkaitan erat dengan tingkat harga beli tebu yang diterima petani, sehingga petani lebih memilih dikirim keluar daerah. Diperlukan peningkatan fasilitasi kemitraan dengan PG Prajekan secara berkelanjutan, agar harga beli tebu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus ketersediaan gula pasir dapat tercukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan tingkat produksi komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.87 Tingkat Produksi Bahan Pangan Tahun 2017-2021 di KabupatenBondowoso

| No | Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Padi | ton | 522.158 | 537.450 | 609.579 | 542.574 | 453.503 |
| 2 | Jagung | ton | 160.454 | 148.668 | 140.485 | 172.054 | 189.869 |
| 3 | Kedelai | ton | 39 | 317 | 207 | 78 | 32 |
| 4 | Kc. Tanah | ton | 39 | 118 | 118 | 260 | 161 |
| 5 | Kc. Hijau | ton | 54 | 51 | 67 | 112 | 51 |
| 6 | Ubikayu | ton | 53.297 | 39.234 | 43.897 | 48.201 | 48.842 |
| 7 | Ubijalar | ton | 814 | 577 | 123,90 | 1.599 | 1.713 |
| 8 | Daging | Kg | 3.980.347 | 4.390.544 | 4.419.295 | 4.595.681 | 3.816,03 |
| 9 | Telur | Kg | 2.122.493 | 2.730.215 | 2.828.351 | 3.245.929 | 3.245,93 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2022

### 2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Aspek pelayanan urusan pertanahan meliputi pemberian ijin lokasi dan penerbitan ijin membuka tanah untuk pembangunan, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk lokasi tanah yang digunakan dalam pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, serta perencanaan penggunaan hamparan tanah dalam satu daerah kabupaten. Perkembangan indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.88 Perkembangan indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2022

| No. | indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persentase penyelesaian izin lokasi/membuka lahan | 8 | 25 | 18* | 76 | - |
| 2 | Bangunan yang memiliki IMB | 82.169 | 82.697 | 84.528* | 84.933 | - |
| 3 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | - | - | 39,13** | 52,17 | 55,17 |

Sumber : * Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja, 2023
** Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2023

### 2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas air Sungai Sampean saat ini memerlukan perhatian, karena terdapat beberapa parameter dari 6 parameter yang ada, perlu diwaspadai agar tidak melebihi ambang batas. Selama Tahun 2017-2021 untuk parameter pH rata-rata mencapai 7,617 (ambang batas 6 – 9), DO berfluktuasi tiap tahun pada kisaran 4,410 - 5,405 mg/L (ambang batas > 3 mg/L), BOD cenderung membaik pada kisaran 3,234 mg/L - 17,813 mg/L (ambang batas 6 mg/L), COD cenderung membaik pada kisaran 11,782 mg/L – 42,424 mg/L (ambang batas 50 mg/L), Nitrat mencapai 2,383 mg/L (ambang batas 20 mg/L), dan Nitrit mencapai 0,062 mg/L (ambang batas 0,06 mg/L). Sehingga dapat disimpulkan selama Tahun 2017-2021 secara umum parameter pH pada batas normal, sedangkan parameter DO, BOD dan COD cenderung membaik.

Kondisi kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, air dan pencemaran limbah masih dalam ambang batas kewajaran namun tetap harus terus menerus diwaspadai terutama penanganan terhadap limbah medis. Dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Puskesmas terhadap layanan rawat inap menyebabkan meningkatnya volume sampah medis. Memerlukan perhatian secara intensif karena berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga diperlukan sarana pengolahan limbah medis dan B3 di setiap Puskesmas.

Pada tahun 2018 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso (IKLH) sebesar 66,00. Kondisi kualitas lingkungan hidup sebenarnya cenderung stabil atau tetap, dan meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan nilai IKLH. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai IKLH kembali dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan IKLH dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022, nilai IKLH mengalami kenaikan menjadi 68,97. Capaian kinerja Lingkungan Hidup tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Sampah Tertangani (%) | 65,39 | 53,57 | 60,4 | 60,0 | 60,96 |
| 2. | Rasio TPS per penduduk | 1,67 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 0,84 |
| 3. | Pengangkutan sampah (unit) | 10 | 15 | 17 | 17 | 24 |
| 4. | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 66,00 | 64,63 | 71,06 | 66,39 | 68,97 |
| | - Indek Kualitas Air (IKA) | 50,00 | 48,33 | 51,66 | 50 | 55,33 |
| | - Indek Kualitas Udara (IKU) | 83,48 | 81,00 | 80,99 | 85,33 | 86,70 |
| | - Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 64,90 | 65,00 | 78,16 | 59,49 | 59,57 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Selama tahun 2018 – 2022, sarana penanganan sampah terus meningkat. Pada tahun 2022, alat pengangkutan sampah bertambah 7 unit menjadi 24 unit dari jumlah

tahun 2021 yang berjumlah 17 unit. Sedangkan Rasio TPS per penduduk terjadi penurunan dari tahun 2021 yaitu 1,26 menjadi 0,84 pada tahun 2022.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pelaporan, evaluasi dan pemantauan (PEP GRK), dengan melaksanakan inventarisasi emisi gas rumah kaca pada sumber emisi pengadaan dan penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah.

Sesuai dengan RAD Pengurangan Emisi GRK Provinsi Jawa Timur, pengukuran kontribusi pengurangan Karbon di Wilayah Kabupaten Bondowoso dilakukan pada sektor energi, lahan dan limbah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.90 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018 - 2022

| No. | Sektor | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energi | - | 56.394,66 | 201.190,77 | 52.400,00 | 51.269,20 |
| 2 | Lahan | - | - | - | 6.113,81 | 8.583,50 |
| 3 | Limbah | - | 97,13 | 2,63 | 2,18 | 2,45 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di bidang perhubungan, pertanian, perumahan dan permukiman serta lingkungan hidup memberi kontribusi yang cukup berarti pada penurunan emisi GRK di Kabupaten Bondowoso.

### 2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. pelayanan administrasi Kependudukan dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91 Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembar)
Tahun 2018-2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Akta Kelahiran | 14.390 | 13.250 | 14.391 | 14.681 | 13.830 |
| 2 | Akta Perkawinan | 36 | 25 | 24 | 26 | 25 |
| 3 | Akta Perceraian | 7 | 45 | 3 | 8 | 0 |
| 4 | Akta Kematian | 178 | 854 | 796 | 1.741 | 8.383 |
| 5 | Akta Pengakuan/ Pengesahan Anak | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Pengangkatan Anak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 | Kartu Keluarga | 63.058 | - | - | - | 3.875 |
| 8 | Kartu Tanda Penduduk | 21.503 | - | - | - | 39.476 |
| 9 | Surat Keterangan | 3.999 | - | - | - | 0 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2022

Perkembangan penduduk ber-KTP di Kabupaten Bondowoso tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.92 Persentase Penduduk ber-KTP dan ber-Akta
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ber-KTP | 98,50 | 99,77 | 99,99 | 94,66 | 95,97 |
| 2 | Ber-Akta | 54,43 | 55,75 | 56,88 | 57,86 | 58,85 |
| 3 | Ber-KK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, 2022

## 2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat perdesaan, yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga memerlukan penanganan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Disisi lain, wilayah perdesaan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sehingga selama tahun 2017-2021 dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi terciptanya masyarakat yang partisipatif, berdaya, dan mandiri dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pemberian bantuan usaha ekonomi masyarakat, pembinaan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, pembinaan kelompok PKK, revitalisasi pasar desa dan pengembangan BUM Desa.

Upaya sinergis pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan potensi desa dan pengerahan seluruh sumberdaya dan *stakeholder* pembangunan. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat menjadi dasar pembentukan pola pikir pembangunan kemasyarakatan. Pembinaan kelompok masyarakat terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan perluasan lapangan kerja.

Tabel 2.93 Kelompok Binaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Bondowoso

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kelompok lembaga Pemberdayaan masyarakat LPM Desa | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 2 | Kelompok PKK/desa yg dibina dan dilatih | - | - | 36 | 35 | 150 |
| 3 | Jumlah kelompok Penggerak PKK | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 4 | Kelompok Pemanfaatan TTG | 62 | 82 | 95 | 84 | 96 |
| 5 | Posyandu | 46 | 50 | - | 438 | 39 |
| 6 | Kelompok Penerima Manfaat | 4.345 | 2.725 | 1.163 | 1337 | 600 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2022

Upaya meningkatkan kemandirian pemerintah desa juga dilaksanakan melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dilaksanakan melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam bentuk pengembangan unit usaha dan bantuan modal bagi BUMDES. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.94 Badan Usaha Milik desa Tahun 2018- 2022

| No. | indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Keberadaan BUMDES | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas BUMDes | 209 | - | - | 209 | 209 |
| 3 | BUMDES Aktif | 31 | 43 | 43 | 57 | 57 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, 2022

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang secara teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, mengamanatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat. Sumber pendapatan yang tercatat dalam APBDesa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Anggaran ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan di desa.

Selanjutnya pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang meliputi tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan ADD yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada setiap tahunnya, diatur melalui Peraturan Bupati sesuai amanat Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

## 2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan suatu konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan fokus keluarga berencana dilaksanakan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pencegahan terhadap pernikahan dini khususnya terhadap anak dan remaja usia sekolah. Sehingga disamping meningkatkan skala kesejahteraan masyarakat juga memenuhi hak-hak reproduksi masyarakat. Disamping itu keluarga dapat mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran secara ideal. Dampak pemenuhan hak-hak reproduksi tersebut secara langsung adalah terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, sosialisasi, advokasi KIE, dan adanya kelompok masyarakat peduli KB dapat meningkatkan jumlah pasangan usia subur yang ikut KB (baru dan aktif) termasuk KB pria.

Tabel 2.96 Peserta KB Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi
Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AKDR | 12.037 | 6 528 | 6.140 | 6.466 | 6.017 |
| 2. | Tablet | 25.483 | 26.863 | 25.086 | 25.764 | 24.873 |
| 3. | Kondom | 604 | 555 | 563 | 582 | 605 |
| 4. | MOP | 1.228 | 1.076 | 1.036 | 1.098 | 1.002 |
| 5. | MOW | 1.750 | 1.939 | 2.221 | 2.192 | 2.271 |
| 6. | Suntik | 64.468 | 67.453 | 66.089 | 67.779 | 67.906 |
| 7. | Susuk | 10.455 | 12.531 | 12.802 | 13.271 | 12.849 |
| | **Jumlah** | **116.025** | **116.945** | **113.937** | **117.152** | **115.523** |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Kabupaten Bondowoso dalam angka (BPS), 2022

Perkembangan pasangan usia subur dan pencapaian kepesertaan KB aktifnya di Kabupaten Bondowoso tahun 2017 - 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.97 Banyaknya PUS dan Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2017 - 2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Jumlah Pasangan Usia Subur | 154.473 | 150.783 | 149.875 | 147.895 | 147.895 |
| 2. | Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB aktif | 116.025 | 116.945 | 113.937 | 115.523 | 115.523 |
| 3. | Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB | 38.448 | 38.149 | 35.938 | 32.355 | 32.355 |
| 4. | Persentase Terhadap PUS | 75,11 | 77,56 | 76,02 | 78,12 | 78,12 |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Kabupaten Bondowoso dalam angka (BPS), 2022

## 2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Arus penumpang angkutan umum di wilayah Bondowoso relatif stagnan dan dan bahkan cenderung menurun dengan jumlah ijin trayek tetap sebanyak 5 trayek. Guna mendukung kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penumpang dan barang, penyediaan prasarana dan sarana perhubungan senantiasa terus ditingkatkan. Pada tahun 2022 telah tersedia 79 APILL meliputi 17 TL, 61 WL dan 1 PCTL, 1.867 rambu lalu lintas, dan 24 halte.

Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bondowoso tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan arus penumpang angkutan umum. Perkembangan arus penumpang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99 Perkembangan arus penumpang Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Keberangkatan penumpang | 355.717 | 353.692 | 127.423 | 60.041 | 79.851 |
| 2. | Kedatangan penumpang | 273.233 | 271.583 | 89.377 | 27.475 | 38.630 |

Sumber: Kabupaten Bondowoso dalam angka, Badan Pusat Statistik kabupaten Bondowoso 2017-2021
Dinas Perhubungan, 2022

Pada tahun 2022, jumlah penumpang yang berangkat dari terminal Bondowoso naik dari tahun 2021 menjadi 79.851 orang dan jumlah penumpang yang datang naik menjadi 38.630 orang. Namun masih jauh lebih rendah dibanding jumlah penumpang pada tahun 2018. Penurunan jumlah penumpang selain disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi baik yang kendaraan roda dua maupun roda empat, juga disebabkan karena pandemi COVID-19. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tahun 2018-2022 di kabupaten Bondowoso disajikan berikut :

Tabel 2.100 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor
Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bondowoso

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kendaraan pribadi | | | | | |
| | Kendaraan Roda 4 | 16.394 | 18.380 | 20.268 | 15.217 | 14.953 |
| | Kendaraan Roda 2 | 163.288 | 176.375 | 189.462 | 99.750 | 120.749 |
| 2. | Moda Angkutan Barang/Orang | | | | | |
| | Angkutan Barang | 4.810 | 4.951 | 4.454 | 4.649 | 3.349 |
| | Angkuran Umum | 243 | 235 | 217 | 165 | 165 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2022
Dinas Perhubungan, 2023

Guna mendukung kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penumpang dan barang, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang), Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan upaya pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor. Kondisi pemasangan rambu dan sarana uji kendaraan bermotor tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.101 Kondisi Pemasangan Rambu dan
Sarana Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah rambu yang ada (tersedia) pada tahun yang bersangkutan | 1.551 | 1.591 | 1.656 | 1.723 | 1.867 |
| 2 | Jumlah alat uji yang ada (tersedia) | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, 2022
Dinas Perhubungan, 2023

## 2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan pembangunan daerah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan maupun implementasi kebijakan. Transparansi pelaksanaan pembangunan berperan sebagai fungsi kontrol dan evaluasi bagi pemerintah daerah, utamanya dalam menilai keberhasilan pencapaian kinerja atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pelayanan terhadap ketersediaan informasi yang akurat, cepat dan informatif serta penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada publik diharapkan dapat membangun aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pelayanan komunikasi dan informatika mencakup upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, fasilitasi peningkatan media massa (surat kabar, radio/TV/website serta peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Gambaran pembangunan komunikasi dan informasi tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.102 Perkembangan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 - 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kerjasama dengan media massa | 50 | 48 | - | 42 | 40 |
| 2. | Persentase peningkatan frekuensi informasi publik | 96,93 | - | 65,11 | - | 84,49 |
| 3. | Cakupan jaringan e-*Gov* di lingkungan SKPD Kabupaten Bondowoso | 35 | 58 | 58 | 93 | 93 |
| 4. | Jumlah inplementasi e government (aplikasi) | - | 2 | 5 | 3 | 6 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selama tahun 2018-2022, jumlah koperasi dan IKM terus bertambah dan Usaha Mikro yang naik kelas sampai dengan tahun 2022 sejumlah 20 unit usaha. Jumlah koperasi pada tahun 2018 sebanyak 938 koperasi meningkat menjadi 957 koperasi pada tahun 2021, dengan koperasi yang sehat mencapai 236 pada tahun 2021. Sedangkan

pada tahun 2022, Jumlah UKM meningkat menjadi 40.035 UKM dari 39.335 UKM pada tahun 2018. Jumlah permodalan Koperasi dari tahun 2018-2022 terus meningkat dari Rp.340.264.433.000 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.427.188.459.000 pada tahun 2021.

Tabel 2.103 Perkembangan Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2018 – 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah | | | | | |
| | Koperasi | 938 | 943 | 952 | 957 | |
| | UKM | 39.335 | 39.550 | 39.710 | 39.970 | 40.035 |
| 2 | Jumlah permodalan (juta Rp) | | | | | |
| | Koperasi | 340.264,433 | 364.511,297 | 369.504,448 | 401.885,45 | |
| | UKM | - | 322.017,16 | - | 427.188.46 | 430.438.46 |
| 3 | Jumlah volume usaha (juta Rp) | | | | | |
| | Koperasi | 239.394,557 | 299.015,624 | 324.448,860 | 341.988,80 | |
| | UKM | 2.799.321,65 | 2.802.112,13 | 3.012.461 | 3.017.953,42 | 3.040.704,00 |
| 4 | Jumlah anggota (orang) | | | | | |
| | Koperasi | 90.926 | 96.357 | 96.052 | 96.715 | |
| | UKM | 52.750 | 55.902 | 79.420 | 79.530 | 79.725 |
| 5 | Jumlah kesehatan kelembagaan koperasi | 260 | 263 | 268 | 236 | |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2023

### 2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang tinggi, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Realisasi nilai investasi non fasilitasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding nilai investasi tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah investasi mencapai Rp. 1.598.839.920.350,- meningkat menjadi Rp. 7.759.482.135.141,- pada akhir tahun 2021. Perkembangan Nilai investasi non fasilitasi di Tahun 2018 - 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.104 Nilai Investasi Non Fasilitasi di Kabupaten Bondowoso 2018-2022

| NO | BIDANG USAHA | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 4.545.000.000 | 3.526.500.000 | - | | |
| 2 | Peternakan | 7.000.000.000 | 8.000.000.000 | - | | |

| NO | BIDANG USAHA | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perikanan | 3.078.888.638 | 30.337.717.000 | - | | |
| 4 | Perkebunan | 1.050.000.000 | 1.120.000.000 | - | | |
| 5 | Kehutanan | - | - | - | | |
| 6 | Pertambangan | 900.000.000 | 1.380.063.000 | - | | |
| 7 | Perindustrian | 152.900.116.680 | 148.860.116.860 | - | | |
| 8 | Perdagangan | 93.710.300.000 | 112.630.100.000 | - | | |
| 9 | Perhotelan/ Losmen/ Penginapan | 2.800.000.000 | 63.591.470.000 | - | | |
| 10 | Restoran, Rumah Makan , Cafe | 18.867.610.000 | 65.845.725.000 | - | | |
| 11 | Perumahan, Ruko | 196.590.000.000 | 380.950.000.000 | - | | |
| 12 | Perkantoran, Supermarket, Supermal | 4.500.000.000 | 6.250.000.000 | - | | |
| 13 | Jasa Konstruksi | 65.737.483.200 | 74.251.825.719 | - | | |
| 14 | Pergudangan | 14.000.000.000 | 12.000.000.000 | - | | |
| 15 | Transportasi Darat/Laut | 510.000.000 | 6.620.000.000 | - | | |
| 16 | Kesehatan | 11.900.000.000 | 11.900.000.000 | - | | |
| 17 | Koperasi | 677.934.415.000 | 714.628.524.000 | - | | |
| 18 | Lain-Lain (Jasa Hiburan, Tower, Usaha Wisata) | 3.851.000.000 | 4.235.865.000 | - | | |
| 19 | Produksi Air Minum | 500.000.000 | - | - | | |
| 20 | Tower | 4.765.000.000 | 5.687.000.000 | - | | |
| | | | | | | |
| 1 | Perdagangan dan Reparasi | - | - | 114.617.836.068 | 212.570.580.182 | 284.583.140.772 |
| 2 | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | - | - | 1.975.977.570.003 | 57.184.237.316 | 260.183.228.922 |
| 3 | Hotel dan Restoran | - | - | 10.603.975.003 | 22.648.680.700 | 62.631.410.753 |
| 4 | Industri makanan | - | - | 11.560.785.005 | 48.038.947.990 | 425.646.273.673 |
| 5 | Jasa Lainnya | - | - | 11.984.880.009 | 35.301.500.000 | 705.286.493.992 |
| 6 | Lainnya | - | - | 474.373.902.212 | 7.383.738.188.953 | - |
| | **Jumlah** | **1.265.139.813.518** | **1.651.814.906.579** | **2.599.118.948.300** | **7.759.482.135.141** | **1.738.330.548.112** |

Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2023

Penyelenggaraan perizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan diharapkan dapat meningkatkan investasi. Kinerja pelayanan perizinan tahun 2016-2020 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.105 Kinerja Pelayanan Perizinan Tahun 2016-2020

| No. | Ijin Yang Diterbitkan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | SITU Berdasarkan HO | 268 | 104 | - | - | - |
| 2 | SITU Non HO | 875 | - | - | - | - |
| 3 | IUJK | 117 | 108 | - | - | - |
| 4 | IMB | 960 | 897 | 682 | 721 | 919 |
| 5 | Izin Reklame | 65 | 62 | 80 | 68 | 205 |
| 6 | Izin Hiburan | 9 | 9 | 15 | 18 | 3 |
| 7 | SIUP | 974 | 288 | 1.287 | 1.011 | 284 |
| 8 | TDP | 1.172 | 698 | 867 | - | - |
| 9 | Izin Prinsip | 25 | 38 | 18 | 14 | 18 |
| 10 | Izin Lokasi | 11 | 12 | 8 | 1.202 | 18 |
| 11 | Izin Alih Fungsi Lahan | 64 | 47 | 44 | 25 | 5 |
| 12 | Izin Mendirikan Rumah Sakit | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum | - | - | - | - | - |
| 14 | Izin Pengelolaan Penambangan Galian C | - | - | - | - | - |
| 15 | Izin Pengambiln Dan Eksplorasi Air Tanah | - | - | - | - | - |
| 16 | Izin Hotel Dan Penginapan | 2 | - | - | - | - |
| 17 | Izin Usaha Penggilingan Padi/Jagung | - | 2 | - | - | - |
| 18 | Izin Usaha Restoran Dan Rumah Makan | - | - | - | - | - |
| 19 | Izin Pembelian Dan Pengolahan Tembakau | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 20 | Izin Usaha Travel | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 21 | Izin Usaha Lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) | - | - | - | 6 | - |
| 22 | Izin Perluasan IPHHK | - | - | - | - | - |
| 23 | Tanda Daftar Gudang/Ruangan | 52 | 51 | 43 | 15 | - |
| 24 | Tanda Daftar Industri | 22 | 21 | - | - | 21 |
| 25 | Izin Usaha Industri | 3 | 7 | 57 | - | 54 |
| 26 | Rekomendasi IPHHK | - | - | - | - | - |
| 27 | Izin Usaha Perkebunan | - | - | 4 | 8 | 2 |
| 28 | Retribusi Pengendalian Menara | - | - | - | - | - |
| 29 | Surat Izin Praktek Dokter /SIP Dokter | 126 | 131 | 109 | 152 | 86 |
| 30 | Surat Izin Praktek Perawat (SIPPr) | 33 | 32 | 139 | 419 | 405 |
| 31 | Surat Izin Kerja Perawat (SIKPr) | 346 | 246 | 218 | - | - |
| 32 | Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) | 6 | - | 11 | - | - |
| 33 | Surat Izin Praktek Bidan (SIPS) | 8 | 49 | 446 | 248 | 209 |
| 34 | Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) | 144 | 97 | - | - | - |
| 35 | Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) | - | - | - | - | - |
| 36 | Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) | 24 | 23 | 12 | 21 | 9 |
| 37 | Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) | 3 | 9 | 17 | 27 | - |
| 38 | Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 39 | Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) | 34 | - | 42 | 35 | - |
| 40 | Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) | 2 | - | 8 | - | - |
| 41 | Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM) | 15 | 3 | 30 | 31 | 10 |
| 42 | Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) | - | 2 | 8 | - | - |

| No. | Ijin Yang Diterbitkan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 43 | Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) | - | 1 | 1 | - | - |
| 44 | Surat Izin Kerja Perekam Medis | - | 2 | - | - | - |
| 45 | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) | 33 | 1 | 1 | 14 | - |
| 46 | Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) | - | 23 | - | - | 31 |
| 47 | Izin Laboratorium | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 48 | Surat Izin Penyelenggara Optik (SIPO) | 1 | 2 | - | - | - |
| 49 | Surat Izin Apotek (SIA) | 12 | 14 | 9 | - | 8 |
| 50 | Izin Mendirikan Klinik | 3 | - | 9 | - | - |
| 51 | Izin Operasional Klinik | 4 | 3 | - | - | - |
| 52 | Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga (SPPIRT) | 39 | - | - | 1 | - |
| 53 | Izin Unit Transfusi Darah | - | - | - | - | - |
| 54 | Sertifikat Laik Higienis Sanitasi | - | - | - | - | - |
| 55 | Izin Lingkungan | 12 | 18 | - | - | - |
| 56 | Izin Penyimpan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 9 | 1 | - | - | - |
| 57 | Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air | 4 | - | - | - | 1 |
| 58 | Rekomendasi Penurunan Trotoar | 2 | - | - | - | - |
| 59 | Rekomendasi Pemangkasan Pohon | 15 | - | - | - | - |
| 60 | Izin emisi udara | - | - | - | - | - |
| 61 | Izin Pengumpulan 83 | - | - | - | - | - |
| 62 | Izin Pengangkutan 83 | - | - | - | - | - |
| 63 | Izin Trayek Angkutan Oesa | 8 | - | - | - | - |
| 64 | Izin Angkutan Luar Kota | 1 | - | - | - | - |
| 65 | Surat lzin Tentang Pohon Ayoman | 24 | 58 | - | - | - |
| 66 | Izin Operasional Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI) | - | - | - | - | - |
| 67 | Rekomendasi Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK} | - | 6 | - | - | - |
| 68 | Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (LPK) | - | 14 | 3 | - | - |
| 69 | Izin Lembaga Pelatihan Kerja | - | 47 | 3 | - | 26 |
| 70 | Rekomendasi Operator Peralatan Pesawat Tenaga dan Produksi | - | - | - | - | - |
| 71 | Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat | - | - | - | - | - |
| 72 | Rekomendasi lzin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan IMTA | 5 | - | - | - | - |
| 73 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal | 152 | 467 | 13 | 54 | 38 |
| 74 | Izin Pembangunan Menara | - | - | 1 | - | - |
| 75 | Izin Usaha Jasa Pariwisata | 5 | - | - | - | - |
| 76 | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba | - | - | - | - | - |
| 77 | Izin Usaha Toko Modem | - | - | - | - | - |
| 78 | Izin Pembangunan Perumahan | - | - | 5 | - | - |
| 79 | Persetujuan Siteplan | 7 | 10 | - | - | - |
| 80 | Tanda daftar Usaha pariwisata | - | 3 | 19 | 87 | 26 |
| 81 | Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) | - | - | - | - | - |
| 82 | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | - | - | 42 | - | 39 |
| 83 | Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA) | - | 1 | - | - | - |
| 84 | Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) | - | - | - | - | - |
| 85 | Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) | - | - | - | - | - |
| 86 | Surat lzin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) | - | - | - | - | - |
| 87 | Surat lzin Praktik Terapis Wtcara (SIPTW) | - | - | - | 2 | - |
| 88 | Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler | - | - | - | - | - |

| No. | Ijin Yang Diterbitkan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 89 | Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE) | - | - | - | 3 | - |
| 90 | Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) | - | - | - | - | - |
| 91 | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | - | - | - | - |
| 92 | Klinik Dialisis /Unit Pelayanan Dialisis | - | - | 2 | - | - |
| 93 | Izin Penurunan Trotoar | - | - | 4 | 4 | 6 |
| 94 | Izin Pemangkasan Pohon | - | - | - | 57 | 115 |
| 95 | Izin Trayek Angkutan Kota / Pedesaan | - | - | 7 | - | - |
| 96 | Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek | - | - | - | - | - |
| 97 | Kartu Pencari Kerja (AK/I) | - | 1.763 | - | - | |
| 98 | RekomendasiKlaim Jaminan Hari Tua (JHT) | - | 686 | - | - | - |
| 99 | Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) | . | 2 | - | - | - |
| 100 | Izin Angkutan Barang Khusus | . | - | - | - | - |
| 101 | Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) | . | | 141 | - | - |
| 102 | Surat Izin Praktek Paramedik Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PK) | - | - | - | 1 | 11 |
| 103 | Surat Izin Praktek Paramedik sistensiTeknlk Reproduksi (SIPP ATR) | - | - | - | 1 | - |
| 104 | Izin Usaha Mikro dan Kecil | - | - | - | 319 | 5.220 |
| 105 | Izin Usaha Kontruksi Jasa (IUJK) | - | - | - | 486 | 128 |
| 106 | Nomor Induk Berusaha | - | - | - | 1.228 | 328 |
| 107 | Izin Usaha Industri | - | - | - | 194 | 54 |
| 108 | Izin Peyelenggara Angkutan Orang | - | - | - | 13 | 5 |
| 109 | Izin Usaha Perluasan | - | - | - | 1 | - |
| 110 | Izin Usaha Peternakan | - | - | - | 6 | 5 |
| 111 | Surat Izin Peil Banjir | - | - | - | 6 | - |
| 112 | Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) | - | - | - | - | 1 |
| 113 | Surat Izin Praktek Refrakslonis Optisien (SIPRO) | - | - | - | - | 1 |
| 114 | Surat Izin Praktek Tenaga Tehnis Kefarmasian (SIPTTK) | - | - | - | - | 39 |
| 115 | Surat Izin Praktek Dokter Hewan (Sip Drh) Dokter Hewan Spesialis (SIP Drh. Spesialis) | - | - | - | - | 17 |
| 116 | Surat Izin Praktek Paramedik Kesehatan Hewan(SIPP Keswan) | - | - | - | - | 17 |
| 117 | Surat Izin Praktek Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator) | - | - | - | - | 54 |
| 118 | Izin Usaha Tanaman Pangan | - | - | - | - | 7 |
| 119 | Izin Usaha Hortikultura | - | - | - | - | 2 |
| 120 | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil | - | - | - | - | 1 |
| 121 | Izin Pembuangan Air Limbah | - | - | - | - | 1 |
| 122 | Izin Koperasi | - | - | - | - | 9 |
| **JUMLAH** | | **5.765** | **6.043** | **4.411** | **6.577** | **8.324** |

Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2021

Sejak tahun 2021 penyelenggaraan perizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko

dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

2. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:
   a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b. Persetujuan lingkungan; dan
   c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
3. Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:
   a. Kelautan dan perikanan;
   b. Pertanian;
   c. Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
   d. Energi Dan Sumber Daya Mineral;
   e. Ketenaganukliran;
   f. Perindustrian;
   g. Perdagangan;
   h. Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
   i. Transportasi;
   j. Kesehatan, Obat Dan Makanan;
   k. Pendidikan Dan Kebudayaan;
   l. Pariwisata;
   m. Keagamaan;
   n. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
   o. Pertahanan Dan Keamanan;
   p. Ketenagakerjaan.
4. Sektor Ketenaganukliran, Keagamaan Serta Pertahanan Dan Keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan berusaha di daerah.

### 2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan kemajuan teknologi terkini sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas kehidupan. Namun juga memiliki dampak yang buruk jika sistem kontrol tidak terbangun dengan baik. Kemajuan teknologi juga memiliki potensi berpengaruh negatif dalam pembentukan karakter generasi muda serta dapat merusak masa depan generasi muda jika tidak dapat dikontrol dengan baik. Oleh karenanya, perlu pembinaan pemuda secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental melalui kegiatan yang edukatif, rekreatif dan produktif. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, dan sosial ekonomi produktif, olah raga serta kegiatan organisasi pemuda keagamaan.

Tabel 2.106 Capaian Kinerja Kepemudaan Tahun 2018-2022

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | - | 4 | 4 | 4 | 6 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2023

Pembinaan olahraga di Kabupaten Bondowoso terkendala terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga secara memadai. Pembinaan olahraga diarahkan pada cabang olahraga yang memiliki pengurus cabang tingkat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1) Cabang olahraga permainan : Sepak bola, bola voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Drumband, Catur, Senam Artistik, Gate Ball.
2) Cabang olahraga terukur : atletik, renang, panjat tebing, Balap Sepeda, Menembak, Sepatu Roda, Panahan dan Berkuda.
3) Cabang bela diri : pencak silat, wushu, karate, taekwondo, Tinju dan Tarung Derajat.
4) Cabang Olah Raga Dirgantara : Paralayang.

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Olah Raga Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Atlet yang mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional) | 250 | 371 | 188 | 202 | 282 |
| 2 | Cabor yang mengikuti kompetisi olahraga (tingkat regional) | - | 12 | 5 | 7 | 26 |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bondowoso, 2023

### 2.3.2.14 Urusan Statistik

Dalam era informasi, data statistik merupakan hal yang sangat penting dimana data yang dikumpulkan didasari oleh konsep dan definisi yang jelas dan baik sehingga semua pengguna dapat berkomunikasi dengan persepsi yang sama. Penyediaan data digunakan untuk bahan perencanaan, evaluasi maupun pengukuran dalam berbagai indikator pencapaian pembangunan. Penyediaan data statistik sektoral terangkum dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso. Penyelenggaraan urusan Statitistik dilaksanakan dengan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2.108 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Jenis Dokumen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | PDRB | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Bondowoso dalam angka | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Data statistik Sektoral yang disusun | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.3.2.15 Urusan Persandian

Pengamanan informasi pembangunan dalam bentuk persandian beserta segala aspek penyebarluasannya sangat diperlukan dalam rangka pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Pelaksanaan kegiatan persandian masih belum optimal dan memerlukan dukungan baik dari SDM, teknologi dan sarana prasarana.

Tabel 2.109 Jumlah Pengamanan Informasi Milik Daerah Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pengamanan informasi milik daerah (dokumen) | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat banyaknya benda cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, serta masih minimnya penyelenggaraan even yang bertema seni dan budaya sehingga diperlukan upaya pengelolaan dan pemeliharaan benda cagar budaya serta pelibatan masyarakat dalam melestarikan termasuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Disamping itu perlu upaya meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional melalui penyelenggaraan even-even pagelaran kesenian daerah. Potensi cagar budaya pada tahun 2018-2022 tercatat mencapai sebanyak 249 jenis, meningkatnya jumlah kesenian daerah menunjukkan jumlah dan jenis kesenian yang berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah grup kesenian yang mengembangkannya. Perkembangan Seni dan Budaya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.110 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Kesenian | 17 | 24 | 54 | 37 | 37 |
| 2. | Jumlah Gedung Kesenian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Jumlah Grup Kesenian | 11 | 26 | 42 | 66 | 122 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran maupun media transfer pengetahuan berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, karena perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan belajar mandiri yang dapat membantu masyarakat dalam belajar, tanggap dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial politik. Keberadaan perpustakaan diharapkan mampu mendorong kebebasan serta kemampuan berfikir kreatif masyarakat untuk menghadapi tantangan jaman dengan konsep yang modern, inovatif, kreatif dan sistematis. Pelayanan perpustakaan diarahkan dalam meningkatkan jumlah perpustakaan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan layanan sehingga meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan serta meningkatkan ketersediaan bahan bacaan berupa koleksi buku yang tersedia. Gambaran perkembangan perpustakaan tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.111 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jangkauan layanan perpustakaan keliling (kali) | 192 | 169 | 81 | 85 | 160 |
| 2. | Perpustakaan Satker Kab, Kec dan desa /Kel.(Unit) | 78 | 80 | 83 | 83 | 88 |
| 3. | Jumlah bahan pustaka di Perpustakaan umum daerah (Eksemplar) | 76.666 | 1.200 | 1.100 | 2.374 | 60.340 |
| 4. | Jumlah kunjungan ke Perpustakaan (Orang) | 149.095 | 153.604 | 53.847 | 46.909 | 52.685 |
| 5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul) | 31.237 | 31.951 | 32.302 | 32.327 | 32.793 |
| 6. | Jumlah perpustakaan berstandart SNP | 20 | 23 | 25 | 25 | 40 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso, 2023

Hingga tahun 2021 minat baca masyarakat terhadap bahan pustaka masih relatif rendah hal ini ditunjukkan dengan angka kunjungan perpustakaan pertahun yang mencapai 35,07%. Masyarakat belum memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, apabila dibanding dengan jumlah penduduk diatas 15 tahun yang ada maka jumlah kunjungan relatif masih kurang. Jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas, termasuk masih terbatasnya tenaga pustakawan yang dimiliki. Pada saat ini telah dikembangkan *website* untuk Perpustakaan Digital, hal ini sebagai upaya penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi dan ilmu pengetahuan dalam format digital, sehingga kunjungan ke perpustakaan oleh masyarakat dapat dilakukan secara *online*. Rendahnya minat baca masyarakat semakin turun akibat dampak pandemi covid-19, serta kebijakan PPKM. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan ke Perpustakaan yang semakin menurun. Optimalimasi pemanfaatan tehnologi informasi harus dilakukan utamanya dengan membangun Literasi Digital, agar minat baca masyarakat melalui media tehnologi dapat terpenuhi. Perluasan jangkauan Perpustakaan, melalui Perpustakaan

Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Pojok Baca di ruang publik dan Perpustakaan Keliling juga harus terus didorong.

### 2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Penanganan dan pengelolaan arsip perlu dilakukan secara cepat, tepat, akurat dan profesional. Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelayanan kearsipan tahun 2018 – 2022 menitikberatkan pada pembinaan sistem informasi manajemen kearsipan, baik secara manual maupun elektronik secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apabila dilihat capaian Tahun 2018 terdapat sebanyak 75 instansi atau sebesar 18,90%, maka pada Tahun 2022 instansi yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah adalah sebanyak 85 instansi atau sebesar 28,18%.

Tabel 2.112 Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Instansi pemerintah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai kaidah (Lembaga) | 75 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 2 | Jumlah arsip yg berhasil diakuisisi (eksemplar) | 3.500 | 3.700 | 3.325 | 1975 | 3880 |
| 3 | Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan (eksemplar) | 1.150 | 1.500 | 1.972 | 2.331 | 2.425 |
| 4 | Persentase arsip yang disajikan dalam bentuk digital (eksemplar) | 1.250 | 1.350 | 1.952 | 2.055 | 1.893 |
| 5 | Persentase arsip yang disusutkan/ Dimusnahkah (eksemplar) | 125 | 150 | 462 | 617 | 300 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso, 2023

Dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan dokumen daerah, penduplikatan dokumen maupun arsip daerah dalam bentuk digital dan membangun sistem pengamanan penyimpanan data antara lain melalui penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penelurusan, penyelamatan arsip dan dokumentasi foto yang bernilai sejarah terus dilaksanakan. Optimalisasi pelayanan informasi kearsipan melalui Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional harus segera dibangun sebagai bagian dari pelayanan informasi kearsipan. Masih rendahnya kesadaran Perangkat daerah akan pentingnya arsip yang dapat tersimpan dengan baik juga mnjadi kendala untuk penerapan penataan tata kelola kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan. Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah terkendala belum memadainya sarana dan prasarana infrastuktur maupun peralatan dan mesinnya.

## 2.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

### 2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Bondowoso adalah perikanan darat berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perkembangan luas areal, dan produksi perikanan tahun 2018 – 2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.113 Luas Areal, Produksi Perikanan Budidaya,
Perairan Umum dan Benih Ikan Tahun 2018 – 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luas areal Budidaya | | | | | |
| | - Kolam pekarangan (ha) | 123,90 | 13,77 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| | - Karamba ($m^2$) | 440,00 | 600,00 | 600,00 | 75 | 400 |
| | - Mina padi (ha) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 0.05 |
| | - Jaring apung ($m^2$) | 1.088 | - | - | - | - |
| 2 | Pembudidaya Ikan (orang) | 3.004 | 2.922 | 2.493 | 2.292 | 2.290 |
| 3 | Produksi perikanan budidaya (kg) | 929.732 | 939.239 | 907.822 | 808.802 | 868.690 |
| 4 | Produksi perikanan tangkap perairan umum (kg) | 252.400 | 222.600 | 148.760 | 124.914 | 120.963 |
| 5 | Produksi benih ikan (ekor) | 12.452.800 | 16.270.000 | 14.355.000 | 15.634.00 | 17.763.000 |
| 6 | Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th) | 20,95 | 21,19 | 20,84 | 20,37 | 21,62 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2023

Usaha budidaya perikanan belum sepenuhnya berkembang secara optimal dan intensif, karena usaha perikanan masih dianggap pekerjaan sampingan. Namun demikian fasilitasi pemasaran produk perikanan perlu terus dilakukan melalui pembinaan budidaya perikanan secara intensif kepada pokdakkan dalam rangka peningkatan pendapatan dan sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat. Disamping itu penangkapan ikan diperairan umum masih belum menggunakan cara-cara ramah lingkungan, sehingga sosialisasi dan pembinaan secara intensif tentang penangkapan ikan ramah lingkungan perlu terus dilakukan.

### 2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan dalam PDRB. Pengembangan sektor pariwisata dapat mendorong perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karakteristik

wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional.

Tabel 2.114 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2022

| No. | Obyek Wisata | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kawah ijen | 142.005 | 140.843 | 49.428 | 41.299 | 95.438 |
| 2. | Kawah Wurung | 16.194 | 6.283 | 6.795 | 6.501 | 15.589 |
| 3. | Batu Susun Solor | 16.093 | 8.889 | 5.705 | 4.944 | 7.773 |
| 4. | Pemandian air panas Blawan | 15.744 | 11.748 | 5.175 | 1.667 | 5.952 |
| 5. | Agrowisata Kopi Ijen | | | | | |
| 6. | Pemandangan alam Arak-arak | 21.800 | 16.129 | 6.478 | 8.656 | 18.909 |
| 7. | Pemandian alam Tasnan | 36.640 | 33.081 | 19.508 | 10.934 | 9.660 |
| 8. | Arung jeram Bosamba | | | | - | - |
| 9. | Taman Rengganis dan Situs Glingseran | 14.743 | 4.527 | 612 | 374 | 536 |
| 10. | Saung Naga Sumber Gading | | | | 577 | 844 |
| 11. | Wisata desa Rumah Joglo Curahdami | | | | | 5062 |
| 12. | Wisata Desa Agrapana | | | | 615 | 7928 |
| 13. | Wisata Desa Kave Karang Melok | | | | 243 | |
| 14. | Situs Megalit Pekauman | 1.651 | 10.106 | 2.914 | 1.445 | 2.689 |
| 15. | Situs Tanah Wulan | | | | - | - |
| 16. | Situs Tegal mijin | | | | - | - |
| 17. | Situs Sumber Wringin | | | | - | - |
| 18. | Situs Pujer | | | | - | - |
| 19. | Gua Buto Jirek Mas | | | | 277 | 727 |
| 20. | Gua Butha Sumber Canting Kluncing | | | | | 44 |
| 21. | Hutan Pelangi Sumber Wringin | | | | 1001 | 3349 |
| 22. | Lava Basaltis Plalangan | | | | 8507 | 14243 |
| 23. | Lava Blawan( Litle Niagara mini ) | | | | | 5732 |
| 24. | Situs Sukosari | | | | - | - |
| 25. | Air terjun Polo Agung | | | | - | - |
| 26. | Air Terjun Goa Tunggal | | | | | |
| 27. | Puncak Potreh Koneng | 10.716 | | | | |
| 28. | Air Terjun Blawan | | | 5.215 | 4.220 | 6.102 |
| 29. | Kali Pait | | | 7.353 | 5.248 | 8.960 |
| 30. | Perkebunan Kopi Arabica | | | 1.216 | 37 | 9.922 |
| 31. | Air Terjun Gentongan | 1.113 | 1.267 | | 97 | 383 |
| 32. | Air terjun Tancak Kembar | 6.166 | 1.343 | 427 | 600 | 593 |

| No. | Obyek Wisata | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 33 | Pendakian Gunung Argopuro | | | | - | - |
| 34 | Pendakian gunung Raung | 780 | 635 | 46 | - | 81 |
| 35 | Desa Wisata Lombok Kulon | 4.957 | 1.955 | 902 | 510 | 699 |
| 36 | Desa Wisata Almour | 42.256 | 46.896 | 19.619 | 9.708 | 9.864 |
| 37 | Patirana P28 | 11.945 | 2.716 | 176 | 319 | - |
| 38 | Situs Mas Kuning Megalitikum | | | | 229 | 950 |
| 39 | Pemandian Kelapa Gading | 24.421 | 7.627 | | - | - |
| 40 | Pemandian Kharisma | 37.207 | 38.123 | 17.360 | 6.097 | 5.968 |
| 41 | Pemandian Al-amin Kajar | | | 20.533 | 15476 | 21172 |
| 42 | Navara Waterpark | | | | | |
| 43 | River Tubbing Tlogosari | 118 | | | - | - |
| 44 | Museum Kereta Api | 11.976 | 10.272 | 2.227 | 488 | 2.072 |
| 45 | Makam Ki Ronggo | 5.532 | 7.427 | 2.793 | 2.904 | 9.168 |
| 46 | Makam Kiai Mas Prajekan | | | 905 | 3548 | 7537 |
| 47 | Makam Mbah Singo | | | | 780 | 1587 |
| 48 | Padepokan Sine Gema Buana | 1.986 | 1.100 | 154 | 39 | 959 |
| 49 | Batik Sumbersari | 13.929 | 18.799 | 15.946 | - | - |
| 50 | Sumber Salak | | | | - | - |
| 51 | Pemandian WOW Klabang | | 24.911 | 28.845 | 22.357 | 40.099 |
| 52 | Bosamba Rafting | 1.267 | 881 | 160 | - | - |
| 53 | Puncak Megasari | 2.560 | 2.100 | 1.375 | 1.762 | 3.567 |
| 54 | Wisata Bukit Luwih | | 31.314 | 10.839 | 4.577 | 5.130 |
| 55 | Bukit Mahadewa | 10.426 | 3.944 | 288 | 99 | - |
| 56 | Wisata Rumah Selfie Penambangan | | 1.378 | 735 | - | - |
| 57 | Desa Wisata Tirta Agung | | 69.750 | 27.434 | 20.773 | 33.471 |
| 58 | Desa Wisata Blimbing Klabang | | | 306 | | |
| 59 | Desa Wisata Budaya Ramban Kulon | | | 154 | | |
| 60 | Wisata Desa Wonoboyo | | | 182 | 1452 | 1959 |
| 61 | Situs Banyu Putih | 717 | 326 | | - | - |
| 62 | Goes House Jampit | | | 1.504 | | |
| 63 | Catimore Homestay | | 9.222 | | 739 | - |
| 64 | Arabica Homestay | | 7.399 | | 300 | 3.023 |
| 65 | Hotel Palm | | 15.189 | | 4.193 | 9.420 |
| 66 | Kinanti Hotel | | 1.236 | | 628 | 1.649 |
| 67 | Hotel Anugrah | | 5.985 | | 3.061 | 6.608 |
| 68 | Hotel Baru | | 1.567 | | 6.630 | 7.835 |

| No. | Obyek Wisata | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 69 | Hotel Slamet | | 16.152 | | 12.760 | 16.422 |
| 70 | Hotel Ijen View | | 33.827 | | 6.324 | 22.421 |
| 71 | Grand Hotel | | 464 | | 1.055 | 1.563 |
| 72 | Wisata Asri | | 1.103 | | 1.908 | 728 |
| 73 | Hotel RIS | | 244 | | 1.185 | 3.242 |
| 74 | Hotel Melati | | 219 | | 183 | 368 |
| 75 | Hotel Wisata Ijen | | 1.029 | | 18.88 | 2.054 |
| 76 | Panorama Hotel | | 211 | | 103 | 217 |
| 77 | Hotel Grand Padis | | 14.725 | | 7.082 | 17.859 |
| 78 | Dreamland Hotel | | | | 6.449 | 3.297 |
| 79 | Baratha Hotel | | | | 1.441 | 1.727 |
| 80 | Pondok Wisata Pesanggrahan Sumber wringin | | 278 | | 4 | 3 |
| | **Jumlah** | **452.942** | **613.220** | **263.309** | **244.293** | **463.154** |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, 2023

Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bondowoso tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, tercatat sebanyak 613.220 kunjungan (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso). Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tingkat kunjungan mengalami penurunan signifikan akibat pandemi covid-19, sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam kebijakan PSBB, destinasi wisata mengalami buka tutup, namun tingkat kunjungan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dikarenakan kebijakan new normal dan perubahan dari pandemi menuju endemik. Data tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 89% dibanding tahun 2021, atau dengan jumlah 463.154 kunjungan.

Sedangkan pada tahun 2021 rata – rata lama tinggal wisatawan mancanegara 1,8 hari, dan wisatawan nusantara selama 0,7 hari. Pada tahun 2022 rata – rata lama tinggal wisatawan mancanegara 1,8 hari dan wisatawan nusantara selama 1 hari.

Tabel 2.115 Jumlah Total Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) di Destinasi Wisata Tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Bondowoso

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kunjungan wisatawan | 452.942 | 504.370 | 263.309 | 188.360 | 366.522 |

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso, 2023

Dukungan sumber daya manusia yang diperlukan masih sangat terbatas khususnya di lokasi destinasi wisata untuk dapat mengelola objek wisata dengan baik dalam rangka memberikan daya tarik dan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung dan menikmati atraksi wisata yang ada. Sedangkan di sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum signifikan sehingga dampak pembangunan

pariwisata belum dapat dirasakan dari aspek pendapatan asli daerah. Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.115A Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018 – 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **Pajak Daerah** | **3.577.972.944,00** | **4.486.795.801,00** | **3.035.970.739,00** | **3.758.406.652,00** | **5.557.119.242,00** |
| | Pajak Hotel | 952.594.442,00 | 1.084.750.037,00 | 663.747.507,00 | 706.656.835,00 | 1.045.065.838.,00 |
| | Pajak Restoran | 2.578.130.002,00 | 3.300.916.764,00 | 2.337.739.432,00 | 3.027.371.917,00 | 4.447.020.744,00 |
| | Pajak Hiburan | 47.248.500,00 | 101.129.000,00 | 34.483.800,00 | 24.377.900,00 | 65.032.660,00 |
| 2 | **Retribusi Jasa Usaha** | **136.355.020,00** | **120.524.179,00** | **119.802.978,00** | **133.947.750,00** | **279.261.580,00** |
| 3 | **Lain-Lain PAD yang Sah** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | TOTAL PAD | 203.239.207.718,18 | 218.538.009.619,15 | 222.657.296.673,72 | 223.136.567.608,59 | 189.206.091.323,727 |
| | KONTRIBUSI PAD SEKTOR PARIWISATA | 3.719.327.964,00 | 4.612.319.980,00 | 3.155.773.717,00 | 3.892.354.402 | 5.836.380.822 |
| | % KONTRIBUSI PAD SEKTOR PARIWISATA | 1,83% | 2,11% | 1,42% | 1,74% | 3,08% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata Nasional Geopark Ijen bersama Kabupaten Banyuwangi, terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang masuk dalam delineasi Geopark Ijen meliputi Kecamatan Ijen, Sumber Wringin, Sukosari, Cermee, Prajekan, Klabang, Botolinggo, Pujer, Tlogosari, Tapen, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso, dan Jambesari Darussholah. Geopark Ijen ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak tanggal 13 Nopember 2020, dan telah mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Unesco Global Geopark.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), menyatakan bahwa Pengembangan Geopark utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pengelolaan Geopark dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata berupa pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata. Pariwisata geopark secara berkelanjutan dimaknai sebagai upaya penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dengan usaha konservasi dan edukasi masyarakat. Obyek-obyek warisan bumi di dalam geopark berpeluang menciptakan nilai ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata berbasis alam (geologi) atau geowisata merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bondowoso. Selain itu, mutu dan ragam even masih dapat ditingkatkan untuk dapat menyediakan lebih banyak arena bagi insan kreatif Bondowoso serta menarik minat kunjungan wisatawan ke Bondowoso, baik untuk partisipasi aktif dalam even maupun untuk sekedar menonton.

### 2.3.3.3 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Kontribusi sektor pertanian dari tahun 2018 hingga tahun 2022 semakin menurun, namun pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian meningkat dibanding tahun 2019.

Tabel 2.116 Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso dan Kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2018 – 2022

| No. | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | **Primer (*Agriculture*)** | | | | | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 30,39 | 29,17 | 29,83 | 29,47 | 28,34 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2,00 | 1,96 | 1,87 | 1,84 | 1,86 |
| B. | **Sekunder (*Manufacture*)** | | | | | |
| 3 | Industri Pengolahan | 22,57 | 23,32 | 23,89 | 24,42 | 25,28 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Konstruksi | 9,65 | 9,66 | 9,14 | 8,80 | 9,13 |
| C. | **Tersier (*Services*)** | | | | | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda | 15,20 | 15,44 | 14,45 | 14,90 | 15,37 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0,83 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,74 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | 0,68 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 5,07 | 5,15 | 5,57 | 5,64 | 5,40 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,95 | 2,89 | 2,89 | 2,83 | 2,80 |
| 12 | Real Estat | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | 1,14 |
| 13-14 | Jasa Perusahaan | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| 15 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 3,32 | 3,41 | 3,50 | 3,32 | 3,07 |
| 16 | Jasa Pendidikan | 3,43 | 3,49 | 3,64 | 3,52 | 3,34 |
| 17 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,71 | 0,72 | 0,79 | 0,80 | 0,77 |
| 18-21 | Jasa Lainnya | 1,63 | 1,63 | 1,42 | 1,44 | 1,54 |
| | **PDRB** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 6.489.780 juta rupiah atau sebesar 28,34 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 92,63 persen.

Lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB kategori pertanian, kehutanan dan peternakan tahun 2022 adalah Lapangan usaha tanaman pangan sebesar 41,17%, disusul, peternakan 23,90%, tanaman perkebunan 21,11%, Tanaman Hortikultura 5,62, Kehutanan 3,85, perikanan 3,51% dan terkecil adalah Lapangan usaha jasa pertanian dan perburuan sebesar 0,83%.

Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.117 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Bondowoso (%) Tahun 2018 – 2022

| No. | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 92,90 | 92,59 | 92,34 | 92,25 | 92,63 |
| | a. Tanaman Pangan | 43,31 | 42,07 | 41,81 | 40,95 | 41,17 |
| | b. Tanaman Hortikultura | 5,09 | 5,09 | 5,26 | 5,36 | 5,62 |
| | c. Tanaman Perkebunan | 21,39 | 21,13 | 20,59 | 20,85 | 21,11 |
| | d. Peternakan | 22,19 | 22,91 | 23,84 | 24,25 | 23,90 |
| | e. Jasa Pertanian dan Perburuan | 0,92 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,83 |
| 2. | Kehutanan dan Penebangan Kayu | 3,72 | 3,88 | 3,93 | 4,02 | 3,85 |
| 3. | Perikanan | 3,37 | 3,53 | 3,73 | 3,74 | 3,51 |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian juga masih dirinci lagi dan Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah subkategori usaha tersebut yaitu sebesar 41,17 persen, disusul Peternakan sebesar 23,90 persen dan Tanaman Perkebunan sebesar 21,11 persen dari seluruh nilai tambah subkategori. Kontribusi subkategori Perikanan sebesar 208,9 milyar rupiah atau 3,51 persen dan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 229,2 milyar rupiah atau 3,85 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Fluktuasi tersebut terjadi karena fluktuasi yang terjadi pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, khususnya Tanaman Pangan. Sementara itu, dua subkategori lainnya tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dibawah 3 persen. Pada tahun 2020, kategori ini tumbuh sebesar 1,35 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya tumbuh sebesar 1,21 persen.

Perkembangan Luas areal, produktifitas dan produksi tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Bondowoso cenderung fluktuatif. Luas panen tanaman padi seluas 87.410 ha pada tahun 2018 dan 74.594 Ha pada tahun 2022. Luas areal budidaya tanaman hortikultura mencapai 758,82 ha yang meliputi tanaman cabe rawit dengan luas tanam mencapai 725 ha dan bawang merah seluas 33,82 ha. Sedangkan luas areal budidaya tanaman biofarmaka mencapai 1.195,37 ha yang meliputi tanaman jahe seluas 310 ha dan kunyit seluas 885,37 ha.

Perkembangan produktivitas tanaman padi dan palawija selama 5 tahun cenderung meningkat. Produktivitas padi pada tahun 2018 mencapai 61,49 kw/ha dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 61,7 kw/ha. Produktivitas tanaman jagung meningkat dari 52,16 kw/ha pada tahun 2018 menjadi 52,73 kw/ha pada tahun 2022. Produktivitas kedelai meningkat dari 14,98 kw/ha pada tahun 2018 menjadi 15,20 kw/ha pada tahun 2022. Gambaran perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi

komoditi pertanian tanaman pangan dan holtikutura secara rinci tercantum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.118 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditi Pertanian Tahun 2018- 2022

| No. | Uraian | Sat | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **I** | **Luas Panen** | | | | | | |
| **1** | **Padi Palawija** | | | | | | |
| a | Padi | Ha | 87.410 | 99.086 | 88.166 | 73.677 | 74.594 |
| b | Jagung | Ha | 28.409 | 26.807 | 32.766 | 36.009 | 37.136 |
| c | Kedelai | Ha | 212 | 138 | 52 | 21 | 21 |
| d | Ubi Kayu | Ha | 1.720 | 1896 | 2.110 | 2.136 | 2.149 |
| **2** | **Sayuran** | | | | | | |
| a | Bawang Merah | Ha | 110 | 39 | 42 | 50 | 33,82 |
| b | Cabe Rawit | Ha | 1.980 | 1.413 | 1.560 | 1.374 | 725 |
| **3** | **Biofarmaka** | | | | | | |
| a | Jahe | Kw/Ha | 60,06 | 59,28 | 171 | 2 | 161,1 |
| b | Kunyit | Kw/Ha | 33,41 | 169,89 | 221 | 2 | 19,55 |
| **ii** | **PRODUKTIVITAS** | | | | | | |
| **1** | **Padi Palawija** | | | | | | |
| a | Padi | Kw/Ha | 61,49 | 61,52 | 61,54 | 61,55 | 61,7 |
| b | Jagung | Kw/Ha | 52,16 | 52,42 | 52,51 | 52,73 | 51,9 |
| c | Kedelai | Kw/Ha | 14,98 | 15,02 | 15,09 | 15,10 | 15,2 |
| d | Ubi Kayu | Kw/Ha | 210,52 | 228,31 | 228,44 | 228,66 | 227,8 |
| **2** | **Sayuran** | | | | | | |
| a | Bawang Merah | Kw/Ha | 96,38 | 96,72 | 109,62 | 97 | 103,8 |
| b | Cabe Rawit | Kw/Ha | 84,02 | 84,21 | 85,00 | 85 | 83,8 |
| **3** | **Biofarmaka** | | | | | | |
| a | Jahe | Kw/Ha | 60,06 | 59,28 | 171 | 2 | 161,1 |
| b | Kunyit | Kw/Ha | 33,41 | 169,89 | 221 | 2 | 19,55 |
| **iii** | **PRODUKSI** | | | | | | |
| **1** | **Padi Palawija** | | | | | | |
| a | Padi | Ton | 537.450 | 609.378 | 542.574 | 453.503 | 460.452 |
| b | Jagung | Ton | 148.668 | 140.604 | 172.054 | 189.869 | 193.106 |
| c | Kedelai | Ton | 317,08 | 207 | 78 | 32 | 32 |
| d | Ubi Kayu | Ton | 39.234 | 43.297 | 48.201 | 48.842 | 48.964 |
| **2** | **Sayuran** | | | | | | |
| a | Bawang Merah | Ton | 1.060 | 3.772 | 460 | 487 | 351 |
| b | Cabe Rawit | Ton | 16.637 | 118.983 | 132.602 | 11.697 | 6.076 |
| **3** | **Biofarmaka** | | | | | | |
| a | Jahe | Ton | 2534,47 | 1.076 | 5.130 | 530 | 315 |
| b | Kunyit | Ton | 15107,74 | 19.774 | 19.227 | 18.985 | 17.309 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2023

Perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan adanya peralihan jenis tanaman dari tanaman perkebunan ke tanaman kehutanan. Selama tahun 2017-2021, penanaman tembakau tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 8.415,12 ha dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai luas 6.372,70 Ha turun

sebanyak 1.886,8 ha dibanding penanaman tahun 2019. Untuk perkembangan luas tanaman kopi selama 5 tahun bertambah 13 ha dari seluas 13.636 ha pada tahun 2017 menjadi 13.649 ha pada tahun 2021. Sedangkan untuk tanaman tebu mengalami penurunan luas areal dari 6.592,615 ha pada tahun 2017 menjadi 6.060,09 ha pada tahun 2021.

Produktivitas tanaman perkebunan terutama tanaman Kopi masih rendah dibanding dengan potensi genetik yang bisa mencapai 1,2 ton/ha untuk kopi Arabika dan 2 Ton/ha untuk Kopi robusta. Produktivitas kopi arabika di Kabupaten Bondowoso tertinggi hanya mencapai 0,48 ton/ha dan produktivitas kopi robusta tertinggi mencapai 0,45 ton/ha. Sedangkan produktivitas tanaman tebu tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 61,42 ton tebu/ha lebih rendah dari potensi tanaman tebu yang bisa mencapai 1.125-1.500 ton tebu/ha. Perkembangan Luas areal, produktivitas dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Bondowoso selama 2017-2021 secara rinci tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.119 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2017 – 2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **I** | **Luas Panen** | | | | | |
| 1 | Kopi (Ha) | 13.636 | 13.636 | 13.636 | 13.649 | 13.649 |
| | Luar Kawasan Hutan | | | | | |
| | - Robusta (Ha) | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.150 | 1.150 |
| | - Arabika (Ha) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| | Dalam Kawasan Hutan | | | | | |
| | - Robusta (Ha) | 4.349 | 4.349 | 4.349 | 4.316 | 4.316 |
| | - Arabika (Ha) | 7.676 | 7.676 | .7676 | 7.749 | 7.749 |
| 2 | Tebu (Ha) | 6.592,615 | 6.299,93 | 6.060,09 | 6.060,09 | 6.060,09 |
| 3 | Tembakau (Ha) | 6.756,60 | 7.293 | 8.259,5 | 6.372,70 | 8,415,12 |
| **II** | **Produksi** | | | | | |
| 1 | Kopi (Ton) | 3.050,54 | 3.506,88 | 3.756,39 | 4.335,95 | |
| 2 | Tebu (Ton) | 35.652,72 | 28.881,50 | 27.352,72 | 28.224,01 | 28.224,01 |
| 3 | Tembakau | | | | | |
| | - Kasturi (Ton) | 1802,56 | 3788,910 | 3941,45 | 2.648,66 | 2.648,66 |
| | - Rajangan (Ton) | 2901,14 | 5591,105 | 7.360,93 | 5.766,46 | 5.766,46 |
| **III** | **Produktivitas** | | | | | |
| 1 | Kopi (Ton Oce) | | | | | |
| | Luar Kawasan Hutan | | | | | |
| | - Robusta (Ton/Ha) | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
| | - Arabika (Ton/Ha) | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,47 |
| | Dalam Kawasan Hutan | | | | | |
| | - Robusta (Ton/Ha) | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Arabika (Ton/Ha) | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Tebu (Ton/Ha) | 51,5 | 55,3 | 59,02 | 61,42 | 61,42 |
| 3 | Tembakau | | | | | |
| | - Kasturi (Ton/Ha) | 0,72 | 1,62 | 1,81 | 1,65 | 1,65 |
| | - Rajangan (Ton/Ha) | 0,67 | 1,13 | 1,24 | 1,21 | 1,21 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, 2022

Populasi ternak di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif, pada tahun 2018 populasi ternak sapi potong mencapai 224.917 ekor dan pada tahun 2022 mencapai 232.659 ekor. Sedangkan ternak sapi perah semula sebanyak 19 ekor pada tahun 2018 tetapi pada tahun 2022 menjadi 12 ekor. Populasi ternak kambing meningkat dari sebanyak 45.976 ekor pada tahun 2018 menjadi sebanyak 55.254 ekor pada tahun 2022. Ternok domba pada tahun 2018 sebanyak 40.778 ekor menjadi 51.276 ekor pada tahun 2022. Populasi ternak kelinci pada tahun 2018 sebanyak 8.757 ekor menjadi 10.318 ekor pada tahun 2022.

Produksi ternak selama tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan sebesar 3.91%. Produksi daging pada tahun 2018 sebanyak 4.390.544 kg/tahun menjadi sebanyak 4.903.572 kg/tahun pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 2.81% per tahun (128.257 kg/tahun). Produksi telur pada tahun 2018 sebanyak 2.730.215 kg/tahun dan pada tahun 2020 menjadi 3.258.871 kg/tahun atau mengalami peningkatan sebesar 4,69% per tahun (132.164 kg/tahun). Sedangkan produksi susu cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2018 sebanyak 63.037 liter/tahun menjadi 197.506 liter/tahun pada tahun 2022. Perkembangan populasi, dan produksi ternak di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2018-2022 sebagaiman tabel berikut:

Tabel 2.120 Populasi, Produksi Ternak dan
Tingkat Konsumsi Masyarakat Tahun 2018 - 2022

| No. | Jenis Kegiatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I | Populasi Ternak | | | | | |
| 1 | Sapi potong (ekor) | 215.184 | 219.013 | 224.917 | 228.445 | 234.300 |
| 2 | Sapi perah (ekor) | 31 | 20 | 19 | 13 | 12 |
| 3 | Kuda (ekor) | 807 | 926 | 941 | 985 | 1.065 |
| 4 | Kambing (ekor) | 43.898 | 44.399 | 45.976 | 47.170 | 49.166 |
| 5 | Domba (ekor) | 38.723 | 41.156 | 40.778 | 42.937 | 44.506 |
| 6 | Kelinci (ekor) | 4.658 | 6.009 | 8.757 | 6.757 | 8.884 |
| 7 | Ayam Buras (ekor) | 627.078 | 662.655 | 694.197 | 710.471 | 698.046 |
| 8 | Ayam Ras Petelur (ekor) | 181.364 | 185.212 | 244.800 | 199.037 | 232.045 |
| 9 | Ayam Ras Pedaging (ekor) | 491.500 | 662.655 | 456.800 | 1.929.852 | 2.685.053 |

| No. | Jenis Kegiatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | Itik (ekor) | 61.058 | 84.638 | 62.118 | 66.018 | 71.350 |
| 11 | Entok (ekor) | 17.547 | 20.037 | 18.222 | 21.304 | 22.833 |
| **II** | **Produksi Ternak** | | | | | |
| 1 | Daging (kg/thn) | 2.826,000 | 3.980,347 | 4.390,544 | 4.419,295 | 4.595.681 |
| 2 | Telur (kg/thn) | 2.036,9 | 2.122,49 | 2.730,215 | 2.828,351 | 3.245.929 |
| 3 | Susu (ltr/thn) | 1.362 | 18.026 | 63.037 | 238.481 | 239.586 |
| **III** | **Konsumsi** | | | | | |
| 1 | Daging (Kg/Kpt/Th) | 3,696 | 3,696 | 3.666 | 3,726 | 3.764 |
| 2 | Telur (Kg/Kpt/Th) | 2,960 | 2,960 | 2.936 | 2,983 | 2.996 |
| 3 | Susu (Kg/Kpt/Th) | 1,153 | 1,153 | 1.144 | 1,162 | 1.171 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2023

Selain peningkatan kesejahteraan dan SDM petani, dalam rangka penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan yang tepat guna diperlukan upaya sinergis yang berkelanjutan.

Upaya penyediaan sarana produksi dan pengembangan bibit unggul pertanian dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan bibit unggul dan hasil pertanian yang dapat bersaing dan diterima pasar. Standarisasi benih diperlukan untuk menjaga kualitas hasil produksi pertanian.

Tabel 2.121 Perkembangan Luas HMT dan Kelahiran Hasil IB Tahun 2018 - 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Peningkatan luas lahan HMT (ha) | 3.050 | 3.085 | 3.150 | 10.000 | 20.000 |
| 2. | Peningkatan kelahiran hasil IB (ekor) | 39.539 | 51.519 | 46.108 | 49.338 | 52.548 |

Sumber: Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, 2023

Tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan masih rendah sebagai akibat dari masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh petani dan peternak serta akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung sumber daya pertanian sehingga perlu diupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian melalui pelatihan bimbingan di bidang pertanian khususnya dalam penerapan teknologi yang sesuai untuk peningkatan produksi secara efisien. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui Penerapan teknologi pertanian berkelanjutan melalui pertanian terpadu dengan cara sistem tanam ganda, komplementari hewan ternak dan tumbuhan, usaha terpadu peternakan dan perkebunan, *agroforestry*, pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya genetik dan pengelolaan hama terpadu.

Lemahnya kelembagaan, posisi tawar dan sistem pemasaran yang belum berpihak pada petani dan peternak, maka perlu dilakukan penguatan kembali lembaga pertanian

dan perdesaan (GAPOKTAN) untuk meningkatkan posisi tawar petani, mengaktifkan kembali koperasi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian, mengembangkan pasar lelang komoditi.

Masih rendahnya mutu produk pertanian, sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan teknis, sanitasi dan higienis sehingga produk yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan mutu ekspor, maka perlu pendampingan dan pembinaan berkesinambungan dalam penanganan praproduksi, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama eksportir dan pengusaha produk hilir pertanian. Peningkatan pengujian jumlah sampel bahan pangan asal hewan dan ikan memerlukan sosialisasi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bondowoso agar pedagang paham dan mengerti bahaya penggunaan borak dan formalin terhadap kesehatan konsumen.

### 2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso terus meningkat selama tahun 2016-2019, yaitu sebesar 14,76%, 14,91%, 15,20%, 15,44% dan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 menurun menjadi sebesar 14,45%. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 2,88 triliun rupiah atau sekitar 14,45 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 83,15 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan 16,85 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Laju pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama tahun 2016-2017 dan cenderung melambat selama periode 2018-2020. Laju pertumbuhan sebesar 6,37 persen di tahun 2018 melambat menjadi 6,33 di tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -8,23 persen akibat pandemi covid-19, yang dipengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Tabel 2.122 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Kategori Perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Bondowoso (Persen) Tahun 2016-2020

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 22,47 | 22,29 | 21,85 | 21,06 | 16,85 |
| 2 | Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 77,53 | 77,71 | 78,15 | 78,94 | 83,15 |
| | **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2021

Peningkatan sarana prasarana perdagangan melalui revitalisasi pasar rakyat merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Kondisi pasar sebagai sarana perdagangan tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.123 Kondisi Pasar Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2022

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar tradisional | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Ruko | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3. | Toko | 130 | 130 | 119 | 119 | 149 |
| 4. | Kios | 1.315 | 1.315 | 1.428 | 1.428 | 1.472 |
| 5. | Los | 1.599 | 1.599 | 1.790 | 1.883 | 1.561 |
| 6. | Jumlah pedagang pasar | 5.146 | 5.146 | 5.146 | 5.260 | 3.221 |

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2023

Pada tahun 2021, Nilai komoditi berorientasi ekspor meningkat menjadi Rp. 34,007 milyar dibanding pada tahun 2020 yang mencapai Rp. 33,54 milyar. Komoditi perkebunan khususnya komoditi kopi masih menjadi andalan dalam menyumbang devisa. Perkembangan nilai komoditi berorientasi ekspor tahun 2017 – 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.124 Perkembangan Ekspor (Milyar) Tahun 2017 - 2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai komoditi berorientasi ekspor | 30,07 | 33,90 | 25,66 | 33,54 | 34,007 |

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2022

Sedangkan jumlah pedagang kaki lima dan asongan serta wirausaha yang telah mendapat pembinaan tahun 2017 - 2021, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.125 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Serta Wirausaha Tahun 2017 - 2021

| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina (org) | 1.250 | 960 | 291 | 286 | 281 |
| 2. | Jumlah wirausaha yang dibina (org) | 150 | 120 | 1.030 | 1.045 | 1.050 |
| 3. | Jumlah pedagang yang dibina (org) | 225 | 245 | 265 | 395 | |
| 4. | Jumlah pedagang yang dibina tentang perlindungan konsumen | 180 | 180 | 185 | 80 | |
| 5. | Jumlah Pedagang | 13.124 | 13.124 | 13.214 | 17.625 | 17.825 |

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2022

Beberapa pasar daerah masih memerlukan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi kriteria pasar sehat. Guna memenuhi kriteria tersebut, perlu dilakukan rehabilitasi pasar secara bertahap.

Kegiatan tera/tera ulang yang merupakan bagian dari perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat kelembagaan UPT metrologi Legal belum terbentuk. Dalam melaksanakan kegiatan

tera/tera ulang telah dilakukan kerjasama dengan Badan Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Yogyakarta. Disamping itu implementasi sistem jaringan pasar rakyat (Sijeprak) belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan sistem dan mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang serta diperlukan publikasi kepada masyarakat secara lebih komprehensif.

### 2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri khususnya kategori industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2018-2022 terus meningkat yaitu sebesar 22,57%, 23,32%, 23,89%, 24,42% dan 25,28%. Selama Pandemi Covid-19 sektor industri khususnya industri pengolahan yang didominasi industri makanan dan minuman tetap tumbuh walaupun sangat kecil. Pada Kategori Industri Pengolahan, jenis industri dengan nilai produksi terbesar di tahun 2022 adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu mencapai Rp464.785.973.300,00 atau 48,33 persen. Berikutnya adalah Industri Barang Galian Bukan Logam dengan nilai produksi sebesar Rp384.000.255.400,00 atau 39,93 persen. Secara umum, Produk Domestik Regional Bruto untuk Industri Pengolahan berkembang dari 4.173,81 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 5.788,78 milyar rupiah pada tahun 2022 yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku. Pertumbuhan kategori industri pengolahan selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 9,37 persen, tetapi pada tahun 2020 hanya mampu tumbuh sebesar 0,33 persen. Hal ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Namun demikian, seiring dengan terkendalinya Pandemi Covid-19, PDRB Industri Pengolahan mulai berangsur meningkat. Pada tahun 2021 tercatat PDRB Industri Pengolahan sudah dapat tumbuh mencapai 3,81 persen dan semakin meningkat hingga 6,23 persen pada tahun 2022.

Untuk lebih memberi gambaran tentang jenis industri yang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Bondowoso, ditampilkan data Persentase Nilai Produksi Per Jenis Industri di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.126 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Bondowoso (Persen) Tahun 2019-2022

| No. | Lapangan Usaha/Industri | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | - | - | - | - |
| 2 | Industri Makanan dan Minuman | 45,40 | 45,40 | 46,27 | 48,33 |
| 3 | Industri Pengolahan Tembakau | 2,74 | 2,74 | 2,66 | 2,11 |
| 4 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 4,53 | 4,53 | 5,12 | 5,42 |
| 5 | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2,47 | 2,47 | 2,39 | 2,48 |
| 7 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas; | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |

| No. | Lapangan Usaha/Industri | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | | | | |
| 8 | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 9 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
| 10 | Industri Barang Galian bukan Logam | 43,06 | 43,06 | 41,81 | 39,93 |
| 11 | Industri Logam Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,63 |
| 13 | Industri Mesin dan Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Industri Alat Angkutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Industri Furnitur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | **Industri Pengolahan** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Sumbangan sektor industri di Kabupaten Bondowoso lebih banyak didominasi industri kecil yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi dan tetap eksis. Perkembangan jumlah industri kecil selama tahun 2018-2022 terus bertambah. Pada tahun 2018, jumlah industri kecil sebanyak 20.246 unit meningkat menjadi 20.791 unit pada tahun 2022. Sedangkan nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp146.456.137.000,00 meningkat menjadi Rp.149.618.821.000,00 pada tahun 2022. Perkembangan industri di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127 Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Industri Kecil | | | | | |
| | - Jumlah unit usaha (unit) | 20.246 | 20.388 | 20.518 | 20.651 | 20.791 |
| | - Jumlah Tenaga Kerja (org) | 64.773 | 65.240 | 56.754 | 56.952 | 57.171 |
| | - Jumlah nilai investasi (000 Rp.) | 146.456.137 | 146.456.137 | 147.548.606 | 148.505.033 | 149.618.821 |
| 2. | Sentra Industri Kecil | | | | | |
| | - Jumlah sentra IKM (unit) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | - Jumlah unit usaha (unit) | 4.446 | 4.456 | 4.421 | 4.426 | 4477 |
| | - Jumlah tenaga kerja (org) | 9.161 | 9.300 | 9.210 | 9.283 | 9332 |
| | - Jumlah nilai investasi (000 Rp.) | 10.039.417 | 10.101.620 | 10.101.620 | 10.192.535 | 10.922.202 |
| 3. | Industri Kecil Non Formal | | | | | |
| | - Jumlah unit usaha (unit) | 19.528 | 19.623 | 19.630 | 19.675 | 19.761 |
| | - Jumlah tenaga kerja (org) | 59.833 | 60.725 | 59.822 | 60.086 | 60.248 |
| | - Jumlah nilai investasi (000 Rp.) | 32.747.745 | 33.618.200 | 33.735.000 | 33.939.000 | 34.186.000 |

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, 2023

Jumlah industri kecil di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang berjumlah lebih dari 20.000 unit usaha tersebut memerlukan strategi pembinaan yang tepat agar dapat berkembang di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

### 2.3.3.6 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi dilakukan dalam rangka penyebaran penduduk serta merupakan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan pelaksanaan transmigrasi adalah menurunkan tingkat pengangguran melalui program transmigrasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi didasarkan kepada Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama tahun 2016-2020 tidak ada penduduk Kabupaten Bondowoso yang mengikuti transmigrasi.

## 2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah secara umum mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah yang bersifat koordinatif diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan melalui penerapan sistem yang terintegrasi bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses pelaporan dan evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tabel. 2.128 Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persentase Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Penyusunan Kebijakan Bidang Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

### 2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Secara fungsi sekretariat DPRD melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat/sidang DPRD, fasilitasi penyusunan perundang-undangan DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.129 Capaian Kinerja Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persepsi IKM terhadap peran DPRD | 7,90 | 7,51 | 7,51 | 7,71 | 7,80 |
| 2 | % Raperda yang dibahas | 42,86% | 93,75% | 75% | 81,25% | 94,12% |
| 3 | % Raperda yang ditetapkan | 42,86% | 88% | 75% | 81,25% | 94,12% |
| 4 | % Aspirasi yang ditindaklanjuti | 102,53% | 106,23% | 103,72% | 100% | 104,96% |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Bondowoso, 2023

### 2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 2.3.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik

untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Tabel 2.130 Dokumen Perencanaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Jenis Dokumen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | RPJPD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | RPJMD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | RKPD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | RTRW | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.131 Program Pembangunan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah program pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang harus dilaksanakan | 36 Program | 54 Program | 54 Program | 24 Program | 24 Program |
| 2 | Jumlah program pembangunan sosial budaya yang harus dilaksanakan | 59 Program | 180 Program | 180 Program | 98 Program | 98 Program |
| 3 | Jumlah program pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang harus dilaksanakan | 23 Program | 36 Program | 34 program | 18 program | 18 program |
| 4 | Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan Program | 102,58% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

### 2.3.5.2 Keuangan

Keuangan merupakan salah satu fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah, diarahkan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan mengindikasikan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, masih mengandalkan sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih sangat tinggi, sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Tahun 2018 kontribusi

PAD mencapai 9,70% dan meningkat tahun 2019 mencapai 10,13%, tahun 2020 meningkat mencapai 11,47%, tahun 2021 mencapai 10,86%, tahun 2022 menurun menjadi sebesar 9,93% yang disebabkan menurunnya lain-lain PAD yang sah. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2018-2022 masih sangat dominan yaitu berkisar antara 88,53% sampai 90,89% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkisar 6,68% sampai 9,29% dari total Pendapatan. Persentase PAD Terhadap Pendapatan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.132 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2018 - 2022

| URAIAN | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **PENDAPATAN** | **2.094.948.579.690,55** | **2.156.958.262.466,15** | **1.941.749.098.548,72** | **1.990.930.422.024,73** | **1.908.477.397.297,83** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **203.239.170.296,55** | **218.538.009.619,15** | **222.649.322.623,72** | **261.277.628.857,59** | **189.503.493.355,83** |
| 1. Pendapatan Pajak Daerah | 33.846.189.006,00 | 36.877.599.765,21 | 30.580.708.540,96 | 35.114.763.839,00 | 41.397.270.293,00 |
| 2. Hasil Retribusi Daerah | 25.493.435.082,00 | 24.693.713.138,18 | 18.308.842.235,00 | 14.367.036.052,00 | 16.881.328.762,00 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.845.844.443,70 | 3.977.527.552,77 | 4.203.394.607,40 | 4.260.079.389,45 | 4.544.375.373,27 |
| 4. Lain-lain PAD yang Sah | 140.053.701.764,85 | 152.989.169.162,99 | 169.556.377.240,36 | 169.394.688.328,14 | 126.681.516.038,79 |
| **Persentase PAD Terhadap Pendapatan** | **9,70%** | **10,13%** | **11,47%** | **13,12%** | **9,92%** |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Realisasi anggaran dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2017-2021 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133 Realisasi Anggaran dan Opini BPK Terhadap LKD Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rata-Rata Realisasi Anggaran | 95,30% | 93,17% | 93,43% | 93,92% | 94,02% |
| 2 | Opini BPK terhadap LKD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Bentuk akuntabilitas atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah opini atau penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKD dimana setiap tahun dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : 1) Wajar tanpa pengecualian *(unqualified opinion*), 2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), 3) Tidak wajar *(adversed opinion*) dan 4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

### 2.3.5.3 Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sejumlah 8.761 orang yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 574 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 6.819 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 1.368 Orang. Kualifikasi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.134 Kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Berdasarkan Pendidikan | | | | | |
| 1 | SD / MI | 79 | 69 | 57 | 65 | 57 |
| 2 | SMP/ MTs | 243 | 219 | 196 | 187 | 175 |
| 3 | SMA / SMK / MA | 2.288 | 2.167 | 1.867 | 1.801 | 1.649 |
| 4 | Diploma 1 (D-1) | 994 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| 5 | Diploma 2 (D-2) | | 377 | 283 | 273 | 229 |
| 6 | Diploma 3 (D-3) | | 621 | 609 | 627 | 779 |
| 7 | Diploma 4 (D-4) | 4.533 | 115 | 124 | 154 | 159 |
| 8 | Sarjana Srata 1 (S-1) | | 4.340 | 4.335 | 4.506 | 5.391 |
| 9 | Sarjana Strata 2 (S-2) | 353 | 340 | 366 | 316 | 313 |
| 10 | Doktoral (S-3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | **JUMLAH** | **8.492** | **8.259** | **7.851** | **7.939** | **8.761** |
| II | Berdasarkan Golongan | | | | | |
| 1 | Golongan I | 232 | 173 | 142 | 130 | 102 |
| 2 | Golongan II | 2.282 | 2.183 | 1.833 | 1.728 | 1.822 |
| 3 | Golongan III | 3.627 | 3.776 | 3.868 | 3.964 | 3.887 |
| 4 | Golongan IV | 2.351 | 2.127 | 2.008 | 1.805 | 1.582 |
| | **JUMLAH** | **8.492** | **8.259** | **7.851** | **7.627** | **7.393** |
| III | PPPK | | | | | |
| | **JUMLAH** | - | - | - | **312** | **373** |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/37/430.6.2/2021 tentang Perpanjangan, Penetapan Honorarium, dan Penempatan Tenaga Honorer pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, Jumlah tenaga honorer kategori 1 (K1) sebanyak 58 orang, sedangkan tenaga honorer kategori 2 (K2) berjumlah 460 orang. Mengingat terdapat tenaga honorer yang meninggal dan pensiun hingga akhir tahun 2022 jumlah pegawai honorer sebanyak 373 orang sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.135 Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

| No | Kualifikasi Pendidikan | Non ASN | |
|---|---|---|---|
| | | Honorer K1 | Honorer K2 |
| 1 | SD / MI | 8 | 9 |
| 2 | SMP / MTs | 3 | 21 |
| 3 | SMA / SMK / MA | 19 | 200 |
| 4 | Diploma 1 (D-1) | 1 | 1 |
| 5 | Diploma 2 (D-2) | - | 39 |
| 6 | Diploma 3 (D-3) | 12 | 3 |
| 7 | Diploma 4 (D-4) | - | - |
| 8 | Sarjana Srata 1 (S-1) | 13 | 43 |
| 9 | Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) | - | 1 |
| 10 | Doktoral (S-3) | - | - |
| **JUMLAH** | | **56** | **317** |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023

Dalam penyelenggaran urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh aparatur pemerintah agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik antara lain : formasi kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah, disiplin aparatur dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.136 Perkembangan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | % SK yang diterbitkan tepat waktu | 99,73% (6.965/6.984) | 99,29% (8.200/8.259) | | | |
| 2 | % penerbitan SK Sangsi | 100% (19/19) | 100% (9/9) | | | |
| 3 | % Pejabat struktural yang di asessmen yang memenuhi standar kompetensi | 82,60% (451/546) | 82,49% (537/651) | | | |
| 4 | % laporan E SKP tepat waktu | | | 100% (7.851/7.851) | 97,66% (7.667/7.939) | |
| 5 | % ASN yang mengikuti Bimtek | | | 15,95% (1.252/7.851) | 47,67% 3.784/7.939) | |
| 6 | % pejabat yang memenuhi standar kompetensi | | | | | 90,37% (7.918/8.761) |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7 | % pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi | | | 52,74% (337/639) | 84,73% (333/393) | 34,87% (144/413) |
| 8 | % pemangku jabatan struktural | | | 84,19% (639/759) | 71,85% 393/547 | 87,13% (413/474) |
| 9 | % pemangku jabatan fungsional | | | 34,83% (4.800/13.782) | 74,82% (4.707/6.291) | 92,56% (4.343/4.692) |
| 10 | % dokumen kepegawaian (pangkat,pensiun,berkala) yang diterbitkan tepat waktu | | | 88,07% (5.284/600) | 99,46% (5.935/5967) | 98,45% (888/902) |
| 11 | % akurasi data pegawai | 93,29% 7922/8492 | 97,52% 8054/8259 | 97,97% 7692/7851 | 94,18% 7477/7939 | 91,67% 8032/9761 |
| 12 | % pegawai berpendidikan D4/S1 | 57,56% 4888/8492 | 58,08% 4791/8259 | 54,81% 4303/7851 | 61,37% 4872/7939 | 66,93% 5864/8761 |
| 13 | % pemenuhan kebutuhan pegawai | 58,53% 8492/14509 | 60,26% 8259/13706 | 54,11% 7851/14509 | 54,72% 7939/14509 | 60,56% 8761/14466 |
| 14 | % tingkat kehadiran aparatur | 99,81% 8476/8492 | 99,81% 8456/8459 | 99,97% 7849/7851 | 99,95% 7935/7939 | 99.99% 8760/8761 |
| 15 | % aparatur yang berprestasi kinerja baik | | | 99,97% (7849/7851) | 99,55% (7816/7939) | 99,66% (8731/9761) |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bondowoso, 2023

### 2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan daerah, peran bidang pendidikan dan pelatihan menjadi kunci penting bagi penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi buruk jika aparatur pelaksanan pembangunan memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Aparat yang profesional menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada.

Pemerintah harus menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien, berwawasan dan terintegrasi baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan, maupun kelembagaan.

Tabel 2.137 Perkembangan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | % Kelulusan peserta diklat | 67,39% 124/184 | 87,99% 338/441 | | | |
| 2 | % ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20JP | | | 35,88% 2817/7851 | 53,34% 4235/7939 | 21,44% 1879/8761 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | % pemenuhan kebutuhan diklat | | | 3,85% 70/1819 | 29,22% 128/438 | 1,65% 145/8761 |
| 4 | % ASN yang lulus diklat dengan nilai memuaskan | | | | | 91,17% 1084/1189 |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bondowoso, 2023

### 2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 khususnya dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan Pengembangan (litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemologi maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 138 Perkembangan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persentase Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah belum berjalan dengan optimal. Dokumen penelitian dan pengembangan daerah yang termanfaatkan masih rendah, juga secara kuantitatif hasil penelitian dan pengembangan juga masih sedikit. Inovasi daerah perlu terus dikembangkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

### 2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah yang pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah dilakukan terhadap semua urusan pemerintahan mulai tingkat Kabupaten sampai dengan desa/kelurahan. Gambaran kinerja pengawasan di Kabupaten Bondowoso selama tahun 2018-2022 pada tabel berikut.

Tabel 2. 139 Kinerja Pengawasan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan | 43 Org | 44 Orang | 30 orang | 28 Orang | 7 Orang |
| 2 | Jumlah aparatur Pengawasan yang mendapat Diklat Teknis | 29 Orang | 13 Orang | 12 Orang | 11 Orang | - |
| 3 | LK OPD sesuai SAP | 57 OPD | 57 OPD | 57 OPD | 57 OPD | 100% |
| 4 | OPD dengan Maturitas Penerapan SPIP mencapai Level 3 | 34 OPD | 56 OPD | 57 OPD | 57 OPD | 17.54% (10 OPD) |
| 5 | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit | 165 Obwas | 134 Obwas | 165 Obwas | 145 Obwas | 293 obwas |
| 6 | Peyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 138 Kasus | 148 Kasus | 138 Kasus | 57 Kasus | 42 kasus |

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Pembangunan berwawasan kesatuan bangsa dan sosial politik dalam kerangka NKRI mengarah pada penciptaan situasi saling menghormati antar suku, agama, ras maupun antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penataan instrumen sosial masyarakat Bondowoso yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM serta mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam Potensi konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat.

Tabel 2. 140 Perkembangan Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Tahun 2018-2022

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Pembinaan terhadap Ormas, Orpol, Pemuda dan LSM terus dilakukan sebagai upaya untuk pemberdayaan, pencegahan terjadinya Potensi konflik sosial dan untuk menumbuh Kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Bondowoso yang terdaftar di Bakesbangpol Jawa Timur terus meningkat, pada Tahun 2018 sebanyak 236 dan Tahun 2022 mencapai 268 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 141 Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Ormas/LSM | 236 | 243 | 263 | 281 | 268 |

Sumber : Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jatim Tahun 2018-2022

Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi,

sehingga semakin luntur nilai-nilai Pancasila. Masih kurangnya optimalisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sehingga pemahaman kesatuan bangsa dan politik belum terbentuk secara maksimal di masyarakat, karena masih ditemui bahwa demokarasi diidentikkan dengan kebebasan menentukan sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompok. Perlu peningkatan Pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan peran Ormas/LSM dan Tomas/Toga dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif.

## 2.3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018-2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100%. SPM yang berkaitan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, juga dimaksudkan untuk menjawab isu-isu krusial yang bermuara pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2022 penerapan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### 1. SPM Pendidikan

Penerapan SPM Pendidikan selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2.142 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2018-2022

| No | Pelaksanaan SPM | Capaian Seluruh Indikator SPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; | 73,72% | 73,77% | 73,80% | 73,84% | 74,00% |
| 4 | Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru | 92,36% | 92,42% | 92,48% | 92,53% | 92,60% |

| No | Pelaksanaan SPM | Capaian Seluruh Indikator SPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. | | | | | |
| 5 | Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; | 66,90% | 67,40% | 67,43% | 67,50% | 67,55% |
| 6 | Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; | 61,05% | 62,05% | 62,08% | 62,12% | 62,16% |
| 7 | Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; | 85,35% | 88,65% | 88,70% | 88,73% | 85,35% |
| 8 | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20% | 92,81% | 93,16% | 93,21% | 93,24% | 93,31% |
| 9 | Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan | 39,76% | 40,38% | 40,46% | 40,50% | 40,55% |
| 10 | Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; | 76,17% | 76,13% | 76,09% | 76,09% | 76,07% |
| 11 | Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; | 78,26% | 78,22% | 78,18% | 78,18% | 78,15% |
| 12 | Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki serifikat pendidik; | 86,00% | 87,00% | 87,06% | 87,09% | 87,13% |
| 13 | Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; | 76,60% | 76,65% | 79,70% | 79,85% | 79,92% |
| 16 | Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; | 70,71% | 70,76% | 79,80% | 79,84% | 79,88% |
| 17 | Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; | 84,90% | 90,01% | 90,06% | 90,11% | 90,17% |
| 18 | Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku | 79,60% | 79,65% | 79,68% | 79,73% | 79,79% |

| No | Pelaksanaan SPM | Capaian Seluruh Indikator SPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | dan 20 buku referensi; | | | | | |
| 19 | Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk, merencanakan, pembelajaran, melaksanakan, pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; | 95,67% | 95,72% | 95,78% | 95,81% | 95,85% |
| 20 | Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :<br>a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;<br>b) Kelas III : 24 jam per minggu;<br>c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau<br>d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; | 100% | 100% | - | | 100% |
| 25 | Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian 26setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada akhir semester; dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2023

Dalam pemenuhan SPM Pendidikan tahun 2018-2022, pencapaian tingkat kemandirian sekolah masih belum memadai.

Pada indikator di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Sampai dengan tahun 2022 masih mencapai 74,00%.

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; hingga tahun 2022 mencapai 92,60%.

Pada indikator di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah

khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 67,55%.

Pada indikator Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 88,76%.

Indikator di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%, sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 93,31%.

Indikator Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan, sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 40,55%.

Indikator setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 76,07%.

Indikator setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 78,15%.

Indikator satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu, dan indikator Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester pada tahun 2020 tidak dapat tercapai mengingat kondisi pandemi Covid-19 sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.

Capaian mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.143 Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| | **Pendidikan Anak Usia Dini** | |
| 1 | Jumlah total warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan PAUD | 19.936 |
| 2 | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang menerima buku gambar | 19.936 |
| 3 | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang menerima alat mewarnai | 19.936 |
| 4 | Jumlah satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C | 451 |
| 5 | Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 957 |
| 6 | Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 1.511 |
| 7 | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidkan | |
| | **Pendidikan Dasar** | |
| 1 | Jumlah total warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar | 98.402 |

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| | (SD/MI, SMP/MTs) | |
| 2 | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima buku teks pelajaran | 98.402 |
| 3 | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima perlengkapan belajar | 98.402 |
| 4 | Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV | 529 |
| 5 | Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualitas SMA/sederajad | |
| 6 | Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan | |
| 7 | Jumlah lembaga pendidikan yang berakreditasi minimal C | 605 |
| 8 | Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 5.873 |
| | **Pendidikan Kesetaraan** | |
| 1 | Jumlah total warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikandasar dalam pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraaan | 98.402 |
| 2 | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang menerima modul belajar | 98.402 |
| 3 | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang menerima perlengkapan belajar | 98.402 |
| 4 | Jumlah rombongan belajar di PKBM | |
| 5 | Jumlah kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV | 48 |
| 6 | Jumlah kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi SI/D-IV | 48 |
| 7 | Jumlah kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualitas SMA/sederajad | 48 |
| 8 | Jumlah PKBM terakreditasi minimal C | 9 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2. SPM Kesehatan

Penerapan SPM Kesehatan selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Realisasi pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2017-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.144 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2018-2021

| No. | Indikator | Tahun | Target | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembilang | Penyebut | Cakupan |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 2018 | 100% | 9.655 | 11.133 | 86,72% |
| | | 2019 | 100% | 9.439 | 11.020 | 85,65% |
| | | 2020 | 100% | 9.366 | 10.909 | 85,86% |
| | | 2021 | 100% | 9.115 | 10.395 | 87,69% |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 2018 | 100% | 10.484 | 10.627 | 98,65% |
| | | 2019 | 100% | 10.676 | 10.519 | 101,49% |
| | | 2020 | 100% | 10.321 | 10.413 | 99,12% |
| | | 2021 | 100% | 10.425 | 10.425 | 100% |

| No. | Indikator | Tahun | Target | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pembilang | Penyebut | Cakupan |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 2018 | 100% | 10.405 | 10.121 | 102,81% |
| | | 2019 | 100% | 8.598 | 10.018 | 85,83% |
| | | 2020 | 100% | 9.117 | 9.917 | 91,93% |
| | | 2021 | 100% | 9.061 | 9.450 | 95,88 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 2018 | 100% | 45.664 | 50.411 | 90,54% |
| | | 2019 | 100% | 31.775 | 40.811 | 77,86% |
| | | 2020 | 100% | 41.590 | 40.359 | 103,05% |
| | | 2021 | 100% | 37.680 | 39.720 | 94,86% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 2018 | 100% | 20.842 | 20.842 | 100% |
| | | 2019 | 100% | 60.869 | 99.446 | 61,21% |
| | | 2020 | 100% | 93.875 | 98.724 | 95,09% |
| | | 2021 | 100% | 87.001 | 91.044 | 95,56% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 2018 | 100% | 30.620 | 491.747 | 6,23% |
| | | 2019 | 100% | 174.848 | 492.149 | 35,53% |
| | | 2020 | 100% | 31 .284 | 492.287 | 6,35 % |
| | | 2021 | 100% | 53.706 | 492.839 | 10,90% |
| 7 | Pelayanan kesehatan usia lanjut | 2018 | 100% | 88.921 | 118.372 | 75,12% |
| | | 2019 | 100% | 92.725 | 122.801 | 75,51% |
| | | 2020 | 100% | 45.887 | 127.307 | 36,04% |
| | | 2021 | 100% | 45.484 | 139.073 | 32,71% |
| 8 | Pelayanan tekanan darah tinggi di wilayah puskesmas | 2018 | 100% | 76.065 | 111.552 | 68,19% |
| | | 2019 | 100% | 75.934 | 194.939 | 38,95% |
| | | 2020 | 100% | 29.894 | 196.411 | 15,22% |
| | | 2021 | 100% | 33.122 | 200.316 | 16,53% |
| 9 | Pelayanan Diabetes Meliitus di wilayah puskesmas | 2018 | 100% | 16.052 | 53.288 | 30,12% |
| | | 2019 | 100% | 10.752 | 12.299 | 87,42% |
| | | 2020 | 100% | 10.732 | 12.392 | 86,60% |
| | | 2021 | 100% | 11.163 | 12.638 | 88,83% |
| 10 | Pelayanan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas | 2018 | 100% | 1.643 | 1.643 | 100% |
| | | 2019 | 100% | 1.340 | 1.474 | 90,91% |
| | | 2020 | 100% | 1.445 | 1.480 | 97,64% |
| | | 2021 | 100% | 1.487 | 1.487 | 100% |
| 11 | Pelayanan orang dengan TB di wilayah Puskesmas | 2018 | 100% | 1.319 | 1.461 | 90.28% |
| | | 2019 | 100% | 6.597 | 8.105 | 81,39% |
| | | 2020 | 100% | 5.152 | 8.105 | 63,57% |
| | | 2021 | 100% | 5.259 | 8.591 | 61,22% |
| 12 | Pelayanan orang dengan risiko HIV di wilayah Puskesmas | 2018 | 100% | 7.648 | 11.133 | 68,70% |
| | | 2019 | 100% | 8.646 | 10.513 | 82,24% |
| | | 2020 | 100% | 10.042 | 10.518 | 95,47% |
| | | 2021 | 100% | 10.186 | 10.186 | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, 2022

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu dan bayi. Kesadaran untuk memeriksakan kehamilan pada trimester I (3 bulan pertama kehamilan) masih kurang. Beberapa penyebab

utama dari rendahnya kunjungan bumil K-4 adalah cakupan K-1 akses yang rendah, terjadinya abortus prematur, kemudian ada beberapa kasus KTD (kehamilan tidak dikehendaki) sehingga menyebabkan ibu mengambil keputusan untuk tidak periksa. Selain itu penyebab lain rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil adalah mobilisasi ibu hamil yang masih tinggi, kurangnya koordinasi antara Bidan Praktek Mandiri dan Bidan Wilayah sehingga pencatatan sering terlambat atau terlewati, Faktor penyebab lainnya adalah faktor budaya menyembunyikan kehamilan, terutama apabila terdapat kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid -19, sehingga cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil semakin berkurang akibat adanya ketakutan dari masyarakat untuk datang ke Fasilitas Kesehatan. Perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik dengan pemangku kepentingan khususnya pada tingkat desa dan kecamatan seperti ibu kepala desa, ibu camat melalui lembaga PKK untuk meningkatkan cakupan kunjungan bumil K4.

Pelayanan kesehatan ibu bersalin belum mencapai 100% disebabkan masih adanya persalinan yang dilaksanakan di Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, bahkan di rumah pasien, meski sudah dibantu oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa standar pelayanan kesehatan ibu bersalin harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan harus dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan, minimal tingkat Puskesmas. Apabila terdapat cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang melebihi 100%, maka hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena sasaran target yang ditetapkan oleh pusat melebihi sasaran riil di lapangan.

Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir masih belum mencapai target 100 % Rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain syarat layanan KN Lengkap yang tidak terpenuhi, terutama terkait IMD (tidak semua bayi yang lahir di RS mendapatkan IMD). Selain itu, masih tingginya kejadian komplikasi neonatal pada bayi. Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid -19, sehingga cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat untuk datang ke Fasilitas Kesehatan, karena bayi merupakan kelompok usia yang rentan terpapar Covid -19.

Pelayanan Kesehatan Balita belum rnencapai target karena masih ada sebagian balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan standar di posyandu. Keabsenan balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu banyak disebabkan oleh kesibukan orang tuanya, terutama ibu balita. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak dapat mengantarkan balita mereka ke posyandu yang pelayanannya di pagi hari.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum mencapai 100% disebabkan adanya perubahan definisi operasional pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan jumlah sasaran meningkat lebih banyak karena semua anak usia pendidikan dasar harus mendapatkan pelayanan Kesehatan, termasuk anak-anak yang berada di luar sekolah, sedangkan definisi operasional sebelumnya bahwa

pelayanan kesehatan / skrining hanya dilakukan pada siswa baru kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP.

Pelayanan kesehatan usia produktif (15-59 tahun) berupa skrining masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya skrining usia produktif. Pelayanan skrining usia produktif terdiri dari 7 tahap, pemeriksaan IMT, lingkar perut, tekanan darah, tajam pengelihatan, tajam pendengaran, gangguan mental emosional (SRQ20) dan gula darah (untuk sasaran > 40 tahun atau > 15 tahun dengan faktor risiko obesitas. Selain itu, faktor rendahnya mobilitas pemegang program dan minimnya sarana prasarana, serta tingginya target jumlah penduduk menjadi hambatan pada pencapaian 100% pelayanan kesehatan usia produktif. Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid -19, sehingga cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (15-59 tahun) semakin berkurang. Hal ini menyebabkan kunjungan pelayanan pada kantor-kantor untuk melakukan pemerikasaan pada pegawai/ ASN yang masuk ke dalam usia produktif dihentikan. Hal yang sama juga berlaku pada kunjungan pelayanan pada program KS (Keluarga Sehat).

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut masih belum mencapai target dikarenakan kesadaran para lansia untuk datang pada Posyandu Lansia masih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan Posyandu Lansia antara lain :

a. Faktor pengetahuan lansia mengenai pentingnya kegiatan di Posyandu Lansia bagi kesehatan para lansia;
b. Faktor jarak rumah yang jauh dari lokasi posyandu membuat para lansia enggan untuk datang ke posyandu lansia;
c. Faktor ekonomi yang menuntut para Lansia masih tetap bekerja sehingga pada saat jadwal pelaksanaan posyandu mereka lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke posyandu lansia;
d. Faktor dukungan keluarga yang masih kurang karena para lansia terkadang lupa jadwal posyandu atau tidak ada yang mengantar karena anaknya harus kerja semua.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi belum mencapai target disebabkan oleh target sasaran yang dinilai terlalu tinggi. Target sasaran ditentukan berdasarkan angka prevalensi per kabupaten, bukan berdasarkan jumlah sasaran yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Kondisi ini juga dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur kecuali Kabupaten Banyuwangi. Penghitungan target didasarkan pada angka prevalensi nasional yang diterbitkan melalui Riskesdas Tahun 2018 (31,7% x ≥ 15 th). Selain itu, apabila dilihat dari sisi masyarakat, rendahnya cakupan pelayanan hipertensi dikarenakan kesadaran penderita hipertensi untuk kontrol ke fasilitas kesehatan rendah padahal hipertensi merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup agar tidak menderita komplikasi penyakit lainnya. Orang yang menderita hipertensi setelah didiagnosa hipertensi memiliki kecenderungan yang rendah untuk datang kembali untuk kontrol tekanan darah dan pengobatan. Adanya Pandemi Covid -19 mulai Bulan Maret 2020 sampai saat sekarang sangat

berpengaruh terhadap kunjungan pasien ke puskesmas, terutamanya penderita hipertensi.

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus belum mencapai target disebabkan oleh target sasaran yang dinilai terlalu tinggi. Target sasaran ditentukan berdasarkan angka prevalensi nasional, bukan berdasarkan jumlah sasaran yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Kondisi ini juga dihadapi oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur kecuali Kabupaten Banyuwangi dan Pacitan. Penghitungan target didasarkan pada angka prevalensi nasional yang diterbitkan melalui Riskesdas Tahun 2018 (2% x jumlah penduduk). Tingginya jumlah target diperburuk dengan adanya keterbatasan pada ketersediaan sarana dan prasarana berupa perlengkapan tes gula darah. Selain itu, apabila dilihat dari sisi masyarakat, rendahnya cakupan pelayanan disebabkan oleh rendahnya kesadaran penderita untuk kontrol ke fasilitas kesehatan dan mencari pengobatan dengan rutin. Terjadinya kondisi pandemi Covid -19 sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini berpengaruh terhadap tingkat kunjungan pasien Penderita Diabetes Melitus ke puskesmas.

Pelayanan gangguan jiwa di wilayah puskesmas sejak tahun 2019 tidak lagi mencapai 100%, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan estimasi prevalensi ODGJ Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 meningkat. Penghitungan target sasaran pada tahun 2019 didasarkan pada hasil Riskesdas 2018 yang meningkat menjadi sebesar 0,19% dari jumlah penduduk.

Pelayanan orang dengan TB yang mendapat pelayanan sesuai standar masih belum mencapai target dikarenakan ada penderita TB yang enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena harus meminum obat secara teratur sehingga juga ada penderita yang drop out dari pengobatan selama 6 bulan. Pengawas Minum Obat (PMO) yang kurang optimal dalam mendampingi kasus dan manajemen data yang masih perlu diperbaiki. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menyebabkan sempat terhentinya kegiatan investigasi kontak, baik oleh kader maupun petugas. Selain itu, terdapat kerusakan pada mesin pemeriksaan TCM TBC di puskesmas sehingga dibutuhkan waktu menunggu perbaikan dari Kemenkes, hal ini menjadi kendala dalam pemeriksaan specimen.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV terkait dengan kesediaan setiap individu untuk kontak dengan Pelayanan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV-AIDS. Terdapat beberapa orang dengan risiko terinfeksi HIV yang enggan mencari pelayanan ke PDP karena khawatir akan mendapatkan pandangan negatif dari orang lain dan juga khawatir diketahui oleh orang yang mengenal mereka. Beberapa orang lainnya bahkan mencari pelayanan kesehatan ke PDP di luar wilayah Bondowoso agar identitas mereka tidak diketahui orang lain. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid -19 pada bulan Maret 2020 menyebabkan kunjungan Rumah pada kasus positif HIV sempat terhenti sehingga memutus informasi untuk melakukan konseling pada kelompok kunci.

### 3. SPM Pekerjaan Umum

Penerapan SPM Pekerjaan Umum selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2018-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.145 Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2018-2021

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari | 481.986 | 551.865 | 570.818 | 609.858 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai | 466.587 | 500.334 | 589.665 | 198.403 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2022

Target SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluruh warga negara harus mendapatkan layanan air minum dan sanitasi, hingga saat ini masih belum seluruh warga mendapatkan layanan air minum dan sanitasi. Dari penduduk tahun 2020 sebanyak 776.151 jiwa, baru terlayani 570.818 jiwa (73,54%), masih sekitar 26,46% masyarakat yang belum terlayani air minum. Beberapa permasalahan yang menyebabkan antara lain, ketersediaan air baku yang kurang, sarana prasarana perpipaan air minum banyak yang rusak karena kurang terpelihara. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan air limbah domestik tahun 2020 tercapai 75,59% atau 589.665 jiwa. Hal ini disebabkan perilaku hidup bersih dan sehat belum maksimal. Diharapkan penyediaan air bersih dan sanitasi dapat dilakukan secara optimal agar seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dengan baik.

### 4. SPM Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Perumahan Rakyat selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2018-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.146 Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2018-2021

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 142 KK | 987 KK | 214 KK | 9 KK |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, Cipta Karya dan Tata Ruang (2023)

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM bidang Perumahan Rakyat, yaitu (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota, dan (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan target seluruh warga korban bencana harus disediakan dan direhabilitasi rumahnya serta difasilitasi penyediaan rumah untuk warga yang terkena relokasi akibat program pembangunan.

Setiap tahun terjadi bencana di Kabupaten Bondowoso, antara lain bencana longsor dan angin puting beliung. Rumah korban bencana tersebut secara keseluruhan telah mendapat bantuan untuk direhabilitasi melalui BPBD Kabupaten Bondowoso. Secara akumulasi tahun 2017-2020 jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebanyak 1.705 KK.

Pada tahun 2020 terjadi bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Ijen yang berakibat pada rusaknya beberapa rumah warga. Berdasarkan evaluasi, maka para korban bencana akan direlokasi di wilayah yang aman. Hingga saat ini lokasi telah disediakan dan pembangunan rumah akan dilakukan dengan sumber dana APBN tahun 2021. Wilayah Kabupaten Bondowoso termasuk rawan bencana alam banjir bandang dan longsor. Oleh karena itu mitigasi bencana ini terus dilakukan oleh Pemkab Bondowoso.

## 5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.147 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| 1* | Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | A. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten / Kota (Persen) | 2017<br>2018<br>2019 | 30,00<br>72,00<br>100,00 |
| | | B. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Persen) | 2017<br>2018<br>2019 | 39,13<br>39,13<br>39,13 |
| | | C. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) di Kabupaten / Kota (Orang) | 2017<br>2018<br>2019 | 1<br>1<br>1 |
| 2* | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi | A. Jumlah Total Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi (Pelanggar) | 2020 | 17.770 |
| | | B. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materiil (Orang) | 2020 | 2.536 |
| | | C. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan (Orang) | 2020 | - |
| 3* | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu | A. Jumlah Total Penegakan Perda sesuai mutu (Orang) | 2021 | 1.483 |
| | | B. Jumlah Penegakan Perda Sesuai SOP (Orang) | 2021 | 0 |
| | | C. Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda Sesuai Dengan Standar Jumlah SDM Pol PP dan Linmas Yang Sesuai Standar (Orang) | 2020 | 17.770 |
| | | D. Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda Menggunakan Sarpras Sesuai Standar (Orang) | 2020 | 17.770 |
| 4* | Penanggulangan Bencana Kebakaran | A. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota (Persen) | 2020 | 17.770 |
| | | B. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Persen) | 2020 | 1.056 |
| | | C. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi (Persen) | 2021 | 1.483 |
| | | D. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK (Unit) | 2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 80,51<br>124,00<br>100,00<br>100,00 |
| 5* | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Orang) | 2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 30,00<br>70,00<br>49,00<br>100,00 |
| 6** | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang) | 2017<br>2018<br>2019<br>2020 | 11,76<br>11,76<br>11,76<br>11,76 |
| 7** | Pelayanan Pencegahan | Jumlah Warganegara Yang Memperoleh | 2017 | 1 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang) | 2018<br>2019<br>2020 | 0<br>0<br>0 |
| 8** | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Warganegara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang) | 2020 | 11 |

Sumber : *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso, 2021
** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, 2021

Pada tahun 2020 terdapat beberapa perubahan jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel tersebut di atas. Tahun 2016 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan sebanyak 592 pelanggaran, sedang jumlah pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan / dipantau 598 pelanggaran jadi persentase Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota adalah 98,99%. Pada Tahun 2020 jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan sebanyak 17.770 pelanggaran, jumlah pelanggaran peraturan daerah yang dilaporkan/dipantau sebanyak 17.770 pelanggaran jadi prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah di Kabupaten/Kota adalah 100,00 %.

Tahun 2016 terpenuhi sebanyak 3 kelompok patroli, dengan pelaksanaan patroli sebanyak 3 kali di 23 Kecamatan, sehingga diperhitungkan dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencapai 39,13 % patroli. Tahun 2020 terpenuhi sebanyak 3 kelompok patroli, dengan pelaksanaan patroli sebanyak 3 kali di 23 Kecamatan, sehingga diperhitungkan dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencapai 39,13 % patrol.

Tahun 2016 jumlah petugas LINMAS kabupaten 5.662 orang sedang jumlah RT 4.575 (219 Desa) jadi rasio petugas Linmas adalah 1 orang per RT. Tahun 2020 jumlah petugas Linmas kabupaten sebanyak 6.080 orang sementara jumlah total RT sebanyak 4.575 sehingga rasio petugas Linmas adalah 1 orang per RT.

Tahun 2016 jumlah luas cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2016 adalah 11,29%, sedangkan tahun 2020 mencapai 100,00 %. Untuk tingkat waktu tanggap (*Respone Time Rate*) Tahun 2016 sebesar 5,00 % dengan perhitungan kasus kebakaran yang terjadi sebanyak 20 kasus yang masuk dalam jangkauan WMK sebanyak 20 kasus, dan jumlah kebakaran yang masuk jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit sebanyak 1 kasus. Tahun 2020 tingkat waktu tanggap (*Respone Time Rate*) sebesar 57,00 % dengan kasus kebakaran sebanyak 30 kasus yang masuk dalam jangkauan WMK sebanyak 30 kasus, dan jumlah kebakaran yang masuk jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit sebanyak 17 kasus. Dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, sebanyak 11 orang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Jumlah ideal aparatur Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan dalam pelayanan Bencana Kebakaran adalah 72 orang, sampai tahun 2016 jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang tersedia 17 orang sehingga persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 23,61 %. Tahun 2020 persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah 11,76 %. sehingga sangat dibutuhkan aparatur pemadam kebakaran yang mampu mengelola dan merawat peralatan yang berhubungan dengan teknologi informasi bencana kebakaran.

Tahun 2016 jumlah WMK memiliki 2 unit mobil yang layak pakai, hingga tahun 2020 tetap mengoptimalkan mobil pemadam kebakaran yang tersedia.

## 6. SPM Sosial

Penerapan SPM Sosial selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian SPM Sosial Kabupaten Bondowoso Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.148 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2016-2020

| No. | Indikator SPM | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (%) | Real (%) | Target (%) | Real (%) | Target (%) | Real (%) | Target (Org) | Real (Org) | Target (Org) | Real (Org) |
| 1 | Panti Sosial Skala Kabupaten | 7,25 | 33,6 | 7,25 | 21,2 | 7,25 | 30,4 | - | - | - | - |
| 2 | Panti Sosial Skala Luar Kabupaten | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Evakuasi Korban Bencana | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Penyelenggaraan Jaminan Sosial | 50 | 78,21 | 50 | 82,14 | 50 | 18,9 | - | - | - | - |
| 6 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial | - | - | - | - | - | - | 650 | 53 | 658 | 658 |
| 7 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | 1.165 | 1.165 |
| 8 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.508 | 6.508 |
| 9 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya | - | - | - | - | - | - | 85 | 61 | 2.254 | 2.254 |

| No. | Indikator SPM | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (%) | Real (%) | Target (%) | Real (%) | Target (%) | Real (%) | Target (Org) | Real (Org) | Target (Org) | Real (Org) |
| | Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | |
| 10 | Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.790 | 1.790 |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Bondowoso, 2022

Tabel 2.149 Pencapaian SPM Sosial Tahun 2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabitilasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar panti Sosial | A. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Permakanan diluar panti | 2021 | 40 |
| | | B. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Sandang diluar panti | 2021 | 1 |
| | | C. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Alat bantu diluar panti | 2021 | 119 |
| | | D. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti | 2021 | 119 |
| | | E. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti | 2021 | 59 |
| | | F. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti | 2021 | 709 |
| | | G. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti | 2021 | 180 |
| | | H. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar diluar panti | 2021 | 62 |
| | | I. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti | 2021 | 3 |
| | | J. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Pelayanan Reunifikasi keluarga diluar panti | 2021 | 3 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | K. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Rujukan diluar panti | 2021 | 3 |
| | | L. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Kedaruratan bagi daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti | 2021 | 15 |
| | | M. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti | 2021 | 59 |
| | | N. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti | 2021 | 14 |
| | | O. Jumlah Warga Negara Penyandang disbilitas yang memperoleh layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum memiliki Kandaraan Khusu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru diluar panti | 2021 | 15 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial | A. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti | 2021 | 290 |
| | | B. Jumlah anak telantar yang memperoleh Permakanan diluar panti | 2021 | 210 |
| | | C. Jumlah anak telantar yang memperoleh Sandang diluar panti | 2021 | 12 |
| | | D. Jumlah anak telantar yang memperoleh Alat Bantu diluar panti | 2021 | 2 |
| | | E. Jumlah anak telantar yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti | 2021 | 290 |
| | | F. Jumlah anak telantar yang memperolehBimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti | 2021 | 26 |
| | | G. Jumlah anak telantar yang memperoleh Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar diluar panti | 2021 | 26 |
| | | H. Jumlah anak telantar yang | 2021 | 26 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti | | |
| | | I. Jumlah anak telantar yang memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diluar panti | 2021 | 26 |
| | | J. Jumlah anak telantar yang memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti | 2021 | 10 |
| | | K. Jumlah anak telantar yang memperoleh Pelayanan Reunifikasi Keluarga diluar panti | 2021 | 10 |
| | | L. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Rujukan diluar Panti | 2021 | 210 |
| | | M. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti | 2021 | 290 |
| | | N. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru diluar Panti | 2021 | 290 |
| | | O. Jumlah anak telantar yang memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar Panti | 2021 | 875 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial | A. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Data dan Pengaduan diluar panti | 2021 | 150 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | B. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti | 2021 | 150 |
| | | C. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Permakanan diluar panti | 2021 | 150 |
| | | D. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Sandang diluar panti | 2021 | 8 |
| | | E. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Alat Bantu diluar panti | 2021 | 8 |
| | | F. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti | 2021 | 6.250 |
| | | G. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial diluar panti | 2021 | 150 |
| | | H. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar diluar panti | 2021 | 150 |
| | | I. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar diluar panti | 2021 | 150 |
| | | J. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti | 2021 | 150 |
| | | K. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Pelayanan Reunifikasi Keluarga diluar panti | 2021 | 150 |
| | | L. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan | 2021 | 150 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | Rujukan diluar panti | | |
| | | M. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum memiliki Kendaraan Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu melakukan Pengadaan kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti | 2021 | 8 |
| | | N. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti | 2021 | 8 |
| | | O. Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Layanan Kedaruratan Bagi daerah Yang belum memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak mampu Melakukan Pengadaan kendaraan Baru diluar Panti | 2021 | 8 |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial | A. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan data dan pengaduan diluar panti | 2021 | 45 |
| | | B. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Permakanan diluar panti | 2021 | 40 |
| | | C. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Sandang diluar panti | 2021 | 35 |
| | | D. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Alat Bantu diluar panti | 2021 | 10 |
| | | E. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Perbekalan Kesehatan diluar panti | 2021 | 31 |
| | | F. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Bimbingan Fisik, mental Spiritual dan | 2021 | 35 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | Sosial diluar panti | | |
| | | G. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan pengemis Terlantar diluar panti | 2021 | 35 |
| | | H. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Memperoleh Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak diluar panti | 2021 | 30 |
| | | I. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar diluar panti | 2021 | 31 |
| | | J. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Pelayanan Penelurusan Keluarga diluar panti | 2021 | 30 |
| | | K. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Reunifikasi Keluarga diluar panti | 2021 | 20 |
| | | L. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Rujukan diluar panti | 2021 | 30 |
| | | M. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan kedaruratan Bagi daerah Yang belum Memiliki kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak mampu melakukan pengadaan Kendaraan Baru diluar panti | 2021 | 2 |
| | | N. Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Layanan kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti | 2021 | 1 |
| | | O. Jumlah Warga Negara / Gelandangan | 2021 | 1 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Tahun | Realisasi Pencapaian SPM |
|---|---|---|---|---|
| | | dan pengemis yang memperoleh Layanan kedaruratan Bagi daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan mampu Melakukan pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan diluar panti | | |
| 5 | Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat Bancana bagi korban Bencana daerah Kabupaten/Kota | A. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh permakanan perlindungan dan jaminan sosial | 2021 | 75 |
| | | B. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Sandang perlindungan dan jaminan sosial | 2021 | 75 |
| | | C. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Tempat Penampungan perlindungan dan jaminan sosial | 2021 | 25 |
| | | D. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Penanganan Khusus Bagi Kelompok rentan sosial | 2021 | 11 |
| | | E. Jumlah Warga Negara Korban bencana kab/kota yang memperoleh Pelayanan Dukungan Psikososial | 2021 | 75 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Bondowoso, 2022

Pada tahun 2019-2020 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja pada SPM Sosial sebagaimana tabel tersebut di atas. Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dengan sebaran penduduk yang belum merata, aksesibiltas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam pencapaian SPM sosial di Kabupaten Bondowoso.

## 2.3.9 *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDG's)/tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 mengamanatkan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui

pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai dengan tahun 2030. Perlunya penyelarasan terhadap kebijakan strategis serta tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan tingkat provinsi serta sasaran pembangunan daerah. Capaian SDG's Tahun 2019-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.150 Capaian SDG's Tahun 2019-2022

| NO. | TUJUAN *SDGs* | INDIKATOR | CAPAIAN (TAHUN) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun | Prosentase Penduduk Miskin | 13,33 | 14,17 | 14,73 | 13,47 |
| 2 | Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. | 1,33 | 1,69 | 7,20 | - |
| 3 | Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | Unmet need pelayanan kesehatan. | 8,76 | 7,88 | 7,88 | 9,32 |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua | Rata-rata Lama Sekolah | 5,71 | 5,93 | 5,94 | 6,22 |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | 103,61 | 103,61 | 102,51 | 100,24 |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | 103,84 | 103,84 | 100,42 | 100,38 |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan | Unmet need | 8,76 | 7,88 | 7,88 | 9,32 |
| 6 | Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua | Indeks Kualitas Air | 48,33 | 51,66 | 50 | 55,33 |
| 7 | Energi Bersih Dan Terjangkau | Indeks Kualitas Udara | 81 | 80,99 | 85,33 | 86,70 |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyuluruh Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua | Tingkat pengangguran terbuka | 2,96 | 4,13 | 4,46 | 4,32 |
| 9 | Membangun Infrastruktur Yang Tangguh Mendukung Industrialisasi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dan Membantu Perkembangan Inovasi | PDRB Perkapita ADHB | 25,61 | 25,69 | 27,02 | 29,31 |
| | | PDRB Perkapita ADHK | 17,58 | 17,33 | 17,87 | 18,44 |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara | IDM | 0,6748 | 0,6963 | 0,7081 | 0,7251 |
| 11 | Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan | Prosentase Sampah tertangani | 53,57 | 60,40 | 60 | 55,90 |
| 12 | Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan | Indeks kualitas Lingkungan Hidup | 64,63 | 71,06 | 66,39 | 68,97 |

| NO. | TUJUAN *SDGs* | INDIKATOR | CAPAIAN (TAHUN) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 13 | Penanganan Perubahan Iklim | | | | | |
| 14 | Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | | |
| 15 | Ekosistem Daratan | Indeks Tutupan Lahan | 65 | 78,16 | 59,49 | 59,57 |
| 16 | Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Memmbangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif di semua Tingkatan | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | 64,74 | 65,00 | 66,35 | 65,01 |
| 17 | Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan | Pertumbuhan Ekonomi | 5,3 | -1,36 | 3,49 | 3,51 |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2023

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (*sustainnability*).

### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pergeseran pengeluaran masyarakat dari pengeluaran yang lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi atau sebaliknya, mencerminkan perubahan harga berbagai kebutuhan masyarakat, perubahan daya beli, serta kondisi kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya ditandai dengan berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan bergeser pada keperluan Non makanan. Pengeluaran per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk mengukur pendapatan penduduk.

Rata–rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Bondowoso tahun 2019 adalah Rp. 10.665.000,- Artinya setiap orang di Kabupaten Bondowoso mengeluarkan uang sejumlah Rp. 10.665.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pengeluaran per kapita tersebut dibagi menurut kelompok barang makanan dan kelompok barang non makanan. Pengeluaran per kapita rata-rata sebulan pada tahun 2020 adalah Rp.10.610.000,- Bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,51%. Tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita perbulan mencapai Rp. 10.690.000,- atau meningkat sebesar 0,75%.

### 2. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas dilihat dari perkembangan jumlah kejahatan dipengaruhi berbagai macam faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi. Berbagai jenis tindak pidana menunjukkan angka yang fluktuatif, akan tetapi menunjukkan tingkat penyelesaian kasus yang cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 jumlah kejahatan mencapai 517 kasus dan terselesaikan sebanyak 320 kasus (61,8%), tahun 2020 jumlah kejahatan mencapai 676 kasus yang terselesaikan sebanyak 547 kasus (80,91%) dan tahun 2022 terjadi kejahatan sebanyak 372 kasus yang terselesaikan sebanyak 244 kasus (65,59%). Perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 2.26

Tabel 2.149 Perkembangan Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2018-2022 (kejadian)

| No. | Jenis Tindak Pidana | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Pencurian dengan pemberatan | 145 | 142 | 108 | 62 | 91 |
| 3. | Pencurian Ranmor | 10 | 4 | 5 | 61 | 15 |
| 4. | Pencurian kayu jati | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |

| No. | Jenis Tindak Pidana | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pencurian dengan kekerasan | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Pencurian hewan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Pencurian kawat telepon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pencurian biasa | 38 | 47 | 22 | 41 | 0 |
| 9. | Penganiayaan berat | 71 | 77 | 86 | 114 | 105 |
| 10. | Perjudian | 18 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 11. | Kebakaran | 7 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| 12. | Uang palsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Penipuan | 89 | 69 | 74 | 94 | 129 |
| 14. | Penggelapan | - | 21 | 25 | 31 | 11 |
| 15. | Penganiayaan ringan | 6 | 2 | 15 | 32 | 0 |
| 16. | Perusakan | 6 | 8 | 2 | 21 | 0 |
| 17. | Pemalsuan keterangan | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Pemalsuan surat | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19. | Serobot tanah | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20. | Membawa lari gadis di bawah umur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Perzinahan | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 22. | Temu mayat | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 23. | Pencemaran nama baik | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 24. | Pemalsuan merk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Penadahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | VCD porno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Ancaman dengan keras | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 |
| 28. | Pemerkosaan | 3 | 4 | 12 | 23 | 11 |
| 29. | Pencurian sarang walet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Miras | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31. | Narkotika | 34 | 44 | 66 | 0 | 0 |
| 32. | Pencurian listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Penculikan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Bawa lari orang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Memiliki sajam | 9 | 8 | 15 | 19 | 0 |
| 36. | Menyimpan obat petasan | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 37. | Pemerasan | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
| 38. | Pencurian dalam keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Lain-lain | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **517** | **476** | **676** | **542** | **372** |
| | **Penyelesaian** | **320** | **357** | **547** | **402** | **244** |

Sumber : Kepolisian Resort Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso Dalam Angka (BPS), 2019-2023

## 3. Rasio Ketergantungan

Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas) dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan Kerja (usia 15-64 tahun). Pada tahun 2018 angka rasio ketergantungan di Kabupaten Bondowoso sebesar 42,90% sedangkan pada tahun 2022 angka rasio ketergantungan sebesar

31,06 % yang artinya pada tahun 2022 setiap 100 penduduk usia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 31 orang tidak produktif.

Tabel 2.150 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 (dalam jiwa)

| No | Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Penduduk usia 0-14 | 149.216 | 151.228 | 157.043 | 155.490 | 154.210 |
| 2 | Jumlah Penduduk usia 15-64 | 539.781 | 535.972 | 538.370 | 538.471 | 538.457 |
| 3 | Jumlah Penduduk usia 65+ | 82.372 | 89.521 | 80.738 | 84.564 | 88.570 |
| 4 | Rasio | 42,90 | 44,92 | 44,17 | 44,58 | 31,06 |
| | **Jumlah** | **771.369** | **776.721** | **776.151** | **778.525** | **781.417** |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

## 4. Kualitas Infrastruktur

Salah satu aspek untuk mengungkit daya saing daerah adalah aspek infrastruktur dalam hal ini infrastruktur kebinamargaan dan Sumber Daya Air. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang perlu dilakukan untuk mendukung perekonomian suatu daerah.

Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun terus berupaya agar kualitas infrastruktur semakin baik, dimana kondisi baik jalan mantap maupun jaringan irigasi baik semakin meningkat di setiap tahunnya. Namun untuk jalan mantap tahun 2022 turun dikarenakan meningkatnya jalan rusak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia jalan dan tidak adanya drainase jalan.

Tabel 2.151 Kualitas Jalan Mantap Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jalan Mantap (%) | 49,498 | 55,975 | 63,150 | 70,431 | 69,742 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2023

Tabel 2.152 Kondisi Jaringan Irigasi Baik Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (meter dan %) | 398.268<br>68,13 | 421.933<br>72,19 | 430.416<br>73,63 | 435.732<br>74,54 | 441.007 m<br>75,44 |

Sumber: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso, 2023

## 5. Kualitas Cakupan Air Minum

Air minum sebagai kebutuhan dasar bagi manusia merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik akses air minum layak hingga aman.

Untuk memenuhi pelayanan air minum, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menyediakan pemenuhan air minum melalui sistem pelayanan air minum baik di perkotaan dan perdesaan. Dari tahun 2018 sampai 2022 capaian air minum terus meningkat dan di tahun 2022 sebesar 80,59%.

Tabel 2.153 Perkembangan Capaian Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase rumah Tangga yang menggunakan air minum | 62,25 | 71,05 | 73,54 | 78,16 | 80,59 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (2023)

# BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output* dengan menggunakan konsep *budgeting*, dengan mempertimbangkan *benefit and cost ratio* serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. APBD menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pendekatan anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 222 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. penyusunan Program dan Kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan Rencana Kerja SKPD; c. penyusunan anggaran; d. pengelolaan Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; f. akuntansi dan pelaporan; dan g. pengadaan barang dan jasa.

Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pasal 14 dinyatakan bahwa hasil pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA, PPAS dan penyusunan APBD. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut menggunakan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah secara sistematis merupakan perwujudan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya sangat mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa sesuai Indek Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Bondowoso termasuk Kabupaten dengan tingkat Kapasitas Fiskal Sedang. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam hubungannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran komitmen penyelenggara pemerintahan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan APBD yang dilakukan setiap tahun, selalu memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber lain, yang memiliki potensi sebagai penyumbang pendapatan daerah, sehingga kebutuhan pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat terpenuhi. Optimalisasi dan *updating* sumber daya yang menjadi pengungkit untuk meningkatkan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan terus menerus menjadi perhatian, salah satunya melalui penyusunan regulasi secara komprehensif dan rasional.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan asumsi dan proyeksi secara rasional, terukur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sehingga antara jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber dengan jumlah pembiayaan yang dibelanjakan terdapat keseimbangan. Pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 setiap tahun mengalami fluktuasi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2020 saat Pandemi COVID 19 pendapatan daerah menurun, pada tahun 2021 meningkat dan pada tahun 2022 kembali menurun secara siginifikan bahkan lebih rendah dibanding tahun 2018.

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, masih mengandalkan sumber dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kontribusi dana perimbangan dalam struktur APBD masih lebih dari 65% sehingga optimalisasi terhadap sumber pendapatan yang lain menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tahap audit. Berikutnya berdasarkan opini hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan, diberikan penilaian. LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari kurun waktu tahun 2018-2022 mendapatkan penilaian dari BPK yaitu opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 2.094.948.617.112,18,- menurun sebesar 8,90% pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1.908.477.397.297,83,- dengan tingkat penurunan rata-rata 2,30%. Pendapatan daerah tahun 2022 turun menjadi sebesar Rp. 1.908.477.397.297,83,- , atau turun sebesar Rp. 145.872.234.115,67,- (7,10%) dari tahun 2021, dengan penurunan ini bahkan menjadi lebih rendah dibanding total pendapatan daerah yang diterima pada tahun 2018. Komponen pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan adalah bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020 menyebabkan prioritas alokasi anggaran Pemerintah Pusat digunakan untuk percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19, serta sesuai dengan ketentuan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, selanjutnya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyesuaikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemotongan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, pemotongan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dan penyesuaian belanja pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai :

1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
2. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Social Safety Net*; dan
3. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen pendapatan daerah, yang memiliki tingkat kontribusi berkisar antara 8,79% - 10,34% terhadap total pendapatan daerah, mengalami fluktuasi tetapi tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan karena berbagai faktor. Realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 203.239.207.718,18,- menurun sebesar 6,76% menjadi Rp. 189.504.490.467,06,- pada tahun 2022, dengan penurunan rata-rata PAD sebesar 1,73% pertahun.

Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2018-2022 masih sangat dominan yaitu berkisar antara 58,60% dalam menopang pendapatan daerah, yaitu DAU berkisar antara 38,46% sampai 43,98%, DAK berkisar antara 14,15% sampai 17,73% dan DBH berkisar antara 4,61% sampai 7,56%.

Realisasi penerimaan dana transfer setiap tahun terus mengalami fluktuasi sehingga sulit dilakukan asumsi. Realisasi penerimaan Dana Transfer pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.648.824.802.894,00,- dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 1.678.782.423.998,00,- terjadi peningkatan sebesar 1,82% selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Rata–rata pertumbuhan Dana Transfer setiap tahun hingga tahun 2022 mencapai 0,45% pertahun. Pada tahun 2022 penerimaan Dana Transfer mencapai Rp. 1.678.782.423.998,00,- atau turun sebesar Rp. 50,849.217.138,13,- dibanding tahun 2021.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan unsur pendapatan daerah yang sangat fluktuatif, dimana sesuai peraturan perundang-undangan komponen ini merupakan agregat pendapatan daerah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam pos pendapatan yang lain dan perolehannya setiap tahun mengalami fluktuasi tergantung ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Komponen penyusun pendapatan ini terdiri dari penerimaan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan dana lainnya.

Secara kumulatif tahun 2018-2022, pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah total mencapai sebesar Rp. 609.794.465.224,00,- Perolehan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 242.884.606.500,00,- dan pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp 155.833.099.000,00,-. Tahun 2020 pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun dibanding tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 69.302.860.000,00,- . Pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 101.582.419.780,00,-. Dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi Rp. 40.191.479.944,00,- Atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 36,22%.

Gambaran rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1A Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020 Kabupaten Bondowoso

| NO | URAIAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | Rata-Rata Pertumb (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **2.094.948.617.112,18** | **2.156.958.262.466,15** | **1.941.757.072.548,72** | **-0,04%** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **203.239.207.718,18** | **218.538.009.619,15** | **222.657.296.623,72** | **5,90%** |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 33.846.189.006,00 | 36.877.599.765,21 | 30.580.807.590,96 | 5,35% |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 25.493.435.082,00 | 24.693.713.138,18 | 18.316.8717.235,00 | 4,09% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.845.844.443,70 | 3.977.527.552,77 | 4.203.394.607,40 | 2,90% |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 140.053.739.186,48 | 152.989.169.162,99 | 169.556.377.240,36 | 6,29% |
| **1.2** | **DANA PERIMBANGAN** | **1.336.039.553.661,00** | **1.433.245.361.106,00** | **1.264.055.581.233,00** | **-0,66%** |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 116.663.676.048,00 | 102.060.650.644,00 | 99.407.048.031,00 | 8,65% |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 910.319.122.000,00 | 948.677.072.000,00 | 851.793.800.000,00 | -2,08% |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 309.056.755.613,00 | 382.507.638.462,00 | 312.854.733.202,00 | 1,07% |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **555.669.855.733,00** | **505.174.891.741,00** | **455.044.194.692,00** | **-0,82%** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 60.414.120.000,00 | 63.949.840.000,00 | 69.302.860.000,00 | -6,36% |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 91.135.410.233,00 | 109.488.971.741,00 | 93.730.423.692,00 | 6,34% |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 221.649.839.000,00 | 239.852.821.000,00 | 256.120.568.000,00 | 15,78% |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 182.470.486.500,00 | 91.883.259.000,00 | 35.890.343.000,00 | -31,64% |
| 1.3.5 | Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.6 | Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.7 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| NO | URAIAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | Rata-Rata Pertumb (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **2.012.067.456.000,82** | **2.205.808.327.365,39** | **1.957.381.041.110,92** | **-0,45%** |
| **2.1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1.138.617.578.905,90** | **1.206.986.844.917,30** | **1.166.277.564.009,00** | **2,05%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 737.814.919.015,00 | 772.845.898.940,00 | 743.227.595.897,00 | -1,52% |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 2.167.255.600,00 | 2.676.817.400,00 | 1.183.163.800,00 | 0,00% |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 79.994.905.885,00 | 76.915.920.500,00 | 70.135.598.600,00 | 22,23% |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 16.320.800.000,00 | 12.452.000.000,00 | 2.332.500.000,00 | -8,45% |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 5.541.421.605,90 | 6.448.476.777,30 | 5.238.886.188,00 | -2,77% |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 296.523.877.100,00 | 335.617.961.300,00 | 343.933.199.524,00 | 8,27% |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 254.399.700,00 | 29.770.000,00 | 226.620.000,00 | -5,62% |
| **2.2** | **BELANJA LANGSUNG** | **873.449.877.094,92** | **998.821.482.448,09** | **791.103.477.101,92** | **-3,64%** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 33.718.068.125,00 | 34.256.878.363,00 | 41.597.247.508,00 | 7,10% |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 554.930.464.293,82 | 579.008.956.878,45 | 522.254.951.541,40 | 3,20% |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 284.801.344.676,10 | 385.555.647.206,64 | 227.251.278.052,52 | -14,51% |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **118.466.717.254,65** | **201.347.878.366,01** | **152.530.938.011,77** | **-2,52%** |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **121.428.566.254,65** | **201.347.878.366,01** | **152.530.938.011,77** | **-4,18%** |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.961.849.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-50,32%** |

Tabel 3.2B Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 – 2022 Kabupaten Bondowoso

| NO | URAIAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | Rata-Rata Pertumb (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **1.990.930.422.024,73** | **1.908.477.397.297,83** | **-4,14** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **261.277.628.857,59** | **189.503.493.355,83** | **-27,47** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 35.115.359.624,00 | 41.397.270.520,65 | 17,89 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 14.348.603.052,00 | 16.881.382.551,95 | 17,65 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.260.079.389,45 | 4.544.375.373,27 | 6,67 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 207.553.588.792,14 | 126.680.464.909,96 | -38,96 |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.729.631.641.136,14** | **1.678.782.423.998,00** | **-2,94** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 1.597.517.341.095,00 | 1.537.303.275.036,00 | -3,77 |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 132.114.300.041,14 | 141.479.148.962,00 | 7,09 |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **21.152.031,00** | **40.191.479.944,00** | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 11.601.665.000,00 | |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 21.152.031,00 | 28.589.814.944,00 | |
| **2** | **BELANJA** | **1.898.726.058.279,05** | **1.900.909.432.084,66** | 0,11 |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.364.102.710.252,24** | **1.377.797.615.369,66** | 1,00 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 799.417.410.997,00 | 787.984.360.335,00 | -1,43 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 397.769.832.198,38 | 475.353.826.339,66 | 19,50 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 1.183.163.800,00 | 2.183.163.800,00 | 84,52 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 130.514.844.220,06 | 93.264.683.855,00 | -28,54 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 35.217.459.036,80 | 19.011.581.040,00 | -46,02 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **177.725.667.457,81** | **190.396.577.000,00** | 7,13 |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 82.895.933.491,00 | 86.205.466.900,00 | 3,99 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.446.436.867,21 | 48.977.092.155,00 | 15,39 |

| NO | URAIAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | Rata-Rata Pertumb (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 51.677.563.443,60 | 48.386.382.840,00 | -6,37 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 521.590.106,00 | 6.802.635.105,00 | 1.204,21 |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 184.143.550,00 | 25.000.000,00 | -86,42 |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.006.063.700,00** | **1.149.787.428,00** | 14,29 |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.006.063.700,00 | 1.149.787.428,00 | 14,29 |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **355.891.616.869,00** | **331.565.452.287,00** | -6,84 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | 6.165.749.553,00 | 4.527.376.025,00 | -26,57 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/Kota, Pem. Desa dan Parpol | 349.725.867.316,00 | 327.038.076.262,00 | -6,49 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **137.046.287.999,57** | **212.726.349.216,93** | 55,22 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 136.906.969.499,57 | 227.595.111.216,93 | |
| | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 139.318.500,00 | 131.238.000,00 | |
| | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **15.000.000.000,00** | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | 15.000.000.000,00 | |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **137.046.287.999,57** | **212.726.349.216,93** | 55,22 |

## 3.1.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Neraca Daerah Kabupaten Bondowoso secara umum menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif.

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2018-2022

| NO. | URAIAN | TAHUN 2018 (Rp) | TAHUN 2019 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2022 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **ASET** | | | | | | |
| **1** | **ASET LANCAR** | **-** | | | | | |
| | Kas di Kas Daerah | 185.203.532.409,01 | 131.003.038.837,20 | 104.040.569.665,12 | 179.556.601.565,89 | 207.708.972.841,60 | 2,91 |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 7.875.000,00 | 18.433.000,00 | 1.001.111,23 | |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | 47.114.838,00 | 0,00 | 317.407.530,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| | Kas di BLUD | 8.188.103.535,15 | 5.850.199.507,64 | 23.661.575.848,16 | 43.083.972.311,47 | 10.329.468.288,89 | 5,98 |
| | Kas Lainnya | 8.444.068.217,02 | 15.742.350.833,09 | 9.013.447.668,33 | 5.137.508.504,57 | 2.308.771.309,61 | -27,69 |
| | Piutang Pendapatan | 12.595.190.091,68 | 55.783.556.127,53 | 39.376.238.980,21 | 34.869.237.347,91 | 39.285.468.248,66 | 32,89 |
| | Piutang Transfer | 7.644.209.044,00 | 33.341.703.406,00 | 16.331.739.736,00 | 8.128.005.469,00 | 9.433.155.600,00 | 5,40 |
| | Piutang Lainnya | 34.072.264.486,86 | 9.548.387.388,86 | 9.112.000.988,86 | 8.968.269.888,86 | 8.824.144.388,86 | -28,66 |
| | Penyisihan Piutang tak tertagih | - 23.009.761.508,96 | (30.858.234.100,10) | (27.526.204.145,14) | (28.862.198.413,61) | (32.523.447.778,30) | 9,04 |
| | Beban dibayar dimuka | 2.500.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 54.000.000,00 | 115,58 |
| | Persediaan | 36.183.918.702,06 | 35.226.604.425,93 | 45.727.718.089,39 | 41.836.674.564,08 | 38.466.719.775,88 | 1,54 |
| | **JUMLAH ASET LANCAR** | **269.371.139.814,82** | **255.637.606.426,15** | **220.066.369.360,93** | **292.740.504.238,17** | **283.918.253.786,43** | **1,32** |
| **2** | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| | **Investasi Non Permanen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Investasi Permanen** | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 35.721.748.048,29 | 35.171.525.688,80 | 36.999.689.204,00 | 37.467.057.468,76 | 40.246.989.267,76 | 3,03 |
| | **Jumlah Investasi Permanen** | **35.721.748.048,29** | **35.171.525.688,80** | **36.999.689.204,00** | **37.467.057.468,76** | **40.246.989.267,76** | **3,03** |
| | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **35.721.748.048,29** | **35.171.525.688,80** | **36.999.689.204,00** | **37.467.057.468,76** | **40.246.989.267,76** | **3,03** |

| NO. | URAIAN | TAHUN 2018 (Rp) | TAHUN 2019 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2022 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **ASET TETAP** | | | | | | |
| | Tanah | 359.426.863.976,00 | 356.984.844.776,00 | 356.992.452.776,00 | 356.992.452.776,00 | 356.992.452.776,00 | -0,17 |
| | Peralatan dan Mesin | 525.854.111.903,25 | 611.498.744.331,19 | 713.018.983.064,63 | 804.359.574.244,63 | 882.762.175.492,04 | 13,83 |
| | Gedung dan Bangunan | 837.079.228.941,21 | 914.463.484.012,24 | 966.125.500.568,52 | 1.012.156.331.292,77 | 1.065.048.895.661,77 | 6,21 |
| | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 1.900.340.253.828,14 | 2.113.928.261.582,12 | 2.157.138.561.361,75 | 2.209.170.212.756,54 | 2.257.980.446.596,54 | 4,41 |
| | Aset Tetap Lainnya | 53.863.797.686,21 | 65.332.949.621,21 | 72.594.049.345,21 | 79.419.369.156,21 | 85.745.196.946,21 | 12,33 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 14.882.040.300,00 | 2.035.249.578,79 | 1.301.507.700,00 | 554.343.200,00 | 545.343.200,00 | -56,25 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | -1.258.872.262.856,68 | -1.462.188.495.539,53 | -1.701.000.454.138,36 | (1.964.664.492.387,03) | -2.201.242.997.669,22 | 14,99 |
| | **JUMLAH ASET TETAP** | 2.432.574.033.778,13 | 2.602.055.038.362,02 | 2.566.170.600.677,75 | 2.497.987.791.039,12 | 2.447.831.513.003,34 | **0,16** |
| **4** | **DANA CADANGAN** | | | | | | |
| | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000.000,00 | |
| | **JUMLAH DANA CADANGAN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000.000,00** | |
| **5** | **ASET LAINNYA** | | | | | | |
| | Tagihan Jangka Panjang | 2.538.778.509,00 | 2.536.278.509,00 | 2.535.278.509,00 | 2.549.278.509,00 | 2.549.278.509,00 | 0,10 |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 151.408.140,00 | 151.408.140,00 | 151.408.140,00 | 151.408.140,00 | 151.408.140,00 | 0,00 |
| | Aset Tak Berwujud | 2.205.268.460,00 | 2.734.037.558,67 | 8.752.074.510,00 | 8.969.674.320,00 | 9.223.187.675,00 | 43,01 |
| | Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 | -6.402.640.328,33 | (7.113.980.691,34) | (7.870.655.413,34) | |
| | Aset Lain-lain | 58.018.392.471,92 | 57.945.840.771,92 | 61.613.288.122,00 | 61.609.438.122,00 | 59.367.581.199,00 | 0,58 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 | -3.733.197.350,08 | -3.733.197.350,08 | (3.063.278.102,00) | |
| | **JUMLAH ASET LAINNYA** | **62.913.847.580,92** | **63.367.564.979,59** | **62.916.211.602,59** | **62.432.621.049,58** | **60.357.522.007,66** | **-1,03** |
| | **JUMLAH ASET** | 2.800.580.769.222,16 | 2.956.231.735.456,56 | 2.886.152.870.845,27 | 2.890.627.973.795,63 | 2.847.354.278.065,19 | 0,41 |
| **B** | **KEWAJIBAN** | | | | | | |

| NO. | URAIAN | TAHUN 2018 (Rp) | TAHUN 2019 (Rp) | TAHUN 2020 (Rp) | TAHUN 2021 (Rp) | TAHUN 2022 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | | |
| | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 534.940.633,17 | 97.775.711,16 | 133.906.212,04 | 201.404.165,00 | 82.902.010,00 | -37,26 |
| | Pendapatan Diterima di Muka | 624.072.366,83 | 1.696.957.987,43 | 1.747.899.149,08 | 739.493.629,92 | 1.405.862.437,56 | 22,51 |
| | Utang Beban | 10.243.202.031,06 | 12.380.309.292,21 | 14.561.206.073,24 | 4.683.650.361,73 | 11.018.561.650,56 | 1,84 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | 526.025.026,12 | 6.498.100.102,12 | 5.821.605.158,12 | 2.882.281.318,26 | 3.860.225.088,12 | 64,59 |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **11.928.240.057,18** | **20.673.143.092,92** | **22.264.616.592,48** | **8.506.829.474,91** | **16.367.551.186,24** | **8,23** |
| **2** | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **11.928.240.057,18** | **20.673.143.092,92** | **22.264.616.592,48** | **8.506.829.474,91** | **16.367.551.186,24** | **8,23** |
| **C** | **EKUITAS** | | | | | | |
| | Ekuitas | 2.788.652.529.164,98 | 2.935.558.592.363,64 | 2.863.888.254.252,79 | 2.882.121.144.320,72 | 2.830.986.726.878,95 | 0,38 |
| | **JUMLAH EKUITAS** | 2.788.652.529.164,98 | 2.935.558.592.363,64 | 2.863.888.254.252,79 | 2.882.121.144.320,72 | 2.830.986.726.878,95 | 0,38 |
| | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | 2.800.580.769.222,16 | 2.956.231.735.456,56 | 2.886.152.870.845,27 | 2.890.627.973.795,63 | 2.847.354.278.065,19 | 0,41 |

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain Rasio Lancar dan Quick Ratio.

Berdasarkan perhitungan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek, rasio lancar Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi, rasio lancar paling rendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 9,88 dan paling tinggi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 22,58.

Sedangkan untuk quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek, rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 7,83 dan paling tinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 29,49.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah Rasio total hutang terhadap total aset. Berdasarkan perhitungan Rasio total hutang terhadap total aset, yaitu total hutang dibagi dengan total aset, nampak bahwa rasio hutang Kabupaten Bondowoso terhadap total asetnya kurang dari 1 (satu), dimana rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,0077 dan terendah pada Tahun 2021 sebesar 0,0029.

Secara lebih jelas analisis rasio keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2018 – 2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio lancar (*current ratio*) | 22,58 | 12,36 | 9,88 | 34,41 | 17,35 |
| 2. | Rasio quick (*quick ratio*) | 19,55 | 10,66 | 7,83 | 29,49 | 15,00 |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,0043 | 0,0070 | 0,0077 | 0,0029 | 0,0057 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki sangat baik. Demikian pula aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya sedikit yang dibiayai oleh hutang.

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam pengelolaan keuangan daerah, komponen pendapatan yang memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD selama periode 2018-2022 masih rendah dengan rata-rata proporsi 9,10% - 11,47% dari total pendapatan daerah. Peningkatan potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan regulasi oleh

pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan beban pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselaraskan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD.
2. Melakukan kajian penyesuaian tarif, rincian obyek, prosedur / sistem pemungutan dan ketentuan umum lainnya, dalam rangka optimalisasi PAD.
3. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (WP) melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi langsung kepada WP atau melalui media elektronik, baliho, spanduk, dan lain-lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada aparatur pemungut pajak daerah yang berprestasi.
4. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah dengan survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta study banding / lapangan tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan koordinasi terhadap OPD penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan daerah.
8. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT.
9. Optimalisasi kinerja satgas pajak dan retribusi daerah.
10. Kebijakan pemberian relaksasi pajak dan retribusi daerah akibat pandemi Covid-19.
11. Implementasi MOU, PKS dengan Instansi terkait dan pelaksanaan TP2DD.

Pengelolaan belanja yang dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip efektivitas bahwa belanja daerah harus dilaksanakan sesuai sasaran dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Prinsip efisien bahwa belanja harus memperhatikan masukan dan keluaran. Prinsip transparansi bahwa alokasi anggaran belanja dilaksanakan secara terbuka dapat diakses, dilaksanakan menurut skala prioritas

serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan prinsip akuntabilitas bahwa belanja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah sehingga belanja daerah disusun dengan memperhatikan output yang akan dihasilkan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2018-2022 secara akumulasi, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 9.974.892.314.840,84,- dan terserap sebesar Rp. 9.378.393.754.413,36,- atau terealisasi 94,02% dari target. Penyerapan anggaran diatas 90,00% per tahun merupakan realisasi yang optimal untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah. Selama tahun 2018-2020 belanja tidak langsung memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja langsung. Rata-rata belanja tidak langsung mencapai 56,15% dan belanja langsung rata-rata mencapai 43,85%. Belanja tidak langsung adalah bersifat wajib, mengikat serta merupakan prioritas dalam belanja daerah. Tahun 2021-2022 komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total belanja daerah meningkat 0,11%, belanja operasi meningkat 1,00%, belanja modal meningkat 7,13%, belanja tidak terduga meningkat 14,29% sedangkan belanja transfer menurun 6,84%.

Proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung adalah peruntukan belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai ini mengalami penurunan tiap tahun, hal ini bertolak belakang dengan proporsi belanja bantuan keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berimplikasi pada penerapan kebijakan otonomi desa yang makin menguat sehingga alokasi untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahun. Tahun 2018 belanja bantuan keuangan mencapai 14,74% dari total belanja daerah, dan pada tahun 2022 mencapai 17,20% serta terdapat kecenderungan untuk terus meningkat selama 5 tahun ke depan.

Kecenderungan/trend peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan ini tentu mempengaruhi proporsi belanja daerah secara keseluruhan, khususnya terhadap belanja langsung, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat mengingat dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan.

Proporsi belanja yang juga menunjukkan peningkatan adalah dari komponen belanja hibah, tahun 2018 proporsinya mencapai 3,98% dari total belanja daerah, meningkat pada tahun 2022 mencapai 4,90%.

Belanja program dan kegiatan untuk pembangunan setiap tahun berfluktuasi sesuai dengan tingkat fluktuasi pendapatan daerah, dilihat dari proporsi belanja langsung selama tahun 2018-2020 menurun dari 46,04% menjadi 40,41%. Proporsi belanja barang dan jasa dalam belanja langsung yang mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan semakin dinamis mengikuti kondisi keuangan daerah, mengingat stimulan berupa berbagai bantuan yang diterima masyarakat masuk dalam proporsi belanja barang dan jasa. Pada tahun 2020 proporsi belanja barang dan jasa dalam belanja langsung menurun, karena pendapatan daerah mengalami penurunan akibat *refocussing* anggaran dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang berlaku sejak tanggal 16 April 2020.

Tahun 2018-2022 realisasi pemenuhan belanja kebutuhan aparatur yang termasuk dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami fluktuasi sesuai dengan peraturan perundangan. Proporsi belanja kebutuhan aparatur yang termasuk komponen belanja tidak langsung pada tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 37,46% dari Total belanja daerah, sedangkan proporsi belanja kebutuhan aparatur yang termasuk komponen belanja langsung rata-rata pada tahun 2018-2022 mencapai 1,71% dari total belanja daerah.

Proporsi realisasi penyerapan anggaran belanja daerah per tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018-2022

| NO | URAIAN | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % |
| | **BELANJA** | **1.710.002.157.294,92** | | **1.863.741.889.288,09** | | **1.608.208.955.398,92** | | **1.607.910.188.438,37** | | **1.569.343.979.797,66** | |
| **A** | **BELANJA OPERASI** | **1.424.946.412.918,82** | **83,33** | **1.478.156.472.081,45** | **86,44** | **1.380.731.057.346,40** | **80,74** | **1.410.349.479.042,56** | **82,48** | **1.377.797.615.369,66** | **80,57** |
| 1 | Belanja Pegawai | 745.146.112.540,00 | 43,58 | 780.536.106.513,00 | 45,65 | 752.196.941.707,00 | 43,99 | 799.417.410.997,00 | 46,75 | 787.984.360.335,00 | 46,08 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 581.317.338.893,82 | 34,00 | 605.575.627.668,45 | 35,41 | 554.882.853.239,40 | 32,45 | 444.016.600.988,70 | 25,97 | 475.352.226.339,66 | 27,80 |
| 3 | Belanja Subsidi | 2.167.255.600,00 | 0,13 | 2.676.817.400,00 | 0,16 | 1.183.163.800,00 | 0,07 | 1.183.163.800,00 | 0,07 | 2.183.163.800,00 | 0,13 |
| 4 | Belanja Hibah | 79.994.905.885,00 | 4,68 | 76.915.920.500,00 | 4,50 | 70.135.598.600,00 | 4,10 | 130.514.844.220,06 | 7,63 | 93.266.283.855,00 | 5,45 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 16.320.800.000,00 | 0,95 | 12.452.000.000,00 | 0,73 | 2.332.500.000,00 | 0,14 | 35.217.459.036,80 | 2,06 | 19.011.581.040,00 | 1,11 |
| **B** | **BELANJA MODAL** | **284.801.344.676,10** | **16,66** | **385.555.647.206,64** | **22,55** | **227.251.278.052,52** | **13,29** | **196.554.645.695,81** | **11,49** | **190.396.577.000,00** | **11,13** |
| 1 | Belanja Modal - Tanah | 4.160.434.496,00 | 0,24 | 197.631.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal - Peralatan dan Mesin | 80.848.645.684,10 | 4,73 | 95.915.571.576,00 | 5,61 | 104.183.050.562,00 | 6,09 | 95.221.279.024,00 | 5,57 | 86.205.466.900,00 | 5,04 |
| 3 | Belanja Modal - Bangunan dan Gedung | 56.270.798.818,00 | 3,29 | 76.272.552.566,82 | 4,46 | 70.038.377.021,89 | 4,10 | 42.446.436.867,21 | 2,48 | 48.977.092.155,00 | 2,86 |
| 4 | Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 126.003.499.482,00 | 7,37 | 199.919.292.238,82 | 11,69 | 43.648.432.279,63 | 2,55 | 51.677.563.443,60 | 3,02 | 48.386.382.840,00 | 2,83 |
| 5 | Belanja Modal - Aset Tetap lainnya | 16.355.947.096,00 | 0,96 | 11.542.241.935,00 | 0,67 | 8.409.927.669,00 | 0,49 | 7.025.222.811,00 | 0,41 | 6.802.635.105,00 | 0,40 |
| 6 | Belanja Modal - Aset lainnya | 1.162.019.100,00 | 0,07 | 1.708.357.890,00 | 0,10 | 971.490.520,00 | 0,06 | 184.143.550,00 | 0,01 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| **C** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **254.399.700,00** | **0,01** | **29.770.000,00** | **0,00** | **226.620.000,00** | **0,01** | **1.006.063.700,00** | **0,06** | **1.149.787.428,00** | **0,07** |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 254.399.700,00 | 0,01 | 29.770.000,00 | 0,00 | 226.620.000,00 | 0,01 | 1.006.063.700,00 | 0,06 | 1.149.787.428,00 | 0,07 |
| | **TRANSFER** | **302.065.298.705,90** | **17,66** | **342.066.438.077,30** | **20,00** | **349.172.085.712,00** | **20,42** | **355.891.616.869,00** | **20,81** | **331.565.452.287,00** | **19,39** |
| 1 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 3.650.022.575,30 | 0,21 | 3.879.885.909,40 | 0,23 | 2.915.741.954,00 | 0,17 | 4.154.754.200,00 | 0,24 | 4.527.376.025,00 | 0,26 |
| 2 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 1.891.399.030,60 | 0,11 | 2.568.590.867,90 | 0,15 | 2.323.144.234,00 | 0,14 | 2.010.995.353,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 295.557.806.500,00 | 17,28 | 334.679.065.200,00 | 19,57 | 343.933.199.524,00 | 20,11 | 349.725.867.316,00 | 20,45 | 327.038.076.262,00 | 19,13 |
| 4 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 966.070.600,00 | 0,06 | 938.896.100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibanding keseluruhan pengeluaran belanja ditambah pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018-2022 terus mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk komponen belanja yang lain. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibanding keseluruhan pengeluaran belanja ditambah pengeluaran pembiayaan kembali meningkat. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018 - 2022

| No | Uraian | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) | Prosentase |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (a)/(b) x 100% |
| 1 | Tahun 2018 | 820.486.958.022,00 | 2.012.067.456.000,82 | 40,78 |
| 2 | Tahun 2019 | 895.084.665.127,00 | 2.205.808.327.368,39 | 40,58 |
| 3 | Tahun 2020 | 811.707.856.235,00 | 1.957.381.041.110,92 | 41,47 |
| 4 | Tahun 2021 | 799.417.410.997,00 | 1.898.726.058.279,05 | 42,10 |
| 5 | Tahun 2022 | 787.984.360.335,00 | 1.915.909.432.084,66 | 41,13 |

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Realisasi peningkatan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir diharapkan berkorelasi terhadap realisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso. Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun terakhir, menunjukkan kondisi tahun 2018 defisit riil positif, dan tahun 2019-2022 mengalami defisit riil minus sebagaimana terlihat pada tabel 3.6. Defisit riil yang terjadi tersebut, ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, sebagaimana terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | **2.094.948.617.112,18** | **2.156.958.262.466,15** | **1.941.757.072.598,72** | **2.054.350.628.524,73** | **1.908.478.394.409,06** |
| | **Dikurangi Realisasi :** | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | **1.710.002.157.294,92** | **1.863.741.889.288,09** | **1.608.208.955.398,92** | **1.607.910.188.438,37** | **1.569.343.979.797,66** |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2.961.849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000.000,00 |
| | **Defisit Riil** | **381.984.610.817,26** | **293.216.373.178,06** | **333.548.117.199,80** | **446.440.440.086,36** | **324.134.414.611,40** |

Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 100.092.046.784,48 | 201.347.878.366,01 | 152.497.813.011,77 | 136.906.969.499,57 | 227.595.111.216,93 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 21.218.494.470,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 118.025.000,00 | 0,00 | 33.125.000,00 | 139.318.500,00 | 131.238.000,00 |
| 6 | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **121.428.566.254,65** | **201.347.878.366,01** | **152.530.938.011,77** | **137.046.287.999,57** | **227.726.349.216,93** |

Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018-2022

| No | Uraian | SiLPA 2018 | | SiLPA 2019 | | SiLPA 2020 | | SiLPA 2021 | | SiLPA 2022 | | Rata-Rata Pert (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | |
| | **Jumlah SiLPA** | **201.347.878.366,01** | **100,00** | **152.497.813.466,77** | **100,00** | **136.906.969.499,57** | **100,00** | **136.906.969.499,57** | **100,00** | **227.595.111.216,93** | **100** | **3,06** |
| 1 | Pelampauan penerimaan PAD | 11.269.481.474,47 | 5,60 | 7.403.165.621,58 | 4,85 | 13.736.812.463,72 | 10,03 | - | | - | | (1,41) |
| 2 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 22.301.265.661,00 | 11,08 | (36.449.173.894,00) | (23,90) | (29.899.607.976,00) | (21,84) | - | | - | | 26,13 |
| 3 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 18.948.276.373,88 | 9,41 | 26.381.811.376,00 | 17,30 | 26.318.090.537,00 | 19,22 | - | | - | | 134,26 |
| 4 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 148.828.854.856,66 | 73,92 | 155.162.010.363,19 | 101,75 | 126.751.674.474,85 | 92,58 | 136.906.969.499,57 | 100,00 | 227.595.111.216,93 | 100 | 1,86 |
| 5 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kegiatan Lanjutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir, berasal dari berbagai sumber. Tabel 3.8 menyajikan jumlah serta persentase pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja dari rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 terhadap jumlah SILPA. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa proporsi SILPA terbesar pada rentang tahun 2018 hingga 2022 adalah bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Yang terbesar adalah pada tahun 2018, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya menyumbangkan Rp. 148.828.854.856,66,- atau 73,92 % dari total SILPA tahun 2018 Rp. 201.347.878.366,01,- Tabel 3.8 juga memberikan informasi rata-rata pertumbuhan SILPA antara tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu berfluktuasi sebesar 3,06%.

## 3.3 Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan dengan mengelola keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besar manfaat untuk masyarakat melalui:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah.
3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan.
4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan adalah:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah
   a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah (PAD)

      Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

b. Peningkatan penerimaan daerah dari pemerintah pusat, provinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

   Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan pemerintah pusat/provinsi dan pihak lainnya agar pendanaan pembangunan dapat terpenuhi.

c. Pinjaman Daerah

   Pinjaman Daerah dapat dilakukan secara selektif dalam rangka menutup defisit berupa pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (batasan maksimal defisit yang boleh dibiayai dari pinjaman), dengan mempertimbangkan:

   1) Waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

   2) Proyeksi kemampuan mengangsur kembali (*Debt Coverage Service Rasio*).

   3) Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI, serta laju inflasi yang terjadi, sehingga diperoleh tingkat suku bunga yang memadai, kompetitif, dan tidak membebani keuangan daerah.

2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah

   a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Meningkatkan dan memperluas Kemitraan (*Public Private Partnership*)

      Kemitraan/kerjasama merupakan suatu hubungan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Pihak yang saling bekerjasama adalah pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan dimana kemitraan/kerjasama ini dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan secara berkelanjutan dapat tercukupi melalui pengerahan dana swasta dan masyarakat.

   c. Optimalisasi Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

      CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan lingkungan sosial dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas,

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya baik untuk saat ini maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan CSR dengan sukarela. Pelaksanaan CSR akan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/kegiatan antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan pihak perusahaan sehingga dapat berjalan efektif (tepat sasaran).

d. Mengembangkan Privatisasi / Swastanisasi

   Pengembangan privatisasi / swastanisasi dilakukan dalam rangka memberikan peluang seluas-luasnya peran swasta / masyarakat untuk sektor usaha pelayanan umum.

e. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro

   Lembaga keuangan mikro Bank dan nonBank diarahkan untuk berperan dalam intermediasi secara praktis dan efektif antara Bank Umum dengan sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan strategi meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan sumberdaya finansial.

f. Optimalisasi pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

   Efektifitas pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dapat dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek program/ kegiatan berpedoman pada norma/kaidah-kaidah yang berlaku antara Lembaga Pengelola ZIS dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

g. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

   Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah dirasakan cukup penting, sehingga keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

h. Pemanfaatan pembiayaan melalui skema KPBU

   Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat, mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna, dan/atau memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pelaksanaan KPBU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Jawa Timur.

3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan

   Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

   a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan PAD.

   b. Peningkatan pengendalian serta pengawasan atas pemungutan PAD.

4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat

   a. Dalam pengalokasian pembiayaan pembangunan lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan publik disamping kepentingan aparatur.

   b. Pendanaan Pembangunan dengan pola *cost sharing*

      Pola pendanaan pembangunan ini dilakukan melalui kesepakatan belanja antara Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk obyek program maupun kegiatan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan daerah.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikembangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD terintegrasi dilaksanakan secara *E-Government*, baik belanja aparatur, belanja pelayanan publik maupun belanja pembangunan pada tahun 2019-2020 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan pada tahun 2021-2023 dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang berbasis pada kinerja dan kebutuhan masyarakat.

3. Orientasi APBD yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan dilakukan dengan prinsip pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mengurangi kesenjangan sosial maupun kesenjangan antar wilayah.
4. Pengurangan dan pencegahan terjadinya kebocoran serta penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kemitraan strategis baik antar pemerintah daerah dan antar negara dengan masyarakat dan swasta maupun dengan lembaga-lembaga donor.
6. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan dan dana tugas pembantuan/dekonsentrasi, bantuan keuangan serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
7. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan *partnership* secara harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Memperhatikan rencana target kinerja pembangunan daerah tahun 2019 – 2023 yang terus meningkat, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun – tahun sebelumnya, walaupun juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Pada tahun 2024-2026, diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan keuangan negara. Dibandingkan tahun 2018-2022, total pendapatan diperkirakan stagnan, pendapatan dari PAD stagnan, PAD dari hasil pajak daerah diproyeksikan tidak meningkat dari tahun 2021 dengan asumsi diantaranya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang dilakukan penerapan relaksasi, retribusi daerah diperkirakan tidak naik dan Lain lain PAD yang sah diproyeksikan tidak meningkat.

Total pendapatan transfer yang berasal dari komponen transfer Pemerintah Pusat diasumsikan tetap. Dana transfer antar daerah diproyeksikan tetap pada tahun 2024-2026. Dana perimbangan, Dana transfer umum diproyeksikan tetap, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan tetap, meliputi Dana Cukai dan selain Cukai yang, Dana Alokasi Umum diasumsikan tetap dan Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa diasumsikan tetap seperti tahun sebelumnya. Pendapatan dari transfer antar daerah yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak rokok diasumsikan tetap dan yang selain pajak rokok diasumsikan tetap. Untuk pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur sifatnya sangat fluktuatif sehingga untuk tahun 2024-2026 diasumsikan nol. Sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tetap.

Belanja daerah selama 5 tahun harus dilakukan estimasi secara cermat sehingga jika terjadi defisit diperkirakan dapat ditutup dengan pembiayaan netto. Belanja Daerah diperkirakan mengalami stagnan diestimasikan tetap. Total belanja operasi tetap, belanja modal tetap setiap tahun, belanja tidak terduga dialokasikan naik menyesuaikan aturan perundang-undangan dan peningkatan kebutuhan belanja lainnya, sedangkan untuk belanja transfer secara umum menurun sebesar 0,51%. Peningkatan terbesar untuk

bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/Kota, Pem. Desa dan Parpol yaitu untuk ADD yang meningkat sebesar 7,42%. Untuk belanja Pegawai pada Belanja operasi berfluktuasi dimana hal ini telah memperhitungkan peningkatan pengeluaran gaji CPNS serta jumlah pegawai pensiun sesuai peraturan perundangan.

Guna meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat melakukan penyertaan modal kepada badan hukum, khususnya pada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat melakukan penyertaan modal, khususnya pada PDAM dan PT. Bondowoso Gemilang sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, penyertaan modal daerah dapat dilakukan sebagaimana amanat:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang.

Secara garis besar, asumsi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026

| NO | URAIAN | Rata-Rata Pertumb (%) | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | **0,12** | **1.959.495.017.573,00** | **1.961.422.673.863,00** | **1.964.374.030.666,00** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **1,10** | **219.849.976.149,00** | **221.777.632.439,00** | **224.728.989.242,00** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 1,03 | 48.134.556.436,00 | 48.634.556.436,00 | 49.134.556.436,00 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | -3,01 | 26.180.198.850,00 | 24.916.710.943,00 | 24.627.132.808,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1,91 | 140.535.220.863,00 | 143.226.365.060,00 | 145.967.299.998,00 |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **0,00** | **1.703.963.121.684,00** | **1.703.963.121.684,00** | **1.703.963.121.684,00** |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 1.582.892.560.000,00 | 1.582.892.560.000,00 | 1.582.892.560.000,00 |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah | 0,00 | 121.070.561.684,00 | 121.070.561.684,00 | 121.070.561.684,00 |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,00** | **35.681.919.740,00** | **35.681.919.740,00** | **35.681.919.740,00** |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | 35.681.919.740,00 | 35.681.919.740,00 | 35.681.919.740,00 |
| **2** | **BELANJA** | **0,12** | **2.053.350.128.960,00** | **2.055.277.785.250,00** | **2.058.229.142.053,00** |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **0,00** | **1.549.775.895.299,00** | **1.549.775.895.299,00** | **1.549.775.895.299,00** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 0,00 | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 548.959.719.803,00 | 548.959.719.803,00 | 548.959.719.803,00 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 0,00 | 123.918.258.782,00 | 123.918.258.782,00 | 123.918.258.782,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 12.977.750.000,00 | 12.977.750.000,00 | 12.977.750.000,00 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **0,00** | **174.589.519.507,00** | **174.589.519.507,00** | **174.589.519.507,00** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0 | 0 | |

| NO | URAIAN | Rata-Rata Pertumb (%) | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 75.785.323.222,00 | 75.785.323.222,00 | 75.785.323.222,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 24.084.711.300,00 | 24.084.711.300,00 | 24.084.711.300,00 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 66.837.100.385,00 | 66.837.100.385,00 | 66.837.100.385,00 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 7.632.384.600,00 | 7.632.384.600,00 | 7.632.384.600,00 |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **38,41** | **5.328.290.520,00** | **7.255.946.810,00** | **10.207.303.613,00** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 38,41 | 5.328.290.520,00 | 7.255.946.810,00 | 10.207.303.613,00 |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **0,00** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | 0,00 | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/Kota, Pem. Desa dan Parpol | 0,00 | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **93.855.111.387,00** | **93.855.111.387,00** | **93.855.111.387,00** |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | | 63.855.111.387,00 | 93.855.111.387,00 | 93.855.111.387,00 |
| | Pencairan Dana Cadangan | | 30.000.000.000,00 | | |
| | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | | |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | | **93.855.111.387,00** | **93.855.111.387,00** | **93.855.111.387,00** |

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah. Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas merupakan akumulasi belanja tidak langsung dan pos pengeluaran pembiayaan. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan aparatur sebagai pelaksana pelayanan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa serta belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik memiliki kecenderungan fluktuatif selama 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2024–2026 Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diasumsikan tetap tiap tahun. Belanja pegawai yang merupakan komponen belanja operasi menunjukkan angka tetap. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang masuk dalam komponen belanja transfer cenderung meningkat secara signifikan, diproyeksikan tidak meningkat. Belanja bantuan keuangan ini merupakan proporsi peningkatan terbesar dari seluruh komponen belanja yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas. Sedangkan untuk pengeluaran subsidi diasumsikan tetap dan untuk pos pengeluaran pembiayaan memiliki kecenderungan fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian dan keuangan daerah serta mempertimbangkan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024. Gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

| No | Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja Operasi** | **0,00** | **863.920.166.714,00** | **863.920.166.714,00** | **863.920.166.714,00** |
| 1 | Belanja Pegawai | 0,00 | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 |
| 2 | Belanja Subsidi | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| **B** | **Belanja Transfer** | **0,00** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | 0,00 | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 0,00 | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 |
| **C** | **Pengeluaran Pembiayaan** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama** | | **0,00** | **1.187.576.590.348,00** | **1.187.576.590.348,00** | **1.187.576.590.348,00** |

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 – 2026

| No | Uraian | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | **1.959.495.017.573,29** | **1.961.422.673.863,56** | **1.964.374.030.666,51** |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 63.855.111.387,00 | 93.855.111.387,00 | 93.855.111.387,00 |
| | **Total Penerimaan** | **2.053.350.128.960,29** | **2.055.277.785.250,56** | **2.058.229.142.053,51** |
| | Dikurangi: | | | |
| 1 | Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama | 1.187.576.590.348,00 | 1.187.576.590.348,00 | 1.187.576.590.348,00 |
| | **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | **865.773.538.612,29** | **867.701.194.902,56** | **870.652.551.705,51** |

Berdasarkan analisis kerangka pendanaan Tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel 3.9, maka diperoleh asumsi bahwa pertumbuhan pendapatan adalah 0,12% per tahun, pada Tabel 3.10 dapat dilihat Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama yang diasumsikan tetap. Dan pada Tabel 3.11 dapat dilihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan tetap, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp. 865.773.538.612,29,- sedangkan proyeksi pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 870.652.551.705,51,- atau naik sebesar 0,56%.

.

# BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Bondowoso dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum termasuk SPM, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018-2022, terdapat aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun demikian masih terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan serta program secara terencana, terukur, sinergis, serta berkelanjutan (*sustainable*).

Agar berbagai program pembangunan yang dirumuskan menjadi lebih efektif dan optimal dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, salah satu tahapan yang dilakukan adalah identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bondowoso yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026.

## 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (gap) antara kinerja pembangunan yang telah dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum termasuk SPM, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018-2022 yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah:

### 4.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

1. Urusan Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tingginya potensi kejadian bencana alam di Kabupaten Bondowoso karena kondisi wilayah yang bergunung dan berbukit. Jenis bencana yang sering terjadi adalah banjir bandang, puting beliung/ angin kencang, longsor, banjir genangan, kekeringan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi. Masih rendahnya kesiap-siagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, karena belum semua desa dengan kerawanan tinggi bencana mendapatkan pembinaan dan pendampingan menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana relatif masih rendah, kelemahan dan kekurangan dalam ketersediaan SDM terampil, sarana dan prasarana, peraturan dan SOP, serta dukungan kajian resiko bencana dan data informasi kawasan rawan bencana yang belum tersosialisasikan kepada masyarakat.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah maka bisa saja terjadi suatu hal yang sia-sia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penambahan Jumlah penduduk tentu menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan program KB merupakan usaha yang mempunyai dampak langsung terhadap hasil pencapaian dalam penurunan angka kelahiran dan angka fertilitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan mempunyai peranan penting dalam penurunan angka kematian Ibu dan Bayi. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi (pangan, sandang, papan) menjadi suatu hal yang perlu diantisipasi. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi prioritas dalam mengendalikan serta meningkatkan kuantitas Penduduk/Keluarga.

### 4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi, maka berpengaruh juga terhadap kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso yang sempat mengalami penurunan cukup signifikan selama lima tahun terakhir, dengan adanya Pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi, kemampuan berusaha dan akses permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi dan rumah layak huni.

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap meningkatnya pengangguran. Beberapa jenis usaha mengalami penutupan khususnya di sektor jasa yang berkontribusi meningkatkan pengangguran terbuka menjadi relatif cukup besar. Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

2. Indek Desa Membangun (IDM)

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Bondowoso masih perlu dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan aksesibilitas dan pengelolaan lingkungan sehingga terbentuk kemandirian desa. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Optimalisasi fungsi BUMDesa dan BUMDes Bersama sebagai sumber pendapatan Desa, sebagai upaya pencapaian Desa Mandiri.

3. Indek Kualitas Air, Indek Kualitas Udara, Indek Kualitas Tutupan Lahan

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Bondowoso guna menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan oleh industri, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (global warming) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan.

4. Indek Pembangunan Gender (IPG), Kabupaten Layak Anak, dan Kabupaten Layak Pemuda

Fasilitasi perlindungan ibu dan anak serta pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bondowoso masih perlu ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bondowoso juga menjadi kendala untuk pencapaian pembangunan PUG. Penguatan Forum Anak dan forum pemuda perlu terus dilakukan pembinaan agar semakin meningkat kualitasnya.

### 4.1.3 Aspek Daya Saing

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, sehingga semakin luntur nilai-nilai Pancasila. Masih kurangnya optimalisasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sehingga pemahaman kesatuan bangsa dan politik belum terbentuk secara maksimal di masyarakat, karena masih ditemui bahwa demokarasi diidentikkan dengan kebebasan menentukan sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompok. Perlu peningkatan Pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan peran Ormas/LSM dan Tomas/Toga dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif.

2. Urusan Penanaman Modal

Selama pandemi covid-19 investasi terhambat, ketika tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat, pelaksanaan kebijakan kenaikan BBM pasaca pandemi covid-19 menjadi faktor penghambat upaya pemulihan investasi, sehingga iklim investasi yang kondusif perlu terus didorong melalui inovasi pelayanan, kemudahan perijinan dan di dukung penyediaan tenaga kerja sesuai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja, serta perlunya promosi investasi secara lebih intensif terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan minat investor berinvestasi.

### 4.1.4 Aspek Pelayanan Umum Termasuk SPM

1. Urusan Pendidikan

Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan, tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing, selain itu juga adanya jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik, dan masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur Pendidikan juga akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Rendahnya mutu Pendidikan diberbagai jenjang Pendidikan, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan Non Formal ini akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Masih adanya putus sekolah juga menambah masalah di masyarakat, banyak anak yang tidak melanjutkan Pendidikan disebabkan beberapa factor, yaitu factor ekonomi, anak-anak harus bekerja membantu orang tua/keluarga, dan pernikahan di usia anak. Pencapaian target literasi dan numerasi harus menjadi prioritas di setiap jenjang Pendidikan serta penerapan kurikulum merdeka belajar.

2. Urusan Kesehatan

Rendahnya akses masyarakat terhadap sanitasi, jamban dan akses air bersih sebagai faktor kesehatan lingkungan juga berdampak pada rendahnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bondowoso. Pada fase pemulihan Kesehatan, target vaksinasi harus dapat dicapai untuk menghasilkan kekebalan komunal/herd immunity dan upaya penerapan PHBS harus terus dilakukan dan berkelanjutan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan. Pencapaian kepesertaan BPJS UHC hendaknya diikuti dengan peningkatan pelayanan dan perluasan jangkauan layanan Kesehatan. Tingginya prevelansi Stunting diangka 37 % menjadi focus percepatan penurunan stunting secara kolaboratif dan berkelanjutan serta masih tingginya AKI (17 Kasus) dan AKB (120 kasus) juga menjadi prioritas yang harus segera dilakukan pencegahan yang lebih massif lagi.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana Perpres No. 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasam Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, di Bondowoso terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Geopark Ijen, Kawasan Peternakan, Agropolitan, dan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang memerlukan dukungan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selain hal tersebut permasalahan pembangunan bidang perkejaan umum dan penataan ruang, diantaranya:

- Masih banyaknya jalan (jalan kabupaten dan jalan poros desa strategis) dan jembatan yang rusak dikarenakan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan longsor, serta karena faktor usia prasarana jembatan yang sudah tua peninggalan kolonial.

- Rencana dan tahapan pembangunan Jalan lingkar Bondowoso masih belum selesai, masih terkendala dalam pembebasan lahan dan pembangunan prasarana jembatan dan jalan.

- Masih adanya titik rawan genangan dan banjir khususnya di ruas jalan kabupaten karena kurang memadainya saluran drainase jalan dan saluran yang ada tidak berfungsi optimal, saluran drainase tertutup dan trotoar yang ada masih memerlukan pemeliharaan.

- Masih banyaknya bendung, saluran irigasi, dan bangunan pelengkap yang rusak dikarenakan usia bangunan dan tingginya daya rusak air karena sering terjadinya banjir.

- Ketersediaan air irigasi dan tata laksana pembagian air irigasi belum optimal, sehingga beberapa kawasan kurang terlayani air irigasi khususnya pada musim kemarau.

- Kompetensi keahlian dan keterampilan penyedia jasa konstruksi masih belum sesuai kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

- Layanan air minum masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, capaian akses air minum masih 80,59% pada tahun 2022.

- Masih belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala kabupaten untuk melayani masyarakat.

- Akses prasarana sanitasi jamban di Kabupaten Bondowoso sebesar 96,0% (tahun 2022) namun secara kepemilikan masih 70,26%, sehingga masih belum memenuhi target nasional 100%, kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki jamban sendiri dan sebagian masih terbiasa berperilaku BABS.

- Belum semua kawasan perkotaan ditetapkan Perda RDTR-nya, masih 4 dari 20 kawasan perkotaan yang memiliki perda RDTR, sehingga arahan pemanfaatan ruang masih menggunakan Perda RTRW Kabupaten yang sedang dalam proses dilakukan revisi.

- Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan RDTR dan RTRW, serta berpotensi menjadi pelanggaran pemanfaatam ruang, khususnya dalam pemanfaatan ruang-ruang publik.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka menciptakan lingkungan sehat, telah dilakukan identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso sebagaimana kriteria pada Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat beberapa wilayah yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dengan meningkatkan prasarana sarana utilitas umum sesuai dengan kriteria kekumuhannya, seperti drainase,

sistem penyediaan air limbah domestik, jalan lingkungan, dan lainnya. Penanganan kawasan permukiman kumuh telah menyelesaikan 362,2 Ha, sehingga luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bondowoso sampai akhir tahun 2022 masih 476,42 Ha atau 57,29%. Perhitungan kawasan permukiman kumuh didasarkan pada SK Bupati Bondowoso No. 188.45/1055/430.4.2/2021 yang menetapkan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bondowoso seluas 831,6 ha

Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Bondowoso yang sampai tahun 2022 masih terdapat RTLH sebesar 27,60%. Kesadaran masyarakat dan kemiskinan menjadi penyebab utama masih tingginya angka RTLH.

Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) permukiman yang sesuai standard permukiman sehat masih belum merata. Kondisi jalan lingkungan, saluran drainase permukiman dan utilitas umum lainnya pada sebagian besar permukiman belum tersedia secara layak, khususnya di permukiman perdesaan.

5. Urusan Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian social dan bermartabat, serta masih kurang dan belum optimalnya personil yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda. Masih rendahnya pemahaman pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran oleh masyarakat dan belum optimalnya pelayanan penanganan kebakaran dikarenakan belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan standart untuk perluasan jangkauan pemadaman kebakaran.

6. Urusan Sosial

Penanganan PMKS masih terkendala belum tersedianya data per by name by addres serta data per jenis kebutuhan layanan bagi PMKS. Optimalisasi verivikasi dan validasi data DTKS harus terus dilakukan untuk mendapatkan kualitas data DTKS yang lebih valid dan akuntabel. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung baik berupa mobil kusus untuk ODGJ dan Rumah Singgah juga menjadi kendala dalam penanganan PMKS. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas seluruh program Perangkat Daerah untuk menjadi sasaran penerima program, perlu penanganan secara kolaboratif dan sinergi antar Perangkat Daerah karena permasalahan masing-masing keluarga yang berbeda tentunya juga membutuhnya penanganan yang berbeda-beda pula, sehingga percepatan penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan secara terpadu.

7. Urusan Tenaga Kerja

Sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi, maka berpengaruh juga terhadap kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso yang sempat mengalami penurunan cukup signifikan selama lima tahun terakhir, dengan

adanya Pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi, kemampuan berusaha dan akses permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi dan rumah layak huni.

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap meningkatnya pengangguran. Beberapa jenis usaha mengalami penutupan khususnya di sektor jasa yang berkontribusi meningkatkan pengangguran terbuka menjadi relatif cukup besar. Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesenjangan dalam hal memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak masih terjadi, walaupun negara menjamin hak atas hal-hal tersebut diatas. Terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender juga rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan akademisi juga menjadi kendala untuk menyatukan tujuan bersama meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam mencapai kesejahteraan. Tingginya kekerasan kepada perempuan dan anak hingga kejahatan seksual serta rendahnya pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak menjadi tantangan terbesar dalam rangka pencapaian pembangunan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bondowoso.

9. Urusan Pangan

Urusan pangan menjadi sangat penting karena merupakan kebutuhan paling asasi yang menentukan kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan. Masih banyak kawasan yang memerlukan perhatian karena rawan pangan yang memicu kerentanan pangan sehingga berakibat pada rendahnya Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP).

10. Urusan Pertanahan

- Belum semua lahan milik masyarakat memiliki setipikat tanah, khususnya di perdesaan. Program sertifikasi tanah seperti PTSL yang telah berjalan belum menjangkau semua desa dan kelurahan.
- Adanya permohonan perubahan status lahan permukiman dalam kawasan kehutanan untuk menjadi hak milik dan atau pengelolaan oleh masyarakat penghuni.

11. Urusan Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami penurunan (degradasi). Kualitas air, udara, dan lahan mengalami penurunan dikarenakan dampak pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah usaha/industri, polusi udara dari kendaraan dan industri, penggunaan pupuk kimia dalam pengolahan lahan, serta alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan terbangun lainnya.
- Kabupaten Bondowoso masih belum memiliki prasarana TPA yang layak dan memadai. TPA Paguan yang ada saat ini masih menggunakan sistem open dumping dan kondisi kapasitasnya saat ini sudah overload. Sementara TPA baru di Desa Sumberkokap belum dapat dibangun meskipun sudah tersedia lahannya.
- Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah untuk penanganan sampah yang harus diangkut ke TPA, sementara partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari rumah dan penyediaan sistem mandiri pengangkutan sampah dari rumah ke TPS masih kurang.
- Belum optimalnya pemeliharaan dan pengembangan ruang terbuka hijau taman kota untuk memelihara kualitas lingkungan permukiman dan memenuhi ketentuan 20% luasan RTH Publik di kawasan perkotaan

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya permohonan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi dan optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus terus dilakukan agar data kependudukan yang sifatnya dinamis dapat terupdate setiap waktu. Masih rendahnya cakupan layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan jemput bola sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjalin Kerjasama dengan Lembaga / Satuan Pendidikan untuk peningkatan capaian Kartu Identitas Anak dan pencapaian penerbitan Akte Kematian yang capaiannya belum maksimal.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah serta belum optimalnya sitem administrasi pemerintahan desa kususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan juga pendataan dan informasi desa. Menurunnya semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan. Walaupun sudah tidak ada status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal tetapi jumlah Desa Mandiri masih ada 17 (tujuh belas) Desa dari 209 Desa yang ada, sedangkan untuk Desa Berkembang ada 101 Desa dan Desa Maju ada 91 Desa sesuai data tahun 2022 dari Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan apabila tidak disertai dengan kondisi penduduk yang berkualitas dan memiliki daya saing,

rendahnya kualitas penduduk akan menambah beban bagi daerah dalam rangka pencapaian pembangunan manusia. Belum meratanya peningkatan akses dan perluasan jangkauan kualitas pelayanan KB juga menjadi permasalahan sehingga masih banyak pasangan usia subur yang tidak ber KB, ditemui masih banyaknya keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 (dua), serta adanya anggapan banyak anak banyak rejeki juga mempengaruhi upaya-upaya pengendalian penduduk. Masih tingginya pernikahan anak yang terjadi sehingga melahirkan BBLR karena rendahnya pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi.

15. Urusan Perhubungan

- Kurangnya sarana dan prasarana rambu lalu lintas, RPPJ, APILL, marka dan guardrail dan lainnya karena kerusakan dan lokasi-lokasi rawan kecelakaan yang memerlukan penambahan sarana prasarana tersebut.
- Pemeliharaan dan peremajaan prasarana Penerangan Jalan Umum dengan konversi dari tagsasi menjadi meterisasi serta masih adanya jalan poros kecamatan yang belum tersedia prasarana Penerangan jalan umum.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Bondowoso karena belum tersedianya alat uji yang disyaratkan, dan ketersediaan SDM penguji yang bersertifikat. Sehingga belum terpenuhi standar akreditasinya.
- Makin berkurangnya jumlah armada angkutan umum bertrayek karena perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat, khususnya trayek yang melayani kawasan strategis pariwisata dan pusat sosial ekonomi masyarakat, serta kawasan terpencil.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penyelenggaraan e-govermnent sebagaimana standard SPBE, karena belum tuntasnya penyediaan prasarana jaringan yang menghubungkan semua unit pelayanan pemerintah dan area publik, serta belum terintegrasinya pengembangan aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
- Belum maksimalnya penyebarluasan informasi pembangunan melalui berbagai media di tengah dinamika perubahan teknologi dan perkembangan media sosial yang begitu cepat, sehingga informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berbagai keterbatasan Koperasi dan UMKM diantaranya kualitas SDM dan manajemen pengelolaan usaha, inovasi, kualitas dan kapasitas produksi, akses sumber pembiayaan dan akses pemasaran baik secara digital maupun konvensional perlu difasilitasi dan terus dikembangkan melalui penanganan lintas sektor dalam pemulihan ekonomi, mengingat dampak pandemi covid-19 terhadap Koperasi dan UMKM cukup beragam sehingga pada masa pemulihan pasca pandemi covid-19 penanganannya perlu disesuaikan dengan dampak yang diterima.

18. Urusan Statistik

- Belum sinkronnya data sektoral dari berbagai lembaga dan perangkat daerah, karena belum optimalnya sistem koordinasi Satu Data yang dikembangkan.
- Lemahnya mekanisme internal perangkat daerah dalam pembuatan data base sektoral sehingga menyebabkan lamanya pengumpulan dan pengolahan data di perangkat daerah dan keterlambatan publikasi data.

19. Urusan Persandian

Permasalahan bidang persandian adalah belum optimalnya sistem pengamanan data dan informasi daerah, dikarenakan kekurangan SDM yang kompeten dan hal persandian dan sistem aplikasi pengamanan data dan informasi yang belum dikembangkan dengan baik.

20. Urusan Perpustakaan

Optimalimasi pemanfaatan tehnologi informasi harus dilakukan utamanya dengan membangun Literasi Digital, agar minat baca masyarakat melalui media tehnologi dapat terpenuhi. Perluasan jangkauan Perpustakaan, melalui Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Pojok Baca di ruang publik dan Perpustakaan Keliling juga harus terus didorong. Optimalisasi pembinaan kepada pengelola Perpustakaan agar dapat mengelola perpustakaan sebagaimana tata Kelola perpustakaan yang responsive terhadap gender.

21. Urusan Kearsipan

Optimalisasi pelayanan informasi kearsipan melalui Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional harus segera dibangun sebagai bagian dari pelayanan informasi kearsipan. Masih rendahnya kesadaran Perangkat daerah akan pentingnya arsip yang dapat tersimpan dengan baik juga mnjadi kendala untuk penerapan penataan tata kelola kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan. Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah terkendala belum memadainya sarana dan prasarana infrastuktur maupun peralatan dan mesinnya.

22. Urusan Kelautan dan Perikanan

Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana dan kualitas SDM. Disamping itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan perlu mendapat perhatian.

23. Urusan Pariwisata

Potensi wisata dan budaya di Kabupaten Bondowoso cukup banyak yang dapat dikembangkan menjadi industri pariwisata. Percepatan pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri yang melibatkan seluruh masyarakat termasuk peningkatan kualitas SDM pariwisata perlu dilakukan secara lebih fokus, agar dapat menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh. Lapangan usaha yang berdampak langsung adalah jasa akomodasi, penyediaan makan dan minum, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, perdagangan dan retail, sedangkan yang berdampak tidak langsung yaitu Penyedia

barang, jasa marketing, jasa pembersih dan perawatan, penyedia listrik, katering, produksi makanan, desain dan percetakan, serta berdampak induksi seperti infrastruktur, pertanian, teknologi, perumahan, komunikasi, pendidikan dan kesehatan, harus terus dioptimalkan. Penguatan citra dan daya saing pariwisata secara internasional melalui branding Ijen Geopark perlu terus dipromosikan secara terintegrasi didukung seluruh stake holder dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dukungan pengembangan terhadap 17 subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, TV dan Radio, penerbitan, arsitektur, game, iklan, musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, film animasi dan video, desain interior dan desain komunikasi visual, harus difasilitasi sebagai salah satu pengungkit pemulihan perekonomian Kabupaten Bondowoso.

24. Urusan Pertanian

Akibat pandemi covid-19 sampai dengan pertengahan tahun 2021 sektor pertanian menjadi bantalan dalam kontraksi ekonomi dan menjadi limpahan dalam penyerapan tenaga kerja. Terlihat dari meningkatnya tenaga kerja di sektor pertanian secara signifikan. Peningkatan tenaga kerja menjadi tambahan beban sektor pertanian, karena produktifitas tenaga kerja pertanian rendah dan secara struktur pengupahan paling rendah dibanding sektor yang lain. Sehingga diperlukan langkah-langkah peningkatan pembangunan sektor pertanian secara tepat, diantaranya :

- Tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.
- Masih rendahnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
- Perlu percepatan fasilitasi komoditi ekspor unggulan selain kopi sebagai faktor pengungkit untuk tumbuh sebagai penyumbang devisa sehingga memicu berkembangnya sektor penunjang lainnya.
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi peternakan yang menjadi budaya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bondowoso bahkan sebagai lumbung ternak di Jawa Timur.

25. Urusan Perdagangan

Fasilitasi dan ketersediaan sarana prasarana penunjang perdagangan baik secara konvensional maupun non konvensional dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, utamanya menuju era ekonomi digital belum memadai dan masih perlu dilakukan percepatan untuk mendukung pemulihan ekonomi, mengingat pertumbuhan sektor perdagangan cenderung melambat selama 3 (tiga) tahun terakhir dan terkontraksi cukup dalam selama masa pandemi covid-19, sehingga pasca pandemi covid-19 diharapkan sektor perdagangan dapat bangkit menjadi penyumbang peningkatan perekonomian secara lebih stabil.

26. Urusan Perindustrian

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustri seperti jalan dan akses air, kurangnya sarana prasarana peningkatan skala usaha, serta akses permodalan/pembiayaan. Sektor industri pengolahan yang berbasis pertanian diharapkan dapat menjadi pengungkit sektor yang lain pada masa pasca pandemi covid-19.

27. Sekretariat Daerah

Belum optimalnya penerapan budaya kerja pada Perangkat Daerah dan masih minimnya inovasi pelayanan public dalam rangka percepatan dan ketepatan peningkatan kualitas pelayanan public. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan atau produk hukum sehingga masih terjadi pelanggaran. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang belum memadai juga masih menjadi permasalahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlu optimalisasi fasilitasi antar tokoh agama dan Lembaga keagamaan dengan pemerintah daerah.

28. Sekretariat DPRD

Secara umum Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Di dalam pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, ketepatan waktu pembahasan rancangan peraturan daerah antar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah belum optimal, sehingga masih ada permasalahan di ketepatan waktu pembahasan Raperda.

29. Perencanaan

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi serta ketersediaan data yang akurat sehingga masih ditemui perencanaan dan penganggaran yang belum tepat sasaran. Belum terbangunnya pola hubungan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga berpengaruh terhadap belum tercapainya beberapa target kinerja pembangunan. Kapasitas SDM Perencana juga harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan perkembangan dan regulasi yang terus mengalami perubahan.

30. Kepegawaian

Salah satu sumber daya aparatur yang mempunyai peranan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah ASN.

Peningkatan kualitas ASN terus perlu ditingkatkan karena jumlah ASN baru yang tidak seimbang dengan jumlah ASN yang purna tugas serta perlu menyusun mekanisme pembinaan jabatan fungsional sebagai penerapan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan penerapan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memerlukan penataan Sumber Daya Manusia.

31. Pendidikan dan Pelatihan

Rendahnya kualitas ASN dan profesionalisme menjadi permasalahan, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas ASN melalui Pendidikan dan pelatihan baik Pendidikan dan pelatihan structural maupun fungsional. Masih rendahnya kepuasan penerima layanan diklat serta kurangnya infrastruktur penyelenggaraan diklat yang sesuai standart juga mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan. Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya serta belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan Analisa kebutuhan diklat.

32. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah belum berjalan dengan optimal. Dokumen penelitian dan pengembangan daerah yang termanfaatkan masih rendah, juga secara kuantitatif hasil penelitian dan pengembangan juga masih sedikit. Inovasi daerah perlu terus dikembangkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

33. Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan sehingga masih ditemui adanya temuan pemeriksaan baik oleh Inspektorat maupun oleh BPK. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai upaya perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Banyaknya regulasi baru yang membutuhkan percepatan pemahaman dan penyesuaian juga menjadi kendala dalam pelaksanaan ketertiban terhadap regulasi.

34. Pemerintahan Umum

Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan selaku Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM pelayanan dan belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. Rendahnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain adalah belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi. Optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi perlu ditingkatkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan.

35. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, diwajibkan penerapannya dengan target pencapaian 100% dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1) SPM Pendidikan
   a. Pendidikan anak usia dini
   b. Pendidikan dasar
   c. Pendidikan kesetaraan

2) SPM Kesehatan
   a. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
   b. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
   c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
   d. Pelayanan Kesehatan balita
   e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
   f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
   g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
   h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
   i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus
   j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
   k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis
   l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

3) SPM Pekerjaan Umum
   a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
   b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4) SPM Perumahan Rakyat
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kab/kota

5) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda
   b. Pelayanan informasi rawan bencana
   c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

6) SPM Sosial

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

## 4.2 Isu Strategis

Proses pembangunan Kabupaten Bondowoso selama 2018-2022, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta dinamika internal di Kabupaten Bondowoso. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian, sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan. Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh adalah :

### 1. Lingkungan Eksternal Internasional

Tahun 2023 adalah tahun dimana Indonesia harus melanjutkan momentum pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19. Dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lalu, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif dengan capaian 5,3%, serta dengan tingkat inflasi yang masih terkendali. Selain itu, Indeks PMI juga mencatatkan nilai ekspansif yang konsisten secara terus menerus di 18 bulan terakhir. Indeks keyakinan konsumen juga tetap di level ekspansif, dan penjualan kendaraan bermotor terutama sepeda motor menunjukkan pertumbuhan yang juga tinggi. Ini adalah tanda-tanda dari sektor riil yang diharapkan akan bisa menjadi pondasi-pondasi fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh ke depan. Sektor perbankan Indonesia juga relatif kuat. Tingkat pertumbuhan kredit di Indonesia terus tumbuh, serta Capital Adequacy Ratio (CAR) Indonesia berada di level yang cukup tinggi.

Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Di tahun 2023 ini, Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level 5,0% sampai 5,3%. Hal ini diharapkan akan terus memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia yang tumbuh berkembang. Dalam upaya untuk menjaga seluruh pondasi dan fundamental ekonomi Indonesia yang sudah sangat positif

tersebut. APBN sebagai instrumen fiskal akan terus digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga dan bersiapsiaga menghadapi gejolak global yang masih penuh dengan ketidakpastian saat ini. Gejolak global tersebut harus dihadapi dengan pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia diantaranya adalah hilirisasi sumber daya alam Indonesia, penggunaan produk-produk dalam negeri pada belanja APBN, pengembangan UMKM sehingga UMKM bisa naik kelas bahkan hingga mampu melakukan ekspor, pengembangan ekonomi digital, dan transisi menuju ekonomi hijau. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Peraturan pembatasan sosial yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami pemberhentian paksa dari pekerjaan mereka. Pernyataan dari International Labor Organization (ILO), di mana tingkat pengangguran global telah mencapai 207 juta orang pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat cukup tajam dari tahun 2019 sebelum pandemi, yakni sebanyak 186 juta orang.

Peningkatan jumlah pengangguran ini tentunya menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan berpotensi mengalami penurunan laba dan terancam mengalami kebangkrutan. Peristiwa gulung tikar besar-besaran oleh banyak perusahaan di seluruh dunia telah menghambat pertumbuhan ekonomi global hingga menyebabkan kerugian yang tak sedikit. International Monetary Fund (IMF) menaksir kerugian ekonomi global akan mencapai USD 12,5 triliun atau IDR 178.750 triliun dan akan terus bertambah hingga tahun 2024.

Dalam menanggapi situasi perekonomian negara yang kian memburuk, tentunya pemerintahan suatu negara harus segera merancang strategi yang dapat menstabilkan kondisi ekonomi. Dua tahun berjalan sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia, banyak negara yang telah menerapkan strategi yang berhasil membalikkan keadaan perekonomian mereka secara perlahan. Selanjutnya, artikel ini akan merangkum strategi-strategi untuk meningkatkan stabilitas perekonomian yang umum dari berbagai negara.

**Membangkitkan Perekonomian Digital**

Peraturan pembatasan sosial yang berlangsung selama pandemi Covid-19 membuat masyarakat tak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian seperti sediakala. Keterlibatan teknologi digital semakin meningkat untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus memerlukan tatap muka, dan e-commerce merupakan salah satunya. Penggunaan platform e-commerce pun kian populer di berbagai negara dalam rangka membangkitkan perekonomian global secara perlahan tapi pasti.

Dikutip dari situs resmi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Sekretaris Jenderal UNCTAD menyatakan bahwa bisnis-bisnis yang bergerak di ranah digital telah banyak berkontribusi dalam menyelamatkan perekonomian dunia di masa pandemi. Mengkonfirmasi fakta tersebut, UNCTAD mencatat transaksi-transaksi yang ada di dalam e-commerce telah meningkatkan pangsa e-commerce dari perdagangan ritel global dari 14% pada 2019 menjadi

sekitar 17% pada 2020 setelah pandemi Covid-19. Fakta ini juga menunjukkan popularitas penggunaan e-commerce yang kian meningkat dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang disebabkan oleh paparan teknologi digital semasa pandemi.

Popularitas ini dibuktikan oleh capaian transaksi yang signifikan yang diperoleh perusahaan-perusahaan e-commerce selama masa pandemi, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh, Mercado Libre, e-commerce asal Amerika Latin melaporkan penjualan barang yang meningkat sebanyak dua kali lipat per harinya pada kuartal kedua tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Korea Selatan saat ini merupakan negara dengan perekonomian digital yang paling berkembang pesat dengan jumlah keuntungan sebesar USD 160 milyar atau setara dengan IDR 2,214 triliun pada awal tahun 2022. Sementara itu, perekonomian digital di Indonesia juga diprediksi akan meningkatkan kontribusi sebesar 18,87% pada produk domestik bruto nasional pada tahun 2030.

**Pemberdayaan UMKM**

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu saja tidak dapat dikesampingkan. UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara dan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan lingkungan perdagangan global yang mendukung dan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional.

Jepang merupakan salah satu dari negara yang cepat tanggap dalam memberdayakan UMKM selama masa pandemi. Terhitung sejak 23 Maret 2021, pemerintah Jepang mulai mengintensifkan permodalan terhadap UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dalam kebijakan barunya, pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman untuk para pelaku UMKM, yakni sebesar maksimal 1%. Adanya kebijakan ini memudahkan para pemilik UMKM untuk mengakses modal dengan resiko kebangkrutan yang relatif lebih rendah.

Sementara itu, dalam konteks dalam negeri, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada keberadaan UMKM dalam perekonomiannya. Sebab, 99,92% usaha dalam keseluruhan sektor usaha yang ada di dalam perekonomian Indonesia berada dalam kategori UMKM. Pemerintah Indonesia mengadakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak tahun 2020 dengan jangkauan program sebanyak 30 juta unit UMKM di Indonesia. Program ini juga terbukti telah memperluas lapangan kerja di Indonesia sebanyak 4,55 juta orang seiring dengan bertambahnya 760 ribu orang yang membuka usaha.

**Kerjasama Antar Negara**

Negara-negara ASEAN telah berencana melakukan integrasi digital untuk mendukung aktivitas perdagangan dalam kawasan tersebut sejak akhir tahun 2020. Integrasi digital yang akan dilakukan akan berupa pertukaran data untuk memandu penyusunan kebijakan dan pelayanan publik, serta melalui penyediaan beragam solusi digital untuk tujuan membangun resiliensi dalam sektor ekonomi di masa pandemi Covid-19. Adanya integrasi digital di kawasan ASEAN diharapkan untuk mampu membantu memulihkan kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN dan meningkatkan GDP di tiap negara hingga USD 1 triliun pada tahun 2025.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan nyaris seluruh negara mengalami kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh terbatasnya mobilitas manusia dalam melakukan segala jenis aktivitas. Oleh sebab itu, negara-negara dituntut untuk menjadi kreatif dalam menyusun strategi pemulihan ekonomi negara mereka. Dengan adanya upaya ini, perekonomian dunia diharapkan untuk bangkit kembali secara perlahan agar dapat kembali pulih sebagaimana keadaan sebelum pandemi Covid-19 menyerang.

Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik belum sepenuhnya pulih kendati tekanan dari pandemi Covid-19 mulai berkurang. 70% total pengangguran terjadi kawasan Asia Pasifik, di mana 85 juta penduduk masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik juga diperkirakan sejumlah lembaga donor turun 0,5% menjadi 4,9%. Sementara itu, inflasi diperkirakan 8,7%, naik 2,8% dari perkiraan sebelumnya. Target Pencapaian SDGs semakin tertunda, diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada tahun 2065 dan menurut global climate risk indeks, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik.

**Outlook Perekonomian Asia**

Saat ini terindikasi investor global telah mengubah orientasi untuk masuk ke pasar negara berkembang di Asia dengan lebih optimistis dibandingkan dengan periode prapandemi. Ini karena pasar negara berkembang di Asia terlihat menunjukkan perbaikan yang nyata dan konsisten.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Asia akan pulih lebih cepat di tahun ini dan tumbuh lebih kuat di tahun depan dibandingkan dengan kawasan lain. Salah satu pusat ekonomi Asia adalah Tiongkok. Ekonomi negara ini telah dihantam oleh tantangan signifikan dari pandemi, perumahan, dan perdagangan eksternal pada 2022.

Setelah tumbuh sekitar 2,7% pada 2022 (lebih rendah dari perkiraan awal yang 3,2%), ekonomi Tiongkok diperkirakan akan membaik ke level 4,2% (bahkan bisa lebih tinggi lagi) pada 2023, untuk menguat lagi ke 4,8% pada 2024. Tetap positifnya perekonomian Tiongkok (bersama India) menjadi katalis bagi perekonomian Asia, meskipun beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam juga berperan menjadi "penerang" perekonomian kawasan dan global.

## 2. Lingkungan Eksternal Nasional dan Regional

Permintaan domestik tetap berdaya tahan dipengaruhi oleh terjaganya daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap positif, serta kinerja ekspor yang diperkirakan juga tetap kuat, terutama ekspor batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, menjadi katalis pertumbuhan ekonomi 2022 berkisar 5,3%. Untuk 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,8%-5,3% atau sedikit melambat karena faktor eksternal (perlambatan ekonomi global).

Sejauh ini ekspektasi inflasi masih cukup tinggi di atas jangkar yang 3%, namun dengan koordinasi yang baik antara bank sentral dan pemerintah (kementerian/lembaga), diyakini ekspektasi inflasi akan dapat diarahkan ke level sasaran 3,0±1%.

Dukungan sektor keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan nonperbankan akan mampu menyangga ruang pertumbuhan di tengah langkah normalisasi kebijakan oleh otoritas dan pemerintah. Khusus untuk perbankan, kredit diperkirakan akan tetap mampu tumbuh berkisar 10%-12% ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7%-9%. Paralel dengan itu, secara rerata pertumbuhan sektor keuangan nonperbankan juga diperkirakan berkisar 5%-8% untuk 2023.

Pemulihan ekonomi global yang berlangsung termasuk di Indonesia dibayangi tiga fenomena utama pada beberapa waktu terakhir. Pertama, normalisasi kebijakan negara maju yang mulai terindikasi dari kenaikan suku bunga AS. Kedua, dampak luka memar yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, antara lain terhadap pemulihan di sektor dunia usaha dan upaya transformasi di sektor riil untuk mendorong daya saing dan produktivitas, serta transisi ke ekonomi hijau dan keuangan yang berkelanjutan. Ketiga, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada pemulihan ekonomi global berupa kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi dan pangan yang berdampak pada inflasi sejumlah negara. Dampak lainnya adalah gangguan dalam mata rantai perdagangan global yang memengaruhi distribusi dan volume perdagangan serta pertumbuhan pada ekonomi global, serta pada jalur keuangan dimana terjadi pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (safe haven asset) sehingga dapat berdampak pada stabilitas eksternal dan nilai tukar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoy) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah terkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang

untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tecermin secara Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan IV 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi di tahun 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh impresif mencapai 5,31% (C-t-C) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir. Menghadapi tahun 2023, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eskternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan.

Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur berada di level ekspansif yakni 51,3. Sementara itu, indikator eksternal juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang terlihat dari peningkatan Cadangan Devisa per Januari 2023 yakni sebesar 139,4 miliar USD.

Sejumlah kebijakan utama dipersiapkan Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan adalah yakni terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi Covid-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan green economy yang pada KTT G20 telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

Pemerintah juga berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan Januari Tahun

Anggaran 2023 masih tetap optimis namun waspada. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,1 persen dibandingkan akhir tahun 2022, yaitu sebesar Rp 232,2 triliun atau 9,4 persen dari target APBN. Kondisi perekonomian global di tahun 2022 secara keseluruhan masih di dominasi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Dengan begitu, Indonesia yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen relatif dalam situasi yang sangat baik dan memiliki momentum pertumbuhan yang kuat dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun G20.

Disamping itu, selain melalui pertumbuhan yang kuat, optimisme lainnya juga dapat dilihat dari sisi permintaan atau konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi karena adanya konsolidasi fiskal dan motor penggerak perekonomian non pemerintah yang sudah mulai bangkit dan mendukung pemulihan. Dari sisi investasi, ekspor, impor Indonesia juga tumbuh cukup kuat sehingga yang membuat PMI manufaktur Indonesia masih dalam kondisi ekspansif akseleratif dan mendorong pemulihan. Tren pemulihan lainnya juga terlihat dari sisi produksi atau sektoral, seperti sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, konstruksi, transportasi, infokom, real estate, serta akomodasi makanan dan minuman yang sempat terpukul sangat dalam kini telah menunjukan rebound pada tahun 2022 dan diharapkan masih akan terus berlanjut di tahun 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai *volatile food* atau bahan makanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Menkeu menyebut, salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary. Hal ini dimaksudkan untuk membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, memasuki tahun pemilu 2023, Pemerintah tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

Menurut BRIN, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4.9 - 5.2%, sedangkan angka inflasi 3.25 - 3.75%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676 - Rp15.877/USD. Secara garis besar, perekonomian Indonesia 2023 masih positif. Namun ada beberapa catatan, secara umum yang perlu menjadi perhatian seperti adanya potensi inflasi yang tinggi, resesi di negara maju dan harga minyak. Karena negara tujuan ekspor Indonesia rata rata semua melambat. Jadi kemungkinan ekspor Indonesia akan menurun imbas permintaan menurun, sehingga 2023 akan terjadi penurunan pertumbuhan ekspor.

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Jawa pada tahun 2022 didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,47 persen; diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 25,25 persen; Provinsi Jawa Barat sebesar 22,40 persen; Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,43 persen; Provinsi Banten sebesar 6,91 persen; dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,53 persen.

Setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemulihan ekonomi di Pulau Jawa semakin pesat meski dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi (c-to-c) tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45 persen diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34 persen; Jawa Tengah sebesar 5,31 persen; DKI Jakarta sebesar 5,25 persen; DI Yogyakarta sebesar 5,15 persen; dan Banten sebesar 5,03 persen.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestk Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.730,91 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp1.757,82 triliun. Ekonomi Jawa Timur tahun 2022 meningkat sebesar 5,34 persen (c-to-c).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,47 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 9,23 persen. Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2022 dibandingkan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 4,76 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 12,35 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonproft yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,80 persen. Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2022 dibandingkan Triwulan III-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,71 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 7,22 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertnggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 11,47 persen.

Ekonomi Jawa Timur tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,47 persen. Kemudian, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 12,44 persen, sedangkan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,34 persen.

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jumlah kontribusinya sekitar seperenam perekonomian Indonesia dari 38 provinsi. Hampir setengah ekonomi ASEAN berada di Indonesia. Bahkan, secara khusus Jawa Timur menyumbang nyaris tujuh persen perekonomian ASEAN. Sumbangsih Jatim kepada ASEAN ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga lebih rendah dari rata-rata nasional di

angka -2,33. Kemudian pada tahun 2021 berada di angka 3,56 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan angka 5,34 atau di atas rata-rata nasional. "Pertumbuhan ekonomi kita sempat kontraksi di tahun 2020, tapi perlahan melalui upaya pemulihan ekonomi nasional mampu tumbuh di atas rata-rata nasional menjadi 5,34 di tahun 2022. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tren pertumbuhan 5 tahunan investasi di Jawa Timur menunjukkan hasil menggembirakan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan sebesar 38,8 persen. Sedangkan, realisasi penanaman modal asing meningkat sebesar 66,7 persen dan modal dalam negeri meningkat 24,5 persen. Di sisi lain Badan Pusat Statistika (BPS) mencatatkan angka inflasi Indonesia per Januari 2023 masih terkendali. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,28 persen (YoY), dari sebelumnya pada Desember 2022 di angka 5,51 persen (YoY). Merujuk angka tersebut, Indonesia dan Jatim memiliki kesempatan bangkit dan terhindar dari inflasi maupun resesi.

### 3. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Komitmen Sustainable Development Goals (SDG's)/tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 mengamanatkan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai dengan tahun 2030. Perlunya penyelarasan terhadap kebijakan strategis serta tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan tingkat provinsi serta sasaran pembangunan daerah.

Hal ini juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

### 4. Telaah RPJPD Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) serta memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025)

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005–2025 disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat, merupakan dokumen perencanaan daerah yang bersifat makro, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Selain menjadi pedoman bagi pemerintah

daerah dan para pemangku kepentingan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, juga menjadi pedoman bagi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, serta program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga diharapkan dengan adanya RPJP Daerah dapat menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan selama lima tahunan.

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 – 2025 memiliki visi "**Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis Yang Maju, Religius, Adil Dan Makmur**". Visi untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitik-beratkan pada agribisnis. Di dalam implementasinya, untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur harus diwarnai dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalannya.

Untuk RPD Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2024-2026 secara substantif mengacu pada tahap keempat (2020-2025). Adapun arah kebijakan pada tahapan keempat yaitu penguatan pasar dan peningkatan kualitas produk serta lepas landas sebagai Kawasan Agribisnis Maju, adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan
3. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan
4. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia
5. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul

## 5. Telaah RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031

Sebagaimana tertuang dalam Perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031, bahwa Visi penataan ruang Kabupaten Bondowoso adalah **"Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agropolitan, Wisata Agro dan Pegunungan Yang Maju, Berdaya Saing dan Lestari"** dengan misi :

1. Memperkuat peran sektor pertanian dengan menerapkan konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah

2. Mendorong peran sektor pariwisata yang berbasis potensi alam sebagai pendorong ekonomi daerah
3. Membangun struktur ruang wilayah yang mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat secara efektif dan efsien
4. Menciptakan pola ruang wilayah yang resposif terhadap kebutuhan investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan konservasi sumber daya alam
5. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak perekonomian wilayah

Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Arahan penataan ruang merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat :

1. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten (pusat kegiatan dan sistem prasarana). Perwujudan pusat kegiatan meliputi pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL), dan pengembangan pusat kawasan agropolitan. Perwujudan sistem prasarana meliputi transportasi jalan raya, transportasi kereta api, prasarana telekomunikasi, pengairan/irigasi, prasarana energi, air bersih, drainase, sampah, dan sanitasi.
2. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten (perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya). Perwujudan kawasan lindung mencakup kegiatan: Penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung penyangga, lindung setempat, pelestarian alam, cagar budaya dan bersejarah; Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung cagar budaya, dan Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu. Perwujudan kawasan budidaya mencakup hutan produksi dan hutan rakyat, perkebunan, pertanian, perikanan darat, pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, peternakan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan khusus.
3. Perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-budaya, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis teknologi tinggi, dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Arahan penataan ruang tersebut merupakan prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan RTRW.

### 6. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar

Dalam rangka keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar dalam pengelolaan pada Kawasan Perbatasan antar kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten Bondowoso 2011-2031, terbagi dalam 4 segmen batas daerah, yaitu Bondowoso - Jember, Bondowoso -

Banyuwangi, Bondowoso - Situbondo, dan Bondowoso - Probolinggo. Arahan pada setiap segmen adalah sebagai berikut:

a. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember, meliputi Kecamatan Maesan, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Pujer dan Tlogosari :
   - Merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian yaitu kawasan agroindustri durian,
   - Mempunyai akses yang sudah menyambung (Maesan - Jelbuk)

b. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Ijen:
   - Merupakan kawasan yang direncanakan untuk pengembangan pariwisata dengan konsep ekotourism;
   - Sebagai kawasan pengembangan agro yaitu strawberi dan kopi (Kabupaten Bondowoso), dan pengembangan sayur dan buah (Kabupaten Banyuwangi);
   - Merupakan kawasan pengembangan energi geotermal dengan mengambil sumber air panas dari kawah ijen dan pengolahannya di Kabupaten Bondowoso dengan memanfaatkan kawasan budidaya.

c. Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo, meliputi Kecamatan Pakem, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Prajekan dan Cermee:
   - Pengadaan jalan tembus menuju Rajekwesi (Situbondo).
   - Pengelolaan bersama untuk pengendalian secara ketat penggunaan lahan Sumber Daya Alam di Kawasan sekitar Wringin.
   - Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Probolinggo, di Kecamatan Pakem dan Binakal, merupakan kawasan lindung yaitu Taman Margasatwa Pegunungan Hyang, sehingga diarahkan untuk dijaga kelestariannya.

   Arahan yang diberikan untuk daerah perbatasan adalah sebagai berikut:
   - Pengelolaan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait secara kontinyu;
   - Menyusun rencana tata ruang kawasan perbatasan secara bersama dan terpadu untuk memperoleh arahan yang jelas dalam pemanfaatan dan pengelolaannya; dan
   - Dibutuhkan penyediaan mediator/fasilitator dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah pusat untuk penanganan permasalahan kawasan perbatasan.

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis, telaah pentahapan RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan telaah RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Bondowoso yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (ii) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap percepatan pencapaian untuk pembangunan daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat 5 (Lima) isu strategis dalam jangka menengah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Peningkatan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
3. Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, dan Kesejahteraan Sosial
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

# BAB V TUJUAN DAN SASARAN

## 5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran diukur menggunakan indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah Tahun 2018-2023, perumusan tujuan dan sasaran berpedoman langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode Tahun 2024-2026 menggunakan pendekatan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 7 Misi RPJPD Kabupaten Bondowoso 2005-2025
- 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
- 5 Misi RPJMD Kabupaten Bondowoso 2018-2023
- 5 Isu Strategis 2024-2026

Dari hasil persandingan tersebut tersusun 5 (lima) fokus pembangunan yang menjadi hasil penyelarasan dan dijadikan pedoman perencanaan pembangunan 2024-2026 yaitu; Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Sosial, Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kelima fokus pembangunan ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bondowoso 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan fokus pembangunan dalam RPD dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Persandingan Dokumen dan Isu Strategis Dalam Perumusan Konsep RPD Tahun 2024-2026

| 7 MISI RPJPD 2005-2025<br>PERATURAN DAERAH NO. 10/2010 | 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024<br>PERPRES NO. 18/2020 | 5 MISI RPJMD 2018-2023<br>PERATURAN DAERAH NO. 1/2022 | 5 ISU STRATEGIS 2024-2026 | KONSEP RPD 2024-2026 |
|---|---|---|---|---|
| - Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan<br><br>- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan | - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan<br><br>- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | - Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan | Peningkatan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan Ekonomi |
| - Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan | - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | - Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pembangunan Lingkungan Hidup |
| - Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan | - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | - Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Penanganan Kemiskinan, Pengangguran dan Kesejahteraan Sosial | Pembangunan Sosial |
| - Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul | - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | - Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Pembangunan Pemerintahan |
| - Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak mulia<br><br>- Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup | - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br><br>- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | - Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Pembangunan SDM |

Berdasarkan konsep 5 (lima) fokus pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 diharapkan dalam masa transisi periodisasi pemerintahan, masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan secara inklusiv guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, serta dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah. Selengkapnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 5.1 berikut:

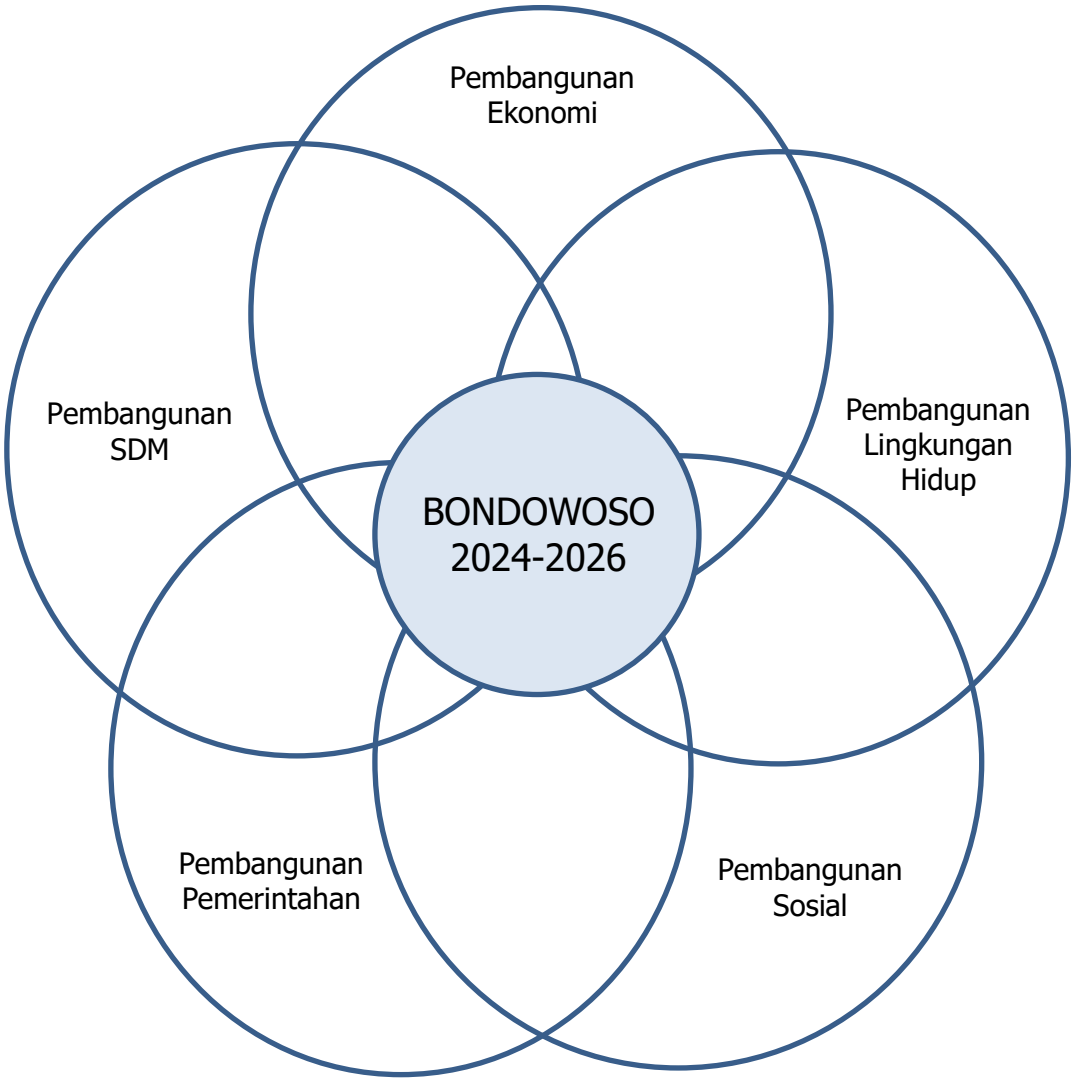


Gambar 5.1 Gambaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan 5 (lima) fokus pembangunan tersebut kemudian dielaborasikan menjadi 5 tujuan dengan 17 sasaran. Masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Tabel 5.2 berikut :

Gambar 5.2 Skema Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026

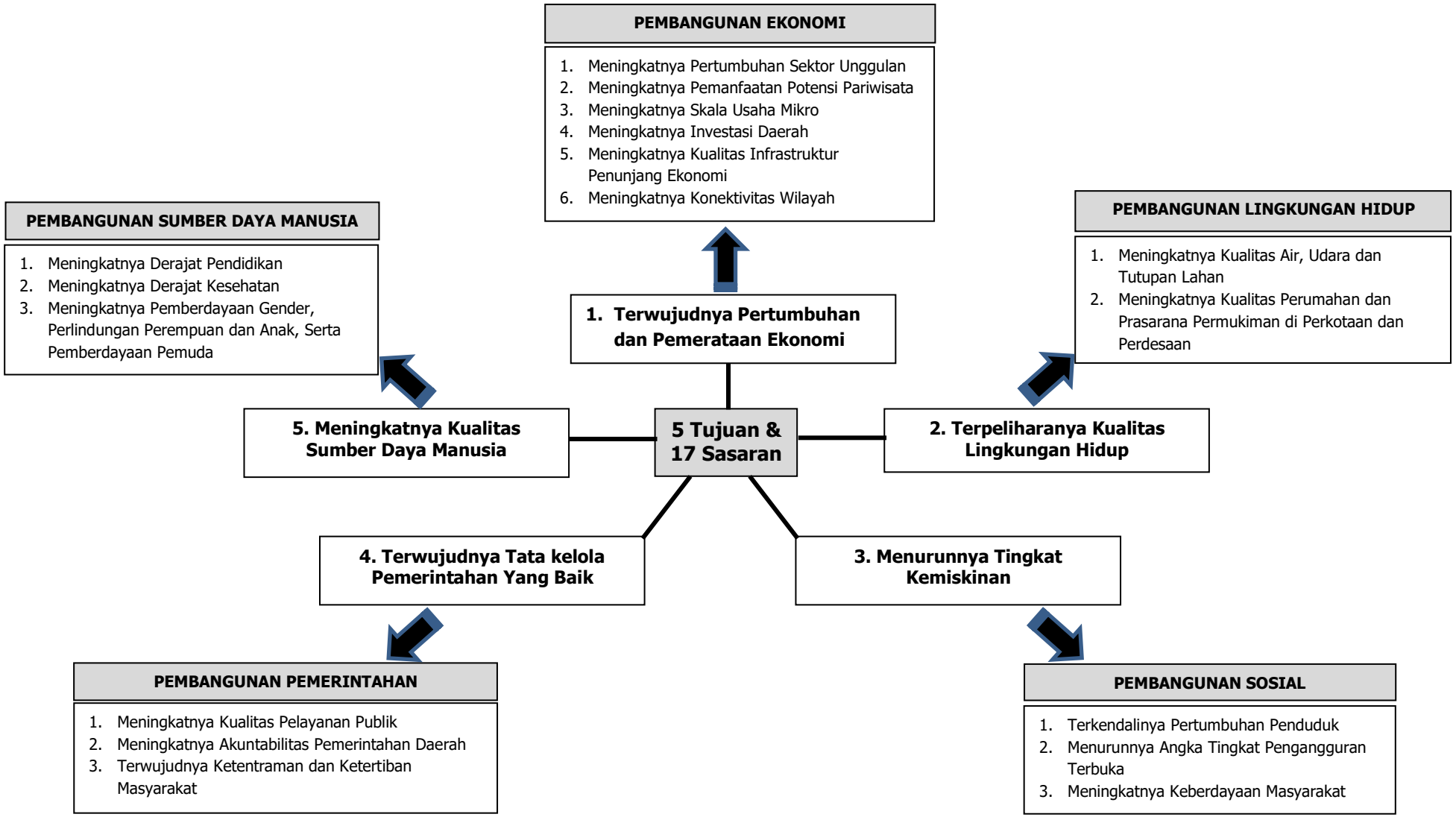

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2022) | Target Tahun | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi | | **Persentase Pertumbuhan Ekonomi** | 3,51% | 4,20% | 4,41% | 4,82% | 4,82% |
| | | | **Nilai PDRB per Kapita (Rupiah)** | | | | | |
| | | | ADHK | 16.368.646,54 | 16.946.724,31 | 17.252.686,77 | 17.621.318,63 | 17.621.318,63 |
| | | | ADHB | 28.536.091,32 | 31.791.845,70 | 33.577.617,55 | 35.560.487,37 | 35.560.487,37 |
| | | | **Indek GINI** | 0,365 | 0,360 | 0,355 | 0,350 | 0,350 |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHK) | -1,61% | 2,08% | 2,37% | 4,86% | 4,86% |
| | | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHK) | 6,23% | 6,61% | 6,92% | 7,14% | 7,14% |
| | | | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHK) | 6,76% | 7,21% | 7,45% | 7,54% | 7,54% |
| | | Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata | Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) | 1,06% | 1,33% | 1,47% | 1,62% | 1,62% |
| | | Meningkatnya Skala Usaha Mikro | Persentase Usaha Mikro naik kelas | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| | | Meningkatnya Investasi Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 3,55% | 3,61% | 3,91% | 4,02% | 4,02% |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2022) | Target Tahun | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi | Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten dan jalan strategis | 66.98% | 71,90% | 74,77% | 77,63% | 77,63% |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% |
| | | Meningkatnya Konektivitas Wilayah | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **2** | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | | **Persentase Tingkat Kemiskinan** | **13,47%** | **12,50%** | **12,00%** | **11,50%** | **11,50%** |
| | | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Laju pertumbuhan penduduk | 0,371% | 0,355% | 0,355% | 0,355% | 0,355% |
| | | Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,32% | 4,11% | 4,01% | 3,91% | 3,91% |
| | | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat | Indek Desa Membangun (IDM) | 0,7251 | 0,7261 | 0,7271 | 0,7281 | 0,7281 |
| **3** | Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup | | **Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | **67,20** | **67,48** | **67,65** | **67,74** | **67,74** |
| | | Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan | Indek Kualitas Air | 55,33 | 53,69 | 53,79 | 53,89 | 53,89 |
| | | | Indek Kualitas Udara | 86,70 | 83,16 | 83,23 | 83,33 | 83,33 |
| | | | Indek Kualitas Tutupan Lahan | 59,57 | 63,46 | 63,51 | 63,56 | 63,56 |
| | | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Prasarana Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan | Persentase kawasan permukiman kumuh | 64,94% | 32,47% | 16,23% | 0,00% | 0,00% |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2022) | Target Tahun | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4** | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | | **Indek Reformasi Birokrasi (IRB)** | **68,00** | **69,00** | **70,00** | **71,00** | **71,00** |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,50% | 81,00% | 81,50% | 82,00% | 82,00% |
| | | | Indek SPBE | 2,55 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP | BB | A | A | A | A |
| | | | Nilai Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Nilai EKPPD | 32,260 | 32,260 | 32,270 | 32,280 | 32,280 |
| | | Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | 2,55 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| **5** | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | | **Indek Pembangunan Manusia (IPM)** | **67,31** | **68,35** | **68,78** | **69,21** | **69,21** |
| | | Meningkatnya derajat pendidikan | Indek Pendidikan | 57,71 | 58,11 | 58,71 | 59,14 | 59,58 |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan | Indek Kesehatan | 72,75 | 72,89 | 73,22 | 73,54 | 73,87 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda | Indek Pembangunan Gender (IPG) | 89,72 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | | Status Kabupaten Layak Anak | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya |
| | | | Status Kabupaten Layak Pemuda | N/A | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama |

# BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan adanya rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program prioritas pembangunan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

## 6.1 Strategi

Strategi pembangunan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang disusun menggambarkan kemantaban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*), strategi dirumuskan berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan Tahun 2024-2026 dengan prinsip :

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi | **1.1** | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan | **1** | Mengembangkan agrobisnis perdesaan, revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi budidaya, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha |
| | | | | **2** | Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi pengolahan, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha pengolahan, diversifikasi produk unggulan daerah |
| | | | | **3** | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), fasilitasi transformasi ekonomi digital dalam perdagangan, penguatan kemitraan dengan pelaku/ pengusaha pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi, revitalisasi pasar tradisional |
| | | **1.2** | Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata | **1** | Mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi usaha lokal perdesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan pengembangan branding Ijen Geopark sebagai Unesco Global Geopark, pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif secara digital |
| | | **1.3** | Meningkatnya Skala Usaha Mikro | **1** | Meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") |
| | | **1.4** | Meningkatnya Investasi Daerah | **1** | Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi |
| | | **1.5** | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi | **1** | Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal, serta penataan ruang secara tepat |
| | | | | **2** | Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, |
| | | **1.6** | Meningkatnya Konektivitas Wilayah | **1** | Melakukan sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan transportasi |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **2.** | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | **2.1** | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | **1** | Pengendalian Kuantitas Penduduk |
| | | **2.2** | Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka | **2** | Memperluas kesempatan kerja, fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan, meningkatkan produktifitas tenaga kerja |
| | | **2.3** | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat | **3** | Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat |
| **3.** | Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup | **3.1** | Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan | **1** | Pengendalian pencemaran air, pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan |
| | | | | **2** | Pengendalian pencemaran udara |
| | | | | **3** | Pengendalian kerusakan tutupan lahan |
| | | **3.2** | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Prasarana Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan | **1** | Pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari |
| **4.** | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | **4.1** | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | **1** | Menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan optimal |
| | | | | **2** | Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan satu data statistik daerah |
| | | **4.2** | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | **1** | Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional |
| | | | | **2** | Meningkatkan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan program/kegiatan |
| | | | | **3** | Meningkatkan mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **4.3** | Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | **1** | Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat yang tertib dan taat terhadap peraturan dan Norma, pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik |
| | | | | **2** | Meningkatkan perlindungan dan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana |
| **5** | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | **5.1** | Meningkatnya Derajat Pendidikan | **1** | Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan |
| | | **5.2** | Meningkatnya Derajat Kesehatan | **1** | Pemenuhan hak terhadap kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitasi pengembangan infrastruktur kesehatan serta integrasi jaminan kesehatan |
| | | **5.3** | Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan pemuda | **1** | Meningkatkan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas |
| | | | | **2** | Meningkatkan perlindungan anak dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan |
| | | | | **3** | Meningkatkan kemandirian pemuda dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan |

## 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada strategi di atas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD ditetapkan arah kebijakan secara komprehensif. Arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam kurun waktu 2024-2026 adalah sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bondowoso sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 pada tahapan keempat (2020-2025) yaitu penguatan pasar dan peningkatan kualitas produk serta lepas landas sebagai Kawasan Agribisnis Maju.

### 1. Tahun 2024

Arah kebijakan yang ditetapkan sebagai prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

Peningkatan nilai tambah produksi Pertanian, Peningkatan nilai tambah produksi Industri Pengolahan, Peningkatan nilai lebih Penyelenggaraan Perdagangan, Peningkatan Nilai Lebih Pariwisata, Peningkatan Nilai Lebih Koperasi dan Usaha Skala Mikro, Peningkatan Realisasi Penanaman Modal, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Konektivitas Wilayah, Penurunan tingkat pengangguran masyarakat, Penurunan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kepedulian Sosial, Peningkatan Kualitas Air, Peningkatan Kualitas Udara, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas tutupan lahan, Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah, Peningkatan Indek SPBE, Peningkatan derajat pendidikan, pengembangan seni dan budaya, serta literasi masyarakat, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas.

**Tema pembangunan yang ditetapkan adalah**: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah Serta Kualitas Lingkungan Hidup.

### 2. Tahun 2025

Arah kebijakan yang ditetapkan sebagai prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

Peningkatan derajat pendidikan, pengembangan seni dan budaya, serta literasi masyarakat, Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan nilai tambah produksi Pertanian, Peningkatan nilai tambah produksi Industri Pengolahan, Peningkatan nilai lebih Penyelenggaraan Perdagangan, Peningkatan Nilai Lebih Pariwisata, Peningkatan Nilai Lebih Koperasi dan Usaha Skala Mikro, Peningkatan Realisasi

Penanaman Modal, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Konektivitas Wilayah, Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah, Peningkatan Indek SPBE, Penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat, Penurunan tingkat pengangguran masyarakat, Penurunan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kepedulian Sosial.

**Tema pembangunan yang ditetapkan adalah**: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pembangunan Ekonomi Secara Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

### 3. Tahun 2026

Arah kebijakan yang ditetapkan sebagai prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

Peningkatan nilai tambah produksi Pertanian, Peningkatan nilai tambah produksi Industri Pengolahan, Peningkatan nilai lebih Penyelenggaraan Perdagangan, Peningkatan Nilai Lebih Pariwisata, Peningkatan Nilai Lebih Koperasi dan Usaha Skala Mikro, Peningkatan Realisasi Penanaman Modal, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Konektivitas Wilayah, Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah, Peningkatan derajat pendidikan, pengembangan seni dan budaya, serta literasi masyarakat, Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat, Penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat, Penurunan tingkat pengangguran masyarakat, Penurunan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kepedulian Sosial.

**Tema pembangunan yang ditetapkan adalah**: Penguatan Ketahanan Ekonomi, Percepatan Reformasi Birokrasi Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas.

## 6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, dimana secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis maka disusun program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan. Program prioritas dikelompokan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan isu strategis sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Adapun program-program prioritas menurut tujuan, sasasan dan kegiatan strategis daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan daftar program menurut Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) berbasis *micro service*. Perhitungan pagu program dilakukan dengan menentukan output dari setiap

kegiatan pada program, menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program selanjutnya menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai pagu Indikatif Tahun 2024-2026**

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| ***1*** | | | ***Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi*** | ***1 Persentase pertumbuhan PDRB*** | **ADHK 3.88** | **4.2** | | **4.41** | | **4.82** | | ***4.82*** | | |
| | | | | | **ADHB 5.92** | **5.92** | | **5.99** | | **6.28** | | ***6.28*** | | |
| | | | | ***2 Nilai PDRB per kapita*** | **ADHK 16,368,646.54** | **16,946,724.31** | | **17,252,686.77** | | **17,621,318.63** | | ***17,621,318.63*** | | |
| | | | | | **ADHB 28,536,091.32** | **31,791,845.70** | | **33,577,617.55** | | **35,560,487.37** | | ***35,560,487.37*** | | |
| | | | | ***3 INDEK GINI*** | **0.365** | **0.36** | | **0.355** | | **0.35** | | ***0.35*** | | |
| ***1*** | ***1*** | | ***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan*** | ***1*** Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB) | 4.59 | 4.71 | | 4.76 | | 4.86 | | ***4.86*** | | |
| 3 | 27 | | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1 Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan, Horikultura dan Perkebunan | | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Padi | 6.17 | 6.17 | | 6.17 | | 6.17 | | 6.17 | | |
| | | | | Jagung | 5.19 | 5.19 | | 5.19 | | 5.19 | | 5.19 | | |
| | | | | Kedelai | 1.52 | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | |
| | | | | Ubi Kayu | 22.78 | 22.78 | | 22.78 | | 22.78 | | 22.78 | | |
| | | | | Cabe Rawit | 8.38 | 8.38 | | 8.38 | | 8.38 | | 8.38 | | |
| | | | | Bawang merah | 10.38 | 10.38 | | 10.38 | | 10.38 | | 10.38 | | |
| | | | | Jahe | 16.11 | 16.11 | | 16.11 | | 16.11 | | 16.11 | | |
| | | | | Kunyit | 19.55 | 19.55 | | 19.55 | | 19.55 | | 19.55 | | |
| | | | | Kopi Arabika | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | | 0.51 | | 0.51 | | |
| | | | | Kopi Robusta | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | |
| | | | | Tembakau Rajangan | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | |
| | | | | Tembakau Kasturi | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | | | Tebu | 6.70 | 6.70 | | 6.70 | | 6.70 | | 6.70 | | |
| 3 | 27 | 03 | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2 Persentase prasarana yang digunakan | 100.00 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 25 | | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 04 | Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 808,802 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| ***1*** | ***1*** | | | ***2*** Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB) | 7.98 | 8.45 | | 8.87 | | 9.04 | | ***9.04*** | | |
| 3 | 31 | | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1 % tersosialisasikannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) | 4.35 | 52.00 | 10,685,881,400 | 78.00 | 10,610,881,400 | 100.00 | 10,460,881,400 | 100.00 | 31,757,644,200 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 % pertumbuhan industri | 0.68 | 0.73 | | 0.74 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| ***1*** | ***1*** | | | ***3*** Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB) | 9.14 | 9.96 | | 10.24 | | 10.76 | | ***10.76*** | | |
| 3 | 30 | | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 % pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (K) | 100 | 100 | 280,000,000 | 100 | 280,000,000 | 100 | 280,000,000 | 100 | 840,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| ***1*** | ***2*** | | Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata | Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) | 1 | 1.03 | | 1.05 | | 1.07 | | ***1.07*** | | |
| 3 | 26 | | **PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 02 | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1 Persentase destinasi wisata yg layak kunjung | 85.00 | 79.41 | 2,985,940,000 | 82.35 | 2,985,940,000 | 85.29 | 2,985,940,000 | 85.29 | 2,985,940,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| ***1*** | ***3*** | | Meningkatnya Skala Usaha Mikro | Persentase Usaha Mikro naik kelas | 0.05 | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | ***0.05*** | | |
| 2 | 17 | | **KOPERASI, USAHA KecamatanIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 1 Persentase Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) | 27,13 | 27,63 | 130,000,000 | 27,82 | 130,000,000 | 28,02 | 130,000,000 | 28,02 | 390,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 0,94 | 1,13 | | 1,23 | | 1,33 | | 1,33 | | |
| | | | | 3 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 1,14 | 1,34 | | 1,44 | | 1,53 | | 1,53 | | |
| | | | | 4 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha | 47,82 | 48,04 | | 48,46 | | 48,88 | | 48,88 | | |
| | | | | 5 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan | 0,83 | 1,03 | | 1,13 | | 1,23 | | 1,23 | | |
| 2 | 17 | 07 | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecamatanil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1 Persentase Pertumbuhan usaha skala mikro | 0,16 | 0,20 | 566,149,500 | 0,22 | 566,149,500 | 0,25 | 566,149,500 | 0,25 | 1,698,448,500 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Usaha mikro yang diinput ke dalam Online Data System (ODS) | 7,49 | 12,44 | | 14,90 | | 17,34 | | 17,34 | | |
| | | | | 3 Persentase Usaha mikro yang bermitra | 0,20 | 0,25 | | 0,27 | | 0,30 | | 0,30 | | |
| | | | | 4 Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan | 7,81 | 8,77 | | 9,25 | | 9,72 | | 9,72 | | |
| ***1*** | ***4*** | | Meningkatnya Investasi Daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 3.55 | 3.61 | | 3.91 | | 4.02 | | ***4.02*** | | |
| 2 | 18 | | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 04 | Pelayanan Penanaman Modal | 1 Persentase Pelaku usaha yang memenuhi komitmen berusaha | 36,05 | 38,68 | 150,000,000 | 41,32 | 150,000,000 | 43,95 | 150,000,000 | 43,95 | 150,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| | | | | 2 Persentase Pengaduan layanan perizinan yang ditindaklanjuti | 77,78 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| ***1*** | ***5*** | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi | ***1*** Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten dan jalan strategis | 66.98 | 71.9 | | 74.77 | | 77.63 | | ***77.63*** | | |
| | | | | ***2*** Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik | 27.86 | 27.86 | | 27.86 | | 27.86 | | ***27.86*** | | |
| 1 | 03 | | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 02 | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1 Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik | 97.32 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| | | | | 2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | 83.81 | 84.42 | | 85.03 | | 85.65 | | 85.65 | | |
| | | | | 3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | 73.80 | 76.62 | | 79.18 | | 81.74 | | 81.74 | | |
| 1 | 03 | 10 | Penyelenggaraan Jalan | 1 Persentase panjang jalan yang dibangun | 0.00 | 50.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,802,227,214 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| | | | | 2 Persentase panjang jalan yang direkonstruksi, dilebarkan, dan direhabilitasi | 0.00 | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | |
| | | | | 3 Persentase panjang jalan yang dipelihara | 0.00 | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | |
| | | | | 4 Persentase panjang jembatan yang dibangun | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase panjang jembatan yang dilebarkan, direhabilitasi, dan dipelihara | 0.00 | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | |
| | | | | 6 Persentase panjang jembatan yang dipelihara | 0.00 | 4.09 | | 4.09 | | 4.09 | | 4.09 | | |
| ***1*** | ***6*** | | Meningkatnya Konektivitas Wilayah | ***1*** Rasio Konektivitas Kabupaten | 0.92 | 0.92 | | 1 | | 1 | | ***1*** | | |
| 2 | 15 | | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1 Persentase Pemasangan Rambu-rambu | 100,00 | 33,00 | 17,940,856,400 | 67,00 | 17,940,856,400 | 100,00 | 17,940,856,400 | 100,00 | 17,940,856,400 | Dinas Perhubungan |
| | | | | 2 Persentase Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | 100,00 | 3,20 | | 3,30 | | 3,40 | | 3,40 | | |
| | | | | 3 Persentase Kendaraan yang melakukan Uji KIR | 100,00 | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | |
| ***2*** | | | ***Menurunnya tingkat kemiskinan*** | ***Persentase tingkat kemiskinan*** | ***13.47*** | ***12.5*** | | ***12*** | | ***11.5*** | | ***11.5*** | | |
| ***2*** | ***1*** | | ***Terkendalinya pertumbuhan penduduk*** | ***1*** *Laju pertumbuhan penduduk* | 0.37 | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | ***0.35*** | | |
| 2 | 14 | | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | Pengendalian Penduduk | 1 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB | 50,00 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| ***2*** | ***2*** | | ***Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka*** | ***1*** *Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* | 4.32 | 4.11 | | 4.01 | | 3.91 | | ***3.91*** | | |
| 2 | 07 | | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 03 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 71,26 | 71,91 | 1,102,500,000 | 72,53 | 1,102,500,000 | 73,12 | 1,102,500,000 | 73,12 | 1,102,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| ***2*** | ***3*** | | ***Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat*** | *Indek Desa Membangun (IDM)* | 0.7251 | 0.7261 | | 0.7271 | | 0.7281 | | ***0.7281*** | | |
| 2 | 13 | | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa Cepat Maju | 0,00 | 4,78 | 6,350,000,000 | 9,56 | 6,350,000,000 | 14,35 | 6,350,000,000 | 14,35 | 6,350,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 09 | | **PANGAN** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 03 | Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Katahanan pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita : | | | 355,000,000 | | 355,000,000 | | 355,000,000 | | 355,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 1 Angka Kecukupan Protein (AKP) | 2.159 | 2.159 | | 2.159 | | 2.159 | | 2.159 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 Angka Kecukupan Energi (AKE) | 64,21 | 64,21 | | 64,21 | | 64,21 | | 64,21 | | |
| **1** | **06** | | **SOSIAL** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | Pemberdayaan Sosial | 1 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 100.00 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| ***3*** | | | ***Terpeliharaanya Kualitaas Lingkungan Hidup*** | ***Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*** | ***67.2*** | ***67.48*** | | ***67.65*** | | ***67.74*** | | ***67.74*** | | |
| ***3*** | ***1*** | | ***Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan*** | ***1*** *Indek Kualitas Air* | ***55.33*** | ***53.69*** | | ***53.79*** | | ***53.89*** | | ***53.89*** | | |
| | | | | ***2*** *Indek Kualitas Udara* | ***86.7*** | ***83.16*** | | ***83.23*** | | ***83.33*** | | ***83.33*** | | |
| | | | | ***3*** *Indek Kualitas Tutupan Lahan* | ***59.57*** | ***63.46*** | | ***63.51*** | | ***63.56*** | | ***63.56*** | | |
| 2 | 11 | | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 03 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten thd usaha yg izin lingkungan | NA | 0,01 | 200,000,000 | 0,02 | 200,000,000 | 0,03 | 200,000,000 | 0,03 | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| ***3*** | ***2*** | | ***Meningkatnya kualitas perumahan dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan*** | ***1*** *Persentase kawasan permukiman kumuh* | ***64.94*** | ***32.47*** | | ***16.23*** | | ***0*** | | ***0*** | | |
| 1 | 04 | | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 04 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1 Persentase penanganan RTLH | 9.76 | 27.43 | 3,302,500,000.00 | 27.39 | 3,302,500,000.00 | 27.35 | 3,302,500,000.00 | 27.35 | 3,302,500,000.00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome ) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | | | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *4* | | | *Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik* | *1 Indek Reformasi Birokrasi (IRB)* | *68* | *69* | | *70* | | *71* | | *71* | | |
| *4* | *1* | | *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* | *1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | *80.5* | *81* | | *81.5* | | *82* | | *82* | | |
| | | | | *2 Indek SPBE* | *2.55* | *2.6* | | *2.7* | | *2.8* | | *2.8* | | |
| 1 | | | **URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | Program Pemerintahan Kesra | 1 Persentase laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan disusun tepat waktu | 100% (6/6) | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | Sekretariat Daerah |
| | | | | 2 Persentase peraturan daerah yang diundangkan | 100% (8/8) | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | |
| | | | | 3 Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian | 100% (16/16) | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | |
| | | | | 4 Persentase rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat | 100% (16/16) | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | |
| 2 | 12 | | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 02 | Pendaftaran Penduduk | 1 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP) | 99.99 | 99.99 | 379,781,000 | 99.99 | 373,061,000 | 99.99 | 373,061,000 | 99.99 | 373,061,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 03 | Pencatatan Sipil | 1 Persentase Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran | 56.87 | 96.50 | 468,737,000 | 96.67 | 468,737,000 | 96.82 | 468,737,000 | 96.82 | 468,737,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 04 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Persentase Perangkat Daerah Yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerjasama | 0.00 | 100.00 | 237,882,000 | 100.00 | 237,882,000 | 100.00 | 237,882,000 | 100.00 | 237,882,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 24 | | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | Pengelolaan Arsip | 1 Persentase arsip dinamis dibuatkan daftar arsip | | 2 | 169,732,300 | 2.2 | 169,732,300 | 2.4 | 169,732,300 | 2.4 | 169,732,300 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 2 Persentase arsip statis dibuatkan sarana temu balik | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Persentase arsip statis dimasukkan ke SIKN-JIKN | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| 5 | 03 | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | Kepegawaian Daerah | 1 Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi | 96.14 | 96.24 | 1,705,470,110 | 98.50 | 1,705,470,110 | 98.46 | 1,632,000,000 | 98.44 | 1,632,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2 Persentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi | 59.87 | 62.85 | | 80.09 | | 83.33 | | 88.81 | | |
| | | | | 3 Persentase pemangku jabatan struktural | 83.18 | 83.18 | | 70.43 | | 81.54 | | 88.71 | | |
| | | | | 4 Persentase pemangku jabatan fungsional | 91.36 | 93.18 | | 74.25 | | 77.91 | | 77.91 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase dokumen kepegawaian (pangkat) yang diterbitkan tepat waktu | | 30.56 | | 33.33 | | 35.00 | | 35.00 | | |
| | | | | 6 Persentase dokumen kepegawaian (pensiun dan berkala) yang diterbitkan tepat waktu | | 58.22 | | 59.33 | | 54.95 | | 54.95 | | |
| | | | | 7 Persentase akurasi data pegawai | 91.72 | 92.60 | | 93.29 | | 93.88 | | 94.42 | | |
| | | | | 8 Persentase pegawai dengan tingkat pendidikan minimal D4/S1 | 58.09 | 58.37 | | 58.55 | | 58.71 | | 59.03 | | |
| | | | | 9 Persentase Pelanggaran pegawai | 0.34 | 0.26 | | 0.24 | | 0.22 | | 0.20 | | |
| | | | | 10 Persentase aparatur yang berkinerja baik | 99.46 | 99.75 | | 99.79 | | 99.81 | | 99.83 | | |
| | | | | 11 Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai | 57.62 | 58.31 | | 61.77 | | 65.22 | | 68.68 | | |
| | | | | 12 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah atau Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | | 76.23 | | 75.94 | | 76.11 | | 75.82 | | |
| | | | | 13 Rasio Pegawai Fungsional PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 14 Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif ( Esselon I dan II) | | 15.63 | | 18.75 | | 21.88 | | 21.88 | | |
| **5** | **04** | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP | 22.64 | 20.14 | 1,070,000,000 | 36.29 | 1,070,000,000 | 48.21 | 1,143,470,110 | 60.56 | 1,143,470,110 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2 Persentase ASN yang lulus diklat dengan nilai memuaskan | 80.07 | 80.08 | | 93.21 | | 96.00 | | 98.53 | | |
| | | | | 3 Persentase pemenuhan kebutuhan diklat | 1.44 | 1.23 | | 11.75 | | 22.92 | | 60.56 | | |
| | | | | 4 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | | 52.94 | | 58.82 | | 82.35 | | 88.24 | | |
| **4** | **02** | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 1 Persentase Raperda Yang di bahas | 100 | 100 | 21,463,604,900 | 100 | 21,463,604,900 | 100 | 21,463,604,900 | 100 | 21,463,604,900 | Sekretariat DPRD |
| | | | | 2 PersentasePenyerapan dan Penghimpun Aspirasi masyarakat | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 PersentasePengawasan Penyelengaraan Pemerintahan | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 Persentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 5 Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD dan Kerja Sama Daerah | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 Persentase Tersediannya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | **KecamatanAMATAN** | | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 1 Kecamatanamatan Bondowoso** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100 | 100 | 27,000,000 | 100 | 27,000,000 | 100 | 27,000,000 | 100 | 27,000,000 | Kecamatan. Bondowoso |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 3 Kecamatanamatan Tamanan** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 5 Kecamatanamatan Tenggarang** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | Kecamatan Tenggarang |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 6 Kecamatanamatan Tegalampel** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan | 100.00 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | Kecamatan Tegalampel |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | **35 11 7 Kecamatanamatan Curahdami** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan | 100.00 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | Kecamatan Curahdami |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 8 Kecamatanamatan Pakem** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 81,000,000 | Kecamatan Pakem |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 9 Kecamatanamatan Binakal** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 51,000,000 | Kecamatan Binakal |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 10 Kecamatanamatan Maesan** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | Kecamatan Maesan |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Binakal yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 11 Kecamatanamatan Grujugan** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | Kecamatan Grujugan |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 12 Kecamatanamatan Pujer** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | Kecamatan Pujer |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | **35 11 13 Kecamatanamatan Wonosari** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | Kecamatan. Wonosari |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Wonosari yang tepat waktu sesuai SOP | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | **35 11 14 Kecamatanamatan Sukosari** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 57,000,000 | Kecamatan. Sukosari |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Binakal yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 15 Kecamatanamatan Telogosari** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | Kecamatan. Tlogosari |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Tlogosari yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 16 Kecamatanamatan Tapen** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Tapen |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Binakal yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 17 Kecamatanamatan Sumberwringin** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | Kecamatan Sumberwri-ngin |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 18 Kecamatanamatan Prajekan** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Prajekan |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Prajekan yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 19 Kecamatanamatan Klabang** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | Kecamatan Klabang |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | **35 11 20 Kecamatanamatan Cermee** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Cermee |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 21 Kecamatanamatan Ijen** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | Kecamatan Ijen |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 22 Kecamatanamatan Taman Krocok** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 % sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |
| | | | | 2 % Pelayanan Kecamatanamatan Taman Krocok yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 23 Kecamatanamatan Jambesari Darus Sholah** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | Kecamatan Jambesari DS |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Jambesari yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 23 Kecamatanamatan Botolinggo** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat Kecamatanamatan yang efektif | 100.00 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | Kecamatan Botolinggo |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatanamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 1 Persentase Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 100,00 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 16 | 3 | Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1 Persentase Sistem ekektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 100,00 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| ***4*** | ***2*** | | ***Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah*** | ***1*** *Nilai SAKIP* | **BB** | ***A*** | | ***A*** | | ***A*** | | ***A*** | | |
| | | | | ***2*** *Nilai Opini BPK atas LKPD* | **WTP** | ***WTP*** | | ***WTP*** | | ***WTP*** | | ***WTP*** | | |
| | | | | ***3*** *Nilai EKPPD* | **32.260** | ***32.260*** | | ***32.270*** | | ***32.280*** | | ***32.280*** | | |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | Program Perekonomian dan Adm.Pmbangunan | 1 Persentase kebijakan ekonomi yang disusun | 100% (11/11) | 100% (11/11) | 2,050,000,000 | 100% (11/11) | 2,050,000,000 | 100% (11/11) | 2,050,000,000 | 100% (11/11) | 2,050,000,000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | 2 Persentase kebijakan Adm.Pembangunan yang disusun | 100% (50/50 PD) | 100% (50/50 PD) | | 100% (50/50 PD) | | 100% (50/50 PD) | | 100% (50/50 PD) | | |
| | | | | 3 Persentase kualitas e-Procurement | 100% (93/93) | 100% (93/93) | | 100% (93/93) | | 100% (93/93) | | 100% (93/93) | | |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yg disusun tepat waktu | 100% (2/2) | 100% (2/2) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 2 Persentase Σ usulan hasil musrenbang Kecamatanamatan yang diakomodir minimal 20Persentase dalam dokumen perencanaan tahunan kabupaten | 100% (23,02%/23,02%) | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 100 | 100 % (4/4) | | 100 % (Ada) | | 100 % (Ada) | | 100 % (Ada) | | |
| | | | | 4 Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD | 100 | 100 (369/369) | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase ketersediaan dokumen data yang aktual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah | 100% (4/4) | 100 % (2/2) | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 6 Persentase Σ dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun tepat waktu | 100% (2/2) | 100 % (4/4) | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 6 | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1 Persentase LK OPD sesuai SAP | 100 (57/57) | 100 (57/57) | 1,504,130,900 | 100 (57/57) | 1,504,130,900 | 100 (57/57) | 1,504,130,900 | 100 (57/57) | 1,504,130,900 | Inspektorat |
| | | | | 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit | 100 (300/300) | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Skor Evaluasi SAKIP OPD Berkategori Minimal A | 100 (57/57) | 100 (57/57) | | 100 (57/57) | | 100 (57/57) | | 100 (57/57) | | |
| | | | | 4 Σ OPD dengan hasil Audit Kinerja minimal Baik | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | |
| | | | | 5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 100 (148/148) | 100 (100/100) | | 100 (95/95) | | 100 (90/90) | | 100 (90/90) | | |
| 6 | 01 | 03 | Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1 Persentase OPD dengan Maturitas Penerapan SPIP Mencapai Level 3 | 100 (57/57) | 100 (57/57) | 445,333,600 | 100 (57/57) | 445,333,600 | 100 (57/57) | 445,333,600 | 100 (57/57) | 445,333,600 | Inspektorat |
| | | | | 2 Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Persentase OPD yang menyusun RKA/DPA tepat waktu | 100.00 | 100.00 | 331,753,286,452 | 100.00 | 342,162,792,698 | 100.00 | 345,114,149,501 | 100.00 | 331,753,286,452 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | 2 Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase penyerapan APBD | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 Target pendapatan asli daerah | 219,834 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | 2 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 90% | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | |
| | | | | 3 Persentase capaian penagihan piutang pajak | 5% | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | | |
| | | | | 4 Persentase pelunasan SPPT PBB P2 | 85% | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | |
| | | | | 5 Persentase desa/ kelurahan lunas PBB P2 | 70% | 70% | | 70% | | 70% | | 70% | | |
| | | | | 6 Persentase tingkat kepatuhan PPAT terhadap laporan BPHTB | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 1 | | | **URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | Program Pemerintahan Kesra | 1 Persentase laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan disusun tepat waktu | 100% (6/6) | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | 100% (6/6) | 62,056,771,800 | Sekretariat Daerah |
| | | | | 2 Persentase peraturan daerah yang diundangkan | 100% (8/8) | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | 100% (8/8) | | |
| | | | | 3 Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian | 100% (16/16) | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | |
| | | | | 4 Persentase rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat | 100% (16/16) | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | 100% (16/16) | | |
| ***4*** | ***3*** | | ***Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat*** | ***1 Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani*** | **100** | ***100*** | | ***100*** | | ***100*** | | ***100*** | | |
| | | | | ***2 Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*** | **2.55** | ***2.6*** | | ***2.7*** | | ***2.8*** | | ***2.8*** | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 06 | Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1 Persentase Kejadian Berpotensi Konflik | 100.00 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1 | 05 | | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase jangkauan patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum | 100.00 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2 Persentase pelanggaran penyakit masyarakat (Pekat) yang tertangani | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 05 | 04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran | 1 Persentase Masyarakat dalam Memahami Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | 100.00 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 100.00 | 31.81 | | 36.36 | | 45.00 | | 45.00 | | |
| | | | | 4 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 05 | 03 | Penanggulangan Bencana | 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 80.00 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 2 Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 60.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Dokumen Penanganan Pasca Bencana yang disusun | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| ***5.*** | | | ***Meningkatnya kualitas sumber daya manusia*** | ***Indek Pembangunan Manusia (IPM)*** | ***67.31*** | ***68.35*** | | ***68.78*** | | ***69.21*** | | ***69.21*** | | |
| ***5*** | ***1*** | | ***Meningkatnya derajat pendidikan*** | ***1 Indek Pendidikan*** | ***57.71*** | ***58.11*** | | ***58.71*** | | ***59.14*** | | ***59.58*** | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | Pengelolaan Pendidikan | 1 Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A | 105.08 | 105.08 | 135,143,341,700 | 105.00 | 135,143,341,700 | 104.80 | 135,143,341,700 | 104.80 | 135,143,341,700 | Dinas Pendidikan |
| | | | | 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 105.00 | 105.00 | | 104.50 | | 104.50 | | 104.50 | | |
| | | | | 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 99.95 | 99.95 | | 99.96 | | 99.97 | | 99.97 | | |
| | | | | 4 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A | 0.18 | 0.18 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | |
| | | | | 5 Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional | 1.70 | 1.70 | | 1.75 | | 1.75 | | 1.75 | | |
| | | | | 6 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional | 1.60 | 1.60 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | | | 7 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B | 96.00 | 96.00 | | 96.10 | | 96.20 | | 96.20 | | |
| | | | | 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 100.38 | 100.38 | | 100.37 | | 1000.36 | | 100.36 | | |
| | | | | 9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 94.15 | 94.15 | | 94.16 | | 94.17 | | 94.17 | | |
| | | | | 10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B | 0.19 | 0.19 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.18 | | |
| | | | | 11 Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional | 1.70 | 1.70 | | 1.75 | | 1.75 | | 1.75 | | |
| | | | | 12 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional | 1.64 | 1.64 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | | | 13 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 75676 | 75676 | | 75680 | | 75680 | | 75680 | | |
| | | | | 14 Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 19936 | 19936 | | 19925 | | 19920 | | 19920 | | |
| | | | | 15 Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1117 | 1117 | | 1120 | | 1120 | | 1120 | | |
| | | | | 16 Angka melek huruf > 15 tahun | 84.78 | 84.78 | | 84.8 | | 84.8 | | 84.8 | | |
| | | | | 17 Rata-rata kemampuan literasi siswa Kesetaraan Paket A berdasarkan asesmen nasional | 1,59 | 1,68 | | 1,68 | | 1,70 | | 1,70 | | |
| | | | | 18 Rata-rata kemampuan numerasi siswa Kesetaraan Paket A berdasarkan asesmen nasional | 1,49 | 1,55 | | 1,55 | | 1,57 | | 1,57 | | |
| | | | | 19 Rata-rata kemampuan literasi siswa Kesetaraan Paket B berdasarkan asesmen nasional | 1,58 | 1,7 | | 1,7 | | 1,72 | | 1,72 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 20 Rata-rata kemampuan numerasi siswa Kesetaraan Paket B berdasarkan asesmen nasional | 1,60 | 1,64 | | 1,64 | | 1,65 | | 1,65 | | |
| 2 | 22 | | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | Pengembangan Kebudayaan | 1 Persentase Seni budaya dan tradisi yang dijadikan potensi daerah | 34,78 | 26,08 | 520,000,000 | 52,17 | 520,000,000 | 78,26 | 520,000,000 | 78,26 | 520,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 23 | | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | Pembinaan Perpustakaan | 1 Persentase Pemerataan pelayanan perpustakaan | | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 2 Persentase Ketercukupan koleksi perpustakaan | | 50,63 | | 51,25 | | 51,88 | | 51.88 | | |
| | | | | 3 Persentase Tenaga ketercukupan tenaga perpustakaan | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 4 Persentase Tingkat kunjungan masyarakat | | 2,81 | | 2,96 | | 3,13 | | 3,13 | | |
| | | | | 5 Persentase Perpustakaan standar Nasional Perpustakaan | | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | | |
| | | | | 6 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | | |
| | | | | 7 Persentase Anggota Perpustakaan | | 62,5 | | 63,13 | | 63,75 | | 63,75 | | |
| ***5*** | ***2*** | | ***Meningkatnya derajat kesehatan*** | ***1 Indek Kesehatan*** | ***72.75*** | ***72.89*** | | ***73.22*** | | ***73.54*** | | ***73.87*** | | |
| **1** | **02** | | **KESEHATAN** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100 | 100 | 150,118,912,826 | 100 | 150,118,912,826 | 100 | 150,118,912,826 | 100 | 150,118,912,826 | Dinas Kesehatan |
| | | | | 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 4 Pelayanan Kesehatan Balita | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 5 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 7 Persentase desa/kelurahan 5 pilar STBM | 5 | 10 | | 20 | | 30 | | 30 | | |
| | | | | 8 Persentase sarana air minum diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart (aman) | 72 | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | | |
| | | | | 9 Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) | 91 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 10 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 11 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 12 Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 13 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Tahun Dasar (2022) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 14 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 15 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 16 CFR DBD | ≤1 % | 2.27 | | 2.26 | | 2.25 | | 2.25 | | |
| | | | | 17 BOR (Puskesmas) | < 40% | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 18 Persentase FKTP dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 19 Persentase Penduduk miskin yg tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 20 Persentase puskesmas dengan ketersedian obat dan vaksin esensial | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1 | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Persentase sarana RS yang telah tersedia dan dimanfaatkan dari seluruh sarana RS yang tersedia | 0.00 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | RSU dr. H. KOESNADI |
| | | | | 2 Persentase alat kesehatan RS yang tersedia dan telah dimanfaatkan | 0.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| ***5.*** | ***3*** | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda*** | ***1 Indek Pembangunann Gender (IPG)*** | ***89.72*** | ***92*** | | ***93*** | | ***94*** | | ***94*** | | |
| | | | | ***2 Status Kabupaten Layak Anak*** | ***MADYA*** | ***MADYA*** | | ***NIDYA*** | | ***NIDYA*** | | ***NIDYA*** | | |
| | | | | ***3 Status Kabupaten Layak Pemuda*** | ***N/A*** | ***PRATAMA*** | | ***PRATAMA*** | | ***PRATAMA*** | | ***PRATAMA*** | | |
| 2 | 08 | | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 1 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 63,69 | 64,00 | 240,000,000 | 65,00 | 240,000,000 | 67,00 | 240,000,000 | 67,00 | 240,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD | 20,00 | 25,00 | | 27,00 | | 30,00 | | 30,00 | | |
| 2 | 08 | 06 | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 1 Persentase Forum Anak Yang Aktif | 75,70 | 77,00 | 300,000,000 | 79,00 | 300,000,000 | 80,00 | 300,000,000 | 80,00 | 300,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 2 | 19 | | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1 Persentase Kelompok pemuda yang difasilitasi pemberdayaan | 100,00 | 54,54 | 575,205,000 | 72,73 | 575,205,000 | 100,00 | 575,205,000 | 100,00 | 575,205,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 Σ Pemuda yang berprestasi di tingkat regional | 15,00 | 2 pemuda | | 4 pemuda | | 6 pemuda | | 6 pemuda | | |

# BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dalam konteks kemampuan pembiayaan pembangunan daerah berhubungan erat dengan kapasitas riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan adalah kemampuan belanja pembangunan yang telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi pendapatan yang menjadi dasar proyeksi belanja, serta pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang meliputi komponen belanja operasi berupa belanja pegawai dan belanja subsidi, belanja transfer, yang meliputi komponen belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik serta pengeluaran pembiayaan.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pendanaan dalam belanja prioritas pembangunan yang meliputi komponen belanja rutin kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah serta belanja pemenuhan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja yang bersifat prioritas nasional, serta belanja tak terduga, serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah, dan pemenuhan belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya berupa Hibah dan Bansos. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 7.1.

Keseluruhan program prioritas pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program perangkat daerah, beserta target indikator kinerja, pagu indikatif, dan perangkat daerah berdasarkan urusan selengkapnya disajikan sebagaimana Tabel 7.2

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

| No. | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | **865.773.538.612,29** | **867.701.194.902,56** | **870.652.551.705,51** |
| | | | | |
| **2** | **BELANJA** | **2.053.350.128.960,29** | **2.055.277.785.250,56** | **2.058.229.142.053,51** |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.549.775.895.299,00** | **1.549.775.895.299,00** | **1.549.775.895.299,00** |
| 2.1.01 | Belanja Pegawai | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 | 862.920.166.714,00 |
| 2.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 548.959.719.803,00 | 548.959.719.803,00 | 548.959.719.803,00 |
| 2.1.04 | Belanja Subsidi | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 2.1.05 | Belanja Hibah | 123.918.258.782,00 | 123.918.258.782,00 | 123.918.258.782,00 |
| 2.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 12.977.750.000,00 | 12.977.750.000,00 | 12.977.750.000,00 |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **174.589.519.507,00** | **174.589.519.507,00** | **174.589.519.507,00** |
| 2.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.785.323.222,00 | 75.785.323.222,00 | 75.785.323.222,00 |
| 2.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 24.084.711.300,00 | 24.084.711.300,00 | 24.084.711.300,00 |
| 2.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 66.837.100.385,00 | 66.837.100.385,00 | 66.837.100.385,00 |
| 2.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | 7.632.384.600,00 | 7.632.384.600,00 | 7.632.384.600,00 |
| 2.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.328.290.520,29** | **7.255.946.810,56** | **10.207.303.613,51** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 5.328.290.520,29 | 7.255.946.810,56 | 10.207.303.613,51 |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** | **323.656.423.634,00** |
| 2.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 | 7.430.623.534,00 |
| 2.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 | 316.225.800.100,00 |

**Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen Perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen Perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 469,788,789,700 | 100.00 | 469,788,789,700 | 100.00 | 469,788,789,700 | 100.00 | 469,788,789,700 | Dinas Pendidikan |
| | | | | 2 Persentase Dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 81,15 | 81,15 | | 81,50 | | 81,75 | | 81,75 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 01 | 02 | Program Pengelolaan Pendidikan | 1 Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A | 1 Σ Murid Usia 7-12 tahun / Σ Penduduk Usia 7-12 Tahun x1000 | % | 105,08 | 105,08 | 135,143,341,700 | 105,00 | 135,143,341,700 | 104,80 | 135,143,341,700 | 104,80 | 135,143,341,700 | Dinas Pendidikan |
| | | | | 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 1 Σ Siswa SD/ MI/ Paket A / Σ Penduduk Usia 7-12 Tahun | % | 105.00 | 105.00 | | 104.50 | | 104.50 | | 104.50 | | |
| | | | | 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 1 Σ Siswa Usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A / Σ Penduduk Usia 7-12 Tahun | % | 99.95 | 99.95 | | 99.96 | | 99.97 | | 99.97 | | |
| | | | | 4 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A | 1 Σ Siswa Putus Sekolah SD/MI/Paket A / Σ Siswa SD/ MI/ Paket A | % | 0.18 | 0.18 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | |
| | | | | 5 Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai literasi Asesmen Nasional SD / Σ Peserta Asesmen Nasional Literasi SD | Nilai | 1.70 | 1.70 | | 1.75 | | 1.75 | | 1.75 | | |
| | | | | 6 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai numerasi Asesmen Nasional SD / Σ Peserta Asesmen Nasional numerasi SD | Nilai | 1.60 | 1.60 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | | | 7 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B | 1 Σ Murid Usia 13-15 tahun / Σ Penduduk Usia 13-15 Tahun x1000 | % | 96.00 | 96.00 | | 96.10 | | 96.20 | | 96.20 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 1 Σ Siswa SMP/ MTs/ Paket B / Σ Penduduk Usia 13-15 Tahun | % | 100.38 | 100.38 | | 100.37 | | 100.36 | | 100.36 | | |
| | | 9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 1 Σ Siswa Usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B / Σ Penduduk Usia 13-15 Tahun | % | 94.15 | 94.15 | | 94.16 | | 94.17 | | 94.17 | | |
| | | 10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B | 1 Σ Siswa Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B / Σ Siswa SMP/ MTs/ Paket B | % | 0.19 | 0.19 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.18 | | |
| | | 11 Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai literasi Asesmen Nasional SMP / Σ Peserta Asesmen Nasional Literasi SMP | Nilai | 1.70 | 1.70 | | 1.75 | | 1.75 | | 1.75 | | |
| | | 12 Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai numerasi Asesmen Nasional SMP / Σ Peserta Asesmen Nasional numerasi SMP | Nilai | 1.64 | 1.64 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | 13 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 1 Σ Warga Negara usia 7-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | Σ | 75,676 | 75,676 | | 75,680 | | 75,680 | | 75,680 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 14 Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 1 Σ warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | Σ | 19,936 | 19,936 | | 19,925 | | 19,920 | | 19,920 | | |
| | | 15 Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1 Σ Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Σ | 1,117 | 1,117 | | 1,120 | | 1,120 | | 1,120 | | |
| | | 16 Angka melek huruf > 15 tahun | 1 Σ penduduk >15 tahun yang melek huruf / Σ penduduk >15 tahun | % | 84.78 | 84.78 | | 84.80 | | 84.80 | | 84.80 | | |
| | | 17 Rata-rata kemampuan literasi siswa Kesetaraan Paket A berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai literasi Asesmen Nasional Kesetaraan Paket A / Σ Peserta Asesmen Nasional Literasi Kesetaraan Paket A | Nilai | 1,59 | 1,68 | | 1,68 | | 1,70 | | 1,70 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 18 Rata-rata kemampuan numerasi siswa Kesetaraan Paket A berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai numerasi Asesmen Nasional Kesetaraan Paket A / Σ Peserta Asesmen Nasional Numerasi Kesetaraan Paket A | Nilai | 1,49 | 1,55 | | 1,55 | | 1,57 | | 1,57 | | |
| | | | | 19 Rata-rata kemampuan literasi siswa Kesetaraan Paket B berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai literasi Asesmen Nasional Kesetaraan Paket B / Σ Peserta Asesmen Nasional Literasi Kesetaraan Paket B | Nilai | 1,58 | 1,70 | | 1,70 | | 1,72 | | 1,72 | | |
| | | | | 20 Rata-rata kemampuan numerasi siswa Kesetaraan Paket B berdasarkan asesmen nasional | 1 Σ Total nilai numerasi Asesmen Nasional Kesetaraan Paket B / Σ Peserta Asesmen Nasional Numerasi Kesetaraan Paket B | Nilai | 1,60 | 1,64 | | 1,64 | | 1,65 | | 1,65 | | |
| 1 | 01 | 03 | Program Pengembangan Kurikulum | 1 Persentase lembaga yang memiliki kurikulum muatan lokal | 1 Σ lembaga yang memiliki kurikulum muatan lokal / Σ lembaga | % | 100.00 | 100.00 | 216,130,000 | 100.00 | 216,130,000 | 100.00 | 216,130,000 | 100.00 | 216,130,000 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 04 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 1 Rasio Guru dan Siswa PAUD | 1 Σ Guru PAUD / Σ Siswa PAUD | Rasio | 0.05 | 0.05 | 3,548,670,000 | 0.05 | 3,548,670,000 | 0.05 | 3,548,670,000 | 0.05 | 3,548,670,000 | Dinas Pendidikan |
| | | | | 2 Rasio Guru dan Siswa Pendidikan | 1 Σ Guru / Σ Siswa | Rasio | 0.06 | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | |
| | | | | 3 Rasio Guru dan Siswa Pendidikan non formal/Kesetaraan | 1 Σ Guru Non Formal/Kesetaraan / Σ Siswa Non Formal/Kesetaraan | Rasio | 0.05 | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 01 | 05 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | 1 Persentase Perizinan Pendidikan | 1 Σ Lembaga yang memiliki perizinan pendidikan / Σ Lembaga | Rasio | 100.00 | 100.00 | 412,000,000 | 100.00 | 412,000,000 | 100.00 | 412,000,000 | 100.00 | 412,000,000 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **02** | | **KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun tepat waktu / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 61,418,812,014 | 100.00 | 61,418,812,014 | 100.00 | 61,418,812,014 | 100.00 | 61,418,812,014 | Dinas Kesehatan |
| | | | | 2 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat wakt | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | 150,118,912,826 | 100.00 | 150,118,912,826 | 100.00 | 150,118,912,826 | 100.00 | 150,118,912,826 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 1 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir | 1 Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 Pelayanan Kesehatan Balita | 1 Jumlah Balita usia 12-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah balita usia 12 –59 bulanpada kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 5 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 1 Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun ajaran / Jumlah Semua Anak Usia Pendidikan Dasar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun ajaran | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 7 Persentase desa/kelurahan 5 pilar STBM | 1 Jumlah desa/kelurahan 5 pilar STBM / Jumlah desa/kelurahan di wilayah dan kurun waktu yang sama | % | 5.00 | 10.00 | | 20.00 | | 30.00 | | 30.00 | | |
| | | 8 Persentase sarana air minum diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart (aman) | 1 Jumlah sarana air minum yang diawasi yang memenuhi syarat kualitas air minum / Jumlah sarana air minum yang ada di wilayah dan waktu yang sama | % | 72.00 | 75.00 | | 80.00 | | 85.00 | | 85.00 | | |
| | | 9 Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) | 1 Σ Desa/kel yang mencapai IDL 85% / Σ Desa/kel di Kabupaten | % | 91.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 10 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 1 Σ Orang Usia 15 - 59 tahun di Kabupaten/Kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Σ Orang Usia 15 - 59 tahun di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 11 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 1 Σ Penderita Hipertensi usia ≥15th di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Σ Estimasi Penderita Hipertensi usia ≥15th di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 12 Persentase Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 1 Σ Penderita Diabetes Melitus usia ≥15th di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun<br>Σ Estimasi Penderita Diabetes Melitus usia ≥15th di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 13 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) | 1 Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun<br>Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 14 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 1 Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 15 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 1 Σ orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Σ orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 16 CFR DBD | 1 Σ kematian karena DBD / Σ penderita DBD | % | 1.00 | 2.27 | | 2.26 | | 2.25 | | 2.25 | | |
| | | | | 17 BOR (Puskesmas) | 1 ∑ hari perawatan / ∑ tempat tidur * ∑ hari dalam sebulan di puskesmas rawat inap ybs | % | 40.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 18 Persentase FKTP dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat | 1 ∑ FKTP dg kemampuan gawat darurat yg dapat diakses masyarakat / ∑ seluruh FKTP | % | 100 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 19 Persentase Penduduk miskin yg tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan | 1 ∑ penduduk miskin yg tercakup dalam Program JKN / ∑ penduduk miskin | % | 100 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 20 Persentase puskesmas dengan ketersedian obat dan vaksin esensial | 1 Jumlah puskesmas yg memiliki 85% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 45 item obat indikator) dibagi jumlah seluruh puskesmas yang ada | % | 100 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 02 | 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Persentase Tenaga kesehatan yg strategis | 1 Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP / Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten | % | 100 | 100.00 | 3,154,887,000 | 100.00 | 3,154,887,000 | 100.00 | 3,154,887,000 | 100.00 | 3,154,887,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 1 Persentase fasilitas IRTP memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku | 1 Jumlah fasilitas IRTP memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku / Fasilitas IRTP yang sudah terbit SPPIRT dalam periode tertentu | % | 0.88 | 100.00 | 416,096,000 | 100.00 | 416,096,000 | 100.00 | 416,096,000 | 100.00 | 416,096,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase Puskesmas yang menerapkan POR sesuai standar (terhadap 4 indikator POR) | 1 Jumlah Puskesmas yang menerapkan POR sesuai standar (terhadap 4 indikator / Jumlah seluruh puskesmas | % | 0.10 | 0.72 | | 0.80 | | 0.88 | | 0.88 | | |
| | | | | 3 Persentase kesesuaian item obat yang tersedia di fasyankes terhadap Fornas. | 1 Jumlah fasyankes yang menggunakan 80% obat sesuai Fornas / Jumlah seluruh fasyankes pada periode tertentu | % | 0.00 | 0.65 | | 0.675 | | 0.70 | | 0.70 | | |
| 1 | 02 | 05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1 Persentase Rumah tangga sehat | 1. ∑ rumah tangga sehat / ∑ seluruh rumah tangga yang disurvey | % | 0.41 | 0.42 | 2,856,215,500 | 0.43 | 2,856,215,500 | 0.44 | 2,856,215,500 | 0.44 | 2,856,215,500 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 170,869,579,984 | 100.00 | 170,869,579,984 | 100.00 | 170,869,579,984 | 100.00 | 170,869,579,984 | RSU dr. H. Koesnadi |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 2 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 6 NDR (Net Death Rate) | 1 Σ jumlah pasien mati setelah dirawat > 48 jam / Σ pasien keluar hidup dan mati | % | 31.80 | 25.00 | | 24.90 | | 24.80 | | 24.80 | | |
| | | 7 BOR (Bed Occupancy Ratio) | 1 Σ hari perawatan rumah sakit / Σ tempat tidur x Σ hari dalam satu periode | % | 55.86 | 65.00 | | 65.00 | | 67.00 | | 69.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 8 Persentase mutu pelayanan keperawatan | 1 Σ pasien yang mendapatkan perawatan holistik yang disurvei / Σ pasien | % | 90.00 | 90.00 | | 90.5 | | 91.00 | | 91.00 | | |
| | | | | 9 Persentase mutu unit pelayanan penunjang | 1 Σ unit pelayanan penunjang yang meningkat / Σ unit layanan penungjang keseluruhan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 02 | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Persentase sarana RS yang telah tersedia dan dimanfaatkan dari seluruh sarana RS yang tersedia | 1 Σ sarana RS yang sudah tersedia melalui sumber pendapatan APBN/APBD dan telah dimanfaatkan pada tahun berjalan / Σ seluruh sarana RS yang sudah tersedia melalui sumber pendapatan APBN/APBD pada tahun berjalan | % | 0.00 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | 100.00 | 33,425,053,445 | RSU dr. H. Koesnadi |
| | | | | 2 Persentase alat kesehatan RS yang tersedia dan telah dimanfaatkan | 1 Σ alat kesehatan RS yang sudah tersedia melalui sumber pendapatan APBN/APBD dan telah dimanfaatkan pada tahun berjalan | % | 0.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | | Σ seluruh alat kesehatan RS yang sudah tersedia melalui sumber pendapatan APBN/APBD pada tahun berjalan | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | 14,187,056,600 | 100.00 | 14,187,056,600 | 100.00 | 14,187,056,600 | 100.00 | 14,187,056,600 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| | | | | 2 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana & prasarana yg layak fungsi / Σ sarana & prasarana yg ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan & Pelaporan) / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan yg disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan yg wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen Perencanaan dan evalusi OPD yang disusun / Σ Dokumen Perencanaan dan evalusi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 03 | 02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 1 Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik | 1 panjang jaringan irigasi primer kondisi baik / Total panjang jaringan irigasi primer | % | 97.32 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | 97.32 | 14,519,078,000 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| | | | | 2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | 1 panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik / Total panjang jaringan irigasi sekunder | % | 83.81 | 84.42 | | 85.03 | | 85.65 | | 85.65 | | |
| | | | | 3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | 1 panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik / Total jaringan irigasi tersier | % | 73.80 | 76.62 | | 79.18 | | 81.74 | | 81.74 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 03 | 03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 1 Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan | 1 Σ rumah tangga berakses air minum perpipaan X 100% / Σ Jumlah tangga | % | 46,95 | 46.99 | 17,613,279,000 | 47.37 | 17,613,279,000 | 47.75 | 17,613,279,000.00 | 47.75 | 17,613,279,000.00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1 Persentase Persentase rumah tangga bersanitasi | 1 Σ rumah tangga berakses prasarana sanitasi SPALD X 100% / Σ rumah tangga | % | 76,16 | 76.19 | 13,630,206,000 | 76.58 | 13,630,206,000 | 76.96 | 13,630,206,000 | 76.96 | 13,630,206,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 1 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | 1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km) / Panjang seluruh jalan kabupaten (Km) | % | 1.86 | 1.94 | 1,916,477,000 | 2.01 | 1,916,477,000 | 2.08 | 1,916,477,000 | 2.08 | 1,916,477,000 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| 1 | 03 | 07 | Program Pengembangan Permukiman | 1 Persentase areal kawasan kumuh | Luas Kawasan Kumuh X 100% / Luas Wilayah | | 5.45 | 0.53 | 3,635,408,700 | 0.73 | 3,635,408,700 | 0.93 | 3,635,408,700 | 0.93 | 1,916,477,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 08 | Program Penataan Bangunan Gedung | 1 Persentase Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 1 Σ pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya X 100% / Σ IMB yang berlaku | | 1.79 | 100.00 | 1,793,000,000 | 100.00 | 1,793,000,000 | 100.00 | 1,793,000,000 | 100.00 | 1,793,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 03 | 12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1 Persentase dokumen penyelenggaraan penataan ruang | 1 jumlah dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang disusun X 100% / jumlah dokumen | | 40.00 | 100.00 | 475,000,000 | 100.00 | 475,000,000 | 100.00 | 475,000,000 | 100.00 | 475,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | Program Penyelenggaraan Jalan | 1 Persentase panjang jalan yang dibangun | 1 Panjang jalan yang dibangun sampai dengan tahun ybs / Total Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun | % | 0.00 | 50.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,005,104,439 | 100.00 | 68,802,227,214 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| | | | | 2 Persentase panjang jalan yang direkonstruksi, dilebarkan, dan direhabilitasi | 1 Panjang jalan yang direkonstruksi, dilebarkan, direhabilitasi, dan dipelihara pada tahun ybs / Total Panjang Jalan Kabupaten | % | 0.00 | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | 2.87 | | |
| | | | | 3 Persentase panjang jalan yang dipelihara | 1 Panjang jalan yang dipelihara rutin pada tahun ybs / Total Panjang Jalan Kabupaten | % | 0.00 | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | |
| | | | | 4 Persentase panjang jembatan yang dibangun | 1 Panjang Jembatan Yang Dibangun pada tahun ybs / Total Panjang Jembatan Kabupaten yang dibangun | % | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase panjang jembatan yang dilebarkan, direhabilitasi, dan dipelihara | 1 Panjang Jembatan Yang Dilebarkan, direhabilitasi, dan dipelihara pada tahun ybs / Total Panjang Jembatan Kabupaten | % | 0.00 | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | |
| | | | | 6 Persentase panjang jembatan yang dipelihara | 1 Panjang jembatan yang dipelihara rutin pada tahun ybs / Total Panjang Jembatan Kabupaten | % | 0.00 | 4.09 | | 4.09 | | 4.09 | | 4.09 | | |
| 1 | 03 | 11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 1 Persentase proyek tanpa kecelakaan kerja | 1 Jumlah proyek yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | % | 0.00 | 100.00 | 1,106,000,000 | 100.00 | 1,106,000,000 | 100.00 | 1,106,000,000 | 100.00 | 1,106,000,000 | Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi |
| **1** | **04** | | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | 4,497,045,500.00 | 100.00 | 4,497,045,500.00 | 100.00 | 4,497,045,500.00 | 100.00 | 4,497,045,500.00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | | 2 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana & prasarana yg layak fungsi / Σ sarana & prasarana yg ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman (Perencanaan & Pelaporan) / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan yg disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan yg wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | *5* Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | *1* jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 04 | 02 | Program Pengembangan Perumahan | 1 Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 1 Σ unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n x 100% / Σ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | % | 25.00 | 100.00 | 800,000,000 | 100.00 | 800,000,000 | 100.00 | 800,000,000 | 100.00 | 800,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 04 | 03 | Program Kawasan Permukiman | 1 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani | 1 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha | % | 4.19 | 0.24 | 3,199,576,000 | 0.48 | 3,199,576,000 | 0.72 | 3,199,576,000 | 0.72 | 3,199,576,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 04 | 04 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1 Persentase penanganan RTLH | 1 Jumlah unit rumah tidak layak huni x 100% / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota | % | 9.76 | 27.43 | 3,302,500,000 | 27.39 | 3,302,500,000 | 27.35 | 3,302,500,000 | 27.35 | 3,302,500,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 1 | 04 | 05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 1 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 1 Σ satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Σ satuan perumahan | % | 14.27 | 9.62 | 6,390,435,300 | 19.23 | 6,390,435,300 | 28.85 | 6,390,435,300 | 28.85 | 6,390,435,300 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1** | **05** | | **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 7,019,307,400 | 100.00 | 7,019,307,400 | 100.00 | 7,019,307,400 | 100.00 | 7,019,307,400 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 05 | 02 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase jangkauan patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum | 1 ∑ Patroli / Σ kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | 100.00 | 6,026,068,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2 Persentase pelanggaran penyakit masyarakat (Pekat) yang tertangani | 1 Σ Pelanggaran Pekat yg tertangani / ∑ pelanggaran pekat | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 Persentase pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada | 1 ∑ perda dan perkada yang dilanggar / ∑ perda dan perkada yang dipantau | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 05 | 04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran | 1 Persentase Masyarakat dalam Memahami Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | 1 Σ masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dalam penanganan kebakaran di kab. Bondowoso / ∑ penduduk di Kab. Bondowoso | % | 100.00 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | 0.19 | 3,091,200,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota | 1 Σ kasus kebakaran di WMK yg tertangani / Σ kasus kebakaran di WMK | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 1 Σ kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Σ kasus kebakaran di WMK yg tertangani | % | 100.00 | 31.81 | | 36.36 | | 45.00 | | 45.00 | | |
| | | | | 4 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1 Σ korban kebakaran yang tertangani / Σ korban kebakaran | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 05 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD Yang Disusun | 1 Σ Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD Yang Disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 2,989,981,300 | 100.00 | 2,989,981,300 | 100.00 | 2,989,981,300 | 100.00 | 2,989,981,300 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 2 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Sesuai Pedoman Yang Disusun Tepat Waktu | 1 Σ Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Sesuai Pedoman Yang Disusun Tepat Waktu / Σ Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Sesuai Pedoman Yang Disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu | 1 Σ Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu / Σ Laporan Keuangan Yang Disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN Yang Puas Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Σ ASN Yang Puas Tehadap Pelayanan Administrasi Perkantoran / Σ ASN Yang Dilayani | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana aparatur | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1 | 05 | 03 | Program Penanggulangan Bencana | 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 1 Σ Warga Negara Yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Σ Warga Negara yang berada di Kawasan Rawan Bencana | % | 80.00 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | 100.00 | 1,789,495,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 2 Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1 Σ Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Σ Warga Negara yang menjadi Korban Bencana | % | 60.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Dokumen Penanganan Pasca Bencana yang disusun | 1 Σ Dokumen Pasca Bencana yang disusun / Σ Kejadian yang membutuhkan Dokumen Pasca Bencana | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **1** | **06** | | **SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 5,963,349,700 | 100.00 | 5,963,349,700 | 100.00 | 5,963,349,700 | 100.00 | 5,963,349,700 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat wakt | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 06 | 02 | Program Pemberdayaan Sosial | 1 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 1 ∑ PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / ∑ PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial | % | 100.00 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | 100.00 | 319,906,700 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 1 | 06 | 03 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 1 Persentase warga negara migran bermasalah, korban tindak kekerasan dan keluarga migran yang tertangani | 1 ∑ warga negara migran bermasalah, korban tindak kekerasan, dan keluarga migran yang tertangani / ∑ warga negara migran bermasalah, korban tindak kekerasan, dan keluarga migran yang ada | % | 100.00 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 06 | 04 | Program Rehabilitasi Sosial | 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 1 ∑ penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / ∑ penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | % | 26,97 | 28.00 | 1,131,892,300 | 31.00 | 1,131,892,300 | 32.00 | 1,131,892,300 | 32.00 | 1,131,892,300 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 1 | 06 | 05 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya | 1 ∑ PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya / ∑ PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial | % | 17.00 | 18.00 | 14,301,478,100 | 19.00 | 14,301,478,100 | 20.00 | 14,301,478,100 | 20.00 | 14,301,478,100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | 06 | 06 | Program Penanganan Bencana | 1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 1 ∑ korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / ∑ korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | % | 100.00 | 100.00 | 308,562,400 | 100.00 | 308,562,400 | 100.00 | 308,562,400 | 100.00 | 308,562,400 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 1 | 06 | 07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 1 Persentase sarana dan prasarana TMP yang layak fungsi | 1 ∑ sarana dan prasarana TMP yang layak fungsi / ∑ sarana dan prasarana TMP yang ada | % | 100.00 | 100.00 | 51,500,000 | 100.00 | 51,500,000 | 100.00 | 51,500,000 | 100.00 | 51,500,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 03 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 1 ∑ Tenaga kerja yang dilatih / ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | % | 71,26 | 71,91 | 1,102,500,000 | 72,53 | 1,102,500,000 | 73,12 | 1,102,500,000 | 73,12 | 1,102,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 1 Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan : | | | | | 419,295,500 | | 419,295,500 | | 419,295,500 | | 419,295,500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| | | | | Persentase Penempatan TK AKL | ∑ Penempatan TK AKL / ∑ Pencari Kerja Terdaftar | % | 65,31 | 65,45 | | 65,59 | | 65,72 | | 65,72 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | Persentase Penempatan TK AKAD | ∑ Penempatan TK AKAD / ∑ Pencari Kerja Terdaftar | % | 0,82 | 0,88 | | 0,95 | | 1,01 | | 1,01 | | |
| | | | | Persentase Penempatan TK AKAN | ∑ Penempatan TK AKAN / ∑ Pencari Kerja Terdaftar | % | 3,88 | 3,94 | | 4.00 | | 4,01 | | 4,01 | | |
| | | | | 2 Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 2 ∑ Tenaga kerja yang dilatih / ∑ Pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan | % | 80,00 | 83,33 | | 83,33 | | 83,33 | | 83,33 | | |
| 2 | 07 | 05 | Program Hubungan Industrial | 1 Persentase Kasus yg diselesaikan dgn Perjanjian Bersama | 1 ∑ Kasus yg diselesaikan dgn Perjanjian Bersama / ∑ Kasus yg dicatatkan | % | 100,00 | 100,00 | 39,386,000 | 100,00 | 39,386,000 | 100,00 | 39,386,000 | 100,00 | 39,386,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| | | | | 2 Persentase Pekerja/buruh Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 2 ∑ Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif / ∑ Pekerja/buruh | % | 39,90 | 40,35 | | 40,90 | | 41,34 | | 41,34 | | |
| | | | | 3 Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 3 ∑ Perush peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif / ∑ Perush thn ybs | % | 74,31 | 74,54 | | 75,91 | | 76,70 | | 76,70 | | |
| **2** | **08** | | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 1 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 1 Angkatan kerja perempuan X 100% / Σ Penduduk perempuan usia 15 th keatas | % | 63,69 | 64,00 | 240,000,000 | 65,00 | 240,000,000 | 67,00 | 240,000,000 | 67,00 | 240,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD | 2 Σ Anggaran Responsif Gender X 100% / Σ APBD Belanja Langsung | % | 20,00 | 25,00 | | 27,00 | | 30,00 | | 30,00 | | |
| 2 | 08 | 03 | Program Perlindungan Perempuan | 1 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 1 Σ Kasus kekerasan perempuan dewasa x 100 % / Σ perempuan dewasa | % | 0,010 | 0,009 | 300,000,000 | 0,009 | 300,000,000 | 0,009 | 300,000,000 | 0,009 | 300,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 1 Persentase Forum Anak Yang Aktif | 1 Σ Forum anak yang aktif x 100% / Σ Total forum anak | % | 75,70 | 77,00 | 300,000,000 | 79,00 | 300,000,000 | 80,00 | 300,000,000 | 80,00 | 300,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 07 | Program Perlindungan Khusus Anak | 1 Rasio kekerasan Terhadap Anak | 1 Σ Kasus Kekerasan Terhadap Anak x 100 % / Σ Anak | % | 0,011 | 0,010 | 320,000,000 | 0,010 | 320,000,000 | 0,010 | 320,000,000 | 0,010 | 320,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| **2** | **09** | | **PANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Utama : | 1 rata-rata Σ ketersediaan pangan utama per tahun / Σ penduduk | | | | 144,430,000 | | 144,430,000 | | 144,430,000 | | 144,430,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 1 Beras | | ton | 255,650 | 255,650 | | 255,650 | | 255,650 | | 255,650 | | |
| | | | | 2 Jagung | | ton | 127,050 | 127,050 | | 127,050 | | 127,050 | | 127,050 | | |
| | | | | 3 Gula Pasir | | ton | 34,250 | 34,250 | | 34,250 | | 34,250 | | 34,250 | | |
| | | | | 4 Telur | | ton | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | | 2,800 | | 2,800 | | |
| | | | | 5 Daging | | ton | 3,050 | 3,050 | | 3,050 | | 3,050 | | 3,050 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 09 | 03 | Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Katahanan pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita : | | | | | 355,000,000 | | 355,000,000 | | 355,000,000 | | 355,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 1 Angka Kecukupan Protein (AKP) | 1 Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan kalori X BDD / 100 | kkal/kapita/hari | 2.159 | 2.159 | | 2.159 | | 2.159 | | 2.159 | | |
| | | | | 2 Angka Kecukupan Energi (AKE) | 1 Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan protein X BDD / 100 | kkal/kapita/hari | 64,21 | 64,21 | | 64,21 | | 64,21 | | 64,21 | | |
| 2 | 09 | 04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 1 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) | 1 Jumlah desa yang diintervensi / Jumlah Desa | % | 18.26 | 18.26 | 150,000,000 | 18.26 | 150,000,000 | 18.26 | 150,000,000 | 18.26 | 150,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 09 | 05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 1 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 1 Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan / Jumlah keseluruhan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan | % | 100,00 | 100,00 | 40,000,000 | 100,00 | 40,000,000 | 100,00 | 40,000,000 | 100,00 | 40,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **10** | | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 10 | Program Penatagunaan Tanah | 1 Persentase fasilitasi penertiban pertanahan | 1 Σ kecamatan yg telah dilakukan penyuluhan / Σ kecamatan | % | 78,26 | 91,30 | 250,000,000 | 95,65 | 250,000,000 | 100,00 | 250,000,000 | 100,00 | 250,000,000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **2** | **11** | | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Sesuai Pedoman Yang Disusun Tepat Waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 11,437,362,660 | 100,00 | 11,437,362,660 | 100,00 | 11,437,362,660 | 100,00 | 11,437,362,660 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | 2 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 11 | 02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 1 Persentase Terselenggaranya Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Strategis | 1 Σ dokumen strategis LH yang disusun / Σ dokumen strategis LH yang ditargetkan pada thn ybs | % | 100,00 | 100,00 | 460,000,000 | 100,00 | 460,000,000 | 100,00 | 460,000,000 | 100,00 | 460,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | 2 Persentase Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 Σ data dan informasi LH yang disusun / Σ data dan informasi LH yang ditargetkan pada thn ybs | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 11 | 03 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten thd usaha yg izin lingkungan | 1 Σ PPLHD yg ada / Σ usaha dan/atau kegiatan yg izin lingkungan, izin PPLH & PUU LH yg diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota | % | NA | 0,01 | 200,000,000 | 0,02 | 200,000,000 | 0,03 | 200,000,000 | 0,03 | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 1 Persentase Luasan RTH Publik di kawasan perkotaan | 1 luas RTH yg ada / Luas RTH yg seharusnya ada di kawasan perkotaan | % | 82,87 | 33,56 | 450,000,000 | 34,35 | 450,000,000 | 35,15 | 450,000,000 | 35,15 | 450,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 1 Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yg ditindaklanjuti | 1 pengaduan masyarakat yg ditangani / total Σ pengaduan yang teregistrasi | % | 100,00 | 100,00 | 65,000,000 | 100,00 | 65,000,000 | 100,00 | 65,000,000 | 100,00 | 65,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 11 | 08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 1 Persentase Pelaksanaan pendidikan lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat | ∑ lembaga yang dididik/dilatih / ∑ lembaga yang ditargetkan | % | 40,00 | 33,33 | 100,000,000 | 66,67 | 100,000,000 | 100,00 | 100,000,000 | 100,00 | 100,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 1 Persentase Pemberian penghargaan lingkungan bagi masyarakat | ∑ lembaga yang ditarget menerima penghargaan / ∑ lembaga yang dibina | % | 20,00 | 30,00 | 25,000,000 | 32,50 | 25,000,000 | 33,33 | 25,000,000 | 33,33 | 25,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | Program Pengelolaan Persampahan | 1 Persentase Penanganan Sampah | 1 volume sampah yg tertangani (ton) / volume sampah kawasan pelayanan (ton) | % | 91,70 | 71,00 | 2,913,740,000 | 70,00 | 2,913,740,000 | 69,00 | 2,913,740,000 | 69,00 | 2,913,740,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **12** | | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 3,107,101,800 | 100,00 | 3,107,101,800 | 100,00 | 3,107,101,800 | 100,00 | 3,107,101,800 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | 2 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 | Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 | Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 | Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 | Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 | Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 12 | 02 | Program Pendaftaran Penduduk | 1 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP) | 1 | Σ Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan / Σ Jumlah penduduk wajib KTP | % | 99,99 | 99,99 | 379,781,000 | 99,99 | 379,781,000 | 99,99 | 379,781,000 | 99,99 | 379,781,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 03 | Program Pencatatan Sipil | 2 | Persentase Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran | 1 | Σ Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Σ Jumlah anak usia 0-18 tahun | % | 56,87 | 96,50 | 468,737,000 | 96,67 | 468,737,000 | 96,82 | 468,737,000 | 96,82 | 468,737,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3 | Persentase Perangkat Daerah Yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerjasama | 1 | Σ Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama / Σ Jumlah OPD | % | 0,00 | 100,00 | 237,882,000 | 100,00 | 237,882,000 | 100,00 | 237,882,000 | 100,00 | 237,882,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **2** | **13** | | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 3,526,965,600 | 100,00 | 3,526,965,600 | 100,00 | 3,526,965,600 | 100,00 | 3,526,965,600 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 2 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat wakt | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 13 | 02 | Program Penataan Desa | 1 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa | 1 Σ Sarana Prasarana Pemerintahan Desa yang baik / Σ Desa | % | 16,75 | 87,00 | 630,000,000 | 89,00 | 630,000,000 | 96,00 | 630,000,000 | 96,00 | 630,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 2 Persentase Desa yang Proses Penetapan dalam Penataan Desa | 1 Σ Desa yangdiproses penetapan / Σ Jumlah Desa | % | 0,00 | 3,00 | | 7,00 | | 12,00 | | 12,00 | | |
| 2 | 13 | 03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 1 Persentase Desa yang dikerjasamakan | 1 Σ Desa yang melakukan kerjasama / Σ Desa | % | 0,00 | 95,00 | 300,000,000 | 98,00 | 300,000,000 | 100,00 | 300,000,000 | 100,00 | 300,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 2 Persentase Kawasan Perdesaan | 1 Σ Kawasan Perdesaan / Σ Desa | % | 0,00 | 4,00 | | 7,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 13 | 04 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa Cepat Maju | 1 Σ Desa yang cepat maju / Σ Desa | % | 0,00 | 4,78 | 6,350,000,000 | 9,56 | 6,350,000,000 | 14,35 | 6,350,000,000 | 14,35 | 6,350,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 1 Σ Swadaya Masyarakat mendukung Program Pemberdayaan masyarakat / Total Program Pemberdayaan Masyarakat | % | 22,36 | 24,58 | 7,080,036,500 | 27,38 | 7,080,036,500 | 30,16 | 7,080,036,500 | 30,16 | 7,080,036,500 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 2 Persentase Desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | 1 Σ Desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan / Σ Desa | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **2** | **14** | | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | Pengendalian Penduduk | 1 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB | 1 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB | % | 50,00 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | 50,00 | 320,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1 Unmeet Need | 1 ∑ (IAT+TIAL) x 100% / ∑ PUS | % | 6,00 | 6,00 | 9,018,847,000 | 5,00 | 9,018,847,000 | 5,00 | 9,018,847,000 | 5,00 | 9,018,847,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2 MKJP | 1 ∑ PA MKJP x 100% / ∑ PASM | % | 25,00 | 25,00 | | 26,00 | | 27,00 | | 27.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 ASFR (15-19) | 1 ∑ Kelahiran usia 15−19 tahun × 1000 / ∑ Perempuan usia 15−19 tahun | per 1000 | 30,90 | 30,00 | | 29,00 | | 28,00 | | 28,00 | | |
| 2 | 14 | 04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1 Persentase PUP | 1 ∑ pernikahan pada umur < 20 th x 100 % / ∑ pernikahan semua umur | % | 24,00 | 23,00 | 250,000,000 | 22,00 | 250,000,000 | 21,00 | 250,000,000 | 21,00 | 350,000,000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
| **2** | **15** | | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 4,477,537,900 | 100,00 | 4,477,537,900 | 100,00 | 4,477,537,900 | 100,00 | 4,477,537,900 | Dinas Perhubungan |
| | | | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 15 | 02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1 Persentase Pemasangan Rambu-rambu | 1 ∑ Pemasangan rambu sampai tahun ybs per ∑ rambu yg ditargetkan dalam 3 tahun | % | 100,00 | 33,00 | 17,940,856,400 | 67,00 | 17,940,856,400 | 100,00 | 17,940,856,400 | 100,00 | 17,940,856,400 | Dinas Perhubungan |
| | | | | 2 Persentase Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | 1 ruas jalan yg tertib lalu lintas / ruas jalan yg ada | % | 100,00 | 3,20 | | 3,30 | | 3,40 | | 3,40 | | |
| | | | | 3 Persentase Kendaraan yang melakukan Uji KIR | 1 ∑kendaraan yg melakukan uji / ∑kendaraan yang wajib uji | % | 100,00 | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | 93,00 | | |
| **2** | **16** | | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 3,454,747,360 | 100,00 | 3,454,747,360 | 100,00 | 3,454,747,360 | 100,00 | 3,454,747,360 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 16 | 02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 1 Persentase Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 1 Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah x 100% / Jumlah komunitas masyarakat/mitra komunitas pemerintah daerah kabupaten | % | 100,00 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | 100,00 | 1,500,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 16 | 03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1 | Persentase Sistem ekektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 1 Jumlah sistem ekektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah x 100% / Jumlah sistem ekektronik | % | 100,00 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | 100,00 | 6,000,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | 2 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 1 Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah x 100% / Jumlah OPD | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| **2** | **17** | | **KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang disusun / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | 7,253,165,100 | 100,00 | 7,328,165,100 | 100,00 | 7,678,165,100 | 100,00 | 7,253,165,100 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 | Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan yg disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan yg wajib disusun tiap tahun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen BMD dan pendapatan yang disusun / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap layanan administrasi perkantoran / Σ ASN yg ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana & prasarana yg layak fungsi / Σ sarana & prasarana yg ada | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 17 | 03 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 1 Persentase Pemeriksaan dan pengawasan koperasi | 1 Σ koperasi yang diperiksa dan diawasi / Σ koperasi yang ada | % | 15,07 | 15,98 | 25,000,000 | 16,43 | 25,000,000 | 16,87 | 25,000,000 | 16,87 | 25,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | 17 | 04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 1 Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | 1 Σ USP/KSP yg dinilai kesehatannya / Σ USP/KSP yg ada | % | 10,40 | 10,72 | 25,000,000 | 10,88 | 25,000,000 | 11,04 | 25,000,000 | 11,04 | 25,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 17 | 05 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 1 Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan | 1 Σ koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / Σ koperasi yang ada | % | 25,99 | 26.19 | 156,620,500 | 26.28 | 156,620,500 | 26.38 | 156,620,500 | 26.38 | 469,861,500 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian | 1 Σ anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian / Σ anggota koperasi yang ada | % | 0,65 | 0,65 | | 0,66 | | 0,66 | | 0,66 | | |
| 2 | 17 | 06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 1 Persentase Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) | 1 Σ koperasi yang telah diterbitkan Nomor Induk Koperasi (NIK) / Σ koperasi yang ada | % | 27,13 | 27,63 | 130,000,000 | 27,82 | 130,000,000 | 28,02 | 130,000,000 | 28,02 | 390,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 1 Σ koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan / Σ koperasi yang ada | % | 0,94 | 1,13 | | 1,23 | | 1,33 | | 1,33 | | |
| | | | | 3 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 1 Σ koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / Σ koperasi yang ada | % | 1,14 | 1,34 | | 1,44 | | 1,53 | | 1,53 | | |
| | | | | 4 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha | 1 Σ koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha / Σ koperasi yang ada | % | 47,82 | 48,04 | | 48,46 | | 48,88 | | 48,88 | | |
| | | | | 5 Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan | 1 Σ koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan / Σ koperasi yang ada | % | 0,83 | 1,03 | | 1,13 | | 1,23 | | 1,23 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 17 | 07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1 Persentase Pertumbuhan usaha skala mikro | 1 Σ usaha mikro tahun bersangkutan - Σ usaha mikro tahun sebelumnya / Σ usaha mikro tahun sebelumnya | % | 0,16 | 0,20 | 566,149,500 | 0,22 | 566,149,500 | 0,25 | 566,149,500 | 0,25 | 1,698,448,500 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Usaha mikro yang diinput ke dalam Online Data System (ODS) | 1 Σ usaha mikro yang diinput ke dalam Online Data System (ODS) / Σ usaha mikro yang ada | % | 7,49 | 12,44 | | 14,90 | | 17,34 | | 17,34 | | |
| | | | | 3 Persentase Usaha mikro yang bermitra | 1 Σ usaha mikro yang bermitra / Σ usaha mikro yang ada | % | 0,20 | 0,25 | | 0,27 | | 0,30 | | 0,30 | | |
| | | | | 4 Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan | 1 Σ usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha / Σ usaha mikro yang ada | % | 7,81 | 8,77 | | 9,25 | | 9,72 | | 9,72 | | |
| 2 | 17 | 08 | Program Pengembangan UMKM | 1 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | 1 Σ usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan / Σ usaha mikro yang ada | % | 0,92 | 1,92 | 3,900,050,000 | 2,41 | 3,900,050,000 | 2,90 | 3,700,500,000 | 2,90 | 11,500,150,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 1 Σ usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / Σ usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran | % | 0,20 | 0,28 | | 0,32 | | 0,35 | | 0,35 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 | Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | 1 | Σ usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk usaha / Σ usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk | % | 0,17 | 0,20 | | 0,21 | | 0,22 | | 0,22 | | |
| **2** | **18** | | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 | Σ ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ ASN keseluruhan | % | 100,00 | 100,00 | 3,150,170,800 | 100,00 | 3,150,170,800 | 100,00 | 3,150,170,800 | 100,00 | 3,150,170,800 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| | | | | 2 | Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 | Σ Sarana prasarana yang dibutuhkan / Σ Sarana prasarana yang tersedia | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 | Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 | Σ Dokumen perencanaan yang disusun / Σ Dokumen perencanaan yang disusun sesuai pedoman perencanaan dan laporan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan yg disusun / Σ Dokumen perencanaan yg disusun sesuai pedoman perencanaan & laporan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ Dokumen keuangan yang disusun / Σ Dokumen keuangan yang disusun tepat waktu | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2 | 18 | 02 | Program Pengembangan Iklim Penanam Modal | 1 Persentase Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN | 1 Σ Investor thn ini - Σ Investor thn sebelumnya / Σ Investor thn sebelumnya | % | 3,91 | 3,98 | 20,000,000 | 4,03 | 20,000,000 | 4,07 | 20,000,000 | 4,07 | 20,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 03 | Program Promosi Penanaman Modal | 1 Persentase Promosi Penanaman Modal | 1 Σ Promosi PM yang diikuti / Σ Promosi PM yang diselenggarakan | % | 50,00 | 50,00 | 13,818,500 | 50,00 | 13,818,500 | 50,00 | 13,818,500 | 50,00 | 13,818,500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 1 Persentase Pelaku usaha yang memenuhi komitmen berusaha | 1 Σ Pelaku usaha yg memenuhi komitmen / Σ Pelaku usaha wajib memenuhi komitmen | % | 36,05 | 38,68 | 150,000,000 | 41,32 | 150,000,000 | 43,95 | 150,000,000 | 43,95 | 150,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| | | | | 2 Persentase Pengaduan layanan perizinan yang ditindaklanjuti | 2 Σ Pengaduan yg ditindaklanjuti / Σ Pengaduan yg masuk | % | 77,78 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 18 | 05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 1 Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM | 1 Σ Perush yg melaporkan LKPM / Σ Perusahaan | % | 5,79 | 6,94 | 396,500,000 | 8,10 | 396,500,000 | 9,26 | 396,500,000 | 9,26 | 396,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 1 Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses | 1 Σ Aplikasi yang dpt diakses / Σ Aplikasi keseluruhan | % | 100,00 | 100,00 | 5,000,000 | 100,00 | 5,000,000 | 100,00 | 5,000,000 | 100,00 | 5,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja |
| **2** | **19** | | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1 Persentase Kelompok pemuda yang difasilitasi pemberdayaan | 1 Σ kelompok pemuda yg dibina / Σ kelompok pemuda yg ditargetkan | % | 100,00 | 54,54 | 575,205,000 | 72,73 | 575,205,000 | 100,00 | 575,205,000 | 100,00 | 575,205,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat regional | 1 Σ pemuda yang berprestasi di tingkat regional | Pemuda | 15,00 | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | | 6.00 | | |
| 2 | 19 | 03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 1 Persentase Atlet yg mengikuti kompetisi olahraga (tingkat | 1 Σ atlet yg mengikuti kompetisi / Σ atlet yg dibina | % | 30,61 | 75,00 | 1,942,232,000 | 78,87 | 1,942,232,000 | 82,83 | 1,942,232,000 | 82,83 | 1,942,232,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 Persentase Cabor yang mengikuti kompetisi olahraga | 1 Σ cabor yg mengikuti kompetisi / Σ cabor yg dibina | % | 37,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Peningkatan prestasi olahraga | 1 Jumlah perolehan medali pada event olahraga Regional, nasional dan internasional | Medali | N/A | 457.00 | | 479.00 | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 2 | 19 | 04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 1 Jumlah Kelompok pramuka yang dibina | 1 Σ Kelompok pramuka yang dibina | Kelompok | 198.00 | 180.00 | 250,000,000 | 185.00 | 250,000,000 | 190.00 | 250,000,000 | 190.00 | 250,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **2** | **20** | | **STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1 Persentase PD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar | 1 Meningkatnya Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar | % | 56,00 | 56,00 | 100,000,000 | 56,00 | 100,000,000 | 56,00 | 100,000,000 | 56,00 | 100,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1 Persentase Kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | 1 yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal x 100% / Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | % | 100,00 | 100,00 | 200,000,000 | 100,00 | 200,000,000 | 100,00 | 200,000,000 | 100,00 | 200,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **22** | | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | Program Pengembangan Kebudayaan | 1 Persentase Seni budaya dan tradisi yang dijadikan potensi daerah | 1 Σ seni budaya & tradisi yg berpotensi / Σ total seni budaya & tradisi yg dibina | % | 34,78 | 26,08 | 520,000,000 | 52,17 | 520,000,000 | 78,26 | 520,000,000 | 78,26 | 520,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 1 Persentase Kesenian tradisional yang dijadikan potensi daerah | 1 Σ kesenian tradisional yg berpotensi / Σ keseniaan tradisional yg dibina | % | 66,66 | 54,05 | 310,000,000 | 67,57 | 310,000,000 | 81,08 | 310,000,000 | 81,08 | 310,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 04 | Program Pembinaan Sejarah | 1 Persentase Cagar budaya yang dijadikan potensi daerah | 1 Σ cagar budaya yg berpotensi / Σ total cagar budaya | % | 42,16 | 35,13 | 120,000,000 | 42,16 | 120,000,000 | 49,19 | 120,000,000 | 49,19 | 120,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 22 | 05 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 1 Persentase Cagar budaya yang dikelola dan dilesatarikan | 1 Σ cagar budaya yg dikelola & dilestarikan / Σ total cagar budaya | % | 93,11 | 91,35 | 365,000,000 | 93,11 | 365,000,000 | 94,87 | 365,000,000 | 94,87 | 365,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 06 | Program Pengelolaan Permuseuman | 1 Persentase Museum yang dikelola | 1 Σ Museum yang dikelola / Σ Museum yang ada | % | 100,00 | 100,00 | 25,000,000 | 100,00 | 25,000,000 | 100,00 | 25,000,000 | 100,00 | 25,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **23** | | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang harus disusun (Renja Awal dan Perubahan, RKA Awal dan Perubahan, DPA Awal dan DPA Perubahan, Evaluasi Renja Triwulan, Renstra) | % | 100,00 | 100,00 | 2,266,295,200 | 100,00 | 2,266,295,200 | 100,00 | 2,266,295,200 | 100,00 | 2,266,295,200 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang harus disusun (LKPJ, LPPD, LKJIP) | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan yang wajib disusun tiap tahun (Laporan Keuangan dan Laporan aset) | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ ASN | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ Sarana dan prasarana yang ada ( Roda 4, roda 3, roda 2, gedung, peralatan kantor & peralatan gedung) | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 2 | 23 | 02 | Program Pembinaan Perpustakaan | 1 Persentase Pemerataan pelayanan | 1 Σ Perpustakaan x 100% / (Σ Penduduk x 2%) | % | | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | 4,57 | 430,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 2 Persentase Ketercukupan koleksi perpustakaan | 1 Σ Koleksi Perpustakaan x 100% / (Σ Penduduk x 2) | % | | 50,63 | | 51,25 | | 51,88 | | 51.88 | | |
| | | | | 3 Persentase Tenaga ketercukupan tenaga perpustakaan | 1 Σ Tenaga Perpustakaan x 100% / (Σ Penduduk : 250) | % | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | | | | 4 Persentase Tingkat kunjungan masyarakat | 1 Σ Kunjungan per hari x 100% / (Σ Penduduk x 2%) | % | | 2,81 | | 2,96 | | 3,13 | | 3,13 | | |
| | | | | 5 Persentase Perpustakaan standar Nasional Perpustakaan | 1 Σ Perpustakaan SNP x 100% / (Σ Perpustakaan x 15%) | % | | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | | 40,98 | | |
| | | | | 6 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi | 1 Σ Masyarakat dalam Sosialisasi x 100% / (Σ Penduduk x 2%) | % | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | | 2,50 | | |
| | | | | 7 Persentase Anggota Perpustakaan | 1 Σ Anggota Perpustakaan x 100% / (Σ Penduduk x 2%) | % | | 62,50 | | 63,13 | | 63,75 | | 63,75 | | |
| **2** | **24** | | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | Program Pengelolaan Arsip | 1 Persentase Arsip dinamis dibuatkan daftar arsip | 1 (∑ arsip aktif +∑ arsip inaktif) x 100% / ∑ arsip dinamis | % | | 2,00 | 169,732,300 | 2,20 | 169,732,300 | 2,40 | 169,732,300 | 2,40 | 169,732,300 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase Arsip statis dibuatkan sarana temu balik | 1 (∑ arsip statis dibuatkan sarana temu balik)x 100% / ∑ arsip statis | % | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Persentase Arsip statis dimasukkan ke SIKN-JIKN | 1 ∑ arsip yang disajikan dalam bentuk digital / ∑ arsip yang diselamatkan | % | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| 2 | 24 | 03 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 1 Pemusnahan arsip sesuai NSPK | 1 ∑ Pemusnahan arsip sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | 30,267,700 | 100,00 | 30,267,700 | 100,00 | 30,267,700 | 100,00 | 30,267,700 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | 2 Penyelamatan arsip bencana sesuai NSPK | 1 Σ penyelamatan arsip bencana sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 3 Penyelamatan arsip PD bar/gab sesuai NSPK | 1 Σ Penyelamatan arsip PD bar/gab sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 4 Autentikasi arsip statis dan alih media sesuai NSPK | 1 Σ autentikasi arsip statis dan alih media sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 5 Penyelamatan arsip statis sesuai NSPK | 1 Σ penyelamatan arsip statis sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | 6 Penerbitan ijin penggunaan arsip sesuai NSPK | 1 Σ penerbitan ijin penggunaan arsip sesuai NSPK | Berkas | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 3 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1 Produksi perikanan tangkap | 1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Kg | 106.80 | 111.07 | 65,000,000 | 113.27 | 65,000,000 | 115.51 | 65,000,000 | 115.51 | 65,000,000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 25 | 04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1 | Produksi perikanan Budidaya | 1 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Kg | 808,802 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | 850,000 | 454,495,000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Angka Konsumsi ikan | 1 | Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) / Target Daerah (Kg) | Kg/kap/th | 21.60 | 21.60 | 160,000,000 | 21.72 | 160,000,000 | 21.82 | 160,000,000 | 21.82 | 160,000,000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| **3** | **26** | | **PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 | Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 4,503,926,100 | 100.00 | 4,503,926,100 | 100.00 | 4,503,926,100 | 100.00 | 4,503,926,100 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 | Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 | Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 | Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 | Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3 | 26 | 02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1 | Persentase destinasi wisata yg layak kunjung | 1 | Σ destinasi wisata yg layak kunjung / Σ destinasi wisata yg ada | % | 85.00 | 79,41 | 2,985,940,000 | 82,35 | 2,985,940,000 | 85,29 | 2,985,940,000 | 85,29 | 2,985,940,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 3 | 26 | 03 | Program Pemasaran Pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 1 | Σ kunjungan wisatawan mancanegara thn ini | orang | 6006 | 14.957 | 1,000,000,000 | 15.705 | 1,000,000,000 | 16.49 | 1,000,000,000 | 16.49 | 1,000,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | 1 | Σ kunjungan wisatawan nusantara thn ini | orang | 257303 | 351.565 | | 369.143 | | 387.600 | | 387.600 | | |
| | | | | 3 | Jumlah lama tinggal wisatawan mancanegara (length of stay) | 1 | Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara thn ini | hari | 2.00 | 1,80 | | 1,80 | | 2.00 | | 2.00 | | |
| | | | | 4 | Jumlah lama tinggal wisatawan nusantara (length of stay) | 1 | Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara thn ini | hari | 1.50 | 1.00 | | 1.00 | | 1,50 | | 1,50 | | |
| 3 | 26 | 05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1 | Persentase Peningkatan pelaku jasa usaha ekonomi kreatif yang dibina | 1 | Σ pelaku jasa usaha ekonomi kreatif yang dibina / Σ pelaku jasa usaha ekonomi kreatif yang berkembang | % | 15.00 | 10.00 | 956,400,000 | 15.00 | 956,400,000 | 20.00 | 956,400,000 | 20.00 | 956,400,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 2 | Persentase tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat | 1 | Σ tenaga kerja pariwisata yg bersertifikat / Σ total tenaga kerja pariwisata | % | 4.16 | 2,58 | | 3,33 | | 4,17 | | 4,17 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan | 1 Σ perserta pembekalan sektor kepariwisataan / Σ Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan | % | | 91,42 | | 96.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| **3** | **27** | | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 8,576,228,200 | 100.00 | 8,576,228,200 | 100.00 | 8,576,228,200 | 100.00 | 8,576,228,200 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | | | 2 Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat wakt | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3 | 27 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 15,830,229,300 | 100.00 | 15,830,229,300 | 100.00 | 15,830,229,300 | 100.00 | 15,830,229,300 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | 2 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3 | 27 | 02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1 Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan, Horikultura dan Perkebunan | 1 | | | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300 | | 7,249,522,300 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | Padi | Produktivitas th ybs | ton/ha | 6.17 | 6.17 | | 6.17 | | 6.17 | | 6.17 | | |
| | | | | Jagung | Produktivitas th ybs | ton/ha | 5.19 | 5.19 | | 5.19 | | 5.19 | | 5.19 | | |
| | | | | Kedelai | Produktivitas th ybs | ton/ha | 1.52 | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | 1.52 | | |
| | | | | Ubi Kayu | Produktivitas th ybs | ton/ha | 22.78 | 22.78 | | 22.78 | | 22.78 | | 22.78 | | |
| | | | | Cabe Rawit | Produktivitas th ybs | ton/ha | 8.38 | 8.38 | | 8.38 | | 8.38 | | 8.38 | | |
| | | | | Bawang merah | Produktivitas th ybs | ton/ha | 10.38 | 10.38 | | 10.38 | | 10.38 | | 10.38 | | |
| | | | | Jahe | Produktivitas th ybs | ton/ha | 16.11 | 16.11 | | 16.11 | | 16.11 | | 16.11 | | |
| | | | | Kunyit | Produktivitas th ybs | ton/ha | 19.55 | 19.55 | | 19.55 | | 19.55 | | 19.55 | | |
| | | | | Kopi Arabika | Produktivitas th ybs | ton oce/ha | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | | 0.51 | | 0.51 | | |
| | | | | Kopi Robusta | Produktivitas th ybs | ton oce/ha | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | |
| | | | | Tembakau Rajangan | Produktivitas th ybs | ton daun kering /ha | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 | | |
| | | | | Tembakau Kasturi | Produktivitas th ybs | ton daun kering /ha | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | |
| | | | | Tebu | Produktivitas th ybs | ton/ha | 6.70 | 6.70 | | 6.70 | | 6.70 | | 6.70 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 27 | 02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1 Persentase Produksi Peternakan : Persentase Peningkatan Produksi Daging | 1 Σ populasi ternak siap potong :Σ total populasi) x 100 | % | 33.84 | 33.84 | 4,521,973,300 | 34.84 | 4,521,973,300 | 35.84 | 4,521,973,300 | 35.84 | 4,521,973,300 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | | | 2 Persentase Peningkatan Produksi Telur | 2 (Σ populasi ayam petelur : Σ total populasi ayam petelur) x 100 | % | 80.00 | 80.00 | | 80.99 | | 81.93 | | 81.93 | | |
| | | | | 3 Persentase Peningkatan Produksi Susu | 3 (Σ populasi ternak perah produksi : Σ total populasi ternak perah) x 100 | % | 51.65 | 51.65 | | 52.64 | | 53.63 | | 53.63 | | |
| 3 | 27 | 03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1 Persentase prasarana yang digunakan | 1 Jumlah Prasarana yang terbangun / Jumlah Prasarana yang diberikan | % | 100.00 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | 100.00 | 1,250,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia : | 2 Σ populasi ternak thn N : Σ target populasi ternak thn N)x 100 | % | 2.10 | 2.10 | 1,200,000,000 | 2.00 | 1,200,000,000 | 2.00 | 1,200,000,000 | 2.00 | 1,200,000,000 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | | | Persentase Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia : | 3 Σ populasi ternak thn N : Σ target populasi ternak thn N)x 100 | % | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | 1.02 | | 1.02 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 27 | 04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verifikasi | 1 Persentase Pelayanan Kesehatan Ternak | 1 Σ ternak yg terlayani kesehatannya th N x 100% / Σ populasi ternak N | % | 3.10 | 3.10 | 832,297,500 | 3.10 | 832,297,500 | 3.10 | 832,297,500 | 3.10 | 832,297,500 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | | | 2 Persentase Peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standart ASUH | 2 (Σ pembinaan terhadap pelaku usaha BSAH thn N x100% / Σ target pembinaan terhadap pelaku usaha BSAH thn N) | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Laboratorium | 3 Σ pengguna laboratorium di tahun N x 100% / Σ pengguna laboratorium yang ditarget | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3 | 27 | 05 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 3 Pengendalian penanggulangan serangan Organisme pengganggu pertanian | 1 Jumlah luasan serangan organisme yang dapat ditanggulangi | Ha | 50.00 | 50.00 | 50,000,000 | 50.00 | 50,000,000 | 50.00 | 50,000,000 | 50.00 | 50,000,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 27 | 07 | Program Penyuluhan Pertanian | 4 Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | 1 Jumlah Kelompok Tani yang dibina | % | 100.00 | 100.00 | 275,500,000 | 100.00 | 275,500,000 | 100.00 | 275,500,000 | 100.00 | 275,500,000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **30** | | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (K) | 1 K = (a+b) x 100%<br>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan<br>a = pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)<br>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkann sesuai peruntukannya (nilai 0.5) | % | 100.00 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 840,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 1 Persentase koefisien variasi harga antar waktu (KVpt) | 1 Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama bulan Januari s.d Desember (Sn)<br>Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember (P) | % | 94.16 | 37.08 | 460,000,000 | 37.08 | 460,000,000 | 37.08 | 460,000,000 | 37.08 | 1,380,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga | 2 Jumlah laporan harga harian yang diupdate dalam sistem informasi harga / Σ laporan harga harian yang wajib diupdate dalam sistem informasi harga | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | 3 Persentase kinerja realisasi pupuk | 1 Realisasi penyaluran pupuk / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) | % | 37.08 | 37.08 | | 37.08 | | 37.08 | | 37.08 | | |
| 3 | 30 | 05 | Program Pengembangan Ekspor | 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor | 1 Σ pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor / pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor | % | 66.67 | 66.67 | 480,000,000 | 66.67 | 480,000,000 | 66.67 | 480,000,000 | 66.67 | 1,440,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang | 1 Σ pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang / Σ pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang | % | 33.33 | 33.33 | | 33.33 | | 33.33 | | 33.33 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 30 | 06 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | 1 Σ total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan / Σ potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota | % | 0.57 | 0.57 | 25,000,000 | 0.57 | 25,000,000 | 0.57 | 25,000,000 | 0.57 | 75,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1 Persentase tersosialisasikannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) | 1 Σ kecamatan yang diberikan sosialisasi RPIK / Σ kecamatan se-Kabupaten Bondowoso | % | 4.35 | 52.00 | 10,685,881,400 | 78.00 | 10,610,881,400 | 100.00 | 10,460,881,400 | 100.00 | 31,532,644,200 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | 2 Persentase pertumbuhan industri | 1 Σ IKM tahun ybs - Σ IKM tahun sebelumnya / Σ IKM tahun sebelumnya | % | 0.68 | 0.73 | | 0.74 | | 0.75 | | 0.75 | | |
| 3 | 31 | 03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 1 Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan | 1 Σ realisasi izin yang diterbitkan / Σ permohonan atau pengajuan izin yang masuk | % | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 75,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 3 | 31 | 04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota | 1 Σ data IKM dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINAS / Σ total populasi industri dan kawasan industri Kabupaten | % | 0.08 | 0,17 | 50,000,000 | 0,21 | 50,000,000 | 0,26 | 50,000,000 | 0,26 | 150,000,000 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | Program Pemerintahan Kesra | 1 | Persentase laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan disusun tepat waktu | 1 ∑ laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu / ∑ laporan penyelenggaraan Pemerintahan yang harus disusun tepat waktu | % | 100.00 | 100.00 | 62,056,771,800 | 100.00 | 62,056,771,800 | 100.00 | 62,056,771,800 | 100.00 | 62,056,771,800 | Bag.Tata Pemerintahan |
| | | | | 2 | Persentase peraturan daerah yang diundangkan | 1 ∑ Perda yang diundangkan / ∑ Perda yang disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Hukum |
| | | | | 3 | Persentase rumusan kebijakan di bidang mental kerohanian | 1 ∑ lembaga keagamaan yang dimanfaatkan / ∑ Lembaga Keagamaan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | 4 | Persentase rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat | 1 ∑ Rumusan Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti / ∑ Rumusan Kebijakan di bidang Kesejahteraan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 04 | 01 | 02 | Program Perekonomian dan Adm.Pmbangunan | 1 | Persentase kebijakan ekonomi yang disusun | 1 | ∑ kebijakan ekonomi dan Adm. Pembangunan yang dikoordinasikan / ∑ kebijakan ekonomi dan Adm. Pembangunan | % | 100.00 | 100.00 | 2,050,000,000 | 100.00 | 2,050,000,000 | 100.00 | 2,050,000,000 | 100.00 | 2,050,000,000 | Bagian Perekonomian dan adm pembangunan |
| | | | | 2 | Persentase kebijakan Adm.Pembangunan yang disusun | 1 | ∑ perangkat daerah yang melaksanakan pedoman kerja dan pengendalian pelaporan Adm.Pembangunan / ∑ perangkat daerah | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | | | 3 | Persentase kualitas e-Procurement | 1 | ∑ Peningkatan kualitas SDM pendukung e-procurementn / ∑ SDM pendukung e-procurementn | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Pengadaan Barang / Jasa |
| 4 | 01 | 03 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase PD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik | 1 | ∑ PD dinilai kinerja pelayanan publik / ∑PD | % | 25.00 | 25.00 | 25,535,654,082 | 25.00 | 25,535,654,082 | 25.00 | 25,535,654,082 | 25.00 | 25,535,654,082 | Bagian Organisasi |
| | | | | 2 | Persentase PD memiliki SOP tupoksi utama | 1 | ∑ PD memiliki SOP tupoksi utama / ∑PD | % | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase PD dimonev budaya kerja dan reformasi birokrasi | 1 | ∑PD yang dimonev budaya kerja dan RB / ∑PD | % | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase PD dievaluasi Tusi dan kelembagaan | 1 | ∑PD dievaluasi tusi dan kelembagaan / ∑PD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 | Persentase PD dimonev LKjIP & PK | 1 ∑PD yang dimonev LKJIP dan PK / ∑PD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 6 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 ∑ ASN yang puas terhadap layanan administrasi perkantoran / ∑ ASN Setda | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Umum |
| | | | | 7 | Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 ∑ ASN yang memakai sarana dan prasarana / ∑ ASN Setda | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 8 | Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 ∑ kegiatan KDH dan WKDH yang terfasilitasi / ∑ seluruh kegiatan KDH dan WKDH | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 9 | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 1 ∑ layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah / ∑ ASN Setda | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 10 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dan disusun tepat waktu | 1 ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu / ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Perencanaan dan Keuangan |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 11 | Persentase Laporan keuangan yang sesuai dan disusun tepat waktu | 1 ∑ laporan keuangan yang sesuai yang disusun tepat waktu / ∑ laporan keuangan yang sesuai yang disusun tepat waktu yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 12 | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang disusun | 1 ∑ dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang disusun / ∑ dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang Wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 13 | Persentase kegiatan Kepala Daerah yang terfasilitasi dan terdokumentasi | 1 ∑ kegiatan kepala daerah yang terfasilitasi dan terdokumentasi / ∑ kegiatan kepala daerah | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | Bagian Promkopim |
| **4** | **02** | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sesuai Pedoman Yang di susun Tepat Waktu | 1 ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu / ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | 29,657,776,487 | 100.00 | 29,657,776,487 | 100.00 | 29,657,776,487 | 100.00 | 29,657,776,487 | SEKRETARIAT DPRD |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 | Persentase Laporan Keuangan yang di susun Tepat waktu | 1 ∑ Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu / ∑ Laporan Keuangan Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 ∑ ASN Yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / ∑ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | PersentaseSarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi | 1 ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi / ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | PersentaseDokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang di susun | 1 ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun / ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 6 | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 1 ∑Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesehatan DPRD yang dilaksanakan / ∑ Anggota DPRD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 4 | 02 | 02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 1 | Persentase Raperda Yang di bahas | 1 ∑ Raperda yang dibahas / ∑ Raperda yang diusulkan | % | 100.00 | 100.00 | 21,463,604,900 | 100.00 | 21,463,604,900 | 100.00 | 21,463,604,900 | 100.00 | 21,463,604,900 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | 2 | PersentasePenyerapan dan Penghimpun Aspirasi masyarakat | 1 ∑ Aspirasi yang ditindaklanjuti dan Penyampaian Informasi Kegiatan / ∑ Aspirasi dan Informasi Kegiatan yang disampaikan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | PersentasePengawasan Penyelengaraan Pemerintahan | 1 ∑ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan / ∑ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase Fasilitasi Tugas DPRD | 1 ∑ Fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan / ∑ Fasilitasi tugas DPRD yang dilrencanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD dan Kerja Sama Daerah | 1 ∑ Peningkatan Kapasitas DPRD dan Kerja Sama Daerah dilaksanakan / ∑ Peningkatan Kapasitas DPRD dan Kerja Sama Daerah di rencanakan | % | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 6 | Persentase Tersediannya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD | 1 ∑ Rencana Kerja Tahunan pada Alat Kelengkapan DPRD yang terlaksana / ∑ Rencana Kerja Tahunan pada Alat Kelengkapan DPRD yang di rencanakan | % | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu / ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang wajib disusun tiap tahun | % | 100 | 100.00 | 4,538,309,700 | 100.00 | 4,538,309,700 | 100.00 | 4,538,309,700 | 100.00 | 4,538,309,700 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 2 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 ∑ Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu / ∑ Laporan Keuangan Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 | Persentase Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 | ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun / ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 | ∑ ASN Yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / ∑ ASN pada Bappeda | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 | ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi / ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Ada | % | NA | 96.00 | | 95.00 | | 95.00 | | 96.00 | | |
| 5 | 01 | 02 | Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1 | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yg disusun tepat waktu | 1 | ∑ Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu / ∑ Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu Yang Wajib Disusun | % | 100.00 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 | Persentase Jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir minimal 20Persentase dalam dokumen perencanaan tahunan kabupaten | 1 ∑ Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir minimal 20% dalam dokumen RKPD<br>∑ Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 1 Ada/Tidak Ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD | 1 ∑ Program APBD Tahun berkenaan<br>∑ program RKPD Tahun berkenaan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | *5* | Persentase ketersediaan dokumen data yang aktual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah | 1 ∑ Dokumen Data yang Aktual dan Valid Yang disusun Tiap tahun sebagai masukan Perencanaan Pembangunan Daerah tiap tahun<br>∑ Dokumen Data Yang Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 6 | Persentase Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun tepat waktu | 1 ∑ Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Yang Disusun Tepat Waktu / ∑ Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Yang Wajib Disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | 01 | 03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dgn kualitas baik | 1 ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dgn kualitas baik / ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun | % | NA | 100.00 | 1,780,532,300 | 100.00 | 1,780,532,300 | 100.00 | 1,780,532,300 | 100.00 | 1,780,532,300 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 2 | Persentase program Renja PD pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang diakomodir dalam DPA | 1 | ∑program Renja PD pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang diakomodir dalam DPA / ∑program Renja PD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA dengan kualitas baik | 1 | ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA dgn kualitas baik | % | NA | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | | | | ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun | Dokumen | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 4 | Persentase program Renja PD pembangunan perekonomian dan SDA yang diakomodir dalam DPA | 1 | ∑program Renja PD pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang diakomodir dalam DPA / ∑program Renja PD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan kualitas baik | 1 | ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan dgn kualitas baik / ∑ dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun | % | NA | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 6 | Persentase program Renja PD pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam DPA | 1 | ∑program Renja PD pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam DPA / ∑program Renja PD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **5** | **02** | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 85,296,591,438 | 100.00 | 85,296,591,438 | 100.00 | 85,296,591,438 | 100.00 | 85,296,591,438 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | 2 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat wakt | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 5 | 02 | 02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 | Persentase OPD yang menyusun RKA/DPA tepat waktu | 1 ∑ OPD yang menyusun RKA tepat waktu x 100% / ∑ OPD | % | 100.00 | 100.00 | 331,510,710,420 | 100.00 | 341,920,316,666 | 100.00 | 344,871,223,468 | 100.00 | 331,753,286,452 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | 2 | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual | 1 ∑ OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual x 100% / ∑ OPD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase penyerapan APBD | 1 Realisasi APBD / Anggaran APBD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | 02 | 03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 | Persentase OPD yang menyusun laporan aset sesuai peraturan | 1 ∑ OPD yang menyusun laporan aset sesuai peraturan x 100% / ∑ OPD | % | 100.00 | 100.00 | 1,400,000,000 | 100.00 | 1,400,000,000 | 100.00 | 1,400,000,000 | 100.00 | 1,400,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 4,204,372,872 | 100.00 | 4,204,372,872 | 100.00 | 4,204,372,872 | 100.00 | 3,936,896,840 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | 2 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 3 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 | Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 | Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 | Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | 02 | 04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 | Target pendapatan asli daerah | 1 | Dalam Jutaan Rupiah | Rp. | 219,834 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | 219,834 | 2,717,742,600 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | 2 | Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 1 | Jumlah Obyek Pajak terbayar x 100% / Jumlah Obyek Pajak | % | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase capaian penagihan piutang pajak | 1 | Jumlah piutang pajak yang tertagih / Total Piutang Pajak | % | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase pelunasan SPPT PBB P2 | 1 | Jumlah SPPT terbayar x 100% / Jumlah total SPPT | % | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | | |
| | | | | 5 | Persentase desa/ kelurahan lunas PBB P2 | 1 | Jumlah desa/kel lunas PBB x 100% / Jumlah desa/kel | % | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 6 | Persentase tingkat kepatuhan PPAT terhadap laporan BPHTB | 1 Jumlah PPAT yang lapor x 100% / Jumlah PPAT yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| **5** | **03** | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu / ∑ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | 4,963,678,400 | 100.00 | 4,963,678,400 | 100.00 | 4,963,678,400 | 100.00 | 4,963,678,400 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 ∑ Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu / ∑ Laporan Keuangan Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 ∑ ASN Yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / ∑ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi / ∑ Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 | Persentase dokumen dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun / ∑ Dokumen Perencaaan dan Evaluasi OPD yang disusun Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5 | 03 | 02 | Program Kepegawaian Daerah | 1 | Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi | 1 Jumlah pemangku jabatan yang memenuhi sistem merit / Jumlah pemangku jabatan yang ada x 100 | % | 96.14 | 83.40 | 1,705,470,110 | 75.52 | 1,705,470,110 | 76.24 | 1,632,000,000 | 98.44 | 1,632,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2 | Persentase pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi | 1 Σ pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi / Σpejabat struktural | % | 59.87 | 62.85 | | 80.09 | | 83.33 | | 88.81 | | |
| | | | | 3 | Persentase pemangku jabatan struktural | 1 Σ pemangku jabatan struktural / Σ jabatan struktural | % | 83.18 | 83.18 | | 75.81 | | 75.27 | | 88.71 | | |
| | | | | 4 | Persentase pemangku jabatan fungsional | 1 Σ pemangku jabatan fungsional / Σ jabatan fungsional | % | 91.36 | 93.18 | | 74.25 | | 77.91 | | 77.91 | | |
| | | | | 5 | Persentase dokumen kepegawaian (pangkat) yang diterbitkan tepat waktu | 1 Σ dokumen kepegawaian (pangkat) yang diterbitkan tepat waktu / Σ dokumen kepegawaian yang diterbitkan | % | | 30.56 | | 33.33 | | 35.00 | | 35.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 6 | Persentase dokumen kepegawaian (pensiun dan berkala) yang diterbitkan tepat waktu | 1 | Σ dokumen kepegawaian (pensiun, berkala) yang diterbitkan tepat waktu / Σ dokumen kepegawaian yang diterbitkan | % | | 58.22 | | 59.33 | | 54.95 | | 54.95 | | |
| | | | | 7 | Persentase akurasi data pegawai | 1 | Σ data pegawai yang akurat / Σ data pegawai | % | 91.72 | 92.60 | | 93.29 | | 93.88 | | 94.42 | | |
| | | | | 8 | Persentase pegawai dengan tingkat pendidikan minimal D4/S1 | 1 | Σ pegawai dengan tingkat pendidikan minimal D4/S1 / Σ pegawai | % | 58.09 | 58.37 | | 58.55 | | 58.71 | | 59.03 | | |
| | | | | 9 | Persentase Pelanggaran pegawai | 1 | Σ ASN yang dikenai sanksi / Σ totalASN | % | 0.34 | 0.26 | | 0.24 | | 0.22 | | 0.20 | | |
| | | | | 10 | Persentase aparatur yang berkinerja baik | 1 | Σ aparatur yg berkinerja / Σ aparatur | % | 99.46 | 99.75 | | 99.79 | | 99.81 | | 99.83 | | |
| | | | | 11 | Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai | 1 | Σ pegawai / Σ kebutuhan pegawai | % | 57.62 | 67.29 | | 65.91 | | 63.95 | | 68.68 | | |
| | | | | 12 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah atau Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 1 | Σ Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah atau Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan / Σ totalFungsionalASN | % | | 76.23 | | 75.94 | | 76.11 | | 75.82 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 13 | Rasio Pegawai Fungsional PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | 1 | Σ Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatann) / Σ totalASN | % | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 14 | Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai | 1 | Σ ASN perempuan yang menjabat / Σ totalASN | % | | 15.63 | | 18.75 | | 21.88 | | 21.88 | | |
| **5** | **04** | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP | 1 | Σ ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20JP / Σ total ASN | % | 22.64 | 20.14 | 1,070,000,000 | 36.29 | 1,070,000,000 | 48.21 | 1,143,470,110 | 60.56 | 1,143,470,110 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 2 | Persentase ASN yang lulus diklat dengan nilai memuaskan | 1 | Σ ASN peserta diklat yang lulus dengan nilai memuaskan / Σ ASN yang mengikuti diklat | % | 80.07 | 80.08 | | 93.21 | | 96.00 | | 98.53 | | |
| | | | | 3 | Persentase pemenuhan kebutuhan diklat | 1 | Σ kebutuhan diklat yang dipenuhi / Σ kebutuhan diklat | % | 1.44 | 1.23 | | 11.75 | | 22.92 | | 60.56 | | |
| | | | | 4 | Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan | 1 | Σ Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan / Σ total ASN fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | | 52.94 | | 58.82 | | 82.35 | | 88.24 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **5** | **05** | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | 1 ∑ Kelitbangan Dalam RKPD / ∑ Kelitbangan Dalam RPJMD | % | NA | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 2 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | 1 ∑ Inovasi Yang Ditetapkan / ∑ Inovasi Yang Diusulkan | % | NA | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| **6** | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 4,519,878,000 | 100.00 | 4,519,878,000 | 100.00 | 4,519,878,000 | 100.00 | 4,519,878,000 | Inspektorat |
| | | | | 2 | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun / Σ dokumen yang wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan dan aset yang wajib disusun tiap tahun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 | Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi | 1 Σ ASN yang puas terhadap layanan administrasi / Σ ASN | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ sarana dan prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 6 | 01 | 02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1 Persentase LK OPD sesuai SAP | 1 Σ LK OPD sesuai SAP / Σ OPD | % | 100.00 | 100.00 | 1,504,130,900 | 100.00 | 1,504,130,900 | 100.00 | 1,504,130,900 | 100.00 | 1,504,130,900 | Inspektorat |
| | | | | 2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit | 1 Σ temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti / Σ temuan hasil pemeriksaaan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase Skor Evaluasi SAKIP OPD Berkategori Minimal A | 1 Σ OPD dgn hasil evaluasi SAKIP berkategori Min A / Σ OPD | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Jumlah OPD dengan hasil Audit Kinerja minimal Baik | 1 Σ OPD dengan hasil Audit kinerja minimal Baik | OPD | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | |
| | | | | 5 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 1 Σ pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti / Σ pengaduan masyarakat | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 6 | 01 | 03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1 Persentase OPD dengan Maturitas Penerapan SPIP Mencapai Level 3 | 1 Σ OPD dgn Nilai Maturitas mencapai Level 3 | % | 100.00 | 100.00 | 445,333,600 | 100.00 | 445,333,600 | 100.00 | 445,333,600 | 100.00 | 445,333,600 | Inspektorat |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **35 11 1 Kecamatan Bondowoso** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 6,446,827,200 | 100.00 | 6,446,827,200 | 100.00 | 6,446,827,200 | 100.00 | 6,446,827,200 | Kecamatan Bondowoso |
| | | | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 2 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 3 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Bondowoso | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 4 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 5 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | 01 | 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Bondowoso |
| | | | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Bondowoso yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 | 01 | 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 1,492,000,000 | 100.00 | 1,492,000,000 | 100.00 | 1,492,000,000 | 100.00 | 1,492,000,000 | Kecamatan Bondowoso |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | 01 | 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Bondowoso |
| 7 | 01 | 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Bondowoso |
| | | | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | 01 | 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Bondowoso |
| **35 11 3 Kecamatan Tamanan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,324,089,500 | 100.00 | 1,324,089,500 | 100.00 | 1,324,089,500 | 100.00 | 1,324,089,500 | Kecamatan Tamanan |
| | | | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 2 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 3 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Bondowoso | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 4 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 5 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Tamanan yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 72,000,000 | 100.00 | 72,000,000 | 100.00 | 72,000,000 | 100.00 | 72,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | | | | | | | | | | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | Kecamatan Tamanan |
| | **35 11 5 Kecamatan Tenggarang** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 2,261,535,900 | 100.00 | 2,261,535,900 | 100.00 | 2,261,535,900 | 100.00 | 2,261,535,900 | Kecamatan Tenggarang |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Tenggarang | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | Kecamatan Tenggarang |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Tenggarang yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 295,000,000 | 100.00 | 295,000,000 | 100.00 | 295,000,000 | 100.00 | 295,000,000 | Kecamatan Tenggarang |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | Kecamatan Tenggarang |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | 100.00 | 35,000,000 | Kecamatan Tenggarang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 48,000,000 | 100.00 | 48,000,000 | 100.00 | 48,000,000 | 100.00 | 48,000,000 | Kecamatan Tenggarang |
| | **35 11 6 Kecamatan Tegalampel** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 2,317,730,800 | 100.00 | 2,317,730,800 | 100.00 | 2,317,730,800 | 100.00 | 2,317,730,800 | Kecamatan Tegalampel |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Tegalampel | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | 100.00 | 24,690,000 | Kecamatan Tegalampel |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Tegalampel yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 280,000,000 | 100.00 | 280,000,000 | Kecamatan Tegalampel |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 20,450,000 | 100.00 | 20,450,000 | 100.00 | 20,450,000 | 100.00 | 20,450,000 | Kecamatan Tegalampel |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | Kecamatan Tegalampel |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 31,160,000 | 100.00 | 31,160,000 | 100.00 | 31,160,000 | 100.00 | 31,160,000 | Kecamatan Tegalampel |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | **35 11 7 Kecamatan Curahdami** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 2,114,302,800 | 100.00 | 2,114,302,800 | 100.00 | 2,114,302,800 | 100.00 | 2,114,302,800 | Kecamatan Curahdami |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Curahdami | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | 100.00 | 19,945,000 | Kecamatan Curahdami |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Curahdami yang tepat waktu sesuai SOP | 2 Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 324,200,000 | 100.00 | 324,200,000 | 100.00 | 324,200,000 | 100.00 | 324,200,000 | Kecamatan Curahdami |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Curahdami |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | 100.00 | 20,700,000 | Kecamatan Curahdami |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 41,380,000 | 100.00 | 41,380,000 | 100.00 | 41,380,000 | 100.00 | 41,380,000 | Kecamatan Curahdami |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | **35 11 8 Kecamatan Wringin** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,398,467,900 | 100.00 | 1,398,467,900 | 100.00 | 1,398,467,900 | 100.00 | 1,398,467,900 | Kecamatan Wringin |
| | | | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Wringin | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 31,600,000 | 100.00 | 31,600,000 | 100.00 | 31,600,000 | 100.00 | 31,600,000 | Kecamatan Wringin |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Wringin yang tepat waktu sesuai SOP | 2 Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 58,500,000 | 100.00 | 58,500,000 | 100.00 | 58,500,000 | 100.00 | 58,500,000 | Kecamatan Wringin |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Wringin |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 55,000,000 | 100.00 | 55,000,000 | 100.00 | 55,000,000 | 100.00 | 55,000,000 | Kecamatan Wringin |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | Kecamatan Wringin |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | **35 11 9 Kecamatan Pakem** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,127,007,600 | 100.00 | 1,127,007,600 | 100.00 | 1,127,007,600 | 100.00 | 1,127,007,600 | Kecamatan Pakem |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Pakem | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Pakem |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Pakem yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | Kecamatan Pakem |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Pakem |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | Kecamatan Pakem |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Pakem |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | **35 11 10 Kecamatan Binakal** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,520,858,500 | 100.00 | 1,520,858,500 | 100.00 | 1,520,858,500 | 100.00 | 1,520,858,500 | Kecamatan Binakal |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Binakal | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | Kecamatan Binakal |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Binakal yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 63,000,000 | 100.00 | 63,000,000 | 100.00 | 63,000,000 | 100.00 | 63,000,000 | Kecamatan Binakal |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Binakal |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | Kecamatan Binakal |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Binakal |
| | **35 11 11 Kecamatan Maesan** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,819,515,800 | 100.00 | 1,819,515,800 | 100.00 | 1,819,515,800 | 100.00 | 1,819,515,800 | Kecamatan Maesan |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Maesan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | Kecamatan Maesan |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Maesan yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | | 100.00 | 100.00 | 66,000,000 | 100.00 | 66,000,000 | 100.00 | 66,000,000 | 100.00 | 66,000,000 | Kecamatan Maesan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | Kecamatan Maesan |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | Kecamatan Maesan |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Maesan |
| **35 11 12 Kecamatan Grujugan** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 2,001,180,800 | 100.00 | 2,001,180,800 | 100.00 | 2,001,180,800 | 100.00 | 2,001,180,800 | Kecamatan Grujugan |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Grujugan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | 100.00 | 15,280,000 | Kecamatan Grujugan |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Grujugan yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 61,120,000 | 100.00 | 61,120,000 | 100.00 | 61,120,000 | 100.00 | 61,120,000 | Kecamatan Grujugan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | Kecamatan Grujugan |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 22,916,800 | 100.00 | 22,916,800 | 100.00 | 22,916,800 | 100.00 | 22,916,800 | Kecamatan Grujugan |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | 100.00 | 26,740,000 | Kecamatan Grujugan |
| | **35 11 13 Kecamatan Pujer** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,885,467,500 | 100.00 | 1,885,467,500 | 100.00 | 1,885,467,500 | 100.00 | 1,885,467,500 | Kecamatan Pujer |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Pujer | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | 100.00 | 23,000,000 | Kecamatan Pujer |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Pujer yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 110,000,000 | 100.00 | 110,000,000 | 100.00 | 110,000,000 | 100.00 | 110,000,000 | Kecamatan Pujer |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Pujer |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | Kecamatan Pujer |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | 100.00 | 59,000,000 | Kecamatan Pujer |
| **35 11 14 Kecamatan Wonosari** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,821,241,478 | 100.00 | 1,821,241,478 | 100.00 | 1,821,241,478 | 100.00 | 1,821,241,478 | Kecamatan Wonosari |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec.Wonosari | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | Kecamatan Wonosari |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Wonosari yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | | 100.00 | 100.00 | 79,500,000 | 100.00 | 79,500,000 | 100.00 | 79,500,000 | 100.00 | 79,500,000 | Kecamatan Wonosari |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 40,560,900 | 100.00 | 40,560,900 | 100.00 | 40,560,900 | 100.00 | 40,560,900 | Kecamatan Wonosari |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | Kecamatan Wonosari |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | Kecamatan Wonosari |
| | **35 11 15 Kecamatan Sukosari** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,343,799,900 | 100.00 | 1,343,799,900 | 100.00 | 1,343,799,900 | 100.00 | 1,343,799,900 | Kecamatan Sukosari |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Sukosari | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | Kecamatan Sukosari |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Sukosari yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | | 100.00 | 100.00 | 41,000,000 | 100.00 | 41,000,000 | 100.00 | 41,000,000 | 100.00 | 41,000,000 | Kecamatan Sukosari |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Perda yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Perda | % | 100.00 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | 100.00 | 19,000,000 | Kecamatan Sukosari |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 | Kecamatan Sukosari |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | 100.00 | 17,000,000 | Kecamatan Sukosari |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **35 11 16 Kecamatan Tlogosari** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,729,366,000 | 100.00 | 1,729,366,000 | 100.00 | 1,729,366,000 | 100.00 | 1,729,366,000 | Kecamatan Tlogosari |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Tlogosari | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | 100.00 | 25,000,000 | Kecamatan Tlogosari |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Tlogosari yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 78,000,000 | 100.00 | 78,000,000 | 100.00 | 78,000,000 | 100.00 | 78,000,000 | Kecamatan Tlogosari |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Tlogosari |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | Kecamatan Tlogosari |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Tlogosari |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | **35 11 17 Kecamatan Tapen** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,503,526,700 | 100.00 | 1,503,526,700 | 100.00 | 1,503,526,700 | 100.00 | 1,503,526,700 | Kecamatan Tapen |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Tapen | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Tapen |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Tapen yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 54,000,000 | 100.00 | 54,000,000 | 100.00 | 54,000,000 | 100.00 | 54,000,000 | Kecamatan Tapen |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Tapen |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | Kecamatan Tapen |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | 100.00 | 36,000,000 | Kecamatan Tapen |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **35 11 18 Kecamatan Sumberwringin** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,410,111,400 | 100.00 | 1,410,111,400 | 100.00 | 1,410,111,400 | 100.00 | 1,410,111,400 | Kecamatan Sumberwringin |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Sumberwringin | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | 100.00 | 17,500,000 | Kecamatan Sumberwringin |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Sumber Wringin yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 37,500,000 | 100.00 | 37,500,000 | 100.00 | 37,500,000 | 100.00 | 37,500,000 | Kecamatan Sumberwringin |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | Kecamatan Sumberwringin |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 15,900,000 | 100.00 | 15,900,000 | 100.00 | 15,900,000 | 100.00 | 15,900,000 | Kecamatan Sumberwringin |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | Kecamatan Sumberwringin |
| | **35 11 19 Kecamatan Prajekan** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,539,396,900 | 100.00 | 1,539,396,900 | 100.00 | 1,539,396,900 | 100.00 | 1,539,396,900 | Kecamatan Prajekan |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Prajekan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | Kecamatan Prajekan |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Prajekan yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 70,000,000 | 100.00 | 70,000,000 | 100.00 | 70,000,000 | 100.00 | 70,000,000 | Kecamatan Prajekan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Prajekan |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | Kecamatan Prajekan |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Prajekan |
| **35 11 20 Kecamatan Klabang** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,650,522,300 | 100.00 | 1,650,522,300 | 100.00 | 1,650,522,300 | 100.00 | 1,650,522,300 | Kecamatan Klabang |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Klabang | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | 100.00 | 41,600,000 | Kecamatan Klabang |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Klabang yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 68,000,000 | 100.00 | 68,000,000 | 100.00 | 68,000,000 | 100.00 | 68,000,000 | Kecamatan Klabang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Klabang |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 10,197,000 | 100.00 | 10,197,000 | 100.00 | 10,197,000 | 100.00 | 10,197,000 | Kecamatan Klabang |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 33,000,000 | 100.00 | 33,000,000 | 100.00 | 33,000,000 | 100.00 | 33,000,000 | Kecamatan Klabang |
| | **35 11 21 Kecamatan Cermee** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,813,887,040 | 100.00 | 1,813,887,040 | 100.00 | 1,813,887,040 | 100.00 | 1,813,887,040 | Kecamatan Cermee |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Cermee | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | Kecamatan Cermee |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Cermee yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 70,900,000 | 100.00 | 70,900,000 | 100.00 | 70,900,000 | 100.00 | 70,900,000 | Kecamatan Cermee |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Cermee |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | Kecamatan Cermee |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | 100.00 | 45,000,000 | Kecamatan Cermee |
| **35 11 22 Kecamatan Ijen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,151,637,300 | 100.00 | 1,151,637,300 | 100.00 | 1,151,637,300 | 100.00 | 1,151,637,300 | Kecamatan Ijen |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Ijen | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | 100.00 | 39,000,000 | Kecamatan Ijen |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Ijen yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 43,151,700 | 100.00 | 43,151,700 | 100.00 | 43,151,700 | 100.00 | 43,151,700 | Kecamatan Ijen |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | 100.00 | 18,000,000 | Kecamatan Ijen |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | Kecamatan Ijen |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Ijen |
| **35 11 23 Kecamatan Taman Krocok** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,207,064,700 | 100.00 | 1,207,064,700 | 100.00 | 1,207,064,700 | 100.00 | 1,207,064,700 | Kecamatan Taman Krocok |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Taman Krocok | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | 100.00 | 21,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Taman Krocok yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 26,000,000 | 100.00 | 26,000,000 | 100.00 | 26,000,000 | 100.00 | 26,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | 100.00 | 15,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | Kecamatan Taman Krocok |
| **35 11 24 Kecamatan Jambesari Darus Sholah** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 988,635,300 | 100.00 | 988,635,300 | 100.00 | 988,635,300 | 100.00 | 988,635,300 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Jambesari Darus Sholah | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | 100.00 | 20,200,000 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Jambesari Darus Sholah yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 56,500,000 | 100.00 | 56,500,000 | 100.00 | 56,500,000 | 100.00 | 56,500,000 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | 100.00 | 28,000,000 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 19,500,000 | 100.00 | 19,500,000 | 100.00 | 19,500,000 | 100.00 | 19,500,000 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 23,400,000 | 100.00 | 23,400,000 | 100.00 | 23,400,000 | 100.00 | 23,400,000 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah |
| **35 11 25 Kecamatan Botolinggo** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan yg disusun tepat waktu / Σ dokumen penyelenggaraan pemerintahan | % | 100.00 | 100.00 | 1,494,145,500 | 100.00 | 1,494,145,500 | 100.00 | 1,494,145,500 | 100.00 | 1,494,145,500 | Kecamatan Botolinggo |
| | | 2 Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN Kec. Botolinggo | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | 4 Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun / Σ Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 Persentase sinergitas penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yang efektif | 1 Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | 100.00 | 27,500,000 | Kecamatan Botolinggo |
| | | 2 Persentase Pelayanan Kecamatan Botolinggo yang tepat waktu sesuai SOP | Σ pelayanan yg diselesaikan sesuai SOP / Σ seluruh permohonan pelayanan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Persentase Lembaga desa/kelurahan yang di bina (LPMD/LPMK, TKPK Kecamatan, Forum komunikasi Sehat, PKK dan Karang Taruna) | 1 Σ lembaga desa/kelurahan yg aktif / Σ lembaga yg ada | % | 100.00 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | Kecamatan Botolinggo |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditangani | 1 Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang ditangan di Wilayah Kecamatan / Σ Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan | % | 100.00 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | 100.00 | 30,000,000 | Kecamatan Botolinggo |
| 7 01 05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 Persentase Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum | 1 Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg dilaksanakan / Σ Jumlah Pembinaan/Sosialisasi penyelenggaraan urusan pemerintahaan umum yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | 100.00 | 5,000,000 | Kecamatan Botolinggo |
| | | 2 Persentase Koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan tingkat kecamatan | Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg dilaksanakan / Σ Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yg direncanakan | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome*) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 7 | 01 | 06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Persentase Desa yang Tertib Administrasi | 1 Σ Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Σ Desa yang menyusun pertanggungjawaban tepat waktu / 2 X Σ Desa | % | 100.00 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | Kecamatan Botolinggo |
| **8** | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 1 Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman dan disusun tepat waktu | 1 Σ dokumen penyelenggaraan yg sesuai pedoman yg dsusun / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | 2,419,725,950 | 100.00 | 2,419,725,950 | 100.00 | 2,419,725,950 | 100.00 | 2,419,725,950 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 2 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 1 Σ laporan keuangan yg disusun tepat waktu / Σ laporan keuangan yg wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 3 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 1 Σ ASN yg puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Σ Total ASN yang dilayani | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| | | | | 4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 1 Σ Sarana dan Prasarana yang layak fungsi / Σ sarana dan prasarana yang ada | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | | | 5 Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yang disusun | 1 Σ dokumen perencanaan dan evaluasi OPD yg dsusun / Σ dokumen yg wajib disusun | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 8 | 01 | 02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1 Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1 Σ Peserta Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun (N) / Σ Jumlah Peserta Pembinaan Wasbang Tahun (N-1) | % | 62.80 | 100.00 | 1,821,891,200 | 100.00 | 1,821,891,200 | 100.00 | 1,821,891,200 | 100.00 | 1,821,891,200 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 2 Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan | 1 Σ Peserta yang terseleksi / Σ Jumlah Peserrta yang di rekrut | % | 37.25 | 83.15 | | 83.15 | | 83.15 | | 83.15 | | |
| 8 | 01 | 03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1 Persentase Pembinaan Politik pada Masyarakat | 1 Σ Masyarakat yang mengikuti pembinaan politik Tahun (N) / Σ Masyarakat yang mengikuti pembinaan Tahun (N-1) | % | 11.05 | 33.68 | 12,338,807,955 | 33.68 | 3,856,858,000 | 33.68 | 3,856,858,000 | 33.68 | 3,856,858,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 2 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi | 1 Σ Partisipasi Masyarakat dalam pemilu / Σ Masyarakat yang memiliki hak pilih | % | 0.00 | 80.00 | | - | | - | | - | | |
| 8 | 01 | 04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 1 Persentase Pembinaan Terhadap ORMAS/LSM | Σ Ormas / LSM yang dibina / Σ Ormas / LSM | % | 72.35 | 80.00 | 118,594,000 | 80.00 | 118,594,000 | 80.00 | 118,594,000 | 80.00 | 118,594,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan | Indikator Kinerja Program (*Outcome* ) | Formula Indikator | Satuan | Tahun Dasar (2023) | TARGET CAPAIAN | | | | | | Akhir RPD | | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 8 | 01 | 05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 1 Persentase Masyarakat yang mengikuti Pembinaan P4GN | 1 Σ Masyarakat yang mengikuti pembinaan Tahun (N) / Σ Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Tahun (N-1) | % | 6.30 | 6.52 | 75,000,000 | 13.04 | 75,000,000 | 13.04 | 75,000,000 | 13.04 | 75,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 2 Persentase Wilayah yang di lakukan Monev SARA | 1 Σ Wilayah / Kecamatan yang dilakukan Monev SARA / Σ Wilayah / Kecamatan yang seharusnya di Monev | % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 8 | 01 | 06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1 Persentase Kejadian Berpotensi Konflik | 1 Σ Kejadian Berpotensi Konflik Tahun (N) / Σ Kejadian Berpotensi Konflik Tahun (N-1) | % | 100.00 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | 100.00 | 1,146,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bondowoso

| No. | Indikator | Kondisi Awal 2022 | Target | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHK) | -1,61% | 2,08% | 2,37% | 4,86% | 4,86% |
| 2 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHK) | 6,23% | 6,61% | 6,92% | 7,14% | 7,14% |
| 3 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHK) | 6,76% | 7,21% | 7,45% | 7,54% | 7,54% |
| 4 | Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) | 1,06% | 1,33% | 1,47% | 1,62% | 1,62% |
| 5 | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| 6 | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 3,55% | 3,61% | 3,91% | 4,02% | 4,02% |
| 7 | Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten dan jalan strategis | 66.98% | 71,90% | 74,77% | 77,63% | 77,63% |

| No. | Indikator | Kondisi Awal 2022 | Target | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 8 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% |
| 9 | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0,92 | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Laju pertumbuhan penduduk | 0,37% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 35,00% |
| 11 | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,32% | 4,11% | 4,01% | 3,91% | 3,91% |
| 12 | Indek Desa Membangun (IDM) | 0,7251 | 0,7261 | 0,7271 | 0,7281 | 0,7281 |
| 13 | Indek Kualitas Air | 55,33 | 53,69 | 53,79 | 53,89 | 53,89 |
| 14 | Indek Kualitas Udara | 86,7 | 83,16 | 83,23 | 83,33 | 83,33 |
| 15 | Indek Kualitas Tutupan Lahan | 59,57 | 63,46 | 63,51 | 63,56 | 63,56 |
| 16 | Persentase kawasan permukiman kumuh | 64,94% | 32,47% | 16,23% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,50% | 81,00% | 81,50% | 82,00% | 82,00% |
| 18 | Indek SPBE | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 19 | Nilai SAKIP | BB | A | A | A | A |
| 20 | Nilai Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 21 | Nilai EKPPD | 32,26 | 32,26 | 32,27 | 32,28 | 32,28 |
| 22 | Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 24 | Indek Pendidikan | 57,71 | 58,11 | 58,71 | 59,14 | 59,58 |
| 25 | Indek Kesehatan | 72,75 | 72,89 | 73,22 | 73,54 | 73,87 |
| 26 | Indek Pembangunan Gender (IPG) | 89,72 | 92 | 93 | 94 | 94 |
| 27 | Status Kabupaten Layak Anak | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya |
| 28 | Status Kabupaten Layak Pemuda | N/A | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama |

## 8.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan sebagaimana Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bondowoso

| No. | Indikator | Kondisi Awal 2022 | Target | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Ekonomi | 3,51% | 4,20% | 4,41% | 4,82% | 4,82% |
| 2 | Nilai PDRB Per Kapita | | | | | |
| | ADHK | 16.368.646,54 | 16.946.724,31 | 17.252.686,77 | 17.621.318,63 | 17.621.318,63 |
| | ADHB | 28.536.091,32 | 31.791.845,70 | 33.577.617,55 | 35.560.487,37 | 35.560.487,37 |
| 3 | Indek GINI | 0,365 | 0,36 | 0,355 | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Persentase Tingkat Kemiskinan | 13,47% | 12,50% | 12,00% | 11,50% | 11,50% |
| 5 | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 67,2 | 67,48 | 67,65 | 67,74 | 67,74 |
| 6 | Indek Reformasi Birokrasi (IRB) | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| 7 | Indek Pembangunan Manusia (IPM) | 67,31 | 68,35 | 68,78 | 69,21 | 69,21 |

## 8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 8.3 berikut.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bondowoso

| No. | Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal 2022 | Target | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| I | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHK) | -1,61% | 2,08% | 2,37% | 4,86% | 4,86% |
| 2 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHK) | 6,23% | 6,61% | 6,92% | 7,14% | 7,14% |
| 3 | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHK) | 6,76% | 7,21% | 7,45% | 7,54% | 7,54% |
| 4 | Persentase Usaha Mikro Naik Kelas | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| 5 | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,32% | 4,11% | 4,01% | 3,91% | 3,91% |
| 6 | Indek Desa Membangun (IDM) | 0,7251 | 0,7261 | 0,7271 | 0,7281 | 0,7281 |
| 7 | Indek Kualitas Air | 55,33 | 53,69 | 53,79 | 53,89 | 53,89 |
| 8 | Indek Kualitas Udara | 86,7 | 83,16 | 83,23 | 83,33 | 83,33 |
| 9 | Indek Kualitas Tutupan Lahan | 59,57 | 63,46 | 63,51 | 63,56 | 63,56 |
| 10 | Indek Pembangunan Gender (IPG) | 89,72 | 92 | 93 | 94 | 94 |
| 11 | Status Kabupaten Layak Anak | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya |
| 12 | Status Kabupaten Layak Pemuda | N/A | Pratama | Pratama | Pratama | Pratama |
| II | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,50% | 81,00% | 81,50% | 82,00% | 82,00% |
| 2 | Indek SPBE | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Nilai SAKIP | BB | A | A | A | A |
| 4 | Nilai Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Nilai EKPPD | 32,26 | 32,26 | 32,27 | 32,28 | 32,28 |
| 6 | Indek Pendidikan | 57,71 | 58,11 | 58,71 | 59,14 | 59,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Indek Kesehatan | 72,75 | 72,89 | 73,22 | 73,54 | 73,87 |
| 8 | Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Dan Jalan Strategis | 66.98% | 71,90% | 74,77% | 77,63% | 77,63% |
| 9 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% | 27,86% |
| 10 | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,371% | 0,355% | 0,355% | 0,355% | 0,355% |
| 12 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh | 64,94% | 32,47% | 16,23% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | **Aspek Daya Saing** | | | | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 3,55% | 3,61% | 3,91% | 4,02% | 4,02% |
| 2 | Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) | 1,06% | 1,33% | 1,47% | 1,62% | 1,62% |
| 3 | Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

# BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2024-2026 memuat perencanaan pembangunan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bondowoso. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso sehingga arah pembangunan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan harus dipahami dan menjadi ukuran bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan.

## 9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan pada tahun 2026, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut : Pada saat RPJMD Tahun 2026-2030 belum ditetapkan maka penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2026 tetap berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dengan prioritas pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga akhir periode RPD, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025, dan RPJM Nasional 2020-2024.

## 9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dengan tersusunnya dokumen RPD tahun 2024-2026 ini maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dokumen RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48), dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.
2. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
3. Perangkat Daerah wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-

2026 untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Terhadap perangkat daerah yang baru dibentuk setelah Dokumen RPD ini ditetapkan, sebelum penetapan RPJMD periode berikutnya melalui peraturan daerah, pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator kinerjanya tetap mengacu pada dokumen RPD tahun 2024-2026.

**BUPATI BONDOWOSO,**

**SALWA ARIFIN**

# PEMERINTAH
# KABUPATEN BONDOWOSO